Kepercayaan

Integritas

Pelayanan

Kesempurnaan

Menjadikan hidup lebih bernilai

Profesionalisme

Laporan Tahunan 2002

PermataBank

DAFTAR ISI

daftar isi

Visi dan Misi	1
Sekilas PermataBank	2
Perjalanan Proses Merger	4
Perkembangan Usaha	7
Sambutan Komisaris Utama	8
Sambutan Direktur Utama	12
Laporan Kinerja Keuangan	16
Rencana 2003	21
Produk, Jasa dan Jaringan Usaha	23
Sumberdaya Manusia	29
Teknologi	31
Internal Audit	33
Risk Management	35
Tata Kelola Perusahaan	39
Kegiatan Sosial	41
Dewan Komisaris	42
Direksi	44
Tanda Tangan Persetujuan	46
Laporan Akuntan Publik	47
Struktur Organisasi	276
Pejabat Eksekutif	277
Informasi Perusahaan	278
Anak Perusahaan dan Afiliasi	280
Alamat PermataBank	283

VISI

Menjadi penyedia jasa keuangan yang terkemuka dan profesional, yang memiliki hubungan erat dengan nasabah dan secara konsisten memberikan pengalaman interaksi yang terbaik bagi nasabah

MISI

Menjalankan usaha dengan berhati-hati dan berkesinambungan untuk mendapatkan hasil yang optimal

Menyediakan produk dan jasa keuangan yang memberikan solusi atas kebutuhan keuangan nasabah dengan menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme

Mempekerjakan karyawan dengan membekali pelatihan-pelatihan serta memberikan penghargaan atas prestasi kerja

Melayani seluruh lapisan masyarakat dengan mempertahankan standar kualitas yang tinggi serta berusaha menjadi panutan dalam pelaksanaan tata kelola usaha yang baik.

Permata Bank

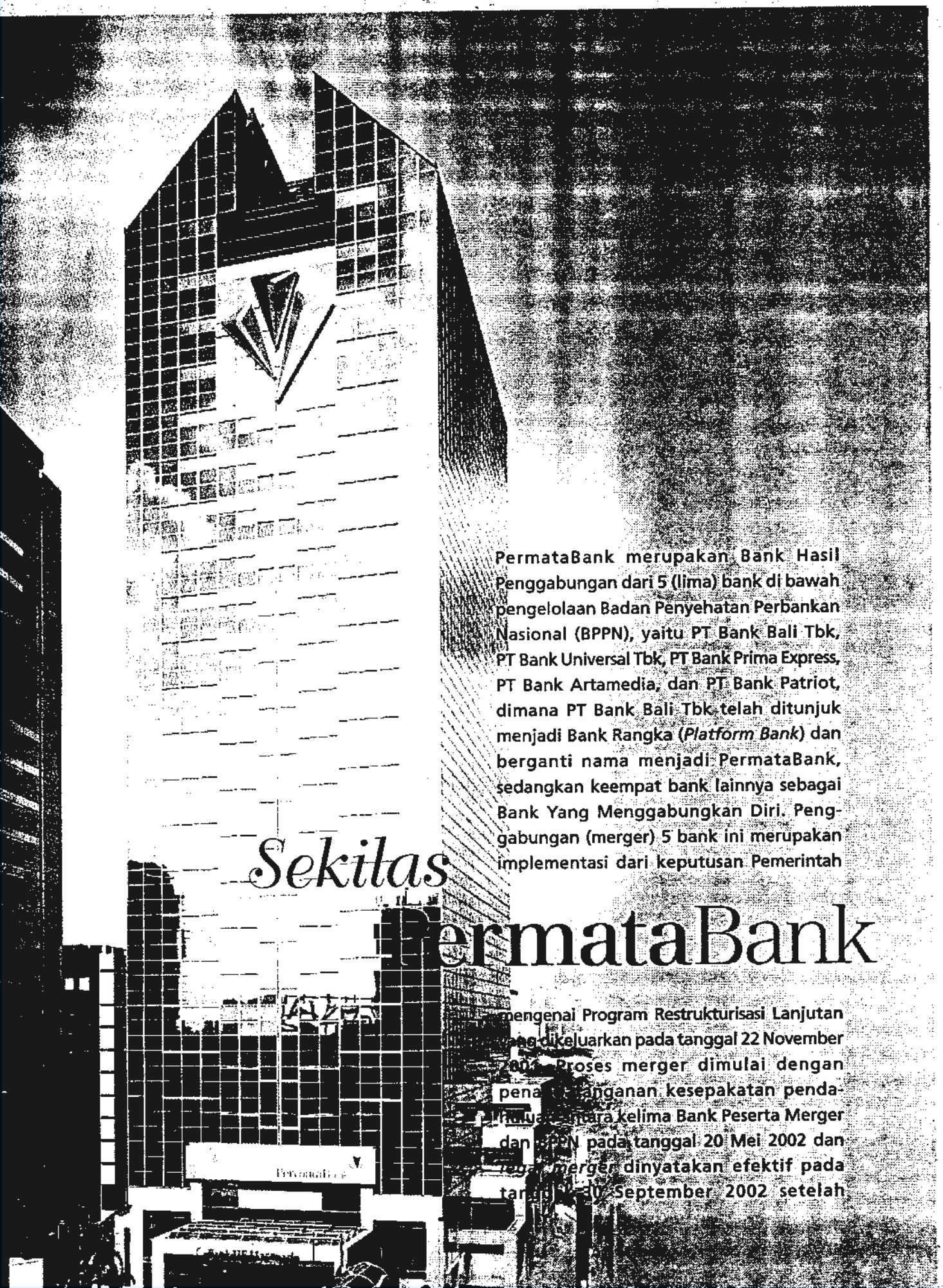

Sekilas PermataBank

PermataBank merupakan Bank Hasil Penggabungan dari 5 (lima) bank di bawah pengelolaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yaitu PT Bank Bali Tbk, PT Bank Universal Tbk, PT Bank Prima Express, PT Bank Artamedia, dan PT Bank Patriot, dimana PT Bank Bali Tbk telah ditunjuk menjadi Bank Rangka (*Platform Bank*) dan berganti nama menjadi PermataBank, sedangkan keempat bank lainnya sebagai Bank Yang Menggabungkan Diri. Penggabungan (merger) 5 bank ini merupakan implementasi dari keputusan Pemerintah

mengenai Program Restrukturisasi Lanjutan yang dikeluarkan pada tanggal 22 November 2001. Proses merger dimulai dengan penandatanganan kesepakatan penda-huluan secara kelima Bank Peserta Merger dan BPPN pada tanggal 20 Mei 2002 dan tanggal *merger* dinyatakan efektif pada tanggal 30 September 2002 setelah

dikeluarkannya persetujuan dari Bank Indonesia dan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Tujuan dari merger tersebut adalah untuk membentuk suatu bank yang memiliki struktur permodalan yang kuat, kondisi keuangan yang sehat dan berdaya saing tinggi dalam menjalankan fungsi intermediasi, dengan jaringan layanan yang lebih luas dan produk yang lebih beragam. Oleh karena itu, pola dari merger yang menghasilkan PermataBank ini adalah dengan menggabungkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing Bank Peserta Merger menjadi satu kesatuan sinergi yang positif. Untuk itu pula, BPPN mewakili Pemerintah telah melakukan Penempatan Modal Sementara sebesar Rp 4,6 triliun yang terdiri dari setoran tunai sebesar Rp 2,8 triliun dan penerbitan obligasi Pemerintah bersuku bunga tetap sebesar Rp 1,8 triliun.

PermataBank dengan total aset konsolidasi Rp 28,03 triliun per 31 Desember 2002 memiliki jaringan distribusi yang mencakup 328 kantor cabang dan 456 ATM yang tersebar di 30 kota dan 15 propinsi, layanan *telebanking* PermataTel dan fasilitas *internet banking* PermataNet serta layanan *sms banking* yang dapat diakses kapan saja dan dari manapun. Adapun segmen pasar yang menjadi target utama PermataBank adalah segmen nasabah dengan tingkat pendapatan menengah ke atas (untuk segmen ritel), segmen usaha kecil dan menengah (UKM) melalui portofolio kredit yang terdiversifikasi dengan baik dan tetap mempertahankan pangsa pasar di segmen otomotif (untuk segmen komersial).

Nama PermataBank merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai cerminan bank yang bersahabat, penuh perhatian dan mengutamakan kualitas dalam pelayanan, yang didukung oleh *PermataBanker* yang profesional. *Brand name* dan logo baru PermataBank yang

diluncurkan pada tanggal 18 Februari 2003 terdiri dari kumpulan 3 (tiga) warna, yaitu biru, merah dan hijau. Biru mencerminkan keabadian, merah mencerminkan semangat, dan hijau mencerminkan kemakmuran.

Dengan moto "Menjadikan hidup lebih bernilai", PermataBank hadir untuk membantu nasabah mewujudkan hidup yang nyaman dan aman selalu.

PERJALANAN PROSES MERGER

NOVEMBER 2001

RESTRUKTURISASI LANJUTAN TERHADAP 5 BANK

Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) memutuskan untuk melakukan restrukturisasi lanjutan terhadap 5 Bank yaitu PT Bank Bali Tbk, PT Bank Universal Tbk, PT Bank Artamedia, PT Bank Prima Express, PT Bank Patriot dengan mekanisme merger.

JUNI - JULI 2002

PROSES MERGER DIMULAI

BPPN menunjuk Chandra Purnama sebagai *Project Director* dan secara resmi melakukan *Kick Off* untuk *project* merger 5 bank yang didukung oleh konsultan independen.

AGUSTUS 2002

PENUNJUKKAN *PLATFORM BANK*

BPPN menunjuk PT Bank Bali Tbk sebagai Bank Rangka (*Platform Bank*) dan mengumumkan Ringkasan Rancangan Merger di media massa.

SEPTEMBER 2002

LEGAL MERGER SELESAI

Proses *legal merger* selesai pada tanggal 30 September 2002 diikuti dengan perubahan nama PT Bank Bali Tbk menjadi PT Bank Permata Tbk.

OKTOBER - NOVEMBER 2002

PENGANGKATAN MANAJEMEN BARU

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi baru PT Bank Permata Tbk dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

PT Bank Artamedia yang merupakan *pilot project* integrasi operasional telah menyelesaikan proses konversi pada tanggal 21 Oktober 2002. Selanjutnya diikuti oleh PT Bank Prima Express pada tanggal 4 November 2002, PT Bank Universal Tbk pada tanggal 18 November 2002, dan PT Bank Patriot pada bulan berikutnya.

DESEMBER 2002

OPERATIONAL MERGER SELESAI

Tahapan *Operational Merger* telah diselesaikan pada akhir tahun 2002.

Setelah melewati tahapan merger dalam waktu 5,5 bulan, PermataBank mampu mencapai Rasio Kecukupan Modal (CAR) sebesar 10,4%.

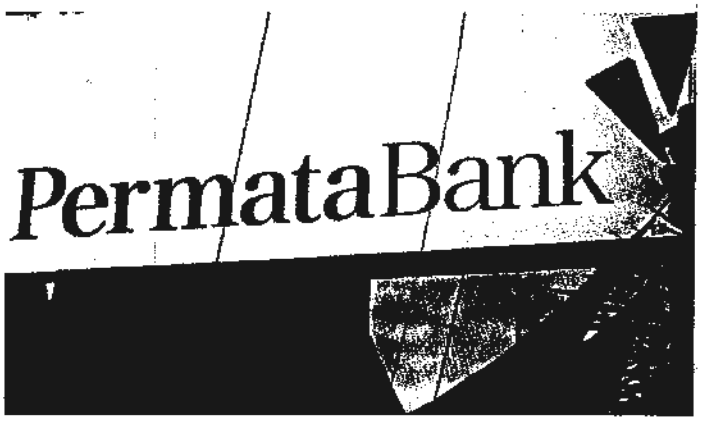

FEBRUARI 2003

PELUNCURAN LOGO

Peluncuran logo PermataBank secara resmi oleh Ketua BPPN, Bapak Syafruddin A. Temenggung

MARET 2003

MEMBUKUKAN LABA DI TRIWULAN PERTAMA 2003

PermataBank diawal tahun 2003 berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 102,29 miliar (belum diaudit, sebelum memperhitungkan pajak tangguhan perusahaan induk).

Proses Rasionalisasi, Seleksi dan Penempatan Karyawan dapat dituntaskan pada akhir Maret 2003.

PermataBank optimis mampu meraih kinerja yang lebih baik lagi di tahun 2003.

PERKEMBANGAN USAHA

(dalam jutaan Rupiah)

NERACA	Mar 2003	Des 2002	Des 2001 *)	Des 2000 *)
Aktiva	28.276.855	28.027.532	26.613.635	27.562.322
Aktiva Produktif-Bersih	23.846.663	23.430.405	22.477.116	22.718.340
Kredit yang Diberikan-Bersih	7.068.069	7.194.883	8.575.100	7.812.896
Surat-surat Berharga yang Dimiliki-Bersih	15.811.782	13.426.870	12.269.847	11.152.038
Penyertaan Saham-Bersih	28.129	28.051	136.666	193.985
Dana Masyarakat	22.282.874	21.894.456	22.449.386	22.242.744
Pinjaman yang Diterima	1.504.067	1.474.925	2.621.736	2.162.471
Kewajiban	26.969.423	26.830.712	27.194.731	26.668.622
Ekuitas (Defisiensi Modal)-Bersih *)	1.265.008	1.157.252	(616.832)	864.098

LABA RUGI	Mar 2003 *)	Des 2002 *)	Des 2001 *)	Des 2000 *)
Pendapatan (Beban) Bunga-Bersih	231.077	356.939	77.892	(255.102)
Pendapatan Operasional Lainnya	68.371	269.935	257.673	331.142
Beban (Pembalikan) Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif	42.212	342.336	(121.991)	565.125
Beban (Pembalikan) Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	(22.801)	13.022	(46.240)	9.985
Beban Merger	-	482.248	-	-
Beban Operasional Lainnya	186.481	648.324	472.554	454.829
Laba (Rugi) Operasional	93.556	(859.056)	31.242	(953.899)
Pendapatan (Beban) Bukan Operasional-Bersih	14.370	11.201	200.007	(160.327)
Laba (Rugi) Sebelum Taksiran Penghasilan (Beban) Pajak	107.926	(847.855)	231.249	(1.114.226)
Taksiran Penghasilan (Beban) Pajak	1.407	46.177	(7.853)	40.174
Laba (Rugi) Bersih *)	102.289[4]	(808.221)	216.125	(1.080.363)

RASIO KEUANGAN **)	Mar 2003 *)	Des 2002 *)
I Permodalan		
1. Rasio Kecukupan Modal (CAR)	10,3%	10,4%
2. Aktiva Tetap Terhadap Modal	98,6%	96,8%
II Aktiva Produktif		
1. Aktiva Produktif Bermasalah	8,8%	10,0%
2. Kredit Bermasalah (NPL) - *gross*	25,4%	27,2%
3. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Terhadap Aktiva Produktif	6,3%	7,5%
4. Pemenuhan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	136,0%	107,2%
III Rentabilitas		
1. Rasio Laba Terhadap Aktiva (ROA)	1,4%	-4,8%
2. Rasio Laba Terhadap Ekuitas (ROE)	10,0%	-153,5%
3. Margin Pendapatan Bunga Bersih (NIM)	3,6%	2,4%
4. Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	90,9%	138,1%
IV Likuiditas		
Kredit yang diberikan terhadap Dana Pihak Ketiga (LDR)	37,9%	40,5%
V Kepatuhan		
1.a. Persentase Pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)		
a.1. Pihak Terkait	0,0%	0,0%
a.2. Pihak Tidak Terkait	0,0%	0,0%
b. Persentase Pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)		
b.1. Pihak Terkait	0,0%	0,0%
b.2. Pihak Tidak Terkait	13,4%	3,1%
2. Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah	5,1%	5,6%
3. Posisi Devisa Neto (PDN)	16,2%	33,4%

LAIN-LAIN	Mar 2003	Des 2002
Jumlah Karyawan	7.148	7.954
Jumlah Kantor Cabang	321	328
Jumlah Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	455	456

*) Tidak termasuk Hak Pemegang Saham Minoritas

**) Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001. Rasio keuangan untuk tahun 2001 & 2000 tidak disajikan karena penggabungan usaha mulai efektif sejak 30 September 2002. Dihitung berdasarkan perusahaan induk saja.

[1] Laporan Keuangan disusun seolah-olah penggabungan telah terjadi sejak 1 Januari 2000.

[2] Berdasarkan Akta Merger yang diaktakan dengan akta notaris A. Partomuan Pohan S.H., LL.M No. 46 tanggal 27 September 2002, antara lain disebutkan bahwa semua kekayaan dan kewajiban serta operasi, usaha, kegiatan dan aktivitas setiap Bank yang Menggabungkan Diri beralih demi hukum kepada PT Bank Permata Tbk (d/h PT Bank Bali Tbk) sebagai Bank Hasil Penggabungan.
Dengan demikian sampai dengan 30 September 2002, laba rugi yang tercantum dalam Ikhtisar Data Keuangan ini merupakan laba rugi dari PT Bank Bali Tbk sebagai Bank Hasil Penggabungan & bukan merupakan hasil penggabungan dari seluruh Bank Peserta Merger. Sedangkan laba rugi sampai dengan 30 September 2002 dari keempat Bank Peserta Merger diperhitungkan dalam pos Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali.

[3] Tidak Diaudit.

[4] Merupakan laba sebelum memperhitungkan manfaat (beban) pajak tangguhan dari perusahaan induk.

DR. Aditiawan Chandra
Komisaris Utama

Melalui merger, kekuatan-kekuatan positif yang dimiliki lima bank dari sisi sumber daya manusia, tingkat layanan dan teknologi yang terfokus pada kebutuhan nasabah, dapat digabungkan untuk memberikan layanan dan produk solusi keuangan bagi nasabah dan memberikan nilai tambah bagi *stakeholder* lainnya.

SAMBUTAN KOMISARIS UTAMA

Para *stakeholder* PermataBank yang terhormat,

Perkenankan kami menyampaikan sedikit kilas balik PermataBank yang baru saja terbentuk dari proses merger lima bank, PT Bank Bali Tbk, PT Bank Universal Tbk, PT Bank Prima Express, PT Bank Artamedia dan PT Bank Patriot. Keberhasilan proses ini merupakan hasil kerjasama yang baik dari berbagai pihak, baik pihak manajemen, karyawan, pemegang saham maupun dukungan dari para nasabah yang loyal.

Proses *legal merger* dituntaskan pada bulan September 2002 antara lain dengan mengubah nama PT Bank Bali Tbk yang merupakan Bank Rangka (*Platform Bank*) menjadi PT Bank Permata Tbk, serta diangkatnya anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Proses merger secara operasional terus berlanjut sampai dengan akhir tahun 2002 yang didominasi oleh proses konversi/ integrasi empat Bank Peserta Penggabungan ke dalam Bank Rangka.

Selain kasus bom Bali pada bulan Oktober 2002, suhu politik dan kondisi keamanan Indonesia selama tahun 2002 dapat dikatakan relatif stabil dan lebih baik dari tahun sebelumnya. Stabilitas tersebut mendukung kinerja ekonomi nasional untuk berkembang lebih baik, khususnya bagi industri perbankan nasional. Kinerja perbankan nasional selama tahun 2002 menunjukkan perbaikan, yang ditunjukkan oleh peningkatan perolehan dana sebesar 2,3% menjadi Rp 815 triliun pada akhir tahun 2002 serta peningkatan penyaluran pinjaman sebesar 12,2% menjadi Rp 402 triliun pada akhir tahun 2002. Hal ini menunjukkan semakin berjalannya fungsi intermediasi sektor perbankan nasional. Sejalan dengan kondisi di atas, nilai CAR telah mencapai 22,8% atau melebihi ketentuan minimal 8%, rasio NPL secara net juga mengalami perbaikan dari 3,6% di tahun 2001 menjadi 2,9% di akhir tahun 2002. Disisi lain ketergantungan sektor perbankan atas obligasi rekapitalisasi terus menurun sebagaimana ditunjukkan oleh penurunan saldo obligasi rekapitalisasi dari Rp 397 triliun menjadi Rp 368 triliun pada periode yang sama.

Dari kiri ke kanan : Dradjat Bagus Prasetyo, Tirta Hidayat, Aditiawan Chandra, Ichsanuddin Noorsy, Lukita Dinarsyah Tuwo, Deswandhy Agusman

PermataBank dengan total aktiva konsolidasi sebesar Rp 28,03 triliun per 31 Desember 2002 merupakan bank ketujuh terbesar di Indonesia dari sisi total aset. Sedangkan Rasio Kecukupan Modal (CAR) dapat dijaga pada tingkat 10,4%, lebih tinggi dari ketentuan minimum Bank Indonesia sebesar 8%.

Kesuksesan merger sangatlah tergantung dari keberhasilan manajemen dalam menyatukan visi dan menciptakan budaya korporasi yang dapat diterima oleh semua pihak. Kami ingin agar seluruh *PermataBanker* dapat menyatukan langkah untuk menciptakan suatu budaya korporasi yang

kondusif untuk mencapai visi PermataBank. Nilai-nilai korporasi yang menjadi acuan perilaku dan tindakan setiap *PermataBanker* menjadi modal awal dalam membentuk budaya korporasi PermataBank. Tanggung jawab eksekutif senior PermataBank sangatlah besar, karena budaya korporasi PermataBank hanya dapat dikembangkan dan ditularkan kepada *PermataBanker* lainnya dengan *"walk the talk"*, sehingga dapat menjadi *role model*.

Kami yakin PermataBank memiliki potensi yang luar biasa untuk dapat menjadi bank pilihan dan salah satu yang terbaik di masa mendatang. Melalui merger, kekuatan-kekuatan positif yang dimiliki lima bank dari sisi sumber daya manusia, tingkat layanan dan teknologi yang terfokus pada kebutuhan nasabah, dapat digabungkan untuk memberikan layanan dan produk solusi keuangan bagi nasabah dan memberikan nilai tambah bagi *stakeholder* lainnya.

Pada kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Bapak I Nyoman Suwandha yang telah memberikan dukungannya kepada PermataBank hingga beliau mengundurkan diri sebagai Komisaris efektif pada tanggal 31 Januari 2003. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh instansi terkait, para nasabah, para mitra usaha, serta seluruh jajaran manajemen dan karyawan yang telah memberikan dukungan kerjasama dan kepercayaan, sehingga proses merger dapat terlaksana dengan baik dalam waktu yang relatif singkat.

Akhirnya, kami mengajak seluruh *PermataBanker* untuk memberikan yang terbaik bagi para *stakeholder*-nya, agar tujuan kita untuk menciptakan suatu institusi yang dapat dibanggakan dapat tercapai.

Mei 2003

Aditiawan Chandra

Agus D.W. Martowardojo
Direktur Utama

Dengan memegang teguh lima nilai korporasi PermataBank: ***trust, integrity, service, excellence*** dan ***professionalism,*** kita dapat membangun budaya korporasi yang merupakan ciri khas PermataBank.

SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA

Para *stakeholder* PermataBank yang terhormat,

PermataBank sebagai hasil merger lima bank di bawah BPPN telah menciptakan suatu bank dengan skala ekonomis yang lebih besar, jaringan yang lebih luas serta alokasi sumber daya yang lebih efisien. PermataBank diharapkan dapat menjadi institusi perbankan yang mampu berkinerja secara berkesinambungan (*sustainable*) dan memberikan nilai tambah bagi para *stakeholder*.

Patut disyukuri bahwa proses merger PermataBank, baik dari sisi hukum maupun operasional, telah dapat diselesaikan dengan baik pada akhir Desember 2002 dalam waktu yang relatif singkat. Meskipun sebagian besar aktivitas sudah dapat dituntaskan, namun masih ada beberapa hal yang masih harus diselesaikan, seperti sosialisasi logo PermataBank, rasionalisasi jumlah kantor cabang dan sumber daya manusia, harmonisasi produk dan standarisasi cabang. Untuk menghindari ketidaknyamanan yang akan dirasakan oleh para nasabah terutama akibat perubahan kebijakan, sistem dan prosedur, PermataBank telah membentuk *task force* khusus untuk menangani tahap stabilisasi dan optimalisasi pasca merger secara efektif.

PermataBank pada tahun 2002 membukukan kerugian sebesar Rp 808,22 miliar. Kerugian ini merupakan penjumlahan kinerja laba rugi eks *legacy* PT Bank Bali Tbk sebagai Bank Rangka untuk periode Januari 2002 sampai dengan September 2002 dan kinerja laba rugi PermataBank sebagai Bank Hasil Penggabungan untuk periode Oktober 2002 sampai dengan Desember 2002. Kerugian ini terutama disebabkan oleh adanya pembebanan biaya merger sebesar Rp 482,25 miliar dan tambahan beban pembentukan PPAP sehubungan dengan merger sebesar Rp 342,34 miliar. Biaya merger sebesar Rp 482,25 miliar tersebut adalah porsi biaya merger yang dibebankan kepada eks *legacy* PT Bank Bali Tbk dari total biaya merger sebesar Rp 1,6 triliun, sedangkan sisanya yang merupakan porsi biaya merger yang dibebankan kepada keempat bank peserta merger lainnya telah diperhitungkan di dalam pos Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali yang terdapat pada neraca konsolidasi bagian ekuitas. Pada posisi 31 Desember 2002,

Dari kiri ke kanan: Chandra Purnama, Irman Alvian Zahiruddin, Agus D.W. Martowardojo, Ongki W. Dana, Elvyn G. Masassya, Andrew H. Hanubrata, Mahdi Syahbuddin, J. Georgino Godong

jumlah kredit yang diberikan (*gross*) berjumlah Rp 8,93 triliun, jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun adalah berjumlah Rp 21,89 triliun, dan total ekuitas konsolidasi per 31 Desember 2002 mencapai Rp 1,16 triliun, yaitu setelah BPPN mewakili Pemerintah melakukan Penempatan Modal Sementara sebesar Rp 4,6 triliun dalam rangka merger, sehingga Rasio Kecukupan Modal (CAR) PermataBank pada akhir tahun 2002 mencapai 10,4%.

Berkat upaya-upaya yang telah dilakukan di tahun 2002, khususnya kegiatan merger, pengelolaan aktiva produktif dan pengendalian operasional secara efisien dan efektif, maka pada kuartal I tahun 2003 PermataBank telah berhasil membukukan laba sebesar Rp 102,29 miliar (sebelum diaudit dan sebelum memperhitungkan pajak tangguhan perusahan induk). Di samping itu, budaya kerja sudah mulai tumbuh serta berjalan seirama, dan nama PermataBank sudah mulai dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu, kami optimis bahwa PermataBank mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik di tahun 2003 dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang secara sehat seperti yang diharapkan.

Semua rencana strategis PermataBank tidak akan pernah dapat direalisasikan tanpa ada dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan integritas yang baik. Karena itu kami menyerukan kepada *PermataBanker* agar dalam bekerja dan berinteraksi baik secara internal maupun eksternal selalu memegang teguh lima nilai korporasi PermataBank, yaitu *trust, integrity, service, excellence* dan *professionalism*. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, kita akan dapat membangun budaya korporasi yang merupakan ciri khas PermataBank.

Akhir kata, kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para *stakeholder* PermataBank atas dukungan yang telah diberikan terhadap keberadaan PermataBank. Kami sangat mengharapkan hubungan baik yang telah terjalin selama ini dengan para *stakeholder* dapat berkembang dan berjalan secara berkesinambungan.

Berlandaskan komitmen bekerja untuk "Menjadikan hidup lebih bernilai", kami yakin PermataBank akan dapat memberikan layanan yang lebih baik lagi di masa mendatang.

Mei 2003

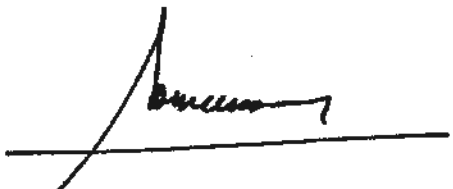

Agus D.W. Martowardojo

LAPORAN KINERJA KEUANGAN

Analisa keuangan PermataBank membandingkan kinerja selama tahun 2002 dan 2001 yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Informasi keuangan yang disampaikan dianalisa dengan mengacu kepada laporan keuangan yang telah diaudit beserta catatan laporan keuangan yang terdapat pada bagian lain dari Laporan Tahunan 2002 ini. Neraca per 31 Desember 2001 merupakan angka yang disajikan kembali (*proforma*) dengan menggabungkan neraca lima bank. Kerugian bersih selama tahun 2002 berasal dari PT Bank Bali Tbk sebelum penggabungan usaha, yaitu untuk periode Januari 2002 sampai dengan September 2002, dan kinerja PT Bank Permata Tbk untuk periode Oktober 2002 sampai dengan Desember 2002. Sedangkan untuk tahun 2001, laba bersih yang tercermin dalam laporan laba rugi merupakan hasil usaha dari PT Bank Bali Tbk sebagai Bank Rangka (*Platform Bank*).

Aktiva

Pada tanggal 31 Desember 2002 jumlah aktiva konsolidasi tercatat sebesar Rp 28,03 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp 1,41 triliun atau 5,31% dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2001 yang berjumlah Rp 26,61 triliun. Hal ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan volume aktiva produktif terutama Penempatan pada Bank Indonesia dan Efek-efek yang dimiliki.

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Pada posisi 31 Desember 2002, akun Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain (sebelum dikurangi penyisihan kerugian) mengalami peningkatan 114,65%, yaitu dari Rp 1.250,17 miliar di akhir 2001 menjadi Rp 2.683,54 miliar pada akhir 2002. Kenaikan volume terutama terjadi pada instrumen Bank Indonesia Intervensi Rupiah yang mengalami peningkatan signifikan yaitu Rp 1.747,23 miliar di mana dana untuk penempatan ini terutama berasal dari dana rekapitalisasi pada saat merger.

Efek-efek

Posisi Efek-efek (sebelum dikurangi penyisihan kerugian) pada tanggal 31 Desember 2002 berjumlah Rp 13.458,30 miliar, naik sebesar Rp 1.156,01 miliar atau 9,40% dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2001 yang sebesar Rp 12.302,29 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan volume Obligasi Pemerintah dalam rangka rekapitalisasi sebesar Rp 1.863 miliar disamping adanya penurunan jumlah Sertifikat Bank Indonesia sebesar Rp 494 miliar.

Obligasi Negara Republik Indonesia

Sehubungan dengan penggabungan usaha 5 bank, Pemerintah melakukan Penyetoran

(dalam jutaan Rupiah)

No	Seri	Jumlah Pokok	Jatuh Tempo	Suku Bunga
1	FR 0004	542.593	15 Februari 2006	12,125%
2	FR 0008	402.049	15 Mei 2005	16,5%
3	FR 0009	918.614	15 Mei 2005	10,0%

Modal Sementara di mana dari total dana rekapitalisasi sebesar Rp 4,6 triliun, sejumlah Rp 1,86 triliun digunakan untuk membeli Obligasi Pemerintah yang terdiri dari 3 seri (lihat tabel diatas).

Sampai dengan 31 Desember 2002, jumlah Obligasi Pemerintah yang dimiliki mencapai Rp 11,69 triliun dan meliputi 41,71% dari total aktiva PermataBank. Obligasi Pemerintah berdasarkan tujuan kepemilikannya terdiri dari Obligasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo sebesar Rp 8.270,67 miliar; yang tersedia untuk dijual Rp 645,12 miliar dan untuk tujuan diperdagangkan sebesar Rp 2.775,77 miliar.

Kredit Yang Diberikan

Pada akhir tahun 2002, jumlah kredit yang diberikan sebelum dikurangi penyisihan kerugian mencapai Rp 8.925,84 miliar, menurun Rp 1.048,64 miliar atau 10,51% dari posisi pada akhir tahun 2001 yang sebesar Rp 9.974,48 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pelunasan dari debitur otomotif dan *commercial* serta adanya Program Penjualan Aset Inti (PPAI) I pada bulan November 2002.

Kredit yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada akhir tahun 2002 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar 94,84% atau sebesar Rp 199,38 miliar dibanding posisi akhir tahun 2001, dimana 91,74% merupakan penyaluran kredit kepada PT Astra International Tbk. Sesuai dengan Surat Bank Indonesia No. 5/35/DpwBI/PwB/6 tanggal 18 Februari 2003, dinyatakan bahwa berhubung kepemilikan PT Astra International Tbk pada PermataBank tercatat di bawah 10%, maka status PT Astra International Tbk dilihat dari kepemilikannya tidak lagi merupakan pihak terkait. Di samping itu, berdasarkan surat BPPN No. PB-461/BPPN/0303 tanggal 28 Maret 2003 dinyatakan bahwa sepanjang kredit kepada Grup Astra tidak termasuk dalam kategori pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit di Bank, maka PT Astra International Tbk tidak lagi terikat dengan klausula kewajiban dalam Perjanjian Investasi, Manajemen dan Kinerja Usaha.

Adapun perincian kredit yang diberikan kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2001	31 Desember 2002
Nasabah	206.419	-
Karyawan Kunci	3.804	10.839
Total	210.223	10.839

Kredit yang diberikan kepada karyawan kunci berupa kredit untuk membeli kendaraan, rumah dan keperluan lainnya dengan jangka waktu berkisar antara 1 sampai dengan 20 tahun, dibebani bunga dan dibayar kembali melalui pemotongan gaji setiap bulan.

Jumlah kredit bermasalah (tidak termasuk kredit dalam perhatian khusus) terhadap total kredit untuk induk perusahaan saja pada akhir tahun 2002 tercatat Rp 2.408,76 miliar atau naik 5,14% dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2001 yang sebesar Rp 2.291,07 miliar.

Jumlah kumulatif penyisihan kerugian kredit sampai dengan akhir tahun 2002 mencapai Rp 1.718,92 miliar atau 19,26% dari jumlah portepel kredit. Rasio penyisihan kerugian kredit yang telah dibentuk terhadap total penyisihan kerugian kredit yang wajib dibentuk pada akhir tahun 2002 adalah 107,15%.

Adapun rincian kualitas kredit adalah sebagai berikut :

(dalam miliaran Rupiah)

Uraian	31 Desember 2001		31 Desember 2002	
	Rp	%	Rp	%
Lancar	6.624,65	66,42	5.762,90	64,57
Dalam Perhatian Khusus	1.058,76	10,62	754,18	8,45
Kurang lancar	364,31	3,65	519,54	5,82
Diragukan	527,10	5,28	242,13	2,71
Macet	1.399,66	14,03	1.647,09	18,45
Total	9.974,48	100,00	8.925,84	100,00

Berdasarkan sektor ekonomi, 27,15% dari jumlah kredit pada akhir tahun 2002 disalurkan ke sektor industri, 15,59% ke sektor perdagangan, dan 9,40% ke sektor pertanian. Sedangkan pada tanggal 31 Desember 2001, kredit ke sektor industri, perdagangan dan sektor pertanian tercatat masing-masing sebesar 33,21%, 15,90% dan 8,74% dari total kredit. Bila ditinjau dari komposisi kredit yang diberikan berdasarkan mata uang, pada 31 Desember 2002 tercatat 77,37% kredit diberikan dalam mata uang Rupiah dan 22,63% dalam valuta asing, sementara pada tanggal 31 Desember 2001 tercatat 73,90% dalam mata uang Rupiah dan 26,10% dalam valuta asing.

Pada bulan November 2002, PermataBank telah berhasil melaksanakan Program Penjualan Aset Inti (PPAI) I yaitu program penjualan kredit bermasalah sebesar Rp 673 miliar (termasuk penyertaan sebesar Rp 124 miliar). Program ini akan terus berlanjut di tahun mendatang.

Dana Pihak Ketiga

Jumlah simpanan dana masyarakat pada akhir tahun 2002 tercatat Rp 21.894,46 miliar turun sebesar Rp 554,93 miliar atau 2,47% dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2001 yang berjumlah Rp 22.449,39 miliar. Penurunan ini tidak terlepas dari kebijakan manajemen PermataBank untuk mengurangi sumber dana mahal dengan

tidak mengganggu posisi likuiditas PermataBank.

Ditinjau dari struktur pendanaan masyarakat, komposisi giro, tabungan dan deposito terhadap total dana pihak ketiga pada 31 Desember 2002 masing-masing 19,05%, 12,48% dan 68,47%. Dana masyarakat yang berhasil dihimpun dalam Rupiah mencakup 85,87%, sedangkan 14,13% dalam valuta asing. Jangka waktu penempatan deposito rata-rata kurang dari 1 (satu) tahun, dimana pada akhir tahun 2002 hanya 0,20% dari volume deposito berjangka yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan.

Penghimpunan dana dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada akhir 2002 tercatat sejumlah Rp 26,17 miliar atau hanya 0,12% dari total dana masyarakat yang berhasil dihimpun.

Adapun rincian dana masyarakat adalah sebagai berikut :

(dalam miliaran Rupiah)

Uraian	31 Desember 2001	31 Desember 2002
Giro	4.067,54	4.171,70
Tabungan	2.884,01	2.731,29
Deposito Berjangka & Sertifikat deposito	15.497,84	14.991,47
Total	22.449,39	21.894,46

Ekuitas

Pada tanggal 31 Desember 2002, ekuitas PermataBank tercatat sebesar Rp 1.157,25 miliar. Jumlah ekuitas ini merupakan akumulasi dari peningkatan modal saham dan tambahan modal disetor sebesar Rp 4.676,33 miliar dan Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali sebesar negatif Rp 3.240,52 miliar yang merupakan akumulasi selisih nilai buku bersih dari Bank-bank Yang Menggabungkan Diri (PT Bank Universal Tbk, PT Bank Artamedia, PT Bank Prima Express dan PT Bank Patriot), serta pencatatan rugi bersih selama tahun 2002 sebesar Rp 808,22 miliar.

Rugi Bersih

Selama tahun 2002, PermataBank mengalami kerugian bersih sebesar Rp 808,22 miliar, suatu penurunan yang sangat signifikan bila dibandingkan dengan perolehan laba bersih PermataBank pada tahun 2001 yang sebesar Rp 216,13 miliar. Komponen utama kerugian bersih ini adalah pembebanan biaya merger sebesar Rp 482,25 miliar dan pembebanan penyisihan kerugian aktiva produktif sebesar Rp 342,34 miliar.

Pendapatan Bunga Bersih

Di akhir tahun 2002, pendapatan bunga bersih PermataBank mencapai Rp 356,94 miliar, mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun 2001 sebesar Rp 77,89 miliar. Peningkatan ini didominasi oleh pendapatan bunga dari Efek-efek yang dimiliki PermataBank serta kredit yang diberikan.

Peningkatan pendapatan bunga (termasuk provisi dan komisi kredit) selama tahun 2002 mencapai 67,15% dibandingkan dengan pendapatan bunga tahun 2001, sementara beban bunga (termasuk provisi dan komisi) hanya mengalami peningkatan sebesar 48,15%. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan yang diambil oleh manajemen PermataBank, khususnya setelah terjadinya penggabungan usaha, untuk mengurangi dana mahal sehingga mampu menekan biaya bunga dan menggantikannya dengan sumber dana yang lebih murah. Hal ini sejalan dengan upaya perbaikan struktur dana pihak ketiga yang mengarah pada *low cost funding structure.*

Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya di akhir tahun 2002 tercatat sebesar Rp 269,93 miliar, naik sebesar Rp 12,26 miliar atau 4,76% dari tahun 2001. Komponen utama pendapatan operasional lainnya di tahun 2002 ini terdiri dari pendapatan imbalan yang mencakup 38,13% dari total pendapatan operasional lainnya dan perolehan keuntungan bersih penilaian efek yang diperdagangkan serta pendapatan premi yang masing-masing mencakup 20,06% dan 13,39% dari total pendapatan operasional lainnya.

Beban Operasional Lainnya

Beban operasional lainnya pada akhir tahun 2002 tercatat sebesar Rp 648,32 miliar, mengalami peningkatan sebesar 37,20% atau Rp 175,77 miliar dibandingkan dengan beban operasional pada akhir tahun 2001. Komponen utama beban operasional lainnya adalah beban umum dan administrasi sebesar Rp 295,02 miliar atau 45,51% dari total beban operasional lainnya serta beban tenaga kerja sebesar Rp 293,57 miliar atau 45,28% dari total beban operasional lainnya, di mana kenaikan dari komponen masing-masing biaya ini merupakan dampak dari proses penggabungan usaha.

Pendapatan Bukan Operasional

Pada akhir 2002, PermataBank membukukan pendapatan bukan operasional sebesar Rp 11,20 miliar atau turun 94,40% dibandingkan akhir tahun 2001 yang sebesar Rp 200,01 miliar. Pendapatan bukan operasional selama tahun 2002 terutama berasal dari laba penjualan penyertaan sebesar Rp 15,34 miliar, pembalikan kerugian dari agunan diambil alih sebesar Rp 12,17 miliar, pendapatan sewa Rp 6,68 miliar, laba penjualan aktiva tetap dan agunan yang diambil alih sebesar Rp 6,11 miliar, serta adanya kerugian penghapusan aktiva tetap sebesar Rp 36,01 miliar. Sementara pendapatan bukan operasional selama tahun 2001 didominasi oleh dampak atas penjualan anak perusahaan.

RENCANA 2003

Rencana jangka pendek PermataBank pasca merger adalah sebagai berikut :

1. Lebih memfokuskan pada upaya *customer retention & development* melalui program-program untuk meningkatkan *customer relationship.*
2. Menjaga kesinambungan dana masyarakat melalui kualitas layanan yang baik dan konsisten, keamanan dan inovasi produk & jasa agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah dari berbagai segmen secara lebih efisien dan efektif.
3. Memperbaiki struktur dana pihak ketiga menjadi *low cost funding structure*, melalui berbagai program pemasaran bagi produk giro dan tabungan, sementara porsi deposito berjangka dikurangi secara bertahap dengan tetap menjaga likuiditas yang memadai.
4. Meningkatkan penyaluran kredit konsumsi (KPR, *car loan*, kartu kredit) secara lebih agresif dengan tetap memperhatikan risiko kredit dan tingkat NPL.
5. Meningkatkan penyaluran kredit komersial, dengan memfokuskan kepada segmen menengah ke bawah (*small business & middle market*/UKM) dan dengan memperhatikan diversifikasi portofolio kredit ke berbagai sektor industri secara seimbang.
6. Mempertahankan dan mengembangkan pembiayaan kepada segmen otomotif maupun kepada sektor industri lainnya secara selektif dengan menerapkan *value chain strategy.*
7. Mempercepat penyelesaian kredit bermasalah untuk mencapai tingkat rasio NPL di bawah 5%.
8. Meningkatkan *fee based income* dengan cara meningkatkan aktivitas *cross selling* dan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh saluran distribusi yang ada melalui program-program khusus agar jumlah transaksi melalui saluran distribusi elektronik meningkat.
9. Upaya efisiensi akan tetap dijalankan secara berkesinambungan.
10. Meningkatkan kualitas layanan di bidang operasional *(back office)* dengan menjadi mitra bisnis yang handal bagi bidang non-operasional, memberikan pelayanan yang tepat waktu dan aman bagi para nasabah.
11. Mengembangkan sistem teknologi yang dibutuhkan dalam mengembangkan bisnis.
12. Mengadakan program pelatihan bagi seluruh karyawan untuk membentuk sumber daya manusia yang profesional dan handal.
13. Meningkatkan kemampuan dan kualitas penerapan *risk management* dan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *(good corporate governance).*
14. Mengadakan *branding program* untuk memperkuat *brand* dan citra PermataBank.
15. Melakukan upaya memperkuat struktur permodalan untuk menciptakan *sustainable bank.*

Sedangkan rencana jangka panjang PermataBank adalah sebagai berikut :

1. Mempertahankan dan mengembangkan nasabah yang menguntungkan bagi PermataBank.
2. Menciptakan organisasi yang berkinerja tinggi.
3. Mencapai tingkat kinerja operasional yang optimal agar memiliki daya saing yang tinggi.
4. Meningkatkan kemampuan pengendalian risiko.
5. Mengembangkan keahlian dalam pengendalian produk.
6. Membangun dan mensosialisasikan *brand* PermataBank.

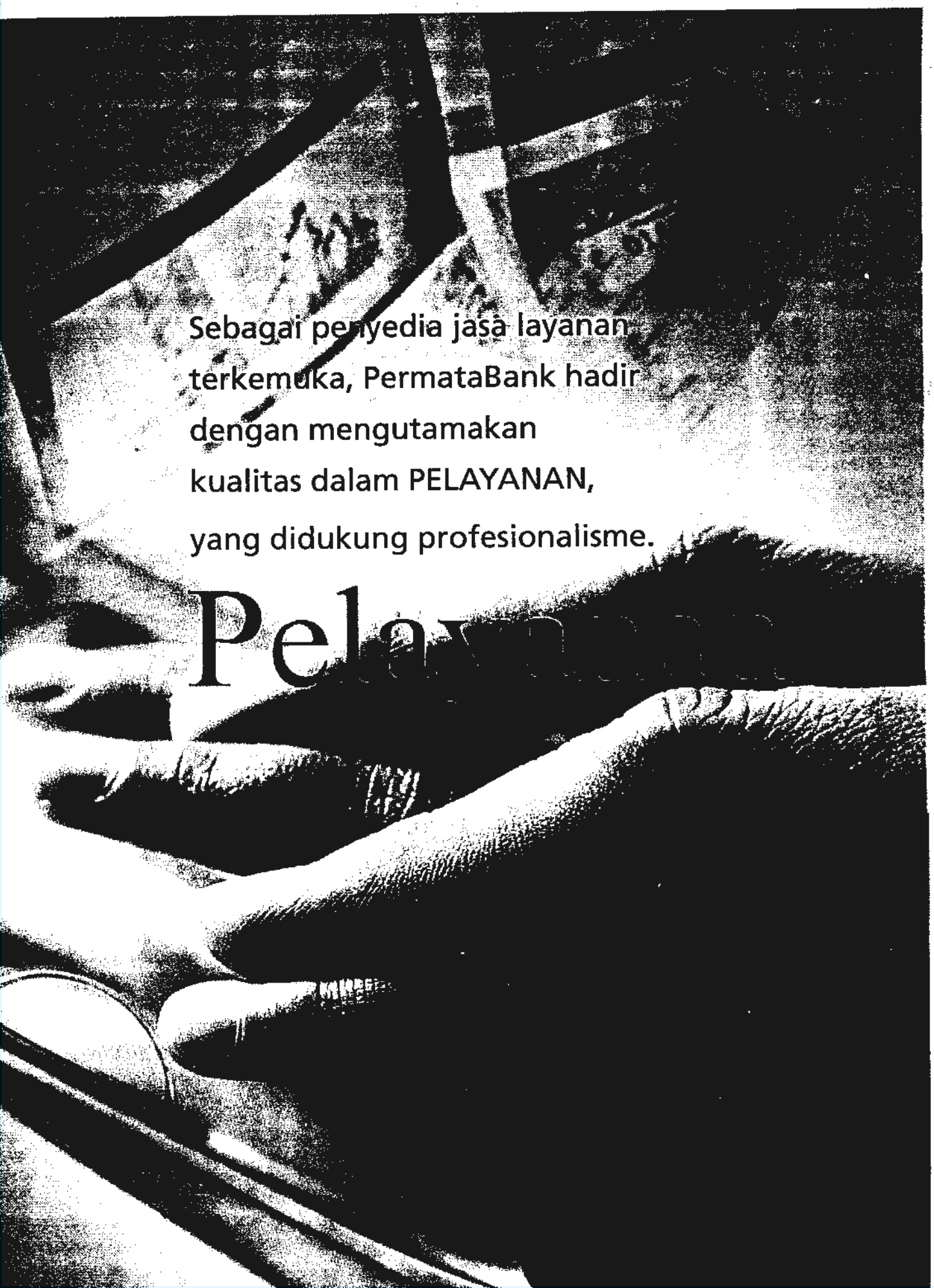
Sebagai penyedia jasa layanan
terkemuka, PermataBank hadir
dengan mengutamakan
kualitas dalam PELAYANAN,
yang didukung profesionalisme.
Pelay

PRODUK, JASA DAN JARINGAN USAHA

PermataBank memberikan keamanan, kenyamanan, fleksibilitas dan efisiensi dalam melakukan transaksi perbankan.

Sebagai bukti nyata atas komitmen PermataBank terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), maka diluncurkan produk PermataAnjakPiutang yang memberikan peluang kepada pengusaha mikro, kecil dan menengah untuk memperoleh pembiayaan modal kerja.

PermataAnjakPiutang merupakan pilihan tepat bagi pengusaha, karena memungkinkan nasabah memperoleh pembiayaan modal kerja tanpa jaminan tanah dan bangunan. Melalui produk ini pengusaha dapat menjual piutang dagangnya ke PermataBank dan memperoleh dana tunai maksimal 80% dari nilai piutang/faktur yang dijaminkan.

PermataAnjakPiutang membantu pengusaha dalam meningkatkan likuiditas keuangan perusahaan untuk kelancaran operasi bisnis. Selain itu, PermataAnjakPiutang juga membantu pengusaha dalam pengurusan administrasi piutang dagang yang memudahkan pengusaha dalam mengelola bisnis secara lebih efisien.

PermataBank juga mengembangkan PermataLink, yaitu layanan perbankan elektronik yang memungkinkan beragam transaksi perbankan dilakukan langsung di komputer nasabah *corporate*. PermataLink memberikan akses langsung ke rekening, sehingga nasabah dapat bertransaksi dan memperoleh informasi setiap saat dibutuhkan.

PermataLink dikembangkan dengan sistem keamanan yang berlapis, yaitu *User ID, Password* dan *Telephone Identification Number* (TIN), serta hubungan langsung dari komputer nasabah ke *server* PermataBank melalui sistem *dial up*, memastikan keamanan nasabah dalam melakukan setiap transaksi.

Melalui layanan PermataLink, PermataBank memberikan nilai tambah bagi nasabah, khususnya meningkatkan

efisiensi, fleksibilitas dan kenyamanan dalam melakukan berbagai transaksi perbankan.

Dari sisi ragam pelayanan, PermataBank telah melakukan banyak perubahan dan penambahan kerjasama.

Hal ini bertujuan untuk lebih dapat melayani berbagai macam kebutuhan nasabah dalam bertransaksi dengan PermataBank yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan non bunga. Selama tahun 2002, PermataBank telah melakukan kerjasama dengan pihak Telkomsel sehingga pengguna jasa prabayar Simpati dapat melakukan isi ulang secara otomatis (*automatic reload*) melalui ATM PermataBank dan PermataTel. Selain dengan penyedia layanan telepon selular, PermataBank juga telah melakukan penambahan layanan secara *host to host* dengan Telkom daerah Malang, Blitar dan Pasuruan yang juga sudah dapat diakses nasabah melalui ATM PermataBank dan PermataTel, sehingga nasabah PermataBank di ketiga kota tersebut sudah dapat melakukan pembayaran telepon secara langsung.

Disamping layanan pembayaran telepon dan pembelian pulsa, PermataBank juga menambahkan fitur baru, yaitu pembayaran kartu kredit GE Ekstra MasterCard dan Sumber Kredit melalui ATM PermataBank yang sebelumnya hanya dapat dilayani melalui kantor cabang dan PermataTel.

Dari sisi pelayanan di PermataTel, PermataBank juga telah membuka nomor telepon lokal untuk nasabah yang ingin menghubungi PermataTel di Denpasar dan

Bogor. Hal ini akan lebih mempermudah nasabah yang tinggal di kota tersebut untuk dapat menghubungi PermataBank. Untuk meningkatkan ke-amanan dalam bertransaksi di PermataTel juga telah ditambahkan beberapa fitur baru, yaitu dengan mengubah TIN untuk bertransaksi di PermataTel dari sistem *input* manual ke sistem komputerisasi.

Layanan-layanan tersebut melengkapi layanan yang telah ada sebelumnya, seperti pembayaran telepon, pembayaran PLN, pembayaran PALYJA, pembayaran premi asuransi Prudential, pembayaran telepon selular pasca bayar, pembelian pulsa telepon selular prabayar, isi ulang e-Wallet, pencetakan 8 transaksi terakhir, pembayaran kartu kredit Visa dan Master di Indonesia, dan pemindahbukuan (*overbooking*) yang mempunyai fleksibilitas tinggi. Layanan tersebut selama ini telah dapat diakses melalui berbagai macam *channel* yang ada di PermataBank, seperti kantor cabang, ATM PermataBank, *Internet Banking*, dan PermataTel.

Khusus melalui ATM milik PermataBank, nasabah bank lain yang tergabung dalam jaringan ALTO dan ATM Bersama tidak hanya mendapatkan fasilitas standar seperti informasi saldo dan penarikan tunai, namun juga dapat melakukan pembayaran telepon, isi ulang pulsa, pembayaran tagihan kartu kredit, dan pembayaran telepon selular pasca bayar. Disamping itu juga dapat dilakukan pemindahbukuan secara *online* ke rekening yang ada di PermataBank.

Selain bekerja sama dengan jaringan lokal seperti ALTO, Cakra dan ATM Bersama, PermataBank juga bekerjasama dengan jaringan Internasional seperti Visa Plus, Visa Electron, Visa International, Cirrus dan MasterCard. Fasilitas yang dapat dinikmati oleh nasabah jaringan tersebut yaitu informasi saldo dan penarikan tunai, serta pembelian barang dan jasa di *merchant-merchant* PermataBank.

Untuk memberikan nilai tambah kepada nasabah pemegang Visa Electron tabungan dan giro perseorangan diberikan fasilitas kemudahan penarikan ATM yaitu Gratis Biaya Penarikan (untuk penarikan tunai ≥ Rp 250.000,00) di lebih dari 6.000 ATM BCA, ALTO dan ATM Bersama. Selain itu, untuk meningkatkan *funding* tabungan, PermataBank meluncurkan program yang berkesinambungan berupa Undian Berhadiah III & IV pada periode Maret - Juni 2002 dan Agustus - Desember 2002.

Untuk memberikan lebih banyak kemudahan kepada nasabah, terhitung sejak bulan November 2002 telah dimungkinkan untuk melakukan penyetoran tunai ke Kartu Debet (Permata Visa Electron dan e-Wallet) dan Kartu Kredit Permata Visa/MasterCard melalui cabang-cabang Kantor Pos Indonesia.

Salah satu produk inovatif PermataBank yang telah diluncurkan pada penghujung

tahun 2001, yaitu e-Wallet, di tahun 2002 selain dijual untuk pasar ritel juga terus dikembangkan e-Wallet *Co-Branding* yang bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yaitu :

1. **e-Wallet StockWatch Retail,** PermataBank bekerjasama dengan PT Limas Stockhomindo Tbk yang bertujuan memberikan kemudahan bagi pelanggan PT Limas Stockhomindo Tbk untuk ber-transaksi dengan memberikan informasi harga saham dan kurs valuta asing.

2. **Hotel Club Indonesia (HCI) Visa Electron,** PermataBank bekerjasama dengan PT Jasa Inti Promosi Marketindo menerbitkan e-Wallet dengan nilai tambah keanggotaan Hotel Club Indonesia yang memberikan benefit berupa potongan harga khusus di jaringan hotel terkemuka di seluruh Indonesia dan diskon pembelian tiket pesawat.

3. **Epson Premium Partner Card,** PermataBank bekerjasama dengan PT Epson Indonesia tujuannya sebagai sarana *maintenance* distributor produk PT Epson Indonesia.

Selain dapat diperoleh di seluruh cabang PermataBank, sejak pertengahan tahun 2002 e-Wallet dapat diperoleh di *outlet* Fuji Image Plaza, Toko Buku Gramedia, Hero Supermarket dan Kantor Pos Indonesia.

Untuk memberikan nilai tambah pada Kartu Permata Visa Electron dan e-Wallet sebagai kartu belanja, PermataBank menggalang kerjasama dengan *merchant-merchant* untuk memberikan diskon spesial pada setiap transaksi belanja di *outlet* mitra yang berpartisipasi. Program ini sifatnya berkesinambungan, dimulai sejak Oktober 2002.

dilakukan secara selektif dan berdasarkan hasil evaluasi, baik dari segi kinerja maupun prospek usaha dan lokasi yang strategis dari kantor-kantor cabang hasil peng-gabungan tersebut.

Untuk mendukung efektifitas dan optimalisasi dari jaringan ATM yang dimiliki sendiri, PermataBank tetap memper-

Jaringan Usaha

Dengan selesainya proses penggabungan (merger), PermataBank telah melakukan rasionalisasi dari cabang bank-bank yang tergabung dengan PermataBank. Hal tersebut dilakukan secara bertahap mulai November 2002 dan tetap menyebabkan penambahan jumlah kantor operasional PermataBank dari 245 kantor pada akhir tahun 2001 menjadi 328 kantor pada akhir tahun 2002, yang tersebar di 30 kota di Indonesia serta 1 (satu) kantor cabang di Caymans Island. Penutupan ataupun relokasi kantor operasional

tahankan kerja sama dengan jaringan ATM lainnya seperti ATM BCA, ATM Bersama, ALTO dan Visa International yang memungkinkan kartu Visa Electron sebagai kartu ATM dan kartu debet dapat digunakan di seluruh jaringan ATM PermataBank maupun di seluruh jaringan ATM tersebut di atas, sehingga memudahkan nasabah dalam bertransaksi di ATM.

Sedangkan bank koresponden berjumlah 491 yang tersebar di berbagai negara antara lain Amerika, Jepang, Singapura, Jerman, Hong Kong, Italia, Korea Selatan dan Taiwan.

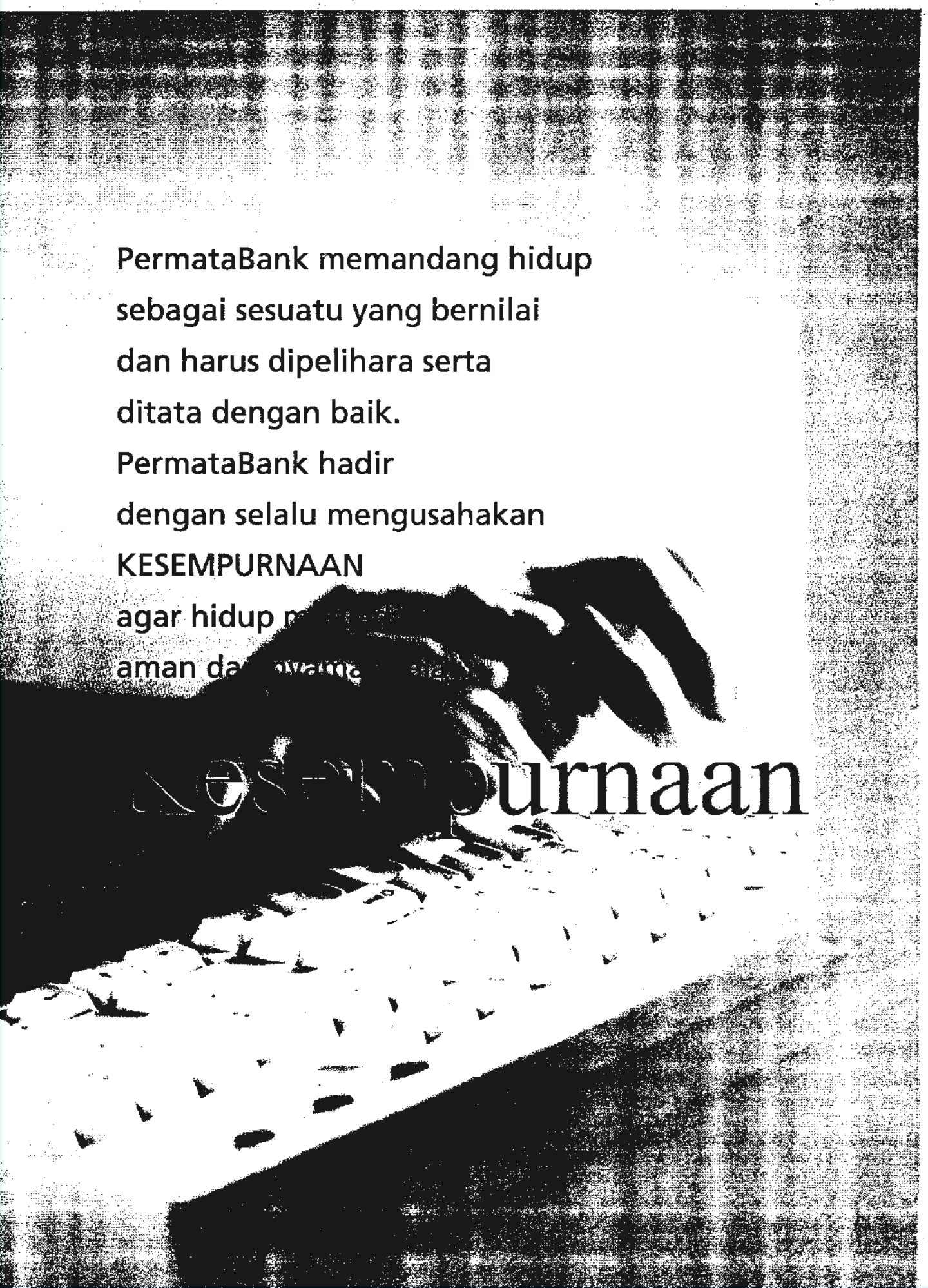
PermataBank memandang hidup
sebagai sesuatu yang bernilai
dan harus dipelihara serta
ditata dengan baik.
PermataBank hadir
dengan selalu mengusahakan
KESEMPURNAAN
agar hidup
aman da
urnaan

SUMBER DAYA MANUSIA

Tantangan lain di bidang SDM adalah menyatukan budaya kerja dari lima bank peserta merger menjadi satu budaya korporasi PermataBank.

Sebagai bagian dari aktivitas merger lima Bank menjadi PT Bank Permata Tbk, maka proses konsolidasi Sumber Daya Manusia (SDM) adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Rasionalisasi sumber daya manusia dilakukan dalam tiga gelombang sejumlah 950 karyawan seperti yang telah disepakati dan konsolidasi

SDM yang masih tersisa dapat dituntaskan pada bulan Maret 2003. Pada awal merger PermataBank memiliki 8.008 orang karyawan, dengan rasionalisasi dan karyawan yang memilih untuk tidak bergabung dengan PermataBank, maka per 31 Maret 2003 jumlah *PermataBanker*

adalah 7.148 orang. Dengan selesainya pekerjaan rumah tersebut terutama yang berkaitan dengan sumber daya manusia, maka PermataBank kini sepenuhnya dapat memfokuskan diri pada upaya peningkatan kinerja.

Selanjutnya yang menjadi tantangan di bidang SDM adalah menyatukan budaya kerja dari 5 Bank peserta merger untuk membentuk satu budaya korporasi

Hal lainnya yang tidak kalah penting adalah proses konsolidasi kebijakan SDM yang menyangkut kompensasi dan benefit karyawan, peraturan Perusahaan secara umum, serta aktivitas-aktivitas SDM lainnya seperti *Job Design* dan *Job Grading*, Rekrutmen, *Training*, Sistem *Data Base* karyawan dan program SDM lainnya.

PermataBank yang baru, yang menjunjung tinggi nilai-nilai utama, yaitu : Kepercayaan, Integritas, Pelayanan, Kesempurnaan, dan Profesionalisme. Pembentukan budaya korporasi yang baru akan melibatkan seluruh jajaran Manajemen PermataBank melalui berbagai macam interaksi baik secara formal maupun informal.

TEKNOLOGI

Teknologi dari 5 Bank telah bergabung menjadi satu sehingga dapat terhubung secara *online*.

Teknologi merupakan salah satu kunci dalam penuntasan proses merger. Penyelesaian penggabungan teknologi dari 5 Bank menjadi satu telah selesai dilakukan sehingga semua cabang dan ATM dapat terhubung secara *online*. Penambahan kapasitas sistem guna mendukung proses merger juga telah dilakukan, sehingga pemanfaatan sarana teknologi telah siap untuk dioptimalkan.

Komitmen untuk stabilitas pasca merger terus menerus dijalankan dengan menjaga *uptime* dari sistem komputer PermataBank, dan juga dengan mitra-mitra jaringan seperti ALTO, ATM Bersama, ATM Rintis-BCA untuk layanan penarikan tunai bagi nasabah serta HSBC dan Citibank untuk pembayaran kartu kredit.

Dengan membangun sistem operasi berbasis teknologi, saat ini telah dimungkinkan pula untuk melakukan transaksi perbankan melalui *sms Banking* sehingga dimanapun, kapanpun nasabah dapat melakukan transaksi perbankan tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat.

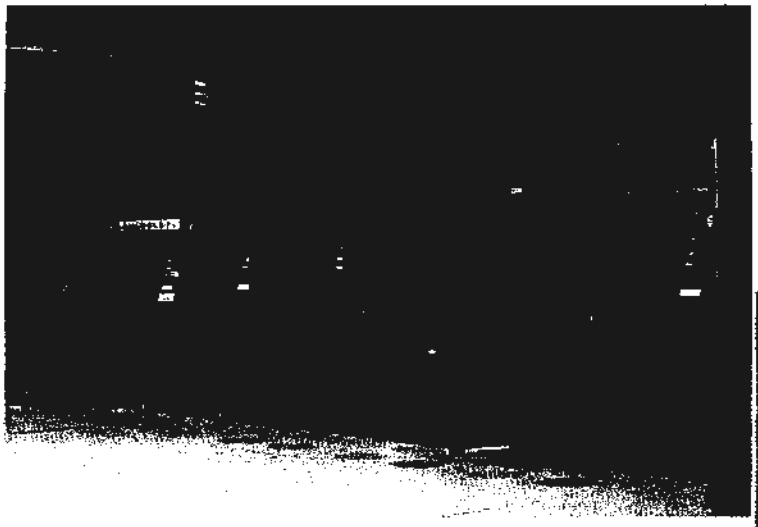

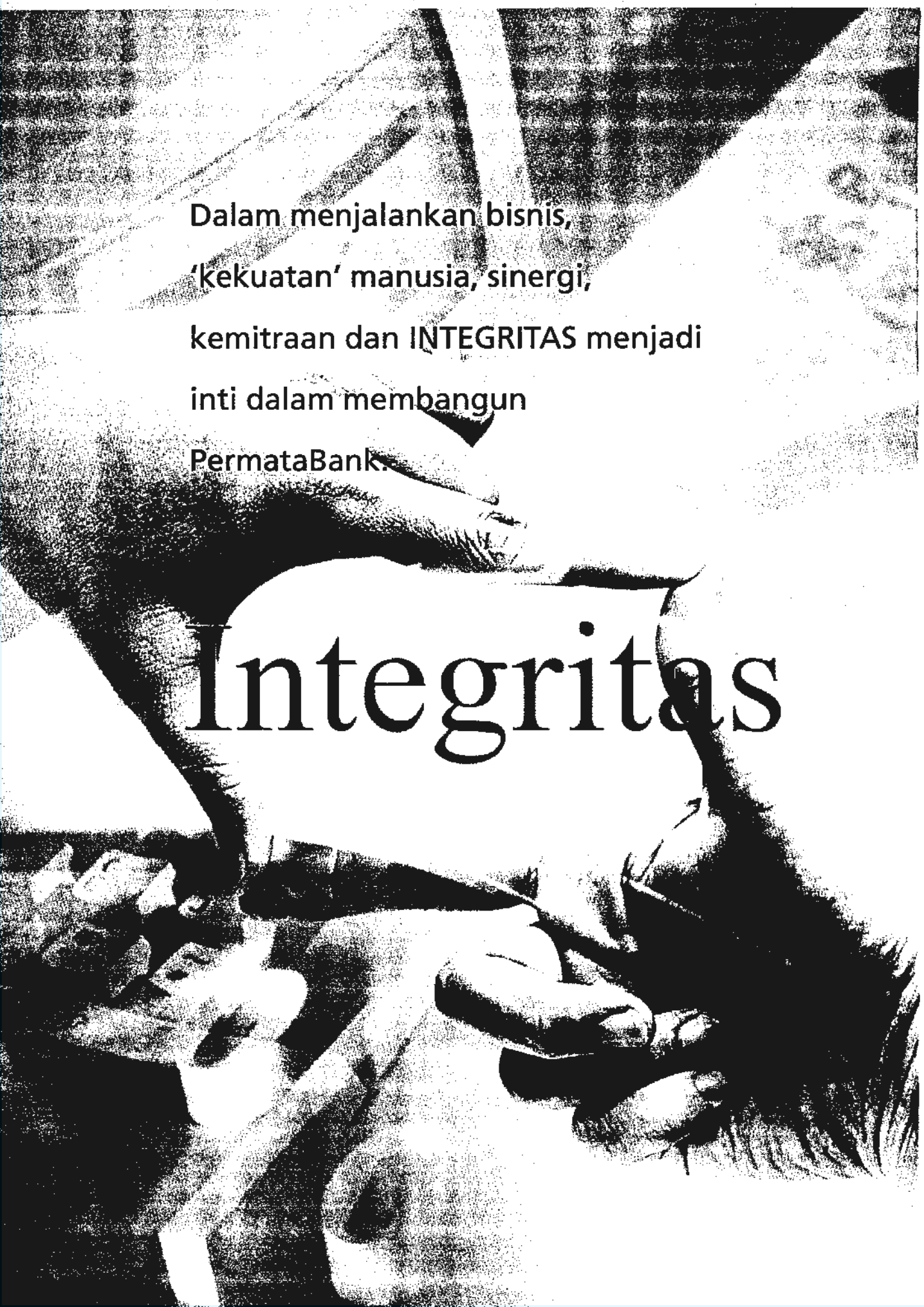

Dalam menjalankan bisnis,
'kekuatan' manusia, sinergi,
kemitraan dan INTEGRITAS menjadi
inti dalam membangun
PermataBank.

Integritas

INTERNAL AUDIT

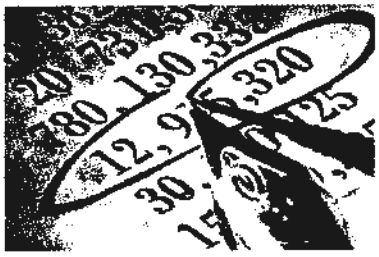

Internal Audit diarahkan pada konsolidasi internal khususnya yang menyangkut Sumber Daya Manusia dari lima bank merger, perumusan Visi & Misi, redefinisi seluruh kebijakan dan prosedur internal.

Pada periode Januari sampai dengan September 2002, setiap Internal Audit Bank Peserta Penggabungan masih menjalankan fungsi pemeriksaan menurut rencana kerja yang telah disusun oleh masing-masing Bank. Internal Audit eks PT Bank Bali Tbk melakukan pemeriksaan dalam bidang *Credit, Trade Finance, Operational Banking, Resources & Management* serta *Information Technology* di berbagai *Business Unit* yang telah direncanakan. Salah satu agenda yang menjadi fokus pemeriksaan adalah pelaksanaan Kebijakan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) seperti diatur oleh Bank Indonesia. Internal Audit eks PT Bank Universal Tbk melakukan pemeriksaan terhadap tindak lanjut yang dikerjakan manajemen atas temuan Internal Audit untuk bidang Penanganan *Non Performing Loan, Operation Compliance*, dan Kualitas Aktiva Produktif (KAP), serta pemeriksaan atas Bisnis *Consumer Asset* dan Operasi *Dealing Room.* Di samping itu, juga dilakukan pemeriksaan atas Barang Jaminan Diambil Alih (*Foreclosed Asset*), Barang Inventaris Kantor Pembelian tahun 2002 dan Program Penjualan Aset Inti (PPAI). Internal Audit eks PT Bank Prima Express, eks PT Bank Patriot dan eks PT Bank Artamedia melakukan pemeriksaan operasional dan membantu proses persiapan merger.

Periode Oktober sampai dengan Desember 2002 merupakan periode operasional merger bagi 5 Bank Peserta Penggabungan. Internal Audit terlibat dalam proses konversi data finansial dari sistem Bank Peserta Penggabungan ke sistem Bank Hasil Penggabungan mulai dari tahap *User Acceptance Test* (UAT), *Mock Run* sampai dengan *Conversion* dengan cara melakukan verifikasi kebenaran data dan hasil rekonsiliasi yang dilakukan oleh *User.* Tujuannya adalah untuk meyakinkan kebenaran data finansial yang digabungkan ke PermataBank sebagai hasil penggabungan.

Pada tahun 2003 aktivitas *Corporate Internal Audit* diarahkan pada konsolidasi internal, khususnya menyangkut Sumber Daya Manusia dari kelima bank, perumusan Visi & Misi, redefinisi seluruh kebijakan dan prosedur internal termasuk di dalamnya *Internal Audit Charter*, pengembangan fungsi *Quality Assurance* dan penyusunan kebijakan serta keseragaman pelaksanaan kerja Unit Kontrol Internal.

Selain itu, aktivitas pemeriksaan akan diarahkan pada kegiatan stabilisasi operasional dan administrasi pasca merger yang bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap kecukupan internal kontrol dalam rangka melindungi aset Bank, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

KEPERCAYAAN terhadap
PermataBank tercermin
dari hubungan erat PermataBank
dengan nasabah dan secara konsisten
memberikan pengalaman interaksi
yang terbaik bagi nasabah.

Kepercayaan

RISK MANAGEMENT

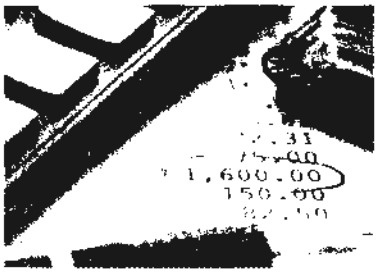

Pendekatan yang dilakukan PermataBank adalah *bank-wide approach* yang meliputi pengelolaan seluruh risiko atas divisi-divisi yang dianggap memiliki derajat risiko relatif tinggi.

Risk Management merupakan bagian integral dari kegiatan manajemen PermataBank dan berperan dalam mengelola risiko yang berkaitan dengan aktivitas perbankan PermataBank. Tugas utama *Risk Management* adalah memastikan bahwa seluruh risiko yang melekat pada produk, jasa, kebijakan, sistem, dan prosedur kerja telah teridentifikasi, terukur, dan terpantau dengan baik melalui sistem dan organisasi yang memadai. Hasil dari kegiatan utama *Risk Management* dapat digunakan untuk membantu manajemen dalam usaha mencapai *business plan* dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam menjalankan operasional PermataBank, yakni memperoleh *return* yang optimal setelah memperhitungkan risiko kerugian yang mungkin timbul sehingga tidak melebihi kemampuan PermataBank dalam menyerap kerugian atau membahayakan kelangsungan hidup PermataBank.

Pelaksanaan manajemen risiko dilandasi oleh ketentuan Bank Indonesia, standar perbankan internasional (seperti dari *Bank for International Settlement*), dan *best practices* yang telah diterapkan bank-bank lain yang lebih maju dalam mengelola risiko. Pendekatan yang dilakukan PermataBank adalah *bank-wide approach* seluruh kegiatan perbankan PermataBank yang meliputi pengelolaan seluruh risiko atas divisi-divisi yang dianggap memiliki derajat risiko relatif tinggi. Adapun jenis risiko yang melekat atas divisi-divisi dimaksud mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko suku bunga, risiko likuiditas, risiko konsentrasi, risiko operasional, risiko hukum, risiko lingkungan, risiko regulasi dan risiko reputasi. Disamping itu, risiko secara portofolio juga mendapatkan perhatian yang sama pentingnya dalam rangka mengoptimalkan tingkat pengembalian (*return*) atas pengelolaan aktiva produktif dan pasiva yang dimiliki dan dikelola PermataBank.

Di dalam menjalankan fungsinya, *Risk Management Group* PermataBank dibagi atas empat departemen yaitu: *credit risk management, treasury risk management, operation and non-business risk management,* dan portofolio *risk management* ditingkat kantor pusat. Keempat departemen dalam menjalankan peranannya masing-masing didukung oleh *risk management unit* di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, dan Semarang. Secara spesifik, masing-masing departemen mempersiapkan infrastruktur untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memonitor risiko-risiko yang terkait sehingga dapat digunakan untuk menentukan limit-limit dan memberikan masukan-masukan atas transaksi dan aktivitas yang dipandang memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi baik ditinjau dari segi jumlah maupun frekuensi kemungkinan timbulnya risiko dimaksud. Interaksi dan kegiatan saling mendukung antara *Risk Management Group* dengan divisi-divisi lain seperti: *Policy and System Development,*

Management Information System, Satuan Kerja *Audit Intern*, dan *Compliance* merupakan praktek yang umum dilaksanakan dalam pengelolaan risiko PermataBank.

Risk Management PermataBank menggunakan metode standar dan internal model dalam mengkaji risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Adapun metodologi dalam mengevaluasi dan mengkuantifisir risiko yang digunakan disesuaikan dengan kompleksitas keadaan yang ada di tiap-tiap divisi, unit kerja, dan kantor cabang PermataBank.

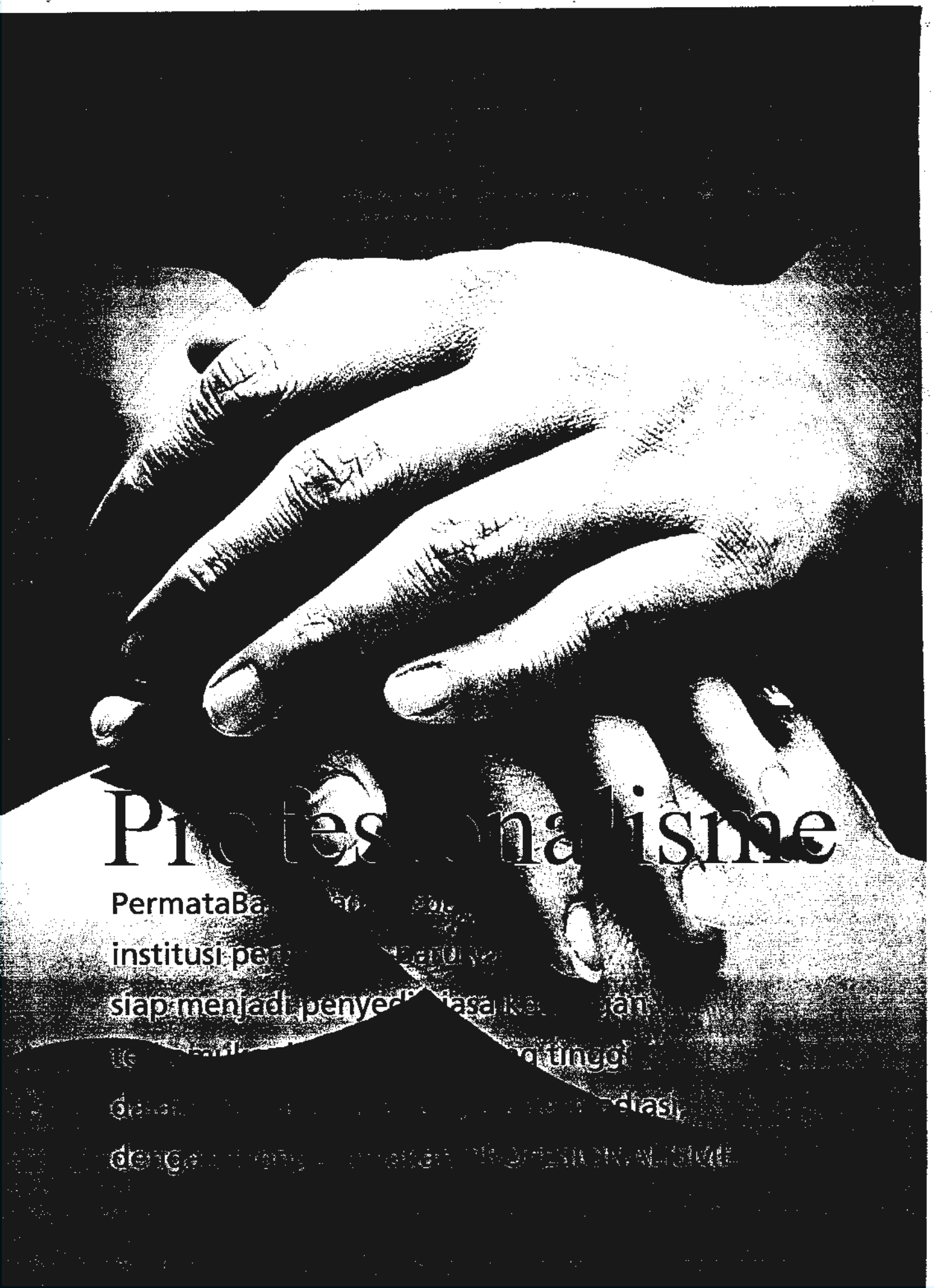

Pr[illegible]nalisme

PermataBa[illegible]

institusi pe[illegible]

siap menjadi penyed[illegible]asa k[illegible]an

[illegible] tinggi

d[illegible]

d[illegible]

dengan[illegible]

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) akan menjadi acuan setiap aktivitas PermataBank.

Krisis ekonomi makro merupakan salah satu penyebab terjadinya krisis perbankan di Indonesia. Di bidang perbankan hal tersebut terjadi antara lain karena lemahnya penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*). Sehubungan dengan upaya peningkatan kualitas *Good Corporate Governance* pada bidang perbankan, atas prakarsa Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) bekerja sama dengan PriceWaterhouse-Coopers sebagai konsultan independen, bank peserta merger PermataBank yaitu PT Bank Bali Tbk, PT Bank Universal Tbk, PT Bank Prima Express dan PT Bank Artamedia berpartisipasi dalam Program Pengembangan dan Implementasi *Good Corporate Governance* yang diwujudkan dengan menyelesaikan penyusunan Panduan Kebijakan *Good Corporate Governance* masing-masing bank peserta merger.

Selanjutnya sehubungan dengan penerapan *Good Corporate Governance* secara konsisten dan berkesinambungan, salah satu bank peserta merger tersebut diatas merupakan salah satu dari 8 emiten terbaik yang telah memenuhi kriteria standar *corporate governance* berdasarkan penilaian Asian Development Bank dan Komite Nasional bidang *Corporate Governance* atas inisiatif Bursa Efek Jakarta pada tahun 2001.

Berdasarkan filosofi merger yaitu untuk mempertahankan nilai-nilai terbaik dari apa yang telah ada di bank-bank peserta merger, maka selanjutnya PermataBank sebagai bank hasil merger akan terus menerapkan *Good Corporate Governance* secara konsisten dan berkesinambungan.

Penerapan *Good Corporate Governance* di PermataBank difokuskan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Peran, Tanggung jawab dan Pengembangan kemampuan Dewan Komisaris dan Direksi (*Roles, Responsibilities* dan *Skills of the Boards*).
2. Perencanaan dan Pemantauan Kinerja (*Business Planning dan Performance Monitoring*).
3. Pengawasan terhadap Manajemen Risiko dan Kepatuhan (*Oversight of Risk Management & Compliance*).
4. Operasional Komite Audit (*Operation of Audit Committee*).
5. Keterbukaan dan Pengungkapan (*Transparency and Disclosure*).
6. Budaya Kerja (*Corporate Culture*).

Keseluruhan cakupan hal-hal tersebut di atas mengacu kepada praktek terbaik (*best practice*) yang dilakukan di beberapa negara lain yang telah menerapkan *Good Corporate Governance* dengan baik.
Prinsip-pinsip *Good Corporate Governance* beserta aktivitas yang sudah diterapkan di PermataBank adalah :

1. Keterbukaan (*Transparency*)
   - Telah dibentuknya Divisi *Corporate Secretary and Communications*
   - Penyampaian keterbukaan informasi

ke publik berupa publikasi laporan keuangan secara berkala serta informasi material lainnya, yang tepat waktu, akurat, jelas, dan konsisten.
- Pelaksanaan Rapat Direksi setiap minggu dengan dihadiri oleh *Corporate Secretary* sebagai notulen

2. Akuntabilitas (*Accountability*)
   - Pelaksanaan Rapat Direksi dengan Komisaris secara berkala untuk membahas perihal kinerja usaha
   - Anggota Direksi dan Komisaris telah melalui *Fit and Proper Test* Bank Indonesia
   - Penyampaian Laporan Direktur Kepatuhan per semesteran kepada Bank Indonesia sehubungan dengan langkah-langkah kepatuhan yang dilaksanakan oleh PermataBank
   - Mengatur kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
   - Dibentuknya Komite Audit dan terdapatnya unsur Komisaris Independen

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)
   - Penetapan visi dan misi PermataBank
   - Menyelengarakan berbagai kegiatan kemanusiaan sebagai wujud tanggung jawab sosial
   - Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) sesuai dengan Anggaran Dasar
4. Independensi (*Independence*)
   - Anggota Direksi dan Komisaris tidak terafiliasi dengan pemegang saham mayoritas
5. Kesetaraan (*Fairness*)
   - Perlakuan yang sama terhadap setiap pemegang saham untuk mengemukakan pendapatnya pada Rapat Umum Pemegang Saham
   - Pengkajian atas setiap prosedur, kebijakan serta transaksi dalam kewenangan Direksi oleh Divisi Kepatuhan
   - Profesionalisme atas setiap tindakan korporasi, termasuk pengangkatan anggota Komisaris dan Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Dengan diterapkannya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di PermataBank secara berkesinambungan, diharapkan dapat menciptakan nilai tambah bagi *stakeholders* (termasuk pemegang saham minoritas) PermataBank. Selain itu juga diharapkan dapat menciptakan hubungan yang kondusif serta dapat dipertanggung jawabkan yang pada akhirnya meningkatkan kinerja PermataBank di masa mendatang.

Penerapan *Good Corporate Governance* di PermataBank menunjukkan bahwa PermataBank memiliki komitmen untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya dari waktu ke waktu. Hal tersebut sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memperbaiki kondisi perekonomian khususnya sektor perbankan. Dengan demikian diharapkan PermataBank tetap mampu memberikan kontribusi terbaiknya bagi perekonomian Indonesia.

KEGIATAN SOSIAL

Dengan moto "Menjadikan hidup lebih bernilai", PermataBank senantiasa berusaha membantu para nasabah agar hidup nyaman dan aman selalu.

Sejalan dengan moto PermataBank maka dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih harmonis PermataBank secara aktif melakukan sejumlah kegiatan sosial kemasyarakatan. Harus diakui kondisi keuangan PermataBank pasca merger masih dalam kondisi yang belum optimal, namun PermataBank tetap berpartisipasi melakukan kegiatan-kegiatan sosial di tengah masyarakat.

Salah satu program PermataBank di tahun 2002 adalah buka puasa bersama masyarakat di sekitar Kantor Pusat PermataBank, perayaan keagamaan yang melibatkan segenap jajaran PermataBank, donor darah rutin setiap triwulan serta seminar-seminar dengan topik yang relevan dan menjadi kebutuhan karyawan dan masyarakat.

Program-program sosial lain yang dilakukan oleh PermataBank yang merupakan satu bukti kepedulian manajemen PermataBank antara lain Perayaan Natal Bersama Persekutuan Doa PermataBank Tower I yang dihadiri oleh Direktur Utama dan jajaran Direksi PermataBank.

Untuk waktu ke depan PermataBank memiliki komitmen untuk terus meningkatkan peran sertanya dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, seiring dengan membaiknya kinerja dan kemampuan PermataBank.

DEWAN KOMISARIS *komisaris*

DR. Aditiawan Chandra

Komisaris Utama, 53 tahun

Warga Negara Indonesia, Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Jakarta (1977) dan memperoleh gelar Msc dari Univ. of Wisconsin, Madison, USA (1979) dan gelar Ph.D dari Univ. of North Carolina Chapel Hill, USA (1985).

Mengawali karir tahun 1975 di Program Perencanaan Nasional sebagai Asisten Pengajar. Lalu di berbagai kantor konsultan perencanaan dan konsultan manajemen perusahaan, menjadi Senior Riset / Kepala (1987 - 2000) di Lembaga Manajemen, dan menjabat sebagai *Managing Director* untuk Asosiasi Manajemen-The Flager Management Group yang menangani konsultasi pengembangan BTN dan Kebijakan Rumah Murah-Kantor Menpera dengan dana dari The World Bank. Beliau diangkat sebagai Anggota Komisaris di PT Semen Padang (1990 – 1995) dan juga Asmen I Bidang Iklim Investasi dan Deputi Perencanaan pada Kantor Menteri Negara Investasi / BKPM (1994 - 1997). Beliau juga menjabat sebagai Direktur Program Magister Manajemen MM UI (1996 - 2000), Anggota Komisaris pada PT Bank Internasional Indonesia Tbk (1999 – 2001), Dekan Fakultas Ekonomi UI (2001 – sekarang) dan juga *Advisory Committee* pada BPPN untuk program divestasi saham PT Bank Niaga Tbk (2001). Terhitung sejak 31 Oktober 2002 diangkat sebagai Komisaris Utama PermataBank.

I Nyoman Suwandha, SH*

Komisaris, 64 tahun

Warga Negara Indonesia, lulusan Fakultas Hukum Universitas Airlangga (1961) dengan spesialisasi dalam jurusan Kepidanaan. Mengawali karier di bidang hukum dengan menjadi Jaksa di Direktorat Reserse Pusat Kejaksaan Agung Republik Indonesia (1961 – 1966). Diangkat menjadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (1993 – 1995) dan kemudian menjadi Wakil Jaksa Agung sampai pensiun pada Februari 1997. Sejak tahun 1997 hingga saat ini menjabat sebagai Direktur Konsultan Hukum Katon & Partners. Pada bulan Desember 1998 diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bank Bali Tbk, sejak Juli 1999 ditunjuk oleh BPPN sebagai anggota Tim Pengawas PT Bank Bali Tbk, pada bulan November 2000 ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Bank Bali Tbk. Terhitung sejak 31 Oktober 2002 menjabat sebagai Komisaris PermataBank.

*) Efektif tanggal 31 Januari 2003 mengundurkan diri selaku Komisaris PermataBank.

DR. Lukita Dinarsyah Tuwo

Komisaris, 42 tahun

Warga Negara Indonesia, Sarjana Teknik Industri ITB (1985) dan memperoleh gelar MA di bidang Ekonomi dari Vanderbilt University, Nashville, USA (1992) dan gelar PhD Ekonomi diraihnya pada University of Illinois, Urbana Champaign, USA (1998).

Mengawali karirnya di PT Unilever Indonesia sebagai *Management Trainee, Production Planner,* Elida Gibbs Division (1986 - 1987). Kemudian menjadi Staf Biro Perencanaan Makro dan Studi Kuantitatif (1987 - 1998). Selanjutnya menjadi Direktur Neraca Pembayaran dan Kerjasama Ekonomi International (NPKEI) (1998 - sekarang) sekaligus anggota Delegasi Republik Indonesia untuk berbagai forum kerjasama ekonomi internasional seperti UNCTAD, ESCAP, dan Konferensi PBB untuk *Financing for Development*. Selain itu juga staf pengajar tidak tetap di Program MM Universitas Bina Nusantara (1999 - sekarang), Anggota Sekretariat Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) (2000 - Maret 2002) dan Sekretaris Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) (April 2002 - sekarang). Terhitung sejak 31 Oktober 2002 diangkat sebagai Komisaris PermataBank.

DR. Tirta Hidayat

Komisaris, 44 tahun

Warga Negara Indonesia, Sarjana Ekonomi di UI (1985). Memperoleh gelar MS (1987) dan gelar PhD (1991) dari Cornell University, New York, USA.

Sejak tahun 1985 hingga saat ini beliau mengajar pada beberapa universitas antara lain UI, Universitas Syah Kuala, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Banten), STEKPI, Sesko ABRI, Sesko Angkatan Udara dan Sekolah Staf Pimpinan Polisi. Karirnya di pemerintahan dimulai di Bappenas sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Pengkajian Ekonomi Makro (April 1993 - September 1998), dan kemudian sebagai Kepala Biro Tenaga Kerja (Oktober 1998 - Maret 2000). Selanjutnya menjadi Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Agustus - Juli 2000). Selama di Bappenas beliau ditugaskan sebagai Anggota Kelompok Kerja II pada Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina (Juni 1993 - Januari 1999) dam sebagai Sekretaris Kelompok Kerja (Februari 1999 - Desember 2000). Juga sebagai Komisaris PT Pelabuhan Indonesia IV (Oktober 1996 – Agustus 1998) dan III (Oktober 1998 - sekarang). Terhitung sejak 31 Oktober 2002 diangkat sebagai Komisaris PermataBank.

'02 JUN 11 13:40

Dradjat Bagus Prasetyo

Komisaris, 47 tahun

Warga Negara Indonesia, Sarjana Ekonomi UI, (1982) dan memperoleh gelar MBA dari Golden Gate University, San Fransisco, USA (1986).

Meniti karir di perbankan sejak tahun 1981 di PT Bank Duta melalui *Officer Development Program*, dilanjutkan sebagai *Treasury Officer* (1982 - 1984), *Dept. Head* Ekspor Impor (1984 - 1986), *Dept. Head Retail Banking* (1986 - 1987), Wakil Pemimpin Cabang Denpasar (1987 - 1989), Pemimpin Cabang Denpasar (1989 – 1991), *Group Head International Banking* PT Bank Duta Kantor Pusat (1991 – 1992). Selanjutnya menjabat sebagai Direktur Operasi di PT Bank Putera Sukapura (Agustus 1992 - September 1993), bergabung di perusahaan *Multi Finance* (PT Swadinamika) sebagai Direktur Operasi (September 1993 – Agustus 1996). Menjabat sebagai Direktur Operasi di PT Bank Mashill Utama (1996 - 1998), Direktur *Treasury & International Banking* (1998), dan Direktur Utama (Oktober 1998 - Maret 1999). Sebagai Anggota Tim Pengelola PT Bank Duta (Maret 1999 - Februari 2000) dan menjadi Ketua Tim Pengelola (Februari 2000 - Juni 2000). Bergabung di PT Bank Bali Tbk sebagai Anggota Tim Pengelola (Juni - November 2000) dan selanjutnya menjabat sebagai Direktur Utama (November 2000 - September 2002). Mulai 30 September hingga 31 Oktober 2002, menjabat sebagai Direktur Utama di PT Bank Permata Tbk, dan terhitung sejak 31 Oktober 2002 menjabat sebagai Komisaris PermataBank.

.

Deswandhy Agusman

Komisaris, 43 tahun

Warga Negara Indonesia, Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1985) dan memperoleh gelar MBA dari University of Denver, Colorado, USA (1988). Sebagai *Risk Manager* di Citibank N.A. Jakarta (1989 – 1990) dan *Syndication Manager* PT Nomura Indonesia (1990 – 1991), *Managing Director* PT Peregrine Sewu Securities (1991 – 1998), Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) (1999 – 2000), dan Komisaris Utama PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (1999 – sekarang). Sementara itu di bidang Pemerintahan, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal bidang Pembiayaan, Departemen Koperasi & UKM Republik Indonesia (1998 – 1999). Kemudian menjadi Deputi Menteri Negara Koperasi & UKM Republik Indonesia (1999 – 2001) dan Staf Ahli Menteri Negara Koperasi & UKM Republik Indonesia (2001 – sekarang). Terhitung sejak 31 Oktober 2002 diangkat sebagai Komisaris PermataBank.

Ichsanuddin Noorsy

Komisaris, 44 tahun

Warga Negara Indonesia, Sarjana Muda Teknik Mesin dari Akademi Teknik Industri Tekstil UPN Veteran, Jakarta (1981). Memperoleh gelar Sarjana Hukum Tata Negara (1987) dari Fakultas Hukum UI dan Magister Sains dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI (2001). Mengawali karirnya sebagai wartawan di Grafiti Pers (1982 – 1983) dan di Citra Media (1984 - 1986), karirnya terus meningkat hingga menjabat Redaktur di perusahaan tersebut (1986 - 1987), dilanjutkan menjadi penulis profesional dan *media relations* di berbagai perusahaan *Public Relations*. Kemudian menjabat sebagai Manager Kredit dan *Remedial Loan* di PT BAA dan PT Bank Summa (1989 - Mei 1992). Sejak 1989 sampai sekarang menjadi Pembicara atau Moderator dalam berbagai Seminar dan Diskusi di dalam dan di luar negeri, menulis di berbagai media cetak, Pembicara dalam berbagai program *talk show* di radio dan televisi. Direktur Umum pada Perusahaan Pelayaran Nasional dan Layanan Kepelabuhan (1992 – 1997), dan Anggota DPR-RI Komisi VIII (1997 – 1999). *Senior Partner* dijabatnya di DSP Law Firm (1998 – sekarang), dan Staf Ahli Jaksa Agung di Kejaksaan Agung RI (1999 – 2001). Terhitung sejak 31 Oktober 2002 diangkat sebagai Komisaris PermataBank.

DIREKSI *direksi*

Agus D.W. Martowardojo

Direktur Utama, 47 tahun

Warga Negara Indonesia, Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1984). Mengikuti berbagai *Banking & Management Courses* termasuk di State University of New York, Buffalo, USA, Stanford University, Palo Alto, USA dan Institute of Banking & Finance, Singapore.

Memulai karir di Bank of America NT & SA (1984) melalui *Officer Development Program* dan sebagai *International Loan Officer*, PT Bank Niaga Tbk sebagai *Vice President, Corporate Banking Group* di Jakarta dan Surabaya (1986 – 1994). Menjabat *Deputy Chief Executive Officer* di Maharani Holding (1994), Direktur Utama di Bank Bumiputera (1995 – 1998) dan Direktur Utama di Bank Ekspor Impor Indonesia (1998).

Menjabat sebagai *Managing Director Risk Management and Credit Restructuring* di Bank Mandiri (1999), *Managing Director Retail Banking and Operation Coordinator* (2000), dan *Managing Director Human Resources and Support Services* (2001). Ditunjuk sebagai *Advisor* bagi Ketua dan Wakil Ketua BPPN untuk bidang Perbankan (2002). Terhitung sejak 31 Oktober 2002 diangkat sebagai Direktur Utama PermataBank.

Chandra Purnama

Wakil Direktur Utama, 49 tahun

Warga Negara Indonesia, lulusan Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta (1979) dan memperoleh gelar MBA dari Baldwin-Wallace College, Ohio, USA (1986).

Mengawali karirnya di PT BNI Tbk bagian Pengelola Kredit Nasabah (1979), Divisi *Treasury* (1988 - 1993), pemimpin beberapa cabang/wilayah (1993 – 1997), *Deputy General Manager* Divisi Sindikasi dan Jasa Keuangan (1997 – 1998) dan *General Manager* BNI *Card Center* (1998 - 2000).

Menjabat sebagai Deputi Ketua *Risk Management* di BPPN (2000), Deputi Ketua Administrasi dan Dukungan Kerja (2000 - 2001). Ditunjuk oleh BPPN sebagai anggota Tim Pengawas PT Bank Bali Tbk (November 2001) dan selanjutnya sebagai Komisaris PT Bank Bali Tbk, dan sebagai *Project Director* Merger lima bank (Juni 2002). Terhitung sejak 31 Oktober 2002 diangkat sebagai Wakil Direktur Utama PermataBank.

Elvyn G. Masassya

Direktur *Compliance & Corporate Secretary*, 36 tahun

Warga Negara Indonesia, Sarjana Ekonomi dari Universitas Jayabaya (1990), meraih gelar MM dari ITB (2000).

Memulai karirnya sebagai Peneliti di Encona Consultant (1990) dan sebagai Analis Kredit di Clemont Finance (1991). Karir di dunia perbankan dirintis di PT BNI Tbk sebagai Pengelola Kredit Ritel, Menengah dan *Problem Loan* Korporasi di berbagai daerah dan kantor pusat PT BNI Tbk (1991 - 1994), dilanjutkan sebagai *Strategic Planning Manager* (1995 - 1996), *Senior Economist* (1997 - 1999) serta *Group Head of Corporate Relations* (2000).

Menjabat sebagai Komisaris PT Bank Bali Tbk (Mei - November 2002). Terhitung sejak 31 Oktober 2002 diangkat sebagai Direktur PermataBank.

Joseph Georgino Godong

Direktur *Finance & Information Services*, 40 tahun

Warga Negara Indonesia, Sarjana Tehnik Elektro, Universitas Trisakti, Jakarta (1986).

Karirnya di dunia perbankan dimulai di PT Bank Bali Tbk melalui *Officer Development Program* (1986), *Commercial Banking Department* (1987-1989), *Head of Retail Banking Department* (1990 -1994) dan *System and Operation Group Head* (1994).

Menjabat sebagai *Center Manager Credit Card Issuing Business* (1996 - 1998), *General Manager Individual Marketing* (Oktober 1998). Diangkat menjadi Direktur PT Bank Bali Tbk (Desember 1998) dan ditunjuk sebagai Tim Pendukung dari Tim Pengelola yang menangani *Individual Financial Services* (Juli 1999).

Menjabat sebagai Direktur pada salah satu perusahaan jasa (Juni 2000), kemudian menjadi Direktur PT Bank Bali Tbk (November 2000). Disamping itu tercatat sebagai *Honorary Associate* (Ahli Honoris) pada Institute Bankir Indonesia (Mei 1999 - sekarang). Terhitung sejak 31 Oktober 2002 menjabat sebagai Direktur PermataBank.

Andrew Hardi Hanubrata

Direktur *Commercial Banking I & Recovery*, 44 tahun

Warga Negara Indonesia, lulusan Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Katholik Parahyangan, Bandung (1986).

Mengawali karir di perusahaan distributor (1977 – 1986), bergabung dengan PT Bank Bali Tbk melalui *Officer Development Program* (1986), *Marketing Officer* (1987 - 1988) dan *Commercial Marketing Head* untuk Bandung dan sekitarnya (1990).

Menjabat sebagai *Middle Marketing Segment Head* se-Jabotabek (1991), *Middle Marketing Segmen Head* untuk wilayah Jawa Timur dan Indonesia Timur (1993), *Chief* Pembina Bisnis Unit di Jawa Timur dan Indonesia Timur dan *General Manager* untuk *Middle Marketing* seluruh Indonesia (1995). Dipercaya sebagai Pembina Unit Special *Assets Management* untuk wilayah Surabaya, Bandung dan Jakarta (1997), diangkat sebagai Direktur PT Bank Bali Tbk (Desember 1998). Menjabat sebagai Tim Pendukung dari Tim Pengelola (Juli 1999) yang bertanggung jawab atas *Strategic Planning*, dan kembali diangkat menjadi Direktur PT Bank Bali Tbk (November 2000). Terhitung sejak 31 Oktober 2002 menjabat sebagai Direktur PermataBank.

Ongki Wanadjati Dana

Direktur *Commercial Banking II & Value Chain*, 46 tahun

Warga Negara Indonesia, Sarjana Teknik Mesin ITB (1981).

Memulai karir di Citibank N.A. melalui *Executive Development Program* Trainee (1982). Diangkat menjadi *Account Officer Corporate Banking* (1982 – 1983), *Lease Officer* (1984 – 1986), *Account Officer Remedial Management* (1986 – 1987) dan *Credit Cycle Manager Consumer Banking* (1987 – 1990).

Ditunjuk oleh PT Bank Subentra sebagai Direktur Kredit (1990 – 1993), dan menjabat sebagai Presiden Direktur (1993 – 1998).

Dipercaya sebagai Tim Pemberesan Bank Subentra di BPPN (1998-1999). Menjabat sebagai *Senior Advisor Risk Management* di PT Bank Universal Tbk (1999) dan Wakil Presiden Direktur (2000-2002) yang membawahi *Automotive Business, Treasury & International Banking*. Ditunjuk oleh BPPN sebagai anggota Tim Pengelola PT Bank Universal Tbk (2002). Terhitung sejak 31 Oktober 2002 diangkat sebagai Direktur PermataBank.

Mahdi Syahbuddin

Direktur *Banking Operations*, 42 tahun

Warga Negara Indonesia, Sarjana Teknik Penerbangan, ITB (1987).

Awal karirnya dimulai di Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) sebagai *Junior Engineer* (1985 – 1987) dan Atlantic Richfield (ARCO) Indonesia sebagai *Senior Engineer* (1987 – 1989). Karir di dunia perbankan diawali di Citibank N.A. melalui *Management Associate Program* di *Global Consumer Banking*. Diangkat menjadi *Manager Loans Operations Department* (1989 - 1990), *Manager Loan Operations* cabang Surabaya dan *Assistant Manager Asset Product Services Department Head* Citibank Jakarta (1991).

Menjabat sebagai *Consumer Banking Operations Head* PT Bank Universal Tbk (1992 – 1994), *Retail Banking Operations Head* (1996), *Operations Head* (1997) dan *Human Resources Management Head* (1997 - 1998). Dipercaya sebagai Direktur *Operations, Information Technology & Human Capital* (1998 - 1999) dan Direktur *Information Technology, Human Capital & Compliance* (2000).

Diangkat sebagai *Deputy President Director* (2000 - 17 Mei 2002) dan dipercaya sebagai Ketua Tim Pengelola PT Bank Universal Tbk (18 Mei 2002 - 30 September 2002). Terhitung sejak 31 Oktober 2002 diangkat sebagai Direktur PermataBank.

Irman Alvian Zahiruddin

Direktur *Retail Banking*, 39 tahun

Warga Negara Indonesia, Sarjana lulusan San Joaquin Delta College, Stockton, California, (1985). Memperoleh gelar BA dari University of The Pacific, Stockton, California (1987) dan gelar MBA dari Golden Gate University, San Fransisco (1988).

Mengawali karir di Citibank N.A. melalui *Management Development Program* (1989), dan menduduki berbagai posisi hingga menjabat sebagai Citibank *Area Director Card Products East Indonesia* (1994). Berkarir di PT General Electric Capital Indonesia (1994 - 2002) antara lain sebagai *Chief Operating Officer, Acting Managing Director, Senior Director Business Development* dan *Quality Leader*. Pada periode itu beliau juga pernah menjabat General Electric *Capital Representative Director to* PT Astra Sedaya Finance sebagai *Financial Planning/Chief Quality Officer* dan *Chief Information & Technology Officer*. Disamping itu menjabat sebagai *Vice Chairman* bidang Regulasi pada Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) sampai tahun 2002. Terhitung sejak 31 Oktober 2002 diangkat sebagai Direktur PermataBank.

TANDA TANGAN PERSETUJUAN

Semua lampiran dari Laporan Tahunan 2002 ini telah disetujui oleh:

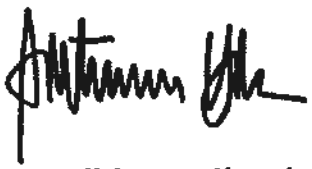

DR. Aditiawan Chandra
Komisaris Utama

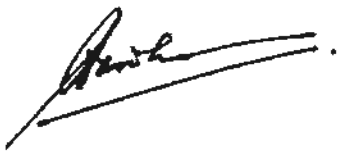

I Nyoman Suwandha
Komisaris

DR. Lukita D. Tuwo
Komisaris

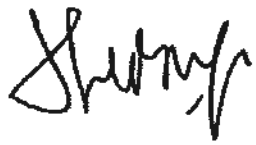

DR. Tirta Hidayat
Komisaris

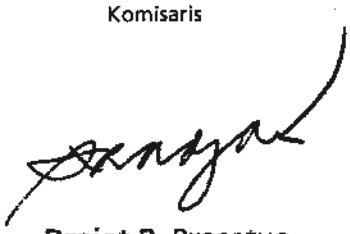

Drajat B. Prasetyo
Komisaris

Deswandhy Agusman
Komisaris

Ichsanuddin Noorsy
Komisaris

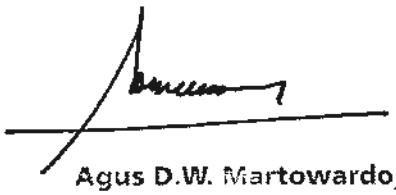

Agus D.W. Martowardojo
Direktur Utama

Chandra Purnama
Wakil Direktur Utama, Direktur *Treasury, Human Resources & Risk Management*

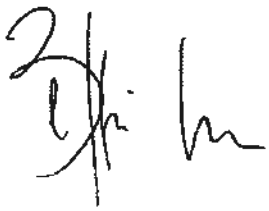

Elvyn G. Masassya
Direktur *Compliance & Corporate Secretary*

J. Georgino Godong
Direktur *Finance & Information Services*

Andrew H. Hanubrata
Direktur *Commercial Banking I & Recovery*

Ongki W. Dana
Direktur *Commercial Banking II & Value Chain*

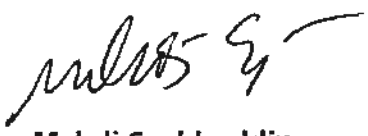

Mahdi Syahbuddin
Direktur *Banking Operations*

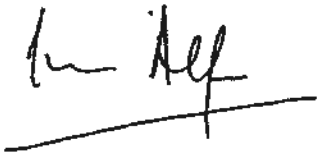

Irman A. Zahiruddin
Direktur *Retail Banking*

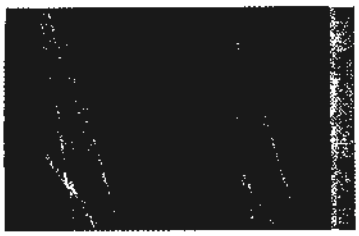

akuntan publik

LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Laporan Keuangan Konsolidasi
Dengan Laporan Auditor Independen
31 Desember 2002
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2001
(Mata Uang Indonesia)

PT BANK PERMATA Tbk (dahulu PT BANK BALI Tbk)
DAN ANAK PERUSAHAAN

PT BANK PERMATA Tbk (dahulu PT BANK BALI Tbk) DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
DENGAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
31 DESEMBER 2002
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2001

Daftar Isi

	Halaman
Laporan Auditor Independen	50
Neraca Konsolidasi	53
Laporan Laba Rugi Konsolidasi	58
Laporan Perubahan Ekuitas (Defisiensi Modal) Konsolidasi	60
Laporan Arus Kas Konsolidasi	61
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasi	63

ERNST & YOUNG

Prasetio, Sarwoko & Sandjaja
Kantor Akuntan Publik Terdaftar, Izin Usaha No. Kep-191/KM.6/2002

Gedung Bursa Efek Jakarta
Menara I, Lantai 13
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Indonesia
Telp: (62-21) 515 1960
Fax: (62-21) 515 1920

Wisma 46, Kota BNI
Lantai 25-28 & 30-31
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220
Indonesia
Telp: (62-21) 573 7999
Fax: (62-21) 574 4521

www.ey.com

Laporan Auditor Independen

Laporan No. RPC-0181/02

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Bank Permata Tbk

Kami telah mengaudit neraca konsolidasi PT Bank Permata Tbk (dahulu PT Bank Bali Tbk) dan Anak perusahaan tanggal 31 Desember 2002, serta laporan laba rugi konsolidasi, laporan perubahan ekuitas konsolidasi dan laporan arus kas konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Bank. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Laporan keuangan konsolidasi PT Bank Bali Tbk dan Anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001 telah diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya tertanggal 28 Maret 2002 menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut sebelum penyajian kembali, seperti diuraikan pada paragraf keempat dan Catatan 50 atas laporan keuangan konsolidasi, serta penjelasan tambahan mengenai penyajian kembali dan reklasifikasi laporan keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000 agar sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 (Revisi 2000) "Akuntansi Perbankan" dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) serta dampak kondisi ekonomi terhadap Bank dan Anak perusahaan. Kami tidak mengaudit laporan keuangan PT Bank Prima Express (Primex), PT Bank Artamedia (Artamedia) dan PT Bank Patriot (Patriot) masing-masing untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2002 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001. Laporan-laporan keuangan tersebut telah tercakup dalam laporan keuangan konsolidasi PT Bank Permata Tbk dan Anak perusahaan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2002 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001, sehubungan dengan peleburan usaha tiga Bank Dalam Penyehatan (BDP) tersebut di atas (Primex, Artamedia dan Patriot) dengan PT Bank Permata Tbk, yang efektif pada tanggal 30 September 2002, di mana jumlah aktiva 3 bank tersebut secara bersama-sama masing-masing mencerminkan 5,94% dan 9,48% dari jumlah aktiva konsolidasi pada tanggal 30 September 2002 dan 31 Desember 2001. Laporan keuangan 3 BDP tersebut telah diaudit oleh auditor independen lain dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, kecuali laporan keuangan Primex dan Patriot untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001 masing-masing dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan penekanan khusus dan tidak memberikan pendapat. Kami tidak mengaudit laporan keuangan PT Bank Universal Tbk (Universal) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001 yang laporan keuangannya mencerminkan 41,8% dari jumlah aktiva konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001. Laporan keuangan tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang tidak memberikan pendapat. Kami juga tidak mengaudit laporan keuangan Anak perusahaan yang dikonsolidasi yang laporan keuangannya mencerminkan jumlah aktiva dan jumlah pendapatan operasional masing-masing sebesar 0,10% dan 0,04% dari jumlah konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002. Laporan keuangan tersebut diaudit oleh auditor independen lain dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan dari auditor-auditor independen lain untuk laporan keuangan 3 BDP dan Universal serta Anak perusahaan telah diserahkan kepada kami, dan pendapat kami, sepanjang yang berkaitan dengan jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan 3 BDP dan Universal serta Anak perusahaan tersebut semata-mata hanya didasarkan atas laporan auditor-auditor independen lain tersebut.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami dan laporan auditor independen lain memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

ERNST & YOUNG

Menurut pendapat kami, berdasarkan audit kami dan laporan auditor-auditor independen lain tersebut, laporan keuangan konsolidasi tahun 2002 yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Permata Tbk (dahulu PT Bank Bali Tbk) dan Anak perusahaan tanggal 31 Desember 2002, hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Seperti diuraikan pada Catatan 3 atas laporan keuangan konsolidasi, berdasarkan Akta Merger yang diaktakan pada tanggal 27 September 2002, Bank dan bank-bank yang menggabungkan diri, yang terdiri dari Universal, Primex, Artamedia dan Patriot (4 bank) dengan persetujuan rapat umum luar biasa pemegang saham telah sepakat melakukan peleburan usaha. Peleburan usaha ini menjadi efektif sejak disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2002. Catatan 50 atas laporan keuangan konsolidasi mengungkapkan pengaruh dari peleburan usaha. Sehubungan dengan peleburan usaha tersebut, laporan keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001 telah disajikan kembali untuk tujuan perbandingan. Menurut pendapat kami, penyajian kembali tersebut adalah memadai dan telah dilaksanakan dengan benar. Namun, kami tidak terlibat dalam pemeriksaan, review, atau pelaksanaan prosedur apapun terhadap laporan keuangan konsolidasi Bank tahun 2001, kecuali atas penyajian kembali, sehingga, kami tidak menyatakan pendapat atau bentuk keyakinan yang lain atas laporan keuangan konsolidasi 2001 secara keseluruhan.

Seperti diuraikan pada Catatan 48d atas laporan keuangan konsolidasi, pada tanggal 24 September 1999, PT Era Giat Prima (EGP) mengajukan gugatan terhadap Bank sehubungan dengan perjanjian pengalihan/"cessie" atas tagihan PT Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dan PT Bank Umum Nasional (BUN) dari Bank kepada EGP. Gugatan ini timbul karena Bank dianggap telah melakukan wanprestasi. Oleh karena itu EGP mengajukan sita terhadap tanah dan bangunan milik Bank yang dikenal sebagai Bank Bali Tower dan Bintaro serta ganti kerugian sebesar Rp 2,5 triliun dan meminta agar dinyatakan sebagai pemilik dana hasil pencairan piutang tersebut yang diletakkan dalam "Escrow Account" di bawah pengawasan Bank Indonesia sebesar Rp 546,4 milyar. Berdasarkan pendapat konsultan hukum Bank tanggal 18 Maret 2003, bahwa sampai saat ini perkara tertanggal 24 September 1999 masih diproses di tingkat Mahkamah Agung sehingga belum bisa diprediksi hasilnya. Tetapi tambahan atas perkara yang sama di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang terdaftar di bawah No. 148/G.TUN/1999/PTUN-JKT (lihat Catatan 48e), BPPN yang membatalkan perjanjian cessie itu dianggap sah oleh pengadilan. Dengan demikian EGP tidak berhak atas perjanjian cessie itu. Bila merujuk pada putusan ini maka Mahkamah Agung akan memenangkan Bank kecuali ada inkonsistensi. Seperti diuraikan pada Catatan 15, sesuai dengan surat ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kepada Bank, keduanya tertanggal 28 Desember 1999 serta surat tanggal 23 Februari 2000, BPPN menjamin realisasi tagihan kepada EGP sebesar Rp 546,4 milyar tersebut di atas. Seperti diuraikan pada Catatan 48e, sesuai dengan surat BPPN tertanggal 6 Agustus 2002, telah disampaikan antara lain hal-hal sebagai berikut: bahwa Mahkamah Agung RI telah mengabulkan permohonan kasasi BPPN melalui keputusan tanggal 4 Maret 2002 antara EGP melawan BPPN di Peradilan Tata Usaha Negara dengan objek sengketa SK Ketua BPPN tanggal 15 Oktober 1999 tentang Pembatalan Perjanjian Pengalihan (Cessie) Tagihan antara Bank dengan EGP, yang pada intinya menolak gugatan dari EGP dan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 29 Februari 2000 Jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tanggal 26 Juli 2000, bahwa dengan demikian, maka SK Ketua BPPN tanggal 15 Oktober 1999 tersebut adalah sah sehingga Perjanjian Cessie dan perjanjian-perjanjian penyelesaian antara EGP dan Bank menjadi batal. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, Bank belum memperoleh data bahwa EGP telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali atas putusan kasasi tersebut.

ERNST & YOUNG

Seperti diuraikan pada Catatan 43 atas laporan keuangan konsolidasi, kondisi ekonomi Indonesia di tahun 2002 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2001. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan beberapa indikator ekonomi, seperti nilai tukar Rupiah yang cenderung stabil, suku bunga yang cenderung menurun dan minat investasi yang membaik. Sebagaimana dijelaskan pada Catatan 46a atas laporan keuangan konsolidasi, pada tanggal 23 Juli 1999, Bank telah ditempatkan dalam pengelolaan BPPN dan kemudian status Bank telah diubah menjadi Bank Take Over (BTO). Berdasarkan surat keputusan Ketua BPPN tanggal 4 Agustus 1999 Bank telah ditetapkan sebagai peserta program rekapitalisasi BTO. Untuk memenuhi persyaratan modal minimum, Bank melakukan Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Rights Issue) III sesuai dengan surat keputusan Ketua BPPN tanggal 29 November 1999. Setelah program rekapitalisasi tersebut, Bank telah memenuhi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai dengan yang disyaratkan Bank Indonesia. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001, Bank telah memperoleh laba bersih konsolidasi sebesar Rp 216.125 juta. Seperti diuraikan dalam paragraf keempat dan Catatan 3 atas laporan keuangan konsolidasi, Bank telah melakukan peleburan usaha dengan Universal, Primex, Artamedia dan Patriot, di mana peleburan usaha ini menjadi efektif pada tanggal 30 September 2002. Sehubungan dengan itu BPPN melakukan penyertaan modal sementara dalam Bank sebesar Rp 4,6 triliun melalui penempatan terbatas. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002, Bank masih mengalami rugi bersih konsolidasi sebesar Rp 808.221 juta yang terutama disebabkan biaya merger sebesar Rp 482.248 juta dan penyisihan kerugian atas aktiva produktif sebesar Rp 342.336 juta. Pada tahun 2002, Bank telah memenuhi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai dengan yang disyaratkan Bank Indonesia, tetapi Bank belum memenuhi rasio "non performing loan" (NPL), Posisi Devisa Neto (PDN) dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Laporan keuangan konsolidasi terlampir mencakup dampak kondisi ekonomi tersebut, sepanjang hal itu dapat ditentukan dan diperkirakan. Pemulihan kondisi ekonomi tersebut tergantung pada kebijakan moneter, fiskal dan kebijakan lainnya yang telah dan akan diambil oleh Pemerintah Indonesia, suatu tindakan yang berada di luar kendali Bank dan Anak perusahaan. Oleh karena itu, tidaklah mungkin untuk menentukan dampak masa depan kondisi ekonomi terhadap pendapatan dan realisasi aktiva produktif Bank dan Anak perusahaan, termasuk dampak mengalirnya dana nasabah, kreditur, deposan, dan pemegang saham ke dan dari Bank dan Anak perusahaan.

PRASETIO, SARWOKO & SANDJAJA

Drs. Ruddy Koesnadi
NIAP 98.1.0063

21 Maret 2003

PT BANK PERMATA Tbk (dahulu PT BANK BALI Tbk) DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASI
31 Desember 2002
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2001
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Data Saham)

	Catatan	2002	2001 (Disajikan Kembali - Lihat Catatan 50)
AKTIVA			
KAS	2a, 4	518.633	331.655
GIRO PADA BANK INDONESIA	2a, 5	1.354.090	1.085.482
GIRO PADA BANK LAIN	2a, 2c, 2j, 6	119.324	282.256
Penyisihan kerugian		(1.070)	(2.774)
Bersih		118.254	279.482
PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN	2d, 2j, 7	2.683.543	1.250.166
Penyisihan kerugian		(90.406)	(112.651)
Bersih		2.593.137	1.137.515
EFEK-EFEK	2e, 2i, 2j, 8, 30		
Diperdagangkan			
Pihak ketiga		1.328.640	43.570
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		2.775.771	927.080
Tersedia untuk dijual			
Pihak ketiga		12.927	1.038
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		645.116	2.330.886
Dimiliki hingga jatuh tempo			
Pihak ketiga		425.172	2.409.240
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		8.270.674	6.590.475
Jumlah efek-efek		13.458.300	12.302.289
Penyisihan kerugian		(31.430)	(32.442)
Bersih		13.426.870	12.269.847
TAGIHAN DERIVATIF	2f, 2i, 2j, 9, 30		
Pihak ketiga		2.082	2.784
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		-	845
Penyisihan kerugian		(21)	(41)
Bersih		2.061	3.588
KREDIT YANG DIBERIKAN	2g, 2i, 2j, 2t, 10, 19, 30		
Pihak ketiga		8.915.001	9.764.261
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		10.839	210.223

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

PT BANK PERMATA Tbk (dahulu PT BANK BALI Tbk) DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASI (lanjutan)
31 Desember 2002
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2001
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Data Saham)

	Catatan	2002	2001 (Disajikan Kembali - Lihat Catatan 50)
Pendapatan bunga ditangguhkan		(12.038)	-
Penyisihan kerugian		(1.718.919)	(1.399.384)
Bersih		7.194.883	8.575.100
TAGIHAN PREMI	2k, 11	14.427	12.776
TAGIHAN AKSEPTASI	2h, 2i, 2j, 12, 30		
Pihak ketiga		57.038	55.965
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		-	6.805
Penyisihan kerugian		(4.316)	(628)
Bersih		52.722	62.142
AKTIVA PAJAK TANGGUHAN - Bersih	2y, 22	385.620	323.209
PENYERTAAN SAHAM	2b, 2g, 2j, 10, 13		
Metode Ekuitas		5.687	80.721
Metode Biaya			
Tidak dalam rangka restrukturisasi kredit		10.037	10.375
Dalam rangka restrukturisasi kredit		69.908	194.508
Penyisihan kerugian		(57.581)	(148.938)
Bersih		28.051	136.666
AKTIVA TETAP	2i, 2m, 14, 30, 41		
Nilai tercatat		1.022.076	1.159.503
Akumulasi penyusutan		(293.383)	(377.788)
Nilai buku		728.693	781.715
AKTIVA LAIN-LAIN			
Tagihan lain-lain	15	546.466	546.466
Agunan diambil alih - bersih	2n, 15	467.426	466.861
Bunga masih akan diterima	15	375.131	407.549
Biaya dibayar di muka	2l, 15	34.169	45.732
Lain-lain	2b, 2m, 2o, 15	186.899	147.850
Jumlah Aktiva Lain-lain		1.610.091	1.614.458
JUMLAH AKTIVA		**28.027.532**	**26.613.635**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

PT BANK PERMATA Tbk (dahulu PT BANK BALI Tbk) DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASI (lanjutan)
31 Desember 2002
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2001
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Data Saham)

	Catatan	2002	2001 (Disajikan Kembali - Lihat Catatan 50)
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN SEGERA	15, 16	1.095.353	783.731
SIMPANAN			
Giro	2i, 2p, 17, 30		
Pihak ketiga		4.168.080	3.405.824
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		3.616	661.715
Jumlah Giro		4.171.696	4.067.539
Tabungan	2i, 2p, 18, 30		
Pihak ketiga		2.725.586	2.876.680
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		5.703	7.332
Jumlah Tabungan		2.731.289	2.884.012
Deposito Berjangka	2i, 2p, 19, 30		
Pihak ketiga		14.972.625	14.536.213
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		16.852	729.099
Jumlah Deposito Berjangka		14.989.477	15.265.312
Sertifikat Deposito - bersih	2p	1.994	232.523
Jumlah Simpanan		21.894.456	22.449.386
SIMPANAN DARI BANK LAIN		128.798	102.892
EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI	2q, 8, 20	-	511.993
KEWAJIBAN DERIVATIF	2f, 2i, 9, 30		
Pihak ketiga		-	2.132
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		-	873
Jumlah Kewajiban Derivatif		-	3.005
KEWAJIBAN AKSEPTASI	2h, 21	57.038	62.770
HUTANG PAJAK	2y, 22	883	1.816

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

PT BANK PERMATA Tbk (dahulu PT BANK BALI Tbk) DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASI (lanjutan)
31 Desember 2002
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2001
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Data Saham)

	Catatan	2002	2001 (Disajikan Kembali - Lihat Catatan 50)
SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN	2i, 23, 30		
Pihak ketiga		113.969	267.888
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		298.809	-
Jumlah Surat-surat Berharga yang diterbitkan		412.778	267.888
PINJAMAN YANG DITERIMA	8, 10, 24, 30		
Pihak ketiga		1.285.879	2.621.736
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		189.046	-
Jumlah Pinjaman yang Diterima		1.474.925	2.621.736
ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI	2j, 25	17.221	23.527
KEWAJIBAN LAIN-LAIN	2r, 2s, 2w, 2x 26, 37, 46	1.749.260	365.987
Jumlah Kewajiban		26.830.712	27.194.731
HAK MINORITAS ATAS AKTIVA BERSIH ANAK PERUSAHAAN	2b	39.568	35.736
EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)			
Modal saham - nilai nominal Rp 500 per saham untuk kelas A dan Rp 5 per saham untuk kelas B pada tahun 2002 dan 2001			
Modal dasar - 672.005.833 saham kelas A dan 452.799.416.700 saham kelas B pada tahun 2002 serta 672.005.833 saham kelas A dan 92.799.416.700 saham kelas B pada tahun 2001			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 672.005.833 saham kelas A dan 192.906.142.242 saham kelas B pada tahun 2002 serta 672.005.833 saham kelas A dan 66.528.577.467 saham kelas B pada tahun 2001	1, 27	1.300.534	668.646
Tambahan modal disetor-agio saham - bersih	1, 27	9.067.496	5.023.052
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	3, 27	(3.240.518)	-

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

PT BANK PERMATA Tbk (dahulu PT BANK BALI Tbk) DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASI (lanjutan)
31 Desember 2002
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2001
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Data Saham)

	Catatan	2002	2001 (Disajikan Kembali - Lihat Catatan 50)
Pro forma akun dari restrukturisasi entitas sepengendali	3, 27, 50	-	(1.130.776)
Rugi yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek yang tersedia untuk dijual	2e, 8	(1.561)	-
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	2b, 28	-	(17.276)
Selisih penilaian kembali aktiva tetap	2m, 14	43.574	43.574
Defisit		(6.012.273)	(5.204.052)
Ekuitas (Defisiensi Modal) - Bersih		1.157.252	(616.832)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**28.027.532**	**26.613.635**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

PT BANK PERMATA Tbk (dahulu PT BANK BALI Tbk) DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2002
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2001
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Laba (Rugi) Bersih Per Saham Dasar)

	Catatan	2002	2001
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan Bunga			
Bunga	2t, 32	2.045.800	1.216.751
Provisi dan komisi	2u	78.927	54.370
Jumlah Pendapatan Bunga		2.124.727	1.271.121
Beban Bunga			
Bunga	2t, 33	1.761.908	1.189.948
Provisi dan komisi	2u	5.880	3.281
Jumlah Beban Bunga		1.767.788	1.193.229
Pendapatan Bunga - Bersih		356.939	77.892
Pendapatan Operasional Lainnya			
Imbalan	2v, 34	102.925	106.857
Keuntungan (kerugian) bersih penilaian efek yang diperdagangkan	2e	54.143	(1.772)
Pendapatan premi	2k	36.148	30.242
Laba selisih kurs - bersih	2f, 2x	24.946	70.587
Keuntungan bersih penjualan efek	2e	16.700	8.838
Pendapatan - bersih dari penyertaan saham (metode ekuitas)	2b, 13	11.416	17.661
Pendapatan dividen (metode biaya)	2b, 13	2.980	83
Lain-lain		20.677	25.177
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya		269.935	257.673
Beban (Pembalikan) Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif	2j	342.336	(121.991)
Beban (Pembalikan) Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	2j, 25	13.022	(46.240)
Beban Merger	46	482.248	-
Beban Operasional Lainnya			
Umum dan administrasi	2m, 2o, 35	295.024	237.013
Tenaga kerja dan tunjangan	2w, 36, 37	293.573	188.617
Lain-lain		59.727	46.924
Jumlah Beban Operasional Lainnya		648.324	472.554

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

PT BANK PERMATA Tbk (dahulu PT BANK BALI Tbk) DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI (lanjutan)
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2002
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2001
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Laba (Rugi) Bersih Per Saham Dasar)

	Catatan	2002	2001
LABA (RUGI) OPERASIONAL	2z, 31	(859.056)	31.242
PENDAPATAN BUKAN OPERASIONAL - Bersih	2b, 2m, 2n, 13, 14, 38	11.201	200.007
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK		(847.855)	231.249
BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK	2y, 22		
Tahun berjalan		3.580	3.686
Tangguhan		(49.757)	4.167
JUMLAH BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK		(46.177)	7.853
LABA (RUGI) SEBELUM HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN		(801.678)	223.396
HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN	2b	(6.543)	(7.271)
LABA (RUGI) BERSIH		**(808.221)**	**216.125**
LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM DASAR	2aa	(8)	3

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

PT BANK PERMATA Tbk (dahulu PT BANK BALI Tbk) DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL) KONSOLIDASI
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2002
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2001
(Dalam Jutaan Rupiah)

	Catatan	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor - Agio Saham - Bersih	Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	Pro forma Akun dari Restrukturisasi Entitas Sepengendali	Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan	Rugi yang Belum Direalisasi Atas Perubahan Nilai Wajar Efek Yang Tersedia Untuk Dijual	Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan	Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	Defisit	Ekuitas (Defisiensi Modal) - Bersih
Saldo 1 Januari 2001											
Dilaporkan sebelumnya		668.646	5.023.052	-	-	17.539	-	140.484	43.574	(5.420.177)	473.118
Penyesuaian beberapa ekuitas 4 BDP yang dialihkan aktiva dan kewajibannya secara retroaktif untuk tujuan perbandingan	3,50	-	-	-	390.980	-	-	-	-	-	390.980
Disajikan kembali		668.646	5.023.052	-	390.980	17.539	-	140.484	43.574	(5.420.177)	864.098
Selisih transaksi perubahan ekuitas Anak Perusahaan	2e, 8	-	-	-	-	(17.539)	-	-	-	-	(17.539)
Penyesuaian atas selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	2b, 28	-	-	-	-	-	-	(157.760)	-	-	(157.760)
Penurunan ekuitas selama tahun berjalan dari entitas sepengendali (4 BDP) yang dialihkan aktiva dan kewajibannya secara retroaktif untuk tujuan perbandingan	3, 50	-	-	-	(1.521.756)	-	-	-	-	-	(1.521.756)
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	-	-	216.125	216.125
Saldo 31 Desember 2001 disajikan kembali		**668.646**	**5.023.052**	**-**	**(1.130.776)**	**-**	**-**	**(17.276)**	**43.574**	**(5.204.052)**	**(616.832)**
Penyertaan modal sementara BPPN dalam rangka peleburan usaha 4 BDP pada Bank	3, 50	555.556	4.044.444	-	-	-	-	-	-	-	4.600.000
Selisih antara kewajiban bersih 4 BDP dengan saham yang diterbitkan kepada pemegang sahamnya dalam rangka peleburan usaha	3, 50	76.332	-	(3.240.518)	1.130.776	-	-	-	-	-	(2.033.410)
Penyesuaian atas rugi yang direalisasi atas perubahan nilai wajar efek yang tersedia untuk dijual		-	-	-	-	-	(1.561)	-	-	-	(1.561)
Penyesuaian atas selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	2b, 28	-	-	-	-	-	-	17.276	-	-	17.276
Rugi bersih tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	-	-	(808.221)	(808.221)
Saldo 31 Desember 2002		**1.300.534**	**9.067.496**	**(3.240.518)**	**-**	**-**	**(1.561)**	**-**	**43.574**	**(6.012.273)**	**1.157.252**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

PT BANK PERMATA Tbk (dahulu PT BANK BALI Tbk) DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2002
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2001
(Dalam Jutaan Rupiah)

	Catatan	2002	2001 (Disajikan Kembali - Lihat Catatan 50)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan bunga, provisi dan komisi		2.099.393	1.272.414
Pendapatan operasional lainnya		36.768	32.347
Pendapatan premi		36.148	30.242
Laba selisih kurs - bersih		4.833	85.008
Pendapatan bukan operasional - bersih		187	78.822
Pembayaran bunga, provisi dan komisi		(1.710.617)	(1.197.339)
Beban operasional lainnya		(610.565)	(430.334)
Hak minoritas atas laba bersih Anak perusahaan		(6.543)	(7.271)
Rugi sebelum perubahan dalam aktiva dan kewajiban operasi		(150.396)	(136.111)
Perubahan dalam aktiva dan kewajiban operasi:			
Penurunan (kenaikan) aktiva operasi:			
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		(1.845.891)	1.314.750
Efek-efek - diperdagangkan		(1.247.249)	640.033
Kredit yang diberikan		9.352	(975.451)
Tagihan premi		(1.651)	(4.745)
Aktiva lain-lain		115.291	30.994
Kenaikan (penurunan) kewajiban operasi:			
Kewajiban segera		311.453	(40.276)
Simpanan bank dan bukan bank			
Giro		231.349	539.426
Tabungan		(95.360)	192.480
Deposito berjangka		(3.337.939)	1.147.483
Sertifikat deposito		(3.552)	-
Simpanan dari bank lain		97.621	-
Kewajiban lain-lain		(295.796)	4.770
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan		12.469	(12.131)
Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi sebelum pembayaran pajak penghasilan		(6.200.299)	2.701.222
Pembayaran pajak penghasilan		(4.513)	(3.468)
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		**(6.204.812)**	**2.697.754**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Hasil penjualan penyertaan saham		103.295	6.000
Penurunan (kenaikan) efek-efek - tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo		65.480	(2.213.361)
Hasil penjualan aktiva tetap dan aktiva yang tidak digunakan lagi		8.513	6.664
Kenaikan hak minoritas atas aktiva bersih Anak perusahaan		3.832	6.133
Penerimaan dividen kas dari penyertaan saham		2.997	1.088

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

PT BANK PERMATA Tbk (dahulu PT BANK BALI Tbk) DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2002
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2001
(Dalam Jutaan Rupiah)

	Catatan	2002	2001 (Disajikan Kembali - Lihat Catatan 50)
Perolehan aktiva tetap		(47.004)	(17.431)
Kenaikan penyertaan saham		(44)	-
Hasil penjualan aktiva bersih satu Anak perusahaan - setelah dikurangi kas yang dilepaskan		-	20.875
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi		**137.069**	**(2.190.032)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Uang muka setoran modal		4.600.000	-
Kenaikan (penurunan) surat-surat berharga yang diterbitkan		144.890	(30.102)
Efek yang dibeli dengan janji dibeli kembali		(44.319)	-
Penurunan pinjaman yang diterima		(18.348)	(698.467)
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		**4.682.223**	**(728.569)**
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		**(1.385.520)**	**(220.847)**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		790.485	1.011.332
Penambahan kas dan setara kas yang diperoleh dari peleburan usaha	3, 50	2.587.082	908.908
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		**1.992.047**	**1.699.393**
Rincian kas dan setara kas adalah sebagai berikut:			
Kas	4	518.633	331.655
Giro pada Bank Indonesia	5	1.354.090	1.085.482
Giro pada bank lain	6	119.324	282.256
Jumlah		**1.992.047**	**1.699.393**
Informasi tambahan arus kas			
Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas:			
Penerbitan saham baru dalam rangka peleburan usaha PT Bank Universal Tbk dengan Bank	3, 50	76.332	-

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

PT BANK PERMATA Tbk (dahulu PT BANK BALI Tbk) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 Desember 2002
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2001
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing, Jumlah Cabang, Jumlah Karyawan, Data Saham Dan Nilai Tukar Mata Uang Asing)

---

1. UMUM

a. Pendirian Bank dan Informasi Umum

PT Bank Permata Tbk (dahulu PT Bank Bali Tbk) didirikan di Indonesia pada tanggal 17 Desember 1954 berdasarkan akta notaris Eliza Pondaag, S.H., No. 228, pengganti dari Raden Mas Soerojo, S.H. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam surat keputusan No. J.A.5/2/2 tanggal 4 Januari 1955 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 22 tanggal 18 Maret 1955, Tambahan No. 292. Anggaran dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M No. 34 tanggal 23 September 2002 mengenai peningkatan modal dasar Bank dari semula sebesar Rp 800.000 menjadi Rp 2.600.000 dengan menambah jumlah saham kelas B menjadi sebanyak 452.799.416.700 saham dan akta notaris A. Partomuan Pohan, S.H.,LL.M No. 45 tanggal 27 September 2002, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh Bank dari semula sebesar Rp 668.646 menjadi Rp 1.300.534 dan pengubahan nama Bank menjadi PT Bank Permata Tbk. Kedua perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia masing-masing dengan Surat Keputusan No. C-18423.HT.01.04.TH.2002 tanggal 24 September 2002 dan No. C-18778.HT.01.04.TH.2002 tanggal 30 September 2002 dan telah diumumkan masing-masing dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 8 Oktober 2002, Tambahan No. 12279/2002 dan 12280/2002 (lihat Catatan 27).

Kantor Pusat Bank berlokasi di Jakarta dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kavling 27. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2002, Bank memiliki 328 kantor cabang dan cabang pembantu domestik. Kantor cabang luar negeri yang berlokasi di Los Angeles, Amerika Serikat telah ditutup pada tanggal 15 Februari 2002, kantor perwakilan Bank di Singapura dan Shanghai telah ditutup masing-masing pada bulan Mei dan September 2001. Kantor cabang luar negeri yang berlokasi di Cayman Island telah ditutup pada tanggal 31 Desember 2002 (lihat Catatan 47).

Bank mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Januari 1955. Bank memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan No. 19371/U.M.II tanggal 19 Februari 1957. Bank juga memperoleh izin untuk menjalankan aktivitas sebagai bank devisa berdasarkan Pengumuman A No. 74 tanggal 25 Mei 1956 dari Lembaga Alat-Alat Pembajaran Luar Negeri Bank Indonesia.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Bank, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan kegiatan umum perbankan. Di samping aktivitas kegiatan umum perbankan, Bank juga memberikan jasa penyimpanan dan penitipan, bertindak sebagai wali amanat (lihat Catatan 42) serta pengelolaan dana pensiun. Setelah peleburan usaha, ruang lingkup kegiatan Bank tidak berubah (lihat Catatan 3).

b. Penawaran Umum Efek Bank

Pada tanggal 15 Januari 1990, berdasarkan izin Menteri Keuangan No. SI-070/SHM/MK.10/1989 tertanggal 2 Desember 1989, 3.999.000 saham Bank dengan jumlah nilai nominal Rp 3.999, telah ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat dan telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Surabaya.

Dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham pada tanggal 5 Juli 1990, Bank telah menempatkan saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas (Rights Issue) I sejumlah 15.508.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham yang ditawarkan kepada para pemegang saham lama di mana setiap pemegang saham yang memiliki 3 (tiga) saham lama berhak membeli 1 (satu) saham baru dengan harga Rp 8.000 per saham. Kemudian berdasarkan surat persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. S-1424/PM/1990 tertanggal

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum Efek Bank (lanjutan)

8 September 1990, saham-saham ini telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta. Saham-saham ini juga telah dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya berdasarkan surat No. 461/D-70/BES/IX/90 tertanggal 24 September 1990.

Berdasarkan surat persetujuan Ketua BAPEPAM No. S-1739/PM/1990 tertanggal 5 November 1990, Bank juga telah mencatatkan tambahan saham pendiri sejumlah 42.525.000 saham pada Bursa Efek Jakarta dan Surabaya.

Dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham pada tanggal 18 Juni 1992, Bank telah menerbitkan saham bonus sejumlah 124.064.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham di mana setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham memperoleh 2 (dua) saham bonus. Saham bonus ini berasal dari tambahan modal disetor-agio saham yang telah dikapitalisasi ke modal saham. Saham-saham ini telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta berdasarkan surat No. S-488/BEJ.I.1/VIII/1992 tertanggal 27 Agustus 1992. Saham-saham ini juga dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya berdasarkan surat No. 11/EMT/LIST/BES/IX/92 tertanggal 3 September 1992.

Dalam Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham pada tanggal 27 Juni 1995, para pemegang saham telah menyetujui untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Rights Issue) II sejumlah 65.133.600 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham yang ditawarkan kepada para pemegang saham lama di mana setiap pemegang saham yang memiliki 20 (dua puluh) saham lama berhak membeli 7 (tujuh) saham baru dengan harga Rp 2.000 per saham dan mendapat 4 (empat) waran atau keseluruhan berjumlah 37.219.200 waran. Setiap 1 (satu) waran dapat dikonversi menjadi 1 (satu) saham baru dengan nilai nominal Rp 1.000 dengan harga Rp 2.900 per saham. Harga pelaksanaan dan jumlah waran diubah masing-masing menjadi Rp 1.450 dan 71.629.940 waran sebagai akibat dari perubahan nilai nominal saham Bank pada tahun 1997 dan kemudian masing-masing menjadi Rp 1.090 dan 95.267.798 waran, sebagai akibat dari penerbitan saham bonus pada tahun 1998. Bank memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran penawaran umum tersebut dari Ketua BAPEPAM tanggal 26 Juni 1995. Saham-saham ini telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta berdasarkan surat No. S-193/BEJ.I.2/VII/1995 tertanggal 14 Juli 1995. Saham-saham ini juga telah dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya berdasarkan surat No. 38/EMT/LIST/BES/VII/95 tertanggal 14 Juli 1995. Pelaksanaan konversi waran menjadi saham sampai dengan 29 Agustus 2000, yang merupakan tanggal terakhir pelaksanaan konversi waran menjadi saham, adalah sejumlah 2.808.460 saham, di mana saham-saham hasil konversi ini telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Surabaya. Waran yang belum dikonversi sampai dengan tanggal 29 Agustus 2000 dan sudah kadaluarsa adalah sebesar 95.267.798 waran.

Dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham pada tanggal 18 Juni 1997, para pemegang saham telah menyetujui perubahan nilai nominal saham Bank dari Rp 1.000 per saham menjadi Rp 500 per saham.

Dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham pada tanggal 27 Juni 1998, Bank telah menerbitkan saham bonus sejumlah 166.738.173 saham dengan nilai nominal Rp 500 per saham di mana setiap pemegang saham yang memiliki 100 (seratus) saham memperoleh 33 (tiga puluh tiga) saham bonus. Saham bonus ini berasal dari tambahan modal disetor-agio saham yang telah dikapitalisasi ke modal saham. Saham bonus ini telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta berdasarkan surat No. Peng-14/BEJ-1.1/SB/0798 tertanggal 20 Juli 1998 dan No. Peng-15/BEJ-1.1/SB/0798 tertanggal 31 Juli 1998. Saham bonus ini juga dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya berdasarkan surat No. Peng-007/PDG/CB/BES/VIII/98 tertanggal 3 Agustus 1998.

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum Efek Bank (lanjutan)

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 28 Agustus 2000, para pemegang saham telah menyetujui untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Rights Issue) III sejumlah 66.528.577.467 saham baru kelas B, yang mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham kelas A, dengan nilai nominal Rp 5 per saham yang ditawarkan kepada para pemegang saham lama di mana setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham lama berhak membeli 99 (sembilan puluh sembilan) saham baru dengan harga Rp 80,51 per saham. Bank memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran penawaran umum tersebut dari Ketua BAPEPAM tanggal 25 Agustus 2000. Saham-saham ini telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta berdasarkan Surat No. S-2686/BEJ.EEM/09-2000 tanggal 18 September 2000. Saham-saham ini juga telah dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya berdasarkan surat No. JKT-01/MKT-LIST/BES/IX/2000 tanggal 12 September 2000.

c. Penempatan Terbatas Efek Bank

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 27 September 2002, para pemegang saham telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp 668.646 menjadi Rp 1.300.534 (lihat Catatan 27). Peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh ini dilakukan sehubungan dengan peleburan usaha 4 Bank Dalam Penyehatan (4 BDP) ke dalam Bank (lihat Catatan 3 dan 27). Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tanggal 30 September 2002 (lihat Catatan 1a dan 27).

d. Komposisi Saham Bank

Pada tanggal 31 Desember 2002, seluruh saham Bank setelah peleburan usaha 4 BDP ke dalam Bank berjumlah 672.005.833 saham kelas A dan 192.906.142.242 saham kelas B yang telah tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, terdiri dari:

Saham kelas A:	
3.999.000	saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana.
15.508.000	saham yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas (Rights Issue) I.
42.525.000	saham pendiri.
124.064.000	saham bonus yang berasal dari tambahan modal disetor-agio saham pada tahun 1992.
65.133.600	saham yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas (Rights Issue) II dengan waran.
1.374.230	saham yang berasal dari konversi waran sebelum perubahan nilai nominal saham.
252.603.830	saham yang berasal dari perubahan nilai nominal saham.
166.738.173	saham bonus yang berasal dari tambahan modal disetor-agio saham pada tahun 1998.
60.000	saham yang berasal dari konversi waran sejak tanggal 1 Januari 1998 sampai dengan 31 Desember 1998.
672.005.833	**Saham**

PT BANK PERMATA Tbk (dahulu PT BANK BALI Tbk) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
31 Desember 2002
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2001
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing, Jumlah Cabang, Jumlah Karyawan, Data Saham Dan Nilai Tukar Mata Uang Asing)

---

1. UMUM (lanjutan)

d. Komposisi Saham Bank (lanjutan)

Saham kelas B:

66.528.577.467	saham yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas (Rights Issue) III.
15.266.453.664	penerbitan saham bagi pemegang saham Universal (lihat Catatan 3) pada tahun 2002.
111.111.111.111	saham yang berasal dari penempatan terbatas dalam rangka peleburan usaha (lihat Catatan 3) pada tahun 2002.
192.906.142.242	**Saham**

e. Anak Perusahaan

Anak perusahaan yang dimiliki secara langsung meliputi:

Nama Perusahaan	Tahun Mulai Operasi Komersial	Bidang Usaha	Tempat Kedudukan	Persentase Pemilikan		Jumlah Aktiva	
				2002	2001	2002	2001
PT Bali Securities	1991	Sekuritas	Jakarta	95,00%	95,00%	32.268	25.442
PT Bali Tunas Finance	1991	Pembiayaan Konsumen dan Sewa Guna Usaha	Jakarta	60,00	60,00	455	455
PT Asuransi BaruBali Nippon Fire	1978	Asuransi Kerugian	Jakarta	51,00	51,00	121.598	112.733
Bank Perkreditan Rakyat (17 bank)	1993 dan 1994	Bank	Tersebar di beberapa kecamatan di Indonesia	51,00 sampai 66,00	51,00 sampai 66,00	84.630	62.879

Dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Bali Tunas Finance (BTF) (Anak perusahaan) yang diselenggarakan pada tanggal 21 Oktober 1998, yang diaktakan dengan akta notaris Rachmat Santoso, S.H., No. 35 tanggal 5 November 1998, para pemegang saham menyetujui untuk melikuidasi Anak perusahaan tersebut sejak tanggal 31 Oktober 1998. Proses likuidasi BTF sampai dengan tanggal laporan auditor independen masih belum selesai (lihat Catatan 2b).

Berdasarkan surat dari Bank kepada Hong Kong Monetary Authority No. DIR/2001003/LN/UM tanggal 12 Maret 2001, Bank telah memutuskan untuk mencabut surat izin "Deposit Taking Company" (DTC) yang dimiliki oleh Bali International Finance, Ltd. (BIF). Berdasarkan surat dari Hong Kong Monetary Authority No. CB/DTC/408 tanggal 3 April 2001, pencabutan surat izin DTC menjadi efektif sejak tanggal 4 April 2001.

Pada bulan September 2001, Bank telah menjual seluruh saham Bank pada BIF kepada Sun Hung Kai Securities Limited (SHKSL) dengan harga HKD 29.772.432, sesuai dengan "Sale and Purchase Agreement" tanggal 25 September 2001 dan surat SHKSL tanggal 11 Desember 2001.

f. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Permata Tbk No. 67 tanggal 31 Oktober 2002 yang dibuat oleh Notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M, susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

1. UMUM (lanjutan)

f. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (lanjutan)

Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	:	Dr. Aditiawan Chandra
Komisaris	:	I Nyoman Suwandha *
Komisaris	:	Dr. Ir. Lukita D. Tuwo
Komisaris	:	Dr. Tirta Hidayat
Komisaris	:	Dradjat Bagus Prasetyo *
Komisaris	:	Deswandhy Agusman
Komisaris	:	Ichsanuddin Noorsy
Direksi		
Direktur Utama	:	Agus DW. Martowardojo
Wakil Direktur Utama	:	Chandra Purnama
Direktur Kepatuhan	:	Elvyn Gahadi Masassya
Direktur	:	Joseph Georgino Godong *
Direktur	:	Andrew Hardi Hanubrata *
Direktur	:	Ir. Ongki Wanadjati Dana
Direktur	:	Mahdi Syahbuddin
Direktur	:	Irman Alvian

* telah mendapat persetujuan Bank Indonesia pada tahun 2001 sedangkan pengurus lainnya lihat Catatan 47

Pada tanggal 31 Desember 2002, Bank mempunyai 7.954 orang karyawan tetap (tidak diaudit).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi disusun berdasarkan konsep biaya historis, kecuali untuk efek-efek tertentu yang dimiliki yang dinyatakan sebesar nilai wajar, penyertaan saham tertentu yang dicatat dengan metode ekuitas, aktiva tetap tertentu yang telah dinilai kembali, aktiva satu Anak perusahaan yang dinyatakan sebesar nilai realisasi bersihnya (lihat Catatan 2b), tagihan dan kewajiban derivatif yang dicatat sebesar nilai wajar, serta agunan diambil alih yang dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi.

Laporan keuangan konsolidasi disusun berdasarkan basis akrual, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasi dan tagihan bunga atas aktiva produktif yang digolongkan sebagai "non-performing" dicatat atas dasar kas. Laporan arus kas konsolidasi disusun berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi disusun sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000, yang memperbaharui Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Pedoman Penyajian Laporan Keuangan". Dalam laporan arus kas konsolidasi, kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain yang tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi (lanjutan)

Laporan keuangan Bank dan Anak perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha bank, pada prinsipnya telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan berdasarkan pedoman Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 (Revisi 2000) tentang "Akuntansi Perbankan" yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) yang diterbitkan atas kerjasama Ikatan Akuntan Indonesia dengan Bank Indonesia, sejauh memungkinkan, serta praktek akuntansi dan pelaporan dalam industri perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia bersama IAI apabila berlaku.

Laporan keuangan Anak perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha asuransi kerugian, disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan PSAK No. 28 (Revisi 1998) tentang "Akuntansi Asuransi Kerugian".

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasi adalah Rupiah.

b. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi meliputi laporan keuangan Bank dan Anak perusahaan (yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Bank) seperti disebutkan dalam Catatan 1e.

Dalam mengkonsolidasikan laporan keuangan kantor cabang Bank dan Anak perusahaan di luar negeri ke dalam laporan keuangan Bank, akun-akun aktiva dan kewajiban dalam valuta asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut seperti ditetapkan oleh Bank Indonesia. Laporan laba rugi untuk tahun yang bersangkutan merupakan penjumlahan dari laporan laba rugi setiap bulan yang telah dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs tengah rata-rata pada bulan yang bersangkutan. Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dilaporkan secara terpisah pada komponen Ekuitas dalam akun "Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan" pada neraca konsolidasi.

Seluruh saldo akun dan transaksi yang material antar perusahaan yang dikonsolidasi telah dieliminasi.

Proporsi bagian pemilikan pemegang saham minoritas atas ekuitas Anak perusahaan yang dikonsolidasi disajikan dalam akun "Hak Minoritas atas Aktiva Bersih Anak perusahaan" dalam neraca konsolidasi.

Penyertaan saham Bank dan Anak perusahaan dengan persentase pemilikan paling sedikit 20% tetapi tidak lebih dari 50% dicatat dengan metode ekuitas (equity method). Dengan metode ini, penyertaan dinyatakan sebesar biaya perolehannya dan ditambah/dikurangi dengan bagian atas laba atau rugi bersih perusahaan asosiasi sejak tanggal perolehan serta dikurangi penerimaan dividen kas.

Penyertaan saham Bank atau Anak perusahaan dengan persentase pemilikan kurang dari 20% dinyatakan sebesar biaya perolehan (cost method).

Penyertaan saham Bank dan Anak perusahaan yang berasal dari restrukturisasi kredit merupakan penyertaan sementara sehingga dinyatakan sebesar biaya perolehan (Cost method) tanpa memperhatikan besarnya kepemilikan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip Konsolidasi (lanjutan)

Akun-akun dari PT Bali Tunas Finance (BTF), Anak perusahaan, telah dinyatakan sebesar nilai realisasi bersihnya pada laporan keuangan konsolidasi. Pada tanggal 31 Desember 2002, BTF memiliki nilai aktiva bersih sebesar Rp 389. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, proses likuidasi BTF masih berlangsung (lihat Catatan 1e).

c. Giro pada Bank Lain

Giro pada bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan penyisihan kerugian.

d. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar saldo penempatan dikurangi dengan penyisihan kerugian.

e. Efek-efek

Efek-efek sebagian besar terdiri dari surat berharga dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang diperdagangkan di pasar uang, exchange offer, unit penyertaan reksadana, surat pengakuan hutang dengan bunga mengambang (floating rate notes), surat pengakuan hutang jangka menengah, wesel dan obligasi (termasuk Obligasi Pemerintah) serta saham yang tercatat di bursa efek.

Sesuai dengan PSAK No. 50 tentang "Akuntansi Investasi Efek Tertentu", efek-efek diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Diperdagangkan, yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajar dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

2. Tersedia untuk dijual, yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajar disajikan sebagai komponen ekuitas. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tersebut dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan pada saat realisasi.

3. Dimiliki hingga jatuh tempo, dinyatakan sebesar biaya perolehan, yang disesuaikan dengan amortisasi premi dan diskonto, berdasarkan metode garis lurus.

SBI dan surat berharga pasar uang disajikan sebesar nilai nominal setelah dikurangi bunga yang belum diamortisasi. Obligasi (termasuk Obligasi Pemerintah), exchange offer dan surat pengakuan hutang dengan bunga mengambang (Floating Rate Notes) yang dimiliki hingga jatuh tempo dinyatakan sebesar biaya perolehan ditambah atau dikurangi dengan amortisasi diskonto atau premi. Biaya perolehan disesuaikan untuk memperhitungkan penurunan nilai efek yang permanen. Obligasi (termasuk Obligasi Pemerintah) yang tersedia untuk dijual dinyatakan sebesar nilai wajar. Laba atau rugi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajar disajikan sebagai komponen ekuitas. Obligasi (termasuk Obligasi Pemerintah), exchange offer, surat pengakuan hutang dengan bunga mengambang (Floating Rate Notes), surat pengakuan hutang jangka menengah, wesel, unit penyertaan reksadana dan saham untuk diperdagangkan dinyatakan sebesar nilai wajar. Laba atau rugi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajar dibebankan pada operasi tahun berjalan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Efek-efek (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001, nilai pasar atas beberapa seri obligasi pemerintah yang diperdagangkan dan tersedia untuk dijual tidak tersedia, sehingga nilai wajar atas obligasi pemerintah tersebut dihitung dengan menggunakan metode nilai sekarang *(present value)* atau arus kas yang didiskonto *(discounted cash flow)*. Apabila nilai wajar yang dihasilkan dari perhitungan tersebut lebih besar dari nilai nominal, maka akan digunakan nilai nominal. Laba atau rugi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajar efek yang diperdagangkan tersebut diakui dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan sedangkan laba atau rugi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajar efek yang tersedia untuk dijual disajikan sebagai komponen ekuitas.

Wesel merupakan wesel ekspor/impor dari nasabah yang timbul karena adanya pembayaran di muka oleh Bank kepada nasabahnya sehubungan dengan transaksi-transaksi ekspor/impor nasabah. Wesel dinyatakan sebesar saldonya.

Harga pokok efek-efek yang dijual dihitung dengan menggunakan metode nilai buku saat dijual. Penyisihan penurunan nilai pasar dan kerugian disajikan sebagai pengurang terhadap akun efek-efek.

f. Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai

Efektif tanggal 1 Januari 2001, Bank menerapkan PSAK No. 55, "Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai". Instrumen derivatif terdiri dari transaksi berjangka dan swap valuta asing yang diakui di neraca konsolidasi sebagai aktiva atau kewajiban berdasarkan nilai wajar dari masing-masing kontrak. Laba atau rugi atas perubahan pada nilai wajar instrumen derivatif diakui sebagai laba rugi tahun berjalan.

Pada tanggal 1 Januari 2001, tidak ada penyesuaian transisi sebagai akibat penerapan PSAK No. 55, karena pengaruhnya tidak material terhadap laporan keuangan konsolidasi.

Transaksi derivatif tersebut di atas disajikan sebagai bagian dari akun "Tagihan dan Kewajiban Derivatif" pada neraca konsolidasi. Tagihan derivatif disajikan sebesar tagihan yang timbul dikurangi penyisihan kerugian.

g. Kredit yang Diberikan

Kredit yang diberikan dinyatakan sebesar saldo kredit dikurangi dengan penyisihan kerugian. Kredit yang direstrukturisasi disajikan sebesar nilai buku baru. Kerugian atas selisih nilai buku baru dengan saldo kredit sebelum restrukturisasi disajikan sebagai pengurang penyisihan kerugian kredit. Untuk kredit yang direstrukturisasi, dalam pokok kredit termasuk bunga dan biaya lain yang dialihkan menjadi pokok kredit. Bunga yang dialihkan tersebut diakui sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan dan disajikan sebagai pengurang dari kredit yang direstrukturisasi.

Penyertaan saham yang diterima dalam restrukturisasi kredit dengan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur, diakui sebesar nilai wajar dan dicatat dengan metode biaya.

Kredit dalam rangka pembiayaan bersama (kredit sindikasi), kredit kelolaan dan penerusan kredit dinyatakan sebesar pokok kredit sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh Bank.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

g. Kredit yang Diberikan (lanjutan)

Kredit dalam rangka pengalihan piutang dinyatakan sebesar nilai piutang yang diperoleh dikurangi dengan penyisihan kerugian.

h. Tagihan dan Kewajiban Akseptasi

Tagihan dan kewajiban akseptasi dinyatakan sebesar nilai Letters of Credit (L/C) atau nilai realisasi L/C yang diaksep oleh bank pengaksep (accepting Bank) dikurangi penyisihan kerugian.

i. Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Bank dan Anak perusahaan mempunyai transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai dengan yang dimaksud dalam PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa".

Hubungan istimewa baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga, terutama berkenaan dengan beberapa akun dalam neraca konsolidasi, yaitu efek, tagihan dan kewajiban derivatif, kredit yang diberikan, tagihan akseptasi, aktiva tetap, giro, tabungan, deposito berjangka dan surat-surat berharga yang diterbitkan. Sifat dan luas hubungan istimewa ini diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasi untuk masing-masing akun tersebut. Transaksi Bank dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan BPPN dalam rangka restrukturisasi perbankan/perusahaan, tidak diungkapkan sebagai transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

j. Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif serta Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

Bank membentuk penyisihan kerugian aktiva produktif serta estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi manajemen terhadap kolektibilitas dan nilai yang dapat direalisasi dari masing-masing aktiva produktif, komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko kredit pada akhir tahun. Dalam kaitan tersebut, ketentuan Bank Indonesia (BI) tentang Pembentukan Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif serta Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi digunakan sebagai acuan, dengan pedoman pembentukan penyisihan kerugian aktiva produktif sebagai berikut:

1. Cadangan umum sekurang-kurangnya 1% dari aktiva produktif yang digolongkan lancar (aktiva produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, efek-efek, tagihan derivatif, kredit yang diberikan, tagihan akseptasi, penyertaan saham serta komitmen dan kontinjensi).

2. Cadangan khusus untuk aktiva produktif:

Penggolongan	Persentase
Dalam perhatian khusus	5%
Kurang lancar	15
Diragukan	50
Macet	100

Cadangan khusus untuk aktiva produktif yang digolongkan sebagai kurang lancar, diragukan dan macet adalah sebesar jumlah saldo pinjaman setelah dikurangi dengan nilai agunan yang bersangkutan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

j. Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif serta Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi (lanjutan)

Aktiva produktif dihapuskan dari masing-masing penyisihan kerugian pada saat manajemen Bank berpendapat bahwa aktiva tersebut sudah tidak dapat tertagih lagi. Penerimaan kembali aktiva yang telah dihapuskan dicatat sebagai penambahan pada masing-masing penyisihan kerugian selama tahun berjalan.

k. Tagihan Premi

Tagihan premi Anak perusahaan dinyatakan sebesar saldo tagihan premi dikurangi dengan penyisihan kerugian. Premi diakui sebagai pendapatan setelah dikurangi premi reasuransi dan kenaikan dalam premi yang belum merupakan pendapatan.

l. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka dibebankan selama masa manfaat.

m. Aktiva Tetap

Aktiva tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan, kecuali yang dinilai kembali berdasarkan peraturan pemerintah, dikurangi akumulasi penyusutan.

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Biaya-biaya tertentu sehubungan dengan perolehan atau perpanjangan pemilikan hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang periode yang lebih pendek antara hak atas tanah atau umur ekonomis tanah. Beban ditangguhkan ini disajikan dalam akun "Aktiva Lain-lain" pada neraca konsolidasi (lihat Catatan 2o).

Golongan bangunan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis selama 5 sampai 40 tahun. Kecuali tanah yang tidak disusutkan, aktiva tetap lainnya disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aktiva yang berkisar antara 4 sampai dengan 8 tahun dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (double-declining balance method) bagi Bank, dan metode garis lurus untuk Anak perusahaan. Pengaruh perbedaan metode penyusutan tersebut tidak material terhadap laporan keuangan konsolidasi.

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya; pemugaran dan penambahan dalam jumlah signifikan dikapitalisasi. Aktiva tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual, nilai tercatat serta akumulasi penyusutan dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi dibukukan dalam pendapatan/beban bukan operasional tahun yang bersangkutan.

Bangunan dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke akun bangunan pada saat bangunan tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

m. Aktiva Tetap (lanjutan)

Sejak tahun 2000, Bank telah menerapkan PSAK No. 48 tentang "Penurunan Nilai Aktiva". PSAK No. 48 mensyaratkan bahwa jumlah aktiva yang dapat diperoleh kembali diestimasi pada saat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat diperoleh kembali. Penurunan nilai aktiva tetap tersebut yang telah direvaluasi dikompensasikan ke "Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap" dan sisanya dibukukan pada laporan laba rugi tahun berjalan.

Transaksi sewa guna usaha Anak perusahaan digolongkan sebagai sewa guna usaha yang dikapitalisasi (capital lease) apabila memenuhi semua kriteria yang disyaratkan berdasarkan PSAK No. 30 tentang "Akuntansi Sewa Guna Usaha" (disajikan sebagai bagian dari Aktiva Tetap). Jika salah satu kriteria tidak terpenuhi, maka transaksi sewa guna usaha dikelompokkan sebagai transaksi sewa menyewa biasa (operating lease). Aktiva (kendaraan bermotor) sewa guna usaha yang dikapitalisasi dinyatakan sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) yang harus dibayar pada akhir masa sewa guna usaha. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aktiva selama 5 tahun.

n. Agunan Diambil Alih

Efektif tahun 2001, berdasarkan PSAK No. 31 (Revisi 2000), agunan diambil alih sehubungan dengan penyelesaian kredit yang diberikan dinyatakan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi. Nilai bersih yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan diambil alih setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan. Selisih lebih antara saldo kredit yang tidak dapat ditagih dengan nilai bersih yang dapat direalisasi tersebut dibebankan pada penyisihan kerugian. Biaya-biaya sehubungan dengan pemeliharaan dan perolehan aktiva tersebut dibebankan pada operasi pada saat terjadinya. Selisih lebih antara nilai agunan diambil alih dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan agunan diambil alih.

o. Beban Ditangguhkan

Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan pembukaan cabang Bank dan pengembangan produk baru ditangguhkan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sampai dengan 4 tahun. Akun ini disajikan dalam "Aktiva Lain-lain" (lihat Catatan 2m).

p. Simpanan

Giro merupakan simpanan nasabah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek, atau dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya. Giro dinyatakan sebesar nilai kewajiban pada pemegang giro.

Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Tabungan dinyatakan sebesar nilai kewajiban kepada pemilik tabungan.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian dengan penyimpan. Deposito berjangka dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian dengan pemegang deposito berjangka.

Sertifikat deposito dinyatakan sebesar nilai nominal dikurangi bunga yang belum diamortisasi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

q. Efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali

Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali diakui sebagai kewajiban repo sebesar harga pembelian yang disepakati. Selisih antara harga jual dengan harga beli kembali efek diakui sebagai beban bunga yang dibayar di muka dan diakui sebagai beban sesuai dengan jangka waktu efek dijual hingga dibeli kembali. Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali dinyatakan sebesar kewajiban bruto dikurangi dengan beban bunga dibayar di muka yang belum diamortisasi.

r. Estimasi Klaim Retensi Sendiri

Anak perusahaan membentuk estimasi hutang klaim yang telah dilaporkan tetapi belum diselesaikan dan estimasi klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan. Akun ini disajikan dalam "Kewajiban Lain-lain".

s. Premi yang Belum Merupakan Pendapatan

Premi yang belum merupakan pendapatan dari Anak perusahaan dihitung berdasarkan persentase premi bersih sebesar 40%, di mana minimum premi yang belum merupakan pendapatan harus disisihkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 481/KMK.017/1999 tanggal 7 Oktober 1999. Akun ini disajikan dalam "Kewajiban Lain-lain".

t. Pendapatan dan Beban Bunga

Pendapatan dan beban bunga aktiva produktif yang "performing" diakui Bank dan Anak perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha bank atas dasar akrual. Pendapatan bunga atas aktiva produktif yang diklasifikasikan sebagai "non-performing" tidak diakui dalam akun ini sampai saat diterimanya pembayaran. Pada saat aktiva produktif diklasifikasikan sebagai "non-performing", tagihan bunga yang sudah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima, dibatalkan. Selanjutnya bunga yang dibatalkan tersebut diakui sebagai tagihan kontinjensi. Penerimaan dari kredit yang diragukan dan macet diakui terlebih dahulu sebagai pengurang pokok kredit. Kelebihan penerimaan dari pokok kredit diakui sebagai pendapatan bunga.

Pendapatan bunga yang ditangguhkan dari kredit yang direstrukturisasi diakui sebagai pendapatan secara proporsional pada saat diterima pembayaran angsuran pokok.

u. Provisi dan Komisi

Provisi dan komisi Bank dan Anak perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha bank yang berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan atau jangka waktu tertentu dan jumlahnya signifikan, ditangguhkan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sesuai dengan jangka waktunya. Saldo provisi dan komisi sehubungan dengan kredit yang diselesaikan sebelum jatuh tempo diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat penyelesaian. Provisi dan komisi yang tidak berkaitan langsung dengan jangka waktu tertentu diakui pada saat transaksi dilakukan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

v. Imbalan

Imbalan Bank dan Anak perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha bank yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan namun terkait dengan jangka waktu tertentu dan jumlahnya signifikan, ditangguhkan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sesuai dengan jangka waktunya, antara lain jasa "safe deposit box", jasa manajemen dan jasa kustodian. Imbalan yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan atau jangka waktu tertentu diakui pada saat transaksi dilakukan, antara lain komisi transaksi ekspor/impor (L/C).

w. Dana Pensiun

Sampai dengan tanggal 2 Desember 2002, Bank mempunyai program pensiun iuran pasti yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Bank Bali untuk sebagian karyawan tetap yang memilih ikut serta dan memenuhi syarat. Iuran dana pensiun ditanggung bersama oleh karyawan dan Bank dengan kontribusi masing-masing sebesar 2,5% dan 5% dari gaji bersih karyawan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-295/KM.6/2002 tanggal 3 Desember 2002, Dana Pensiun Bank Bali telah dibubarkan secara hukum.

Pada tanggal 18 Desember 2002, berdasarkan Perjanjian Pengalihan Program Pensiun No. DPLK/SP/001/XII/2002, Bank mengalihkan dana program pensiun karyawan kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan Central Asia Raya.

x. Transaksi dan Saldo dalam Valuta Asing

Transaksi dalam valuta asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001, aktiva dan kewajiban moneter dalam valuta asing maupun kontrak valuta asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs spot Reuters pada pukul 16.00 WIB (Rp 8.950 dan Rp 10.400 untuk US$ 1,00, Rp 5.153,75 dan Rp 5.623,91 untuk SGD 1,00, Rp 75,43 dan Rp 79,20 untuk JP¥ 1,00, Rp 9.367,08 dan Rp 9.201,93 untuk EUR 1,00 dan Rp 5.067,95 dan Rp 5.313,89 untuk AUD 1,00 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001). Laba atau rugi kurs yang terjadi, termasuk dari transaksi perdagangan valuta asing yang berhubungan langsung dengan nasabah dan bank koresponden dikredit atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

Pembelian tunai (spot) valuta asing yang belum diselesaikan disajikan sebagai akun di luar neraca. Laba atau rugi yang timbul dari selisih antara kurs tunai pada tanggal transaksi dengan kurs pada tanggal neraca diakru dan dicatat dalam laba rugi tahun berjalan.

y. Beban atau Penghasilan Pajak

Beban pajak tahun berjalan Bank dan Anak perusahaan dihitung berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan.

Bank dan Anak perusahaan telah menerapkan PSAK No. 46 tentang "Akuntansi Pajak Penghasilan" yang mensyaratkan pengakuan aktiva dan kewajiban pajak tangguhan atas konsekuensi pajak di masa yang akan datang dari beda temporer antara pelaporan komersial dan pajak. Penerapan PSAK No. 46 atas laporan keuangan konsolidasi menghasilkan pengakuan atas aktiva (kewajiban) pajak tangguhan dan beban atau penghasilan pajak.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

z. Pelaporan Segmen

Berdasarkan PSAK No. 5 (Revisi 2000) tentang "Pelaporan Segmen" yang berlaku efektif untuk laporan keuangan yang mencakup tahun laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2002, Bank telah mengidentifikasi dan mengungkapkan pelaporan informasi keuangan berdasarkan segmen geografis Bank (menyajikan informasi produk atau jasa pada wilayah ekonomi tertentu). Segmen adalah komponen dari Bank yang dapat dibedakan berdasarkan risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen lainnya. Jika penerapan lebih dini dilakukan atau informasi komparatif disajikan, laporan keuangan tahun sebelumnya harus disajikan kembali.

aa. Laba (Rugi) Bersih per Saham Dasar

Laba (rugi) bersih per saham dasar dihitung dengan membagi masing-masing laba (rugi) bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar setelah memperhitungkan pengaruh konversi saham sehubungan dengan peleburan usaha pada tahun 2002. Laba (rugi) bersih per saham dilusi sama dengan laba (rugi) bersih per saham dasar.

Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar dasar masing-masing sebanyak 99.400.894.325 pada tahun 2002 dan 67.200.583.300 pada tahun 2001.

Proforma laba (rugi) bersih per saham dihitung dengan membagi masing-masing laba (rugi) bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham setelah peleburan usaha, seakan-akan peleburan usaha tersebut sudah terjadi sejak awal tahun yang disajikan. Jumlah proforma rata-rata tertimbang saham beredar dasar masing-masing sebanyak 193.578.148.075 pada tahun 2002 dan 2001. Proforma laba (rugi) bersih per saham dasar adalah (Rp 4) dan Rp 1 masing-masing pada tahun 2002 dan 2001.

3. PELEBURAN USAHA

Pada tanggal 20 Mei 2002, BPPN, Bank dan 4 bank lainnya telah mengadakan kesepakatan pendahuluan di mana 5 bank peserta tersebut setuju, berjanji dan mengikatkan diri melaksanakan program restrukturisasi sesuai dengan syarat dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh BPPN serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan surat BPPN No. PB-1591/BPPN/0802 tanggal 6 Agustus 2002, Bank telah ditunjuk sebagai Platform Bank (Rangka Bank) atau sebagai "Bank Hasil Penggabungan" sehingga Bank Peserta Penggabungan lainnya, yaitu PT Bank Universal Tbk (Universal), PT Bank Prima Express (Primex), PT Bank Artamedia (Artamedia) dan PT Bank Patriot (Patriot) akan bertindak sebagai "Bank Yang Menggabungkan Diri".

Pada tanggal 28 Agustus 2002, Bank telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada BAPEPAM dalam rangka peleburan usaha Bank dengan 4 bank lainnya dan telah mendapat pemberitahuan efektifnya penggabungan tersebut sesuai dengan Surat Ketua BAPEPAM No. S-2120/PM/2002 tanggal 26 September 2002.

Berdasarkan Akta Merger yang diaktakan dengan akta notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M No. 46 tanggal 27 September 2002, Bank dan bank-bank yang menggabungkan diri, yang terdiri dari Universal, Primex, Artamedia dan Patriot dengan persetujuan rapat umum luar biasa pemegang saham telah sepakat melakukan peleburan usaha. Peleburan usaha dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

3. PELEBURAN USAHA (lanjutan)

1. Semua kekayaan dan kewajiban serta operasi, usaha, kegiatan dan aktivitas setiap Bank yang Menggabungkan Diri beralih demi hukum kepada Bank sebagai Bank Hasil Penggabungan.
2. Semua pemegang saham Universal karena hukum menjadi pemegang saham Bank, sedangkan pemegang saham Bank yang Menggabungkan Diri lainnya (di luar Universal) mendapatkan saham Bank dari BPPN sebagai pemberian.
3. Bank sebagai Bank Hasil Penggabungan tetap mempertahankan eksistensinya sebagai perseroan terbatas dan sebagai bank umum dengan memakai nama PT Bank Permata Tbk.
4. Semua Bank yang Menggabungkan Diri karena hukum akan bubar tanpa memerlukan likuidasi.

Peleburan usaha ini menjadi efektif sejak disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. C-18778.HT.01.04.TH.2002 tanggal 30 September 2002.

Agar Bank Hasil Penggabungan dapat memenuhi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang ditetapkan oleh BI sebagai akibat beralihnya karena hukum semua kekayaan dan kewajiban yang beralih dari Bank-bank yang Menggabungkan Diri kepada Bank Hasil Penggabungan, maka sebelum atau pada tanggal penggabungan, BPPN melakukan penyertaan modal sementara dalam Bank sebesar Rp 4.600.000. Penyertaan modal sementara tersebut dilakukan melalui penempatan terbatas tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu, sebanyak 111.111.111.111 saham baru kelas B dengan nilai nominal Rp 5 per saham atau seluruhnya berjumlah nominal Rp 555.556 dan sisanya sebesar Rp 4.044.444 sebagai agio saham.

Guna memenuhi ketentuan PP No. 28/1999 yang mensyaratkan bahwa pemegang saham bank yang melakukan penggabungan menjadi pemegang saham Bank Hasil Penggabungan dan mengingat Bank yang Menggabungkan Diri (di luar Universal) telah mencatat saldo ekuitas negatif, maka sebagian dari saham yang diperoleh BPPN atas penyertaan modal sementara tersebut, yaitu sebanyak 332.132.125 saham atau merupakan 1% dari taksiran positif ekuitas per tanggal 30 September 2002 dari Bank Hasil Penggabungan setelah dilakukan Penambahan Modal BPPN, dialokasikan oleh BPPN kepada dan dibagikan di antara para pemegang saham Bank yang Menggabungkan Diri (tidak termasuk para pemegang saham Universal).

Konversi dan alokasi saham Bank dilakukan sebagai berikut:

1. Atas kekayaan dan kewajiban yang beralih dari Universal kepada Bank pada tanggal peleburan usaha, para pemegang saham Universal memperoleh 15.266.453.664 saham kelas B Bank, dengan nilai nominal Rp 5 per saham atau seluruhnya berjumlah nominal Rp 76.332.
2. Sebanyak 332.132.125 saham kelas B dialokasikan BPPN kepada para pemegang saham Bank-bank yang Menggabungkan Diri dengan pembagian sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Kelas B Yang Diperoleh	Jumlah	
Primex	125.413.090	Rp	627
Artamedia	113.489.547		567
Patriot	93.229.488		466
Jumlah	**332.132.125**	**Rp**	**1.660**

3. PELEBURAN USAHA (lanjutan)

Para pemegang saham Universal, Primex, Artamedia dan Patriot telah menyetujui peleburan usaha bank-bank tersebut ke dalam Bank sesuai dengan risalah rapat umum pemegang saham luar biasa masing-masing bank yang diaktakan masing-masing dengan akta notaris Benny Kristianto, S.H., No. 68 tanggal 27 September 2002, A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M No. 32 tanggal 20 September 2002, Tahir Kamili, S.H., No. 34 tanggal 20 September 2002 dan Elliza Asmawel, S.H., No. 45 tanggal 20 September 2002.

Berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur BI No. 4/159/KEP.DpG/2002 tanggal 30 September 2002, BI telah menyetujui peleburan usaha Bank-bank yang Menggabungkan Diri dengan Bank. Peleburan usaha tersebut menjadi efektif sejak tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar Bank Hasil Penggabungan Usaha oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C-18861.HT.01.04.TH.2002 tanggal 30 September 2002.

Dengan efektifnya peleburan usaha tersebut, seluruh aktiva dan kewajiban Universal, Primex, Artamedia dan Patriot (4 Bank Dalam Penyehatan (4 BDP)) pada tanggal 30 September 2002 dengan nilai buku aktiva (kewajiban) bersih masing-masing sebesar (Rp 2.247.915), (Rp 666.866), (Rp 216.174) dan (Rp 33.231) seperti tercantum dalam laporan keuangan Universal, Primex, Artamedia dan Patriot yang telah diaudit, telah dicatat ke dalam catatan akuntansi Bank antara lain sebagai berikut:

Aktiva	
Kredit yang diberikan - bersih	5.514.780
Efek-efek - bersih	4.579.374
Kewajiban	
Simpanan	14.574.204
Pinjaman yang diterima	789.529
Kewajiban lain-lain	1.360.851

Oleh karena Bank dan Bank Yang Menggabungkan Diri telah berada dalam pengendalian bersama *(under common control)* oleh BPPN sejak tanggal 13 Maret 1999 (untuk Artamedia), 16 Maret 1999 (untuk Universal dan Patriot) dan 29 Mei 1999 (untuk Primex), maka sesuai dengan PSAK No. 38 tentang "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali", aktiva maupun kewajiban yang pemilikannya dialihkan dari bank-bank yang menggabungkan diri ke Bank dicatat sesuai dengan nilai buku. Selisih nilai buku kewajiban bersih Universal dengan nilai nominal saham baru Bank yang diterbitkan kepada pemegang saham Universal sebesar Rp 2.324.247, serta nilai buku kewajiban bersih 3 BDP lainnya (karena tidak ada penerbitan saham Bank kepada para pemegang saham terdahulu 3 BDP lainnya tersebut) sebesar Rp 916.271 menghasilkan saldo negatif sebesar Rp 3.240.518 yang dilaporkan secara terpisah (sebagai tambahan) pada komponen Ekuitas (Defisiensi Modal) dalam akun "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" pada neraca konsolidasi tanggal 30 September 2002, tanggal efektifnya penggabungan usaha. Termasuk di dalam akun "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" adalah penurunan nilai wajar efek-efek yang diklasifikasikan ke dalam kelompok tersedia untuk dijual sebesar Rp 4.065.

4. KAS

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	2002	2001
Rupiah	453.079	264.626
Valuta Asing	65.554	67.029
Jumlah	**518.633**	**331.655**

5. GIRO PADA BANK INDONESIA

Akun ini terdiri dari:

	2002	2001
Rupiah	1.224.315	1.000.764
Dolar Amerika Serikat	129.775	84.718
Jumlah	**1.354.090**	**1.085.482**

Pada tanggal 31 Desember 2002, Giro Wajib Minimum (GWM) Bank masing-masing sebesar 5,62% dan 3,30% untuk mata uang Rupiah dan mata uang asing. Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum.

6. GIRO PADA BANK LAIN

Akun ini terdiri dari:

	2002	2001
Rupiah	20.108	27.848
Valuta Asing	99.216	254.408
Jumlah	119.324	282.256
Dikurangi penyisihan kerugian	1.070	2.774
Bersih	**118.254**	**279.482**

Kolektibilitas atas giro pada bank lain seluruhnya lancar. Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian yang dibentuk adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya giro pada bank lain serta telah dihitung berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (lihat Catatan 2j).

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2002 dan 2001, tidak terdapat giro pada bank lain pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN

Akun ini terdiri dari:

	2002	2001
Rupiah		
Intervensi Rupiah	2.100.000	352.766
Deposito Berjangka	33.392	39.851
Pinjaman yang Diberikan	3.111	3.000
Call Money	844	305.454
Sertifikat Deposito	-	3.995
Lain-lain	-	2.944
	2.137.347	708.010
Valuta Asing		
Deposito Berjangka	461.008	394.412
Pinjaman yang Diberikan	85.188	106.144
Call Money	-	41.600
	546.196	542.156
Jumlah	2.683.543	1.250.166
Dikurangi penyisihan kerugian	90.406	112.651
Bersih	**2.593.137**	**1.137.515**

Rincian penempatan berdasarkan sisa umur sampai saat jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001 (sebelum dikurangi penyisihan kerugian) adalah sebagai berikut:

	2002				
Jenis Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain	Intervensi Rupiah	Call Money	Deposito Berjangka	Pinjaman yang Diberikan	Jumlah
Rupiah					
Kurang dari 1 bulan	2.100.000	844	17.990	-	2.118.834
1 - 3 bulan	-	-	15.402	-	15.402
6 - 12 bulan	-	-	-	3.111	3.111
	2.100.000	844	33.392	3.111	2.137.347
Valuta Asing					
Kurang dari 1 bulan	-	-	451.953	85.188	537.141
1 - 3 bulan	-	-	7.850	-	7.850
3 - 6 bulan	-	-	1.205	-	1.205
	-	-	461.008	85.188	546.196
Jumlah	**2.100.000**	**844**	**494.400**	**88.299**	**2.683.543**

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

Jenis Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain	2001				
	Intervensi Rupiah	Call Money	Deposito Berjangka	Pinjaman yang Diberikan, Sertifikat Deposito dan Lain-lain	Jumlah
Rupiah					
Kurang dari 1 bulan	352.766	305.454	14.760	5.595	678.575
1 - 3 bulan	-	-	25.091	-	25.091
Lebih dari 12 bulan	-	-	-	4.344	4.344
	352.766	305.454	39.851	9.939	708.010
Valuta Asing					
Kurang dari 1 bulan	-	41.600	338.868	-	380.468
1 - 3 bulan	-	-	33.054	-	33.054
3 - 6 bulan	-	-	22.490	-	22.490
Lebih dari 12 bulan	-	-	-	106.144	106.144
	-	41.600	394.412	106.144	542.156
Jumlah	**352.766**	**347.054**	**434.263**	**116.083**	**1.250.166**

Kolektibilitas Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain:

	2002	2001
Lancar	2.597.512	1.143.178
Macet	86.031	106.988
Jumlah	2.683.543	1.250.166
Dikurangi penyisihan kerugian	90.406	112.651
Bersih	**2.593.137**	**1.137.515**

Perubahan penyisihan kerugian adalah sebagai berikut:

Uraian	2002			2001		
	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah
Saldo awal tahun	2.446	110.205	112.651	11.529	30.635	42.164
Penyisihan (pembalikan) selama tahun berjalan	(1.257)	(6.074)	(7.331)	(9.083)	97.249	88.166
Selisih kurs	-	(14.914)	(14.914)	-	1.511	1.511
Penghapusan selama tahun berjalan	-	-	-	-	(19.190)	(19.190)
Saldo akhir tahun	**1.189**	**89.217**	**90.406**	**2.446**	**110.205**	**112.651**

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

Manajemen Bank berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian yang dibentuk adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tak tertagihnya penempatan pada bank lain serta telah dihitung berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (lihat Catatan 2j).

Pinjaman yang diberikan dalam Rupiah adalah tagihan Bank kepada PT Bank Lippo Tbk yang merupakan pengalihan kewajiban Bank Umum Majapahit Jaya yang telah dilikuidasi.

Pinjaman yang diberikan dalam Valuta Asing masing-masing sebesar US$ 9.491.934,69 dan SGD 45.540 merupakan tagihan Bank kepada PT Bank Umum Nasional (BBO), PT Bank Central Dagang (BBKU), PT Bank Umum Servitia (BBKU), PT Bank Sahid Gajah Perkasa (BBKU), PT Bank Dharmala (BBKU), PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan PT Bank Lippo Tbk. Tagihan tersebut timbul dari dana talangan Bank kepada bank-bank tersebut untuk membayar letter of credit (L/C) yang telah jatuh tempo yang diterbitkan oleh Bank untuk kepentingan nasabah CV Wira Mustika Indah (WMI). Pembayaran kepada eksportir di luar negeri untuk impor barang dengan L/C yang diterbitkan oleh Bank tersebut disepakati dengan bank-bank yang disebutkan di atas sebagai pembiayaan dengan kredit sindikasi dan Bank bertindak sebagai agen fasilitas atas pemberian kredit tersebut. Bank telah mengajukan klaim kepada bank-bank peserta sindikasi, akan tetapi ditolak. Berdasarkan surat keputusan Ketua BPPN No. SK-198/BPPN/0599 tertanggal 28 Mei 1999, pada tanggal 12 November 1999 kredit kepada WMI termasuk dalam aktiva non produktif yang dialihkan kepada BPPN. Atas klaim Bank (Primex) kepada bank-bank peserta sindikasi yang berstatus BBO dan BBKU, BPPN melalui surat Ketua BPPN No. PB-463/BPPN/0801 tanggal 7 Agustus 2001 menolak membayar klaim tersebut. Pinjaman yang diberikan tersebut memiliki kolektibilitas macet pada tahun 2002 dan 2001.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2002 dan 2001, tidak terdapat penempatan pada bank lain pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Suku bunga rata-rata tahunan adalah berkisar antara 6,00% sampai dengan 18,81% pada tahun 2002, dan antara 6,00% sampai dengan 16,18% pada tahun 2001 untuk penempatan dalam Rupiah, serta berkisar antara 1,20% sampai dengan 4,60% pada tahun 2002 dan antara 3,00% sampai dengan 4,53% pada tahun 2001 untuk penempatan dalam valuta asing.

8. EFEK-EFEK

Efek-efek yang dimiliki berdasarkan jenisnya terdiri atas:

	2002	2001
Rupiah		
Dimiliki hingga jatuh tempo		
Obligasi Pemerintah (pihak yang mempunyai hubungan istimewa)	8.270.674	6.574.538
Obligasi - setelah ditambah/dikurangi premi/diskonto yang belum diamortisasi sebesar Rp 145 pada tahun 2002 dan Rp 326 pada tahun 2001	101.972	82.624

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

	2002	2001
Sertifikat Bank Indonesia - setelah dikurangi bunga yang belum diamortisasi sebesar Rp 3.732 pada tahun 2001	21.000	415.018
Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)	-	100.000
Obligasi (pihak yang mempunyai hubungan istimewa) (lihat Catatan 27)	-	15.937
Wesel	-	561
	8.393.646	7.188.678
Tersedia untuk dijual		
Obligasi Pemerintah (pihak yang mempunyai hubungan istimewa) - setelah dikurangi rugi yang belum direalisasi sebesar Rp 2.762 pada tahun 2002 dan Rp 10.529 pada tahun 2001	645.116	2.330.886
Obligasi - setelah dikurangi rugi yang belum direalisasi sebesar Rp 1.953 pada tahun 2002	12.048	-
	657.164	2.330.886
Diperdagangkan		
Obligasi Pemerintah (pihak yang mempunyai hubungan istimewa)	2.775.771	927.080
Wesel	22.898	-
Unit penyertaan reksadana	18.940	15.693
Surat pengakuan hutang jangka menengah	4.988	-
Obligasi - setelah dikurangi diskonto yang belum diamortisasi sebesar Rp 97 pada tahun 2002 dan Rp 146 pada tahun 2001	4.832	25.149
Saham	1.342	852
	2.828.771	968.774
Jumlah Rupiah	11.879.581	10.488.338
Dikurangi penyisihan kerugian	7.840	4.626
Jumlah Bersih Efek Rupiah	11.871.741	10.483.712
Valuta Asing		
Dimiliki hingga jatuh tempo		
Exchange Offer - setelah ditambah/dikurangi premi/diskonto yang belum diamortisasi sebesar Rp 5.309 pada tahun 2002 dan Rp 120.927 pada tahun 2001	263.862	1.398.484
Obligasi Pemerintah - setelah dikurangi diskonto yang belum diamortisasi sebesar Rp 10.406 pada tahun 2001	-	197.594
Wesel	-	5.144

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

	2002	2001
Surat Pengakuan Hutang dengan Bunga Mengambang (Floating Rate Notes) - setelah ditambah/dikurangi premi/diskonto yang belum diamortisasi sebesar Rp 271 pada tahun 2001	-	103.729
Lainnya - setelah dikurangi premi/diskonto yang belum diamortisasi sebesar Rp 5.279 pada tahun 2002 dan Rp 12.821 pada tahun 2001	38.338	106.086
	302.200	1.811.037
Diperdagangkan		
Exchange Offer - setelah dikurangi diskonto yang belum diamortisasi sebesar Rp 62.949 pada tahun 2002	832.677	-
Surat Pengakuan Hutang dengan Bunga Mengambang (Floating Rate Notes) - setelah ditambah/dikurangi premi/diskonto yang belum diamortisasi sebesar Rp 670 pada tahun 2002	234.781	-
Obligasi Pemerintah - setelah dikurangi diskonto yang belum diamortisasi sebesar Rp 7.843 pada tahun 2002	187.055	-
Wesel	21.127	1.876
	1.275.640	1.876
Tersedia untuk dijual		
Lain-lain - setelah dikurangi rugi yang belum direalisasi sebesar Rp 911 pada tahun 2002 dan Rp 1.041 pada tahun 2001	879	1.038
Jumlah Valuta Asing	1.578.719	1.813.951
Dikurangi penyisihan kerugian	23.590	27.816
Jumlah Bersih Efek Valuta Asing	1.555.129	1.786.135
Jumlah Bersih Efek-efek	**13.426.870**	**12.269.847**

Klasifikasi efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh temponya adalah sebagai berikut (sebelum dikurangi penyisihan kerugian):

Uraian	2002			2001		
	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah
Kurang dari 1 bulan	21.000	-	21.000	515.496	4.982	520.478
1 - 3 bulan	-	-	-	83	162	245
3 - 12 bulan	-	109.553	109.553	-	128.100	128.100
12 - 60 bulan	5.441.468	159.995	5.601.463	4.371.719	1.655.835	6.027.554
Lebih dari 60 bulan	2.931.178	32.652	2.963.830	2.301.380	21.958	2.323.338
Jumlah	**8.393.646**	**302.200**	**8.695.846**	**7.188.678**	**1.811.037**	**8.999.715**

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

Perubahan penyisihan kerugian adalah sebagai berikut:

Uraian	2002			2001		
	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah
Saldo awal tahun	4.626	27.816	32.442	1.166	1.517	2.683
Penyisihan (pembalikan) selama tahun berjalan	3.214	(1.619)	1.595	3.457	25.817	29.274
Selisih kurs	-	(2.607)	(2.607)	-	482	482
Penerimaan kembali efek-efek yang telah dihapuskan	-	-	-	3	-	3
Saldo akhir tahun	**7.840**	**23.590**	**31.430**	**4.626**	**27.816**	**32.442**

Manajemen Bank berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian yang dibentuk adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya efek-efek serta telah dihitung berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (lihat Catatan 2*j*).

Kolektibilitas Efek-efek:

	2002	2001
Lancar	13.442.197	12.287.422
Macet	16.103	14.867
Jumlah	13.458.300	12.302.289
Dikurangi penyisihan kerugian	31.430	32.442
Bersih	**13.426.870**	**12.269.847**

Rincian penerbit obligasi, Sertifikat Bank Indonesia, SBPU, Floating Rate Notes (FRN), Exchange Offer, Wesel dan lain-lain yang dimiliki hingga jatuh tempo tersebut adalah sebagai berikut:

	2002	2001
Obligasi		
Pemerintah Republik Indonesia	8.270.674	6.772.132
Perum Pegadaian	17.600	17.000
PT Indosat Tbk	17.000	17.000
PT Ultrajaya Tbk	15.000	15.000
PT Semen Gresik Tbk	14.989	15.000
PT HM Sampoerna Tbk	14.816	14.724
PT Astra International Tbk	12.546	15.937
PT Astra Sedaya Finance	10.000	-
PT Aplikanusa Lintas Arta	21	-
PT Lontar Papyrus	-	3.900
	8.372.646	6.870.693

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

	2002	2001
Sertifikat Bank Indonesia		
Bank Indonesia	21.000	415.018
SBPU		
PT Bank Niaga Tbk	-	100.000
FRN		
PT Bank Mandiri (Persero)	-	103.729
Exchange offer		
PT Bank Umum Nasional (BBKU)	109.755	-
PT Bank Dagang Nasional Indonesia (BBO)	94.901	62.404
PT Bank Uppindo	23.554	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)	19.717	299.458
PT Bank Mandiri (Persero)	15.935	475.335
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	253.074
PT Bank BIRA (BBKU)	-	193.220
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	74.314
PT Bank Inter-Pacific Tbk	-	40.679
	263.862	1.398.484
Wesel	-	5.705
Lain-lain		
Indonesian Sovereign Fund IV	29.446	72.800
Efek Elnusa	8.892	11.328
PT Garuda Indonesia	-	21.958
	38.338	106.086
Jumlah	**8.695.846**	**8.999.715**

Berdasarkan data dari Bursa Efek Surabaya yang berasal dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo), rincian peringkat obligasi adalah sebagai berikut:

	2002	2001
Perum Pegadaian VIII Tahun 2001 Seri A	idA+	idA+
Perum Pegadaian IX Tahun 2002 Seri B	idAA-	-
Indosat I Tahun 2001 Seri A	idAA+	idAA+
Astra International III Tahun 1999 Seri II	idB+	idB+
Ultrajaya II Tahun 2001 Seri B	idBBB+	idBBB+
Semen Gresik I Tahun 2001 Seri B	idA+	idA
HM Sampoerna I Tahun 2000	idAA	idAA-
Astra Sedaya Finance II Tahun 2002	idA	-

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

	2002	2001
Lontar Papyrus I Tahun 2000 Seri A	idD	-
PLN V Tahun 1996 Seri B (Agustus)	-	idB
Berlian Laju Tanker I Tahun 2000 Seri A	idA-	-
Indofood Sukses Makmur I Tahun 2000	idAA+	-
Dankos Laboratories I Tahun 2000 Seri A	idA-	-
Lautan Luas I Tahun 2000 Seri A	idA	-
Ricky Putra Globalindo I Tahun 2000 Seri A	B+	-
Selamat Sempurna I Tahun 2000	idA	idAA-
Tjiwi Kimia I Tahun 1996	idD	idD
Bank DKI III Tahun 1997	idBBB-	idBB+
Bank Nagari IV Tahun 1997 Seri A	-	idBBB-

Suku bunga rata-rata tahunan efek-efek dalam Rupiah berkisar antara 10,00% sampai dengan 20,38% pada tahun 2002 dan 2001, sedangkan suku bunga rata-rata tahunan efek-efek dalam valuta asing berkisar antara 2,88% sampai dengan 10,38% pada tahun 2002 dan antara 3,96% sampai dengan 10,09% pada tahun 2001.

Obligasi pemerintah (pihak yang mempunyai hubungan istimewa) yang dimiliki pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001 merupakan obligasi Pemerintah Republik Indonesia yang diperoleh dengan dana setoran modal Pemerintah (atas nama BPPN) dan berasal dari peleburan usaha sebagai berikut:

	2002	2001
Saldo awal tahun	9.832.504	10.025.946
Penempatan terbatas dalam rangka peleburan usaha (lihat Catatan 27)	1.863.256	-
Jumlah	11.695.760	10.025.946
Dikurangi:		
Penjualan	(11.860)	(182.800)
Jatuh tempo	(186)	-
Laba (rugi) yang belum direalisasi - Tersedia untuk dijual	7.767	(10.529)
Laba (rugi) yang belum direalisasi - Diperdagangkan	80	(113)
Saldo akhir tahun	**11.691.561**	**9.832.504**

Obligasi Pemerintah ini terdiri dari obligasi dengan suku bunga tetap dan obligasi dengan suku bunga mengambang masing-masing sejumlah Rp 4.882.105 dan Rp 6.809.456 pada tanggal 31 Desember 2002. Obligasi dengan suku bunga tetap memiliki suku bunga tahunan yang berkisar antara 10,00% sampai dengan 16,50%, sedangkan obligasi dengan suku bunga mengambang memiliki suku bunga tahunan sebesar suku bunga Sertifikat Bank Indonesia jangka waktu 3 bulan atau surat hutang lain dari Pemerintah. Pada tanggal 31 Desember 2002, suku bunga tahunan obligasi dengan suku bunga mengambang adalah berkisar antara 14,11% sampai dengan 17,63%. Pembayaran bunga atas obligasi dengan suku bunga tetap adalah setiap 6 (enam) bulan sedangkan atas obligasi dengan suku bunga mengambang adalah setiap 3 (tiga) bulan. Obligasi-obligasi ini akan jatuh tempo pada berbagai tanggal antara 25 Februari 2003 sampai dengan 25 Juli 2009, namun Pemerintah dapat membeli kembali obligasi ini sebelum tanggal jatuh temponya pada harga pasar.

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

Sehubungan dengan peleburan usaha Bank dengan 4 (empat) bank peserta penggabungan, pada tanggal 27 September 2002, Pemerintah Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Menteri Keuangan menerbitkan Obligasi Pemerintah sebesar Rp 1.863.256. Obligasi dengan suku bunga tetap tersebut diterbitkan dalam 3 (tiga) seri, yaitu:

- Seri FR0004

Jumlah pokok	:	Rp 542.593
Tanggal jatuh tempo	:	15 Februari 2006
Tingkat bunga	:	12,125% per tahun

- Seri FR0008

Jumlah pokok	:	Rp 402.049
Tanggal jatuh tempo	:	15 Mei 2005
Tingkat bunga	:	16,5% per tahun

- Seri FR0009

Jumlah pokok	:	Rp 918.614
Tanggal jatuh tempo	:	15 Mei 2005
Tingkat bunga	:	10% per tahun

Pada tanggal 31 Desember 2001, seluruh obligasi Pemerintah (Universal) yang diklasifikasikan sebagai efek yang tersedia untuk dijual sebesar Rp 1.849.110 digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima yang terdiri dari obligasi dengan nilai nominal Rp 1.733.610 dijadikan jaminan atas pinjaman jangka pendek (lihat Catatan 24) dan obligasi sebesar Rp 115.500 dijadikan jaminan atas Fasilitas Likuiditas Intraday (FLI) yang diperoleh dari Bank Indonesia. FLI tersebut jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2002 dan sampai dengan saat jatuh tempo Universal tidak menggunakan fasilitas tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2001, obligasi pemerintah (Universal) yang diperdagangkan dengan nilai nominal Rp 520.020 dijual dengan janji dibeli kembali. Pada saat jatuh tempo, efek yang dijual dengan janji dibeli kembali sudah dibeli kembali (lihat Catatan 20).

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia tahun 1999, Bank tidak diperkenankan untuk memperdagangkan obligasi pemerintah sampai dengan tanggal 31 Januari 2000. Berdasarkan peraturan yang sama, mulai tanggal 1 Februari 2000, bank dapat memperdagangkan obligasi pemerintah setinggi-tingginya 10% dari nilai keseluruhan obligasi pemerintah yang dimiliki. Peraturan ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan surat Bank Indonesia tanggal 31 Juli 2001 yang memperkenankan bank untuk memperdagangkan obligasi pemerintah tersebut yang ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 100% dari nilai keseluruhan obligasi pemerintah.

Sehubungan dengan peraturan tersebut, Bank telah mengubah tujuan klasifikasi sebagian obligasi pemerintah dari dimiliki hingga jatuh tempo menjadi diperdagangkan dan tersedia untuk dijual.

Berdasarkan Internal Memorandum No. 003/KO-INV/II/2002 tanggal 31 Mei 2002, No. 068/IM-DIR/VI/02 tanggal 27 Juni 2002 dan No. 075/IM-DIR/VIII/02 tanggal 29 Agustus 2002, manajemen Bank mengubah tujuan klasifikasi Efek-efek masing-masing sebesar US$ 19,2 juta, US$ 26,1 juta, US$ 51,27 juta untuk "exchange offer" dan US$ 45,5 juta FRN dari Dimiliki Hingga Jatuh Tempo menjadi untuk Diperdagangkan.

Sesuai dengan edaran yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2002, nilai pasar obligasi dengan suku bunga tetap masing-masing berkisar antara 91,64% sampai dengan 104,23% dari nilai nominal. Sementara pada tanggal 21 Maret 2003, nilai pasar berkisar antara 96,59% sampai dengan 109,69% dari nilai nominal suku bunga tetap.

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

Pendapatan bunga dari "exchange offer" diterima setahun dua kali yaitu setiap tanggal 25 Februari dan 25 Agustus untuk perjanjian "exchange offer" pertama dan setiap tanggal 1 Juni dan 1 Desember untuk perjanjian "exchange offer" kedua. Suku bunga "exchange offer" ini ditentukan setiap 6 bulan sekali. Perjanjian "exchange offer" ini dijamin oleh Bank Indonesia.

9. TAGIHAN DAN KEWAJIBAN DERIVATIF

Tagihan dan kewajiban derivatif seluruhnya berkualitas lancar dan terdiri atas:

2002				
Transaksi	Nilai Nosional Kontrak	Nilai Wajar	Tagihan Derivatif	Kewajiban Derivatif
Pihak ketiga				
Swap: - Jual dan Beli	44.750	45.551	801	-
	44.750	45.300	550	-
	44.750	45.246	496	-
	8.950	9.077	127	-
	8.950	9.058	108	-
Jumlah			2.082	-
Dikurangi penyisihan kerugian			21	-
Bersih			**2.061**	**-**

2001				
Transaksi	Nilai Nosional Kontrak	Nilai Wajar	Tagihan Derivatif	Kewajiban Derivatif
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa (lihat Catatan 27)				
Swap: - Jual	29.314	29.403	461	550
- Beli	29.314	29.375	384	323
			845	873
Pihak ketiga				
Swap: - Jual	77.100	76.649	757	656
- Beli	108.300	107.438	1.224	426
	1.040	1.040	-	-
Forward: - Jual	74.350	75.400	-	1.050
- Beli	61.816	62.400	584	-
Artamedia *			219	-
			2.784	2.132
Jumlah			3.629	3.005
Dikurangi penyisihan kerugian			41	-
Bersih			**3.588**	**3.005**

* Data tidak tersedia dari bank yang menggabungkan diri

Kontrak derivatif ini terdiri dari kontrak berjangka dan transaksi swap valuta asing yang meliputi berbagai jenis valuta asing di antaranya Yen Jepang, Dolar Amerika Serikat, Dolar Hong Kong, Euro Eropa, mata uang Rupiah dan lain-lain dengan jangka waktu 1 hari sampai 120 hari. Tidak terdapat transaksi derivatif dengan netting agreement.

9. TAGIHAN DAN KEWAJIBAN DERIVATIF (lanjutan)

Transaksi berjangka valuta asing yang terjadi merupakan transaksi yang dilakukan untuk kepentingan Bank dalam rangka pengelolaan likuiditas dan lindung nilai posisi. Bank memiliki kebijakan pengelolaan risiko dan limit-limit untuk mengendalikan risiko nilai tukar. Perubahan variabel risiko pasar dipantau secara aktif dalam rapat ALCO (Asset Liability Committee) yang dilakukan secara bulanan dan dijadikan acuan dalam menentukan strategi Bank. Pemantauan atas posisi devisa neto dan posisi kontrak valuta asing berjangka dilakukan secara berkala oleh satu unit tersendiri dan dilaporkan ke Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena kriteria-kriteria tertentu di dalam PSAK No. 55 dan untuk tujuan akuntansi tidak dapat dipenuhi, transaksi ini tidak dianggap sebagai transaksi lindung nilai yang efektif.

Manajemen Bank berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian yang dibentuk adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya tagihan derivatif, serta telah dihitung berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (lihat Catatan 2j).

10. KREDIT YANG DIBERIKAN

Kredit yang diberikan terdiri dari:

1) Jenis Kredit

	2002	2001
Rupiah		
Konsumsi	2.459.557	2.003.798
Modal kerja	1.935.787	2.575.643
Investasi	1.374.087	1.651.309
Program Pemerintah	634.630	721.227
Kartu kredit	306.010	131.493
Sindikasi	130.971	205.374
Karyawan	65.244	82.079
Lain-lain	-	656
	6.906.286	7.371.579
Valuta Asing		
Investasi	1.112.167	1.444.092
Sindikasi	536.964	678.007
Modal kerja	370.423	479.759
Konsumsi	-	1.047
	2.019.554	2.602.905
Jumlah	8.925.840	9.974.484
Dikurangi:		
Pendapatan bunga ditangguhkan*	12.038	-
Penyisihan kerugian	1.718.919	1.399.384
Bersih	**7.194.883**	**8.575.100**

* Untuk 2001, data tidak tersedia dari bank yang menggabungkan diri karena disajikan langsung sebagai pengurang saldo kredit

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

2) Sektor Ekonomi

	2002					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Rupiah						
Perdagangan, restoran dan hotel	1.116.000	57.731	2.503	28.386	80.791	1.285.411
Industri pengolahan	923.176	42.111	10.469	17.168	180.082	1.173.006
Pertanian, perburuan dan sarana pertanian	63.340	250.974	252.416	12.907	245.368	825.005
Jasa-jasa dunia usaha	438.029	25.480	27.101	9.116	85.245	584.971
Perumahan	368.490	48.629	8.453	2.268	4.236	432.076
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	151.624	33.970	54.550	-	1.043	241.187
Konstruksi	74.860	3.851	130	3.064	50.114	132.019
Pertambangan	41.032	27.472	2.374	-	73	70.951
Listrik, gas dan air	1.001	-	-	-	44.325	45.326
Jasa-jasa sosial/ masyarakat	31.017	362	-	-	-	31.379
Lain-lain	1.908.745	141.748	21.916	2.560	9.986	2.084.955
Jumlah Rupiah	5.117.314	632.328	379.912	75.469	701.263	6.906.286
Valuta Asing						
Industri pengolahan	329.481	22.782	132.566	166.657	598.871	1.250.357
Jasa-jasa dunia usaha	18.109	23.447	-	-	170.541	212.097
Konstruksi	6.514	-	-	-	140.895	147.409
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	68.075	31.914	-	-	8.943	108.932
Perdagangan, restoran dan hotel	44.660	41.024	-	-	20.458	106.142
Pertanian, perburuan dan sarana pertanian	695	-	7.066	-	6.116	13.877
Pertambangan	7.186	2.688	-	-	-	9.874
Lain-lain	170.866	-	-	-	-	170.866
Jumlah Valuta Asing	645.586	121.855	139.632	166.657	945.824	2.019.554
Jumlah	5.762.900	754.183	519.544	242.126	1.647.087	8.925.840
Penyisihan kerugian	185.779	37.709	70.309	104.703	1.320.419	1.718.919
Pendapatan bunga ditangguhkan						12.038
Bersih						7.194.883

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

2) Sektor Ekonomi (sebelum dikurangi penyisihan kerugian) (lanjutan)

	2001					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Rupiah						
Industri pengolahan	1.112.055	74.867	26.783	40.696	252.428	1.506.829
Perdagangan, restoran dan hotel	1.200.257	33.209	30.771	22.757	80.189	1.367.183
Pertanian, perburuan dan sarana pertanian	421.793	261.797	-	146.004	39.440	869.034
Jasa-jasa dunia usaha	339.811	1.683	8.549	8.248	31.733	390.024
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	317.460	37.042	2.345	151	735	357.733
Perumahan	217.724	16.679	775	210	2.515	237.903
Konstruksi	85.051	318	436	3.308	57.306	146.419
Jasa-jasa sosial/ masyarakat	57.386	104	284	-	283	58.057
Listrik, gas dan air	541	-	-	-	44.325	44.866
Pertambangan	15.978	2.592	83	-	-	18.653
Lain-lain *	2.067.653	182.128	53.079	36.881	35.137	2.374.878
Jumlah Rupiah	5.835.709	610.419	123.105	258.255	544.091	7.371.579
Valuta Asing						
Industri pengolahan	643.872	230.694	174.454	176.949	579.669	1.805.638
Jasa-jasa dunia usaha	33.306	203.925	-	-	18.200	255.431
Perdagangan, restoran dan hotel	37.648	7.779	46.652	36.915	90.073	219.067
Konstruksi	-	-	-	-	167.624	167.624
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	70.499	-	-	12.480	-	82.979
Jasa-jasa sosial/ masyarakat	-	-	-	42.499	-	42.499
Pertambangan	-	1.745	11.886	-	-	13.631
Pertanian, perburuan dan sarana pertanian	2.569	-	-	-	-	2.569
Lain-lain *	1.047	4.204	8.216	-	-	13.467
Jumlah Valuta Asing	788.941	448.347	241.208	268.843	855.566	2.602.905
Jumlah	**6.624.650**	**1.058.766**	**364.313**	**527.098**	**1.399.657**	**9.974.484**

* Termasuk data dari Artamedia yang tidak dapat diklasifikasikan per sektor ekonomi dan per kolektibilitas

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

3) Jangka Waktu

Klasifikasi kredit berdasarkan jangka waktu perjanjian kredit dan sisa umur sampai dengan saat jatuh temponya adalah sebagai berikut (sebelum dikurangi penyisihan kerugian dan pendapatan bunga ditangguhkan untuk tahun 2002 dan sebelum dikurangi penyisihan kerugian untuk tahun 2001):

a. Berdasarkan jangka waktu perjanjian kredit

Uraian	2002			2001		
	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah
Kurang dari 1 tahun	2.978.699	540.938	3.519.637	3.073.195	438.304	3.511.499
1 - 2 tahun	512.868	6.508	519.376	677.393	79.069	756.462
2 - 5 tahun	2.037.634	609.361	2.646.995	2.087.421	695.184	2.782.605
Lebih dari 5 tahun	1.377.085	862.747	2.239.832	1.533.570	1.390.348	2.923.918
Jumlah	**6.906.286**	**2.019.554**	**8.925.840**	**7.371.579**	**2.602.905**	**9.974.484**

b. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo

Uraian	2002			2001		
	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah
1 tahun	2.669.025	690.858	3.359.883	2.893.710	768.660	3.662.370
1 - 2 tahun	1.615.317	137.855	1.753.172	670.902	232.829	903.731
2 - 5 tahun	1.578.060	972.747	2.550.807	2.121.335	770.580	2.891.915
Lebih dari 5 tahun	1.043.884	218.094	1.261.978	1.218.249	695.615	1.913.864
Primex *	-	-	-	467.383	135.221	602.604
Jumlah	**6.906.286**	**2.019.554**	**8.925.840**	**7.371.579**	**2.602.905**	**9.974.484**

* Data tidak tersedia dari bank yang menggabungkan diri

Berikut adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan:

a. Suku bunga rata-rata tahunan dalam Rupiah adalah berkisar antara 14,00% sampai dengan 23,52% pada tahun 2002 dan antara 14,73% sampai dengan 21,50% pada tahun 2001, sedangkan dalam valuta asing adalah berkisar antara 1,90% sampai dengan 10,35% pada tahun 2002 dan antara 7,00% sampai dengan 11,11% pada tahun 2001.

b. Kredit pada umumnya dijamin dengan giro, deposito berjangka atau harta tak bergerak yang diaktakan dengan akta pemberian hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, atau jaminan lain yang umumnya diterima oleh Bank dan Anak perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha bank (lihat Catatan 19).

c. Kredit modal kerja dan investasi diberikan kepada debitur untuk kepentingan modal kerja dan barang-barang modalnya.

d. Kredit modal kerja mencakup pinjaman rekening koran dan cerukan.

e. Kredit konsumsi terdiri dari kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor dan kredit perorangan lainnya.

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

f. Selama tahun 2002 dan 2001 kredit yang telah direstrukturisasi dilakukan dengan mengubah persyaratan pokok dan bunga, perpanjangan jangka waktu serta penurunan suku bunga. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2002, jumlah kredit yang direstrukturisasi adalah sebesar Rp 860.227 atau 9,72% dari jumlah kredit. Dalam saldo kredit yang direstrukturisasi tersebut termasuk bunga yang dialihkan menjadi pokok kredit. Dalam restrukturisasi kredit tersebut tidak termasuk restrukturisasi dengan cara "debt-to-equity participation" masing-masing sebesar Rp 69.908 dan Rp 194.508 pada tahun 2002 dan 2001 (lihat Catatan 13).

g. Kredit sindikasi merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama (sindikasi) dengan bank-bank lain. Keikutsertaan Bank sebagai anggota dalam kredit sindikasi adalah berkisar antara 0,40% sampai dengan 19,00% dari masing-masing fasilitas kredit sindikasi pada tahun 2002 dan antara 0,27% sampai dengan 19,00% dari masing-masing fasilitas kredit sindikasi pada tahun 2001.

h. Kredit yang diberikan kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa terdiri dari:

	2002	2001
Karyawan kunci	10.839	3.804
Perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa		
PT Astra International Tbk (lihat Catatan 27)	-	192.877
PT Astra Graphia Tbk (lihat Catatan 27)	-	12.108
Lain-lain	-	1.434
Jumlah	**10.839**	**210.223**
Persentase dari Jumlah Aktiva Konsolidasi	**0,04%**	**0,79%**

Pada tahun 2001, kredit yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa tidak termasuk kredit di mana pihak yang mempunyai hubungan istimewa bertindak sebagai perantara bagi Bank dalam memberikan kredit kepada pengusaha kecil (lihat Catatan 10o).

Kredit yang diberikan kepada karyawan kunci berupa kredit untuk membeli kendaraan, rumah dan keperluan lainnya dengan jangka waktu berkisar antara 1 sampai dengan 20 tahun, dibebani bunga dan dibayar kembali melalui pemotongan gaji setiap bulan.

Kredit yang diberikan kepada perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal seperti pada pihak ketiga.

i. Kredit yang telah dihentikan pembebanan bunganya ("non-performing loan") oleh Bank sebesar Rp 2.408.757 atau 27,20% dari jumlah kredit yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2002 dan Rp 2.291.313 atau 23,09% dari jumlah kredit yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2001. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 3/25/PBI/2001 tanggal 26 Desember 2001, rasio dari kredit "non-performing" tidak boleh melebihi maksimum 5% dari jumlah kredit yang diberikan Bank.

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

j. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) pada tanggal 31 Desember 2002 tidak melampaui ketentuan BMPK untuk pihak terkait sedangkan untuk pihak tidak terkait terdapat pelampauan BMPK sebesar Rp 32.503 (3,10%).

k. Perubahan penyisihan kerugian adalah sebagai berikut:

Keterangan	2002			2001		
	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah
Saldo awal tahun	655.196	744.188	1.399.384	378.469	481.923	860.392
Pembalikan penyisihan Anak perusahaan yang dijual	-	-	-	-	(122.012)	(122.012)
Penyisihan selama tahun berjalan	740.890	200.378	941.268	483.657	484.094	967.751
Selisih kurs	-	(98.213)	(98.213)	-	654	654
Penghapusan selama tahun berjalan	(38.953)	(57.473)	(96.426)	(214.008)	(99.018)	(313.026)
Penghapusan karena penjualan kredit - PPAI	(282.314)	(266.027)	(548.341)	-	-	-
Laba (rugi) restrukturisasi	236	-	236	1.258	(1.987)	(729)
Penerimaan kembali kredit yang dihapuskan	4.288	1.599	5.887	5.820	534	6.354
Penerimaan dari penjualan kredit - PPAI	54.007	61.117	115.124	-	-	-
Saldo akhir tahun	1.133.350	585.569	1.718.919	655.196	744.188	1.399.384

Manajemen Bank berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian yang dibentuk adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya kredit yang diberikan serta telah dihitung berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (lihat Catatan 2j).

l. Bank memiliki unit tersendiri yang menangani proses pengelolaan risiko di mana tanggung jawab utama unit ini dalam hal pengelolaan risiko kredit adalah menetapkan batas risiko pasar dan risiko kredit berdasarkan pertimbangan mengenai produk, mitra usaha, industri dan letak geografis. Unit ini akan mengembangkan, mengkomunikasikan, membantu dan memantau unit-unit usaha dalam mengimplementasikan kebijakan dan metodologi pengelolaan risiko dalam rangka memperkuat kemampuan Bank dalam mengelola dan mengevaluasi risiko kredit.

Bank juga memiliki pedoman kebijakan perkreditan yang mengatur mengenai kebijakan penyaluran kredit hingga administrasi perkreditan, termasuk kebijakan penelaahan atas kualitas kredit, kecukupan penyisihan kerugian dan penilaian atas agunan kredit. Proses persetujuan kredit telah memiliki tahapan yang baku di mana proposal kredit akan dievaluasi oleh pejabat yang berwenang. Tingkat persetujuan kredit telah ditentukan dengan wewenang tertinggi berada pada Komite Kredit. Di samping itu, manajemen Bank termasuk Direksi, senantiasa memelihara hubungan yang baik dengan debitur, baik dengan pemilik maupun dengan pihak manajemen, antara lain dengan melakukan kunjungan secara berkala, sehingga dapat diperoleh informasi secara jelas mengenai usaha debitur.

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

m. Sehubungan dengan Pasal 10 surat keputusan bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia No. 117/KMK.017/1999 / No. 31/15/KEP/GBI tanggal 26 Maret 1999 mengenai realisasi dari program rekapitalisasi Bank Take Over (BTO), Bank mengalihkan dan menyerahkan semua hak dan kepemilikan dari aktiva produktif "non-performing" kepada BPPN sesuai Perjanjian Jual Beli atas Barang-Barang Bergerak yang telah dilegalisasi oleh Notaris No. 1180/leg/2000, Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang yang telah dilegalisasi oleh Notaris No. 1181/leg/2000 tanggal 29 September 2000 dan Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Hak yang diaktakan dengan akta notaris Ny. Asmara Noer, S.H., No. 21 tanggal 29 September 2000. Aktiva produktif "non-performing" yang dialihkan berjumlah Rp 2.035.744, telah dibentuk penyisihan kerugian seluruhnya dan dialihkan dengan harga nihil. Aktiva "non-performing" tersebut tetap berada dalam pengelolaan, pengurusan dan pengawasan Bank sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Aktiva Sementara yang telah dilegalisasi oleh Notaris No. 1179/leg/2000 tanggal 29 September 2000. Jangka waktu pengelolaan ini berlaku 6 bulan sejak tanggal perjanjian. Setelah jangka waktu perjanjian ini berakhir, kecuali BPPN memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 30 hari kalender sebelum akhir masa berlaku perjanjian, perjanjian ini secara otomatis diperpanjang jangka waktunya untuk 6 bulan berikutnya.

Berdasarkan surat BPPN No. S-243/ADA-OSM/BPPN/0601 tanggal 27 Juni 2001, jangka waktu pelaksanaan pengelolaan aktiva sementara telah diakhiri pada bulan Mei 2001. Oleh karena itu, sejak bulan Juni 2001, tidak ada lagi aktiva "non-performing" yang dialihkan ke BPPN yang berada dalam pengelolaan, pengurusan dan pengawasan Bank.

n. Pada tanggal 19 April 2001, Bank mengadakan perjanjian asuransi kredit ekspor dengan PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI). Kredit yang ditanggung adalah kredit baru dengan kolektibilitas lancar atau perpanjangan dengan kolektibilitas lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar dan diragukan yang jangka waktunya maksimum 12 bulan dengan maksimum fasilitas sebesar Rp 250 sampai dengan Rp 3.500 atau US$ 25.000 sampai dengan US$ 350.000. Risiko yang ditanggung oleh ASEI adalah kerugian Bank yang disebabkan kegagalan nasabah untuk melunasi kredit dan telah dinyatakan kolektibilitas macet. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama. Tarif premi yang dikenakan adalah sebesar 0,8% sampai dengan 1% per tahun dari plafon, sedangkan untuk jangka waktu kredit kurang dari 1 tahun dihitung secara proporsional.

o. Pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001, kredit yang disalurkan dengan sistim pembiayaan bersama (joint financing) masing-masing sebesar Rp 1.560.178 dan Rp 2.197.747, diantaranya Bank mengadakan perjanjian kerjasama pemberian fasilitas pembiayaan bersama dengan PT Federal International Finance (FIF) dan PT Astra Sedaya Finance (ASF), masing-masing untuk menyalurkan kredit kendaraan motor dan mobil. Berdasarkan perjanjian, FIF dan ASF akan bertindak sebagai manajer fasilitas dan manajer jaminan. Bank, FIF dan ASF menanggung risiko kerugian atas piutang yang tidak tertagih sebesar porsi masing-masing dalam pembiayaan bersama tersebut. Saldo pembiayaan bersama untuk FIF dan ASF tersebut pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001 masing-masing sebesar Rp 1.062.919 dan Rp 954.657.

p. Pada bulan Juli 2002, Bank mengadakan perjanjian pengalihan piutang dengan PT Tunas Financindo Sarana (TFS). Piutang yang diambil alih oleh Bank adalah piutang TFS kepada debiturnya dalam rangka menyalurkan kredit mobil yang jangka waktu pembiayaannya maksimal tiga (3) tahun. Nilai piutang yang dialihkan dari TFS kepada Bank adalah sesuai dengan daftar debiturnya. Piutang yang dialihkan harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, antara lain debitur tidak boleh fiktif dan dalam status lancar. Apabila TFS tidak dapat memenuhi kriteria tersebut, maka TFS wajib untuk membeli kembali piutang tersebut dari Bank.

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

Sehubungan dengan pengalihan piutang tersebut, berdasarkan perjanjian pengelolaan piutang, Bank memberikan kuasa kepada TFS untuk melakukan tindakan pengelolaan termasuk melakukan penagihan kepada para debitur sampai hutang debitur tersebut lunas. Saldo pengalihan piutang dari TFS sebesar Rp 22.678 pada tanggal 31 Desember 2002.

q. Pada tahun 2002, Bank melakukan novasi kredit yang diberikan sebesar US$ 1,12 juta melalui penggantian debitur dari Sea Flyte Ferry Services Pte., Ltd. ke PT Pelayaran Baruna Binasegara.

r. Pada tanggal 31 Desember 2001, Bank tidak dapat menyajikan kredit yang diberikan dari Primex berdasarkan sisa umur jatuh tempo dan dari Artamedia berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas, karena Primex dan Artamedia tidak dapat menyediakan data tersebut.

s. Pada bulan November 2002, Bank melaksanakan Program Penjualan Asset Inti (PPAI) untuk kredit yang sudah diklasifikasikan sebagai macet dan sudah seluruhnya dibentuk penyisihan. Saldo kredit yang dijual dalam PPAI tersebut adalah sebesar Rp 548.341 dengan harga jual sebesar Rp 115.124.

11. TAGIHAN PREMI

Akun ini merupakan piutang dari pemegang polis Anak perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha asuransi.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2002 dan 2001 tidak dibentuk penyisihan kerugian karena manajemen Anak perusahaan berpendapat bahwa tagihan premi dapat tertagih seluruhnya.

12. TAGIHAN AKSEPTASI

Tagihan akseptasi berdasarkan counterparty merupakan tagihan kepada nasabah dan bank dengan rincian sebagai berikut:

	2002	2001
Rupiah		
Bank	599	-
Valuta Asing		
Bank	1.802	-
Nasabah		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa (lihat Catatan 27)	-	6.805
Pihak ketiga	54.637	55.965
	56.439	62.770
Jumlah	57.038	62.770
Dikurangi penyisihan kerugian	4.316	628
Bersih	**52.722**	**62.142**

12. TAGIHAN AKSEPTASI (lanjutan)

Rincian tagihan akseptasi berdasarkan jangka waktu jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	2002	2001
Rupiah		
1 - 3 bulan	106	-
3 - 6 bulan	490	-
6 - 12 bulan	3	-
	599	-
Valuta Asing		
Kurang dari 1 bulan	-	1.254
1 - 3 bulan	1.448	20.145
3 - 6 bulan	32.230	38.345
6 - 12 bulan	21.750	2.831
Lebih dari 12 bulan	1.011	195
	56.439	62.770
Jumlah	57.038	62.770
Dikurangi penyisihan kerugian	4.316	628
Bersih	**52.722**	**62.142**

Kolektibilitas Tagihan Akseptasi:

	2002	2001
Lancar	51.962	62.770
Dalam perhatian khusus	1.347	-
Macet	3.729	-
Jumlah	57.038	62.770
Dikurangi penyisihan kerugian	4.316	628
Bersih	**52.722**	**62.142**

Perubahan penyisihan kerugian adalah sebagai berikut:

	2002	2001
Saldo awal tahun	628	6.715
Penyisihan (pembalikan) selama tahun berjalan	3.761	(5.904)
Selisih kurs	(73)	(183)
Saldo akhir tahun	**4.316**	**628**

Manajemen Bank berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian yang dibentuk adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tagihan akseptasi serta telah dihitung berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (lihat Catatan 2j).

13. PENYERTAAN SAHAM

Rincian penyertaan saham adalah sebagai berikut:

	2002				
	Bidang Usaha	Persentase Pemilikan	Biaya Perolehan	Akumulasi Bagian atas Laba Bersih Perusahaan Asosiasi	Nilai Tercatat
Metode Ekuitas (Equity Method)					
PT Bali Walden UOB Venture Capital	Modal Ventura	35,00%	3.500	1.973	5.473
PT BPR Bali Budikusuma Mandiri	Bank	38,09	26	188	214
			3.526	2.161	5.687
Metode Biaya (Cost Method)					
Tidak dalam rangka restrukturisasi kredit					
Orient Bancorporation, San Fransisco, Amerika Serikat	Bank	4,75	4.242	-	4.242
PT KDLC BancBali Finance	Pembiayaan Konsumen dan Sewa Guna Usaha	15,00	3.617	-	3.617
UOB Venture Investment Ltd., Singapura	Modal Ventura	5,22	1.135	-	1.135
PT Sarana Bali Ventura	Modal Ventura	4,66	305	-	305
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	1,00	300	-	300
PT Bursa Efek Surabaya	Pasar Modal	1,56	135	-	135
PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia	Investasi	1,91	128	-	128
PT Aplikanusa Lintasarta	Komunikasi	1,91	111	-	111
PT Bursa Efek Jakarta	Pasar Modal	3,00	60	-	60
PT Pemeringkat Efek Indonesia	Pemeringkat Efek	0,07	4	-	4
PT Bank UFJ Indonesia	Bank	3,77	-	-	-
			10.037	-	10.037
Dalam rangka restrukturisasi kredit					
PT Indra Eramulti Logam Industri	Industri	68,75	38.000	-	38.000
PT Zebra Nusantara Tbk	Transportasi	29,36	12.500	-	12.500
PT Texmaco Perkasa Engineering Tbk	Mesin dan Alat berat	0,49	12.000	-	12.000
PT Catur Karya Mukti	Industri	99,00	5.000	-	5.000
PT KDLC BancBali Finance	Pembiayaan Konsumen dan Sewa Guna Usaha	15,00	2.408	-	2.408
			69.908	-	69.908
Jumlah			83.471	2.161	85.632
Dikurangi penyisihan kerugian			-	-	57.581
Bersih			83.471	2.161	28.051

13. PENYERTAAN SAHAM (lanjutan)

	2001				
	Bidang Usaha	Persentase Pemilikan	Biaya Perolehan	Akumulasi Bagian atas Laba Bersih Perusahaan Asosiasi	Nilai Tercatat
Metode Ekuitas (Equity Method)					
PT United Overseas Bank Indonesia	Bank	20,10%	10.064	60.663	70.727
PT Bali Wakden UOB Venture Capital	Modal Ventura	35,00	3.500	1.505	5.005
PT Willis Corroon BancBali	Asuransi	48,00	1.440	3.402	4.842
PT BPR Bali Budikusuma Mandiri	Bank	39,17	26	121	147
			15.030	65.691	80.721
Metode Biaya (Cost Method)					
Tidak dalam rangka restrukturisasi kredit					
Orient Bancorporation, San Fransisco, Amerika Serikat	Bank	4,75	4.242	-	4.242
PT KDLC BancBali Finance	Pembiayaan Konsumen dan Sewa Guna Usaha	15,00	3.617	-	3.617
UOB Venture Investment Ltd., Singapura	Modal Ventura	5,22	1.512	-	1.512
PT Sarana Bali Ventura	Modal Ventura	4,88	305	-	305
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	1,00	300	-	300
PT Bursa Efek Surabaya	Pasar Modal	1,56	135	-	135
PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia	Investasi	1,91	128	-	128
PT Aplikanusa Lintasarta	Komunikasi	0,40	72	-	72
PT Bursa Efek Jakarta	Pasar Modal	3,00	60	-	60
PT Pemeringkat Efek Indonesia	Pemeringkat Efek	0,07	4	-	4
PT Bank UFJ Indonesia	Bank	3,77	-	-	-
			10.375	-	10.375
Dalam rangka restrukturisasi kredit					
PT Tunggal Maju Asri	Industri	80,00	124.600	-	124.600
PT Indra Eramulti Logam Industri	Industri	68,75	38.000	-	38.000
PT Zebra Nusantara Tbk	Transportasi	29,36	12.500	-	12.500
PT Texmaco Perkasa Engineering Tbk	Mesin dan Alat berat	0,49	12.000	-	12.000
PT Catur Karya Mukti	Industri	99,00	5.000	-	5.000
PT KDLC BancBali Finance	Pembiayaan Konsumen dan Sewa Guna Usaha	15,00	2.408	-	2.408
			194.508	-	194.508
Jumlah			219.913	65.691	285.804
Dikurangi penyisihan kerugian			-	-	148.938
Bersih			219.913	65.691	136.866

13. PENYERTAAN SAHAM (lanjutan)

Kolektibilitas Penyertaan Saham:

	2002	2001
Induk Perusahaan		
Lancar	75.352	151.888
Dalam perhatian khusus	12.500	-
Kurang lancar	7.160	1.512
Macet	55.128	62
Universal	-	192.100 *
	150.140	345.562
Anak Perusahaan	199	199
Eliminasi	(64.707)	(60.157)
Jumlah	85.632	285.604
Dikurangi penyisihan kerugian	57.581	148.938
Bersih	**28.051**	**136.666**

* Data tidak tersedia

Perubahan penyisihan kerugian adalah sebagai berikut:

	2002	2001
Saldo awal tahun	148.938	72.220
Penyisihan selama tahun berjalan	33.286	76.718
Selisih kurs	(43)	-
Penghapusan karena penjualan penyertaan saham - PPAI	(123.354)	-
Penerimaan dari penjualan penyertaan saham - PPAI	(1.246)	-
Saldo akhir tahun	**57.581**	**148.938**

Manajemen Bank berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian yang dibentuk adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas penyertaan saham serta telah dihitung berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (lihat Catatan 2j).

Pada bulan November 2002, Bank melaksanakan PPAI untuk penyertaan saham dalam rangka restrukturisasi kredit yang sudah diklasifikasikan sebagai macet dan sudah seluruhnya dibentuk penyisihan. Saldo penyertaan yang dijual dalam PPAI tersebut adalah sebesar Rp 124.600 dengan harga jual sebesar Rp 1.246.

Berdasarkan "Sale and Purchase of Share Agreement" tanggal 26 September 2002, telah ditandatangani kesepakatan untuk menjual kepada United Overseas Bank Ltd., Singapura seluruh saham Bank pada PT United Overseas Bank Indonesia dengan harga Rp 95.000.

Berdasarkan "Agreement for the Sale and Purchase Shares in PT Willis Corroon BancBali" tanggal 16 Juli 2002, telah ditandatangani kesepakatan untuk menjual seluruh saham Bank kepada Willis Europe BV, Belanda dan PT Erakonsultindo Yadhikarya Indonesia masing-masing sebanyak 8.400 saham dan 6.000 saham dengan harga Rp 5.522.

13. PENYERTAAN SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT KDLC BancBali Finance No. 11 tanggal 22 Mei 2001, pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal disetor dari Rp 15.000 menjadi Rp 39.500 yang berasal dari konversi kredit ke saham. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 11 Mei 2001, Bank telah melakukan penyertaan sementara pada PT KDLC BancBali Finance dalam rangka restrukturisasi kredit sebesar Rp 2.408 yang dicatat dengan metode biaya, sehingga persentase pemilikan atas penyertaan Bank turun dari 23,50% menjadi 15,00%.

Berdasarkan risalah rapat pemegang saham PT Bali Walden UOB Venture Capital tanggal 26 Juni 2000, pemegang saham mayoritas mengajukan proposal untuk melikuidasi perusahaan tersebut dan meminta persetujuan dari pemegang saham lainnya. Berdasarkan surat BPPN No. 528/BR/0900 tanggal 6 September 2000, BPPN telah menyetujui likuidasi atas perusahaan tersebut. Berdasarkan pernyataan keputusan pemegang saham PT Bali Walden UOB Venture Capital pada tanggal 5 Desember 2000 yang diaktakan dengan akta notaris Kun Hidayat, S.H. pada tanggal yang sama, para pemegang saham telah menyetujui likuidasi dari perusahaan tersebut sejak tanggal 29 November 2000. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, proses likuidasi masih berlangsung.

Berdasarkan surat pemberitahuan dari Direksi UOB Venture Investment Ltd., Singapura kepada pemegang saham tanggal 16 Agustus 2002, UOB Venture Investment Ltd. menarik kembali 10% dari seluruh saham preferennya pada tanggal 30 September 2002. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 30 Desember 2002, Bank telah menerima Rp 1.527 (SGD 299.700) dari hasil penarikan kembali saham tersebut.

Berdasarkan surat pemberitahuan dari Direksi UOB Venture Investment Ltd., Singapura kepada pemegang saham tanggal 24 Mei 2001, UOB Venture Investment Ltd. menarik kembali 30% dari seluruh saham preferennya. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 17 Januari 2002 Bank telah menerima Rp 5.056 (SGD 899.100) dari hasil penarikan kembali saham tersebut.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Prudential BancBali Life Assurance tanggal 25 Mei 2000 yang diaktakan dalam akta notaris Singgih Susilo, S.H., No. 149 pada tanggal yang sama, pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal dasar serta modal yang ditempatkan dan disetornya. Namun demikian Bank tidak ikut berpartisipasi dalam peningkatan modal disetor tersebut, yang mengakibatkan penurunan persentase pemilikan atas penyertaan Bank dari 20,00% menjadi 11,76%. Berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, S.H., No. 17 tanggal 10 Agustus 2001, telah ditandatangani kesepakatan untuk menjual seluruh saham Bank pada PT Prudential BancBali Life Assurance dengan harga Rp 6.000. Berdasarkan "Termination Agreement" tanggal 10 Agustus 2001, Bank menerima ganti rugi atas pengakhiran perjanjian dengan PT Prudential BancBali Life Assurance sebesar Rp 61.500 (lihat Catatan 38).

Pada tahun 1999, PT Bank Sanwa Indonesia meningkatkan modal disetornya untuk memenuhi modal yang disyaratkan oleh Bank Indonesia. Namun demikian, Bank tidak ikut berpartisipasi dalam peningkatan modal disetor tersebut, yang mengakibatkan penurunan persentase kepemilikan atas penyertaan Bank dari 20,10% menjadi 5,03%. Sejak tanggal 31 Desember 1998, nilai tercatat dari penyertaan Bank pada PT Bank Sanwa Indonesia dinyatakan nihil karena akumulasi bagian atas rugi bersih perusahaan asosiasi telah melebihi nilai tercatat dari penyertaan. Berdasarkan Akta Merger No. 9 tanggal 18 Juli 2001 yang diaktakan dalam akta notaris Hendra Karyadi S.H., PT Bank Sanwa Indonesia telah berganti nama menjadi PT Bank UFJ Indonesia. Sehubungan dengan merger tersebut, PT Bank UFJ Indonesia meningkatkan modal disetornya dimana Bank tidak ikut berpartisipasi dalam peningkatan modal disetor tersebut, sehingga mengakibatkan penurunan persentase kepemilikan atas penyertaan Bank dari 5,03% menjadi 3,77%.

13. PENYERTAAN SAHAM (lanjutan)

Bagian Bank atas laba bersih perusahaan asosiasi berjumlah Rp 11.416 dan Rp 17.661 masing-masing untuk tahun 2002 dan 2001.

Bank menerima dividen kas dari penyertaan saham dengan metode ekuitas dan metode biaya pada tahun 2002 dan 2001 masing-masing sebesar Rp 17 dan Rp 2.980 dan Rp 1.005 dan Rp 83.

14. AKTIVA TETAP

Aktiva tetap terdiri dari:

	Saldo Awal 1 Januari 2002	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2002
Nilai Tercatat				
Pemilikan Langsung				
Tanah	299.354	115	1.120	298.349
Bangunan (lihat Catatan 41)	423.379	6.814	5.901	424.292
Perabot dan peralatan kantor	420.400	46.839	176.241	290.998
Kendaraan bermotor	16.284	7.499	15.613	8.170
Jumlah	1.159.417	61.267	198.875	1.021.809
Bangunan dalam penyelesaian	86	-	86	-
Aktiva sewa guna usaha				
Kendaraan bermotor	-	267	-	267
Jumlah Nilai Tercatat	1.159.503	61.534	198.961	1.022.076
Akumulasi Penyusutan				
Pemilikan Langsung				
Bangunan	82.251	22.568	2.468	102.351
Perabot dan peralatan kantor	286.374	39.484	139.155	186.703
Kendaraan bermotor	9.163	7.051	11.907	4.307
Jumlah	377.788	69.103	153.530	293.361
Aktiva sewa guna usaha				
Kendaraan bermotor	-	22	-	22
Jumlah Akumulasi Penyusutan	377.788	69.125	153.530	293.383
Nilai Buku	**781.715**			**728.693**

	Saldo Awal 1 Januari 2001	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2001
Nilai Tercatat				
Pemilikan Langsung				
Tanah	319.511	7.560	27.717	299.354
Bangunan (lihat Catatan 41)	458.313	24.110	59.044	423.379
Perabot dan peralatan kantor	424.130	26.665	30.395	420.400
Kendaraan bermotor	13.641	5.990	3.347	16.284
Jumlah	1.215.595	64.325	120.503	1.159.417
Bangunan dalam penyelesaian	-	86	-	86
Jumlah Nilai Tercatat	1.215.595	64.411	120.503	1.159.503

14. AKTIVA TETAP (lanjutan)

	Saldo Awal 1 Januari 2001	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2001
Akumulasi Penyusutan				
Pemilikan Langsung				
Bangunan	71.669	22.864	3.372	91.161
Perabot dan peralatan kantor	266.525	49.605	26.311	289.819
Kendaraan bermotor	8.978	2.320	2.708	8.590
Selisih atas perubahan metode penyusutan (Universal)	(5.025)	-	6.757	(11.782)
Jumlah Akumulasi Penyusutan	342.147	74.789	39.148	377.788
Nilai Buku	**873.448**			**781.715**

Sehubungan dengan perubahan metode penyusutan aktiva tetap Universal agar sesuai dengan metode penyusutan aktiva tetap Bank, nilai buku aktiva tetap Universal pada tanggal 31 Desember 2001 berubah dari Rp 159.170 menjadi Rp 170.952. Mutasi aktiva tetap Universal untuk tahun 2001 tidak disajikan kembali dengan pertimbangan bahwa jumlah aktiva tetap Universal yang dijual dan dihapus buku tidak material sehingga efek yang ditimbulkan juga tidak signifikan.

Berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa No. Kep-02/WPJ.06/KP.0404/1997 tanggal 5 Agustus 1997, Bank telah mendapat persetujuan kantor pajak atas hasil penilaian kembali aktiva tetapnya per tanggal 31 Desember 1996 yang dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 507/KMK.04/1996 tanggal 13 Agustus 1996. Selisih penilaian kembali aktiva tetap tersebut adalah sebesar Rp 161.951.

Berdasarkan hasil penilaian tanggal 12 Mei 2000 dari Penilai Independen PT Inti Utama Penilai, dengan menggunakan metode pendekatan kapitalisasi pendapatan (income approach), terdapat penurunan nilai aktiva tetap atas tanah dan bangunan sebesar Rp 289.221, di mana sebesar Rp 102.001 dikompensasikan ke selisih penilaian kembali aktiva tetap dan sebesar Rp 187.220 dibebankan dalam beban bukan operasional tahun berjalan.

Rincian selisih penilaian kembali aktiva tetap dan pembukuannya dalam kelompok Ekuitas adalah sebagai berikut:

Tanah	161.833
Bangunan	(1.026)
Perabot dan peralatan kantor	1.144
Jumlah yang dibukukan dalam Aktiva Tetap	161.951
Pajak penghasilan final atas selisih penilaian kembali aktiva tetap	(16.376)
Selisih penilaian kembali aktiva tetap yang dibukukan di dalam kelompok Ekuitas	145.575
Pengaruh penurunan nilai atas tanah	(102.001)
Selisih penilaian kembali aktiva tetap pada akhir tahun	**43.574**

14. AKTIVA TETAP (lanjutan)

Di samping itu, 4 Bank Peserta Penggabungan (BPP) juga telah melakukan revaluasi aktiva tetap dengan rincian sebagai berikut:

Bank	Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak	Surat Keputusan Menteri Keuangan	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak	Penilai Independen	Metode Penilaian
Universal	No. Kep-07/WPJ.06/KP. 0404/2000 tanggal 14 Juli 2000	No. 384/KMK.04/ 1998 tanggal 14 Agustus 1998	No. SE-29/PJ.42/1998 tanggal 17 September 1998	PT Vigers Hagai Sejahtera tanggal 17 Mei 2000	Metode nilai pasar
Primex	-	No. 507/KMK.04/ 1996 tanggal 13 Agustus 1996	-	-	-
Artamedia	No. Kep. 513/WPJ.05/KP.09/ 1999 tanggal 31 Maret 1999	No. 384/KMK.04/ 1998 tanggal 14 Agustus 1998	No. SE-29/PS.42/1998 tanggal 7 September 1998	PT Ujatek Baru tanggal 16 Maret 1999	Metode nilai pasar untuk penilaian tanah dan metode kalkulasi biaya untuk penilaian aktiva tetap lainnya
Patriot	No. Kep-78/WPJ.05/KP. 10/1997 tanggal 24 Juli 1997	No. 507/KMK.04/ 1996 tanggal 13 Agustus 1996	-	PT Cipta Daya Guna Mandiri tanggal 25 April 1997	Metode nilai pasar

Rincian selisih hasil penilaian kembali aktiva tetap 4 BPP adalah sebagai berikut:

Tanah	35.601
Bangunan	34.471
Perabot dan peralatan kantor	1.371
Primex (perincian tidak tersedia)	16.403
Jumlah yang dibukukan dalam Aktiva Tetap	**87.846**

Penambahan aktiva tetap Bank selama tahun 2002 termasuk reklasifikasi bangunan dalam penyelesaian sebesar Rp 86 ke perabot dan peralatan kantor, selisih kurs atas aktiva tetap cabang luar negeri dan penambahan aktiva tetap 4 BPP sebesar Rp 11.703.

Penambahan tahun 2001 termasuk selisih kurs atas aktiva tetap cabang luar negeri dan penambahan aktiva tetap dari 4 BPP sebesar Rp 46.653.

Pada tahun 2002, Bank melakukan penghapusan atas aktiva tetap 4 BPP (Artamedia, Primex, Patriot dan Universal) dengan nilai buku sebesar Rp 36.008.

Penambahan akumulasi penyusutan untuk tahun 2002 terdiri dari beban penyusutan sebesar Rp 43.133, reklasifikasi akumulasi penyusutan perabot dan peralatan kantor sebesar Rp 6, selisih kurs atas aktiva tetap cabang luar negeri sebesar Rp 65 dan akumulasi penyusutan 4 BPP sebesar Rp 26.051.

Penambahan akumulasi penyusutan untuk tahun 2001 terdiri dari beban penyusutan sebesar Rp 40.770, reklasifikasi akumulasi penyusutan perabot dan peralatan kantor sebesar Rp 37, reklasifikasi akumulasi penyusutan kendaraan bermotor Rp 0,2, selisih kurs atas aktiva tetap cabang luar negeri sebesar Rp 129 dan akumulasi penyusutan 4 BPP sebesar Rp 33.853.

14. AKTIVA TETAP (lanjutan)

Sebanyak 8 hak atas tanah dan bangunan dalam bentuk hak guna bangunan, hak guna pakai dan "Strata Title" masih dalam proses pengurusan balik nama ke dalam nama Bank. Sisa umur dari hak atas tanah dan bangunan berkisar antara 1 tahun sampai dengan 29 tahun dan dapat diperpanjang.

Aktiva tetap pemilikan langsung kecuali tanah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu masing-masing kepada perusahaan asuransi PT Asuransi BancBali Nippon Fire, anak perusahaan, dengan nilai pertanggungan sebesar US$ 60.485.695 dan Rp 70.599, PT Asuransi Astra Buana dengan nilai pertanggungan Rp 214.004, PT Wahana Tata dengan nilai pertanggungan Rp 6.422 dan PT Asuransi Mitra Maparya dengan nilai pertanggungan Rp 3.113, yang menurut pendapat manajemen Bank cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aktiva yang dipertanggungkan.

15. AKTIVA LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	2002	2001
Tagihan lain-lain (PT Era Giat Prima)	546.466	546.466
Agunan diambil alih - setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai agunan diambil alih sebesar Rp 162.521 pada tahun 2002 dan Rp 228.282 pada tahun 2001	467.426	466.861
Bunga masih akan diterima	375.131	407.549
Biaya dibayar di muka	34.169	45.732
Lain-lain		
Rupiah		
Aktiva tetap yang tidak digunakan	26.123	21.946
Rupa-rupa tagihan	18.315	24.423
Uang jaminan	17.132	18.317
Uang muka	8.562	4.687
Piutang atas penjualan efek	7.724	889
Piutang kartu kredit	7.692	1.319
Beban ditangguhkan - bersih	5.790	6.998
Persediaan alat tulis kantor dan barang promosi	4.204	6.370
Deposito wajib	3.250	3.250
Uang muka pembelian aktiva tetap	1.929	415
Piutang reasuransi	1.181	845
Taksiran pengembalian pajak penghasilan	-	4.568
Lain-lain	45.907	16.879
	147.809	110.906
Dikurangi penyisihan kerugian	(18.315)	(16.026)
	129.494	94.880

15. AKTIVA LAIN-LAIN (lanjutan)

	2002	2001
Valuta Asing		
Uang jaminan	49.737	43.204
Draft dibeli	2.209	3.298
Piutang reasuransi	787	563
Piutang atas penjualan efek	-	5.057
Lain-lain	4.672	853
	57.405	52.975
Dikurangi penyisihan kerugian	-	(5)
	57.405	52.970
	186.899	147.850
Jumlah	**1.610.091**	**1.614.458**

Perubahan penyisihan kerugian adalah sebagai berikut:

	2002			2001		
Uraian	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah
Saldo awal tahun	16.026	5	16.031	16.026	5	16.031
Penyisihan (pembalikan) selama tahun berjalan	2.289	(5)	2.284	-	-	-
Saldo akhir tahun	**18.315**	**-**	**18.315**	**16.026**	**5**	**16.031**

Amortisasi beban ditangguhkan yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasi masing-masing sebesar Rp 542 untuk tahun 2002 dan Rp 659 untuk tahun 2001.

Taksiran pengembalian pajak penghasilan Universal sebesar Rp 4.568 pada tanggal 31 Desember 2001 telah diterima oleh Universal pada tanggal 23 Juli 2002 setelah dikurangi dengan kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp 245.

Tagihan lain-lain sebesar Rp 546,4 milyar merupakan tagihan kepada PT Era Giat Prima (EGP) yang timbul dari transaksi sebagai berikut:

- Pada tanggal 31 Desember 1998, dalam saldo penempatan pada pasar uang terdapat penempatan pada bank beku operasi dan bank yang diambil alih oleh Pemerintah Indonesia, yaitu PT Bank Dagang Nasional Indonesia Tbk (BDNI), PT Bank Umum Nasional Tbk (BUN) dan PT Bank Tiara Asia Tbk (Tiara) sebesar Rp 1.477 milyar meliputi pokok dan bunganya.

15. AKTIVA LAIN-LAIN (lanjutan)

- Pada tanggal 11 Januari 1999, saldo penempatan tersebut di atas setelah diperhitungkan dengan hutang Bank kepada BDNI dan Tiara serta rugi selisih kurs yang diakui, berjumlah Rp 1.235 milyar dengan rincian: BDNI Rp 869,8 milyar, BUN Rp 327,3 milyar dan Tiara Rp 38,0 milyar. Pada tanggal tersebut, Bank mengadakan perjanjian pengalihan/"cessie" dengan EGP atas penempatan (money market) dan kontrak-kontrak swap milik Bank dengan jumlah pokok sebesar Rp 798,1 milyar, yang terdiri dari Rp 598,1 milyar pada BDNI, dan Rp 200,0 milyar pada BUN. Jumlah pokok tersebut beserta bunganya dialihkan kepada EGP dan sebagai kompensasinya EGP akan menyerahkan kepada Bank surat berharga senilai Rp 798,1 milyar. Bank juga mengadakan perjanjian pengalihan/"cessie" dengan PT Persada Harum Lestari (PHL) atas kontrak swap dengan jumlah pokok sebesar Rp 38,0 milyar pada Tiara. Jumlah tersebut beserta bunganya dialihkan kepada PHL dan sebagai kompensasinya PHL akan menyerahkan kepada Bank surat berharga senilai Rp 38,0 milyar.

- Pada tanggal 29 Maret 1999, EGP memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan penagihan atas tagihannya kepada BDNI dan BUN. Pada tanggal 1 Juni 1999, Bank menerima pembayaran dari Bank Indonesia, sesuai dengan surat dari BPPN, sebesar Rp 904,6 milyar atas tagihan kepada BDNI. Pada tanggal 9 Juni 1999, Bank mengadakan perjanjian penyelesaian dengan EGP dan berdasarkan perjanjian tersebut, Bank mentransfer ke rekening EGP dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 546,4 milyar sebagai penyelesaian menyeluruh dari perjanjian pengalihan/"cessie" atas tagihan BDNI sehingga jumlah bersih yang diterima Bank atas penempatan pada BDNI adalah sebesar Rp 358,2 milyar. Tagihan BUN belum diselesaikan dan Bank menerima surat dari EGP tertanggal 11 Juni 1999, yang menyatakan bahwa EGP akan menyerahkan surat berharga sebesar Rp 200,0 milyar.

- Pada tanggal 9 Juni 1999, Bank mengadakan perjanjian penyelesaian dengan PHL di mana kewajiban PHL untuk menyerahkan surat berharga sebesar Rp 38,0 milyar diubah menjadi pembayaran dana sebesar Rp 22,8 milyar melalui cek/bilyet giro yang dapat dicairkan selambat-lambatnya pada tanggal 17 Juni 1999. Bank telah menerima cek/bilyet giro tersebut di atas sebesar Rp 22,8 milyar pada tanggal 17 Juni 1999. Pada tanggal 19 Agustus 1999, PHL meminta Bank dan Bank telah melaksanakan transfer dana sejumlah Rp 22,8 milyar ke rekening Bank Bali Escrow qq EGP.

- Dari tanggal 16 Agustus sampai dengan 19 Agustus 1999, Bank menerima transfer dana atas nama Bank Bali Escrow qq EGP yang keseluruhannya berjumlah Rp 523,6 milyar. Dengan demikian saldo rekening ini menjadi Rp 546,4 milyar yang dibukukan sebagai Rekening Bank Bali Escrow qq EGP pada Kewajiban Segera (lihat Catatan 16).

- Pada tanggal 15 Oktober 1999, perjanjian pengalihan/"cessie" dengan EGP sebagaimana diuraikan di atas dibatalkan dengan Surat Keputusan Ketua BPPN No. SK-423/BPPN/1099. Berdasarkan surat keputusan tersebut, Bank diminta untuk melakukan tindakan/upaya agar dana sebesar Rp 904,6 milyar yang diterima sebagai pembayaran dalam rangka penjaminan pemerintah dapat dikuasai dan dimiliki oleh Bank. Oleh karena itu, Bank menagih kembali kepada EGP sebesar Rp 546,4 milyar dan membukukan tagihan tersebut sebagai Tagihan Lain-lain. Selain itu, kewajiban EGP untuk menyerahkan surat berharga sebesar Rp 200,0 milyar menjadi batal dan timbul kembali tagihan kepada BUN. Pada pihak lain, karena tagihan kepada BUN tidak dapat direalisasikan, maka Bank membentuk penyisihan kerugian atas tagihan tersebut.

- Pada tanggal 30 November 1999, perjanjian pengalihan/"cessie" dengan PHL sebagaimana diuraikan di atas dibatalkan dengan Surat Keputusan Ketua BPPN No. SK-464/BPPN/1199. Berdasarkan surat keputusan tersebut, Bank diminta untuk melakukan tindakan/upaya guna memastikan agar pelaksanaan perjanjian tersebut berlangsung sedemikian rupa seperti layaknya tidak pernah diadakan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, Bank membukukan kembali tagihan kepada Tiara.

15. AKTIVA LAIN-LAIN (lanjutan)

- Sesuai dengan surat ketua BPPN kepada Bank No. PB-805/BPPN/1299 dan surat No. PB-804/BPPN/1299, keduanya tertanggal 28 Desember 1999 serta surat No. PB-158/BPPN/0200 tanggal 23 Februari 2000, BPPN menjamin realisasi tagihan kepada EGP sebesar Rp 546,4 milyar tersebut di atas. BPPN juga menyatakan bahwa tagihan kepada Tiara termasuk dalam skema penjaminan pemerintah.

- Penempatan pada BUN sebesar Rp 204,3 milyar telah dialihkan seluruhnya kepada BPPN, sesuai dengan Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang tanggal 29 September 2000 yang telah dilegalisasi oleh Notaris No. 1181/leg/2000 (lihat Catatan 10m).

- Penempatan pada Tiara sebesar US$ 10 juta telah dilunasi oleh Tiara pada tanggal 11 September 2000 dan Bank juga telah melunasi call money pada Tiara sebesar Rp 39 milyar pada tanggal yang sama.

Agunan diambil alih terutama terdiri dari tanah dan bangunan.

16. KEWAJIBAN SEGERA

Akun ini terdiri dari:

	2002	2001
Rupiah		
Rekening Bank Bali Escrow qq EGP (lihat Catatan 15)	546.466	546.466
Rekening kreditur	115.892	19.239
Hutang pajak penghasilan pasal 21, 23, 26, 4 ayat 2 dan pajak pertambahan nilai	44.352	48.016
Hutang kartu kredit dan debit	15.856	9.728
Hutang reasuransi	14.295	15.019
Hutang premi	2.023	1.009
Kiriman uang	920	14.816
Hutang dividen	152	356
Lain-lain	47.180	22.939
	787.136	677.588
Valuta Asing		
Rekening kreditur	189.465	2.523
Kiriman uang	107.885	93.514
Hutang reasuransi	9.462	9.848
Hutang pajak penghasilan pasal 23	50	14
Lain-lain	1.355	244
	308.217	106.143
Jumlah	**1.095.353**	**783.731**

17. GIRO

Akun ini terdiri dari:

	2002		
	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah
Pihak ketiga	2.551.539	1.616.541	4.168.080
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2.497	1.119	3.616
Jumlah	**2.554.036**	**1.617.660**	**4.171.696**

	2001		
	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah
Pihak ketiga	1.909.946	1.495.878	3.405.824
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	487.892	173.823	661.715
Jumlah	**2.397.838**	**1.669.701**	**4.067.539**

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada tahun 2002 adalah perusahaan asosiasi dan karyawan kunci dari Bank sedangkan pada tahun 2001 adalah pemegang saham, perusahaan asosiasi dan karyawan kunci dari Bank (lihat Catatan 27).

Giro yang diterima dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001 masing-masing berjumlah Rp 3.616 dan Rp 661.715 atau sekitar 0,01% dan 2,43% masing-masing dari jumlah kewajiban konsolidasi.

Giro yang diblokir, yang umumnya digunakan untuk jaminan atas transaksi dengan Bank, pada tanggal 31 Desember 2002 adalah Rp 7.344, US$ 1.402.472 dan SGD 1.680 dan pada tanggal 31 Desember 2001 adalah Rp 69.281 dan US$ 961.298.

Suku bunga rata-rata tahunan giro dalam Rupiah adalah berkisar antara 2,75% sampai dengan 11,96% pada tahun 2002 dan antara 2,50% sampai dengan 6,50% pada tahun 2001, sedangkan suku bunga rata-rata tahunan giro dalam valuta asing adalah berkisar antara 1,95% sampai dengan 2,74% pada tahun 2002 dan antara 3,00% sampai dengan 4,42% pada tahun 2001.

18. TABUNGAN

Akun ini terdiri dari:

	2002	2001
Tabungan Si Jempol	1.838.821	697.110
Tabungan Bali Turbo	577.939	306.988
Flexi Dana Preferred	137.682	115.906
Tabungan Payroll	67.259	36.004
Tabungan Baliprogres	62.105	569.009
Flexi Save	28.589	330.839
Flexi Save Junior	7.347	7.826
Tabungan BPR	6.275	5.376

18. TABUNGAN (lanjutan)

	2002	2001
Rancang Guna	3.679	1.267
Tabungan Ambisi	1.593	7.183
Flexi Prima	-	270.297
Tabungan Tumbuh	-	218.724
Ekstra Save	-	87.818
Tabungan Tahapan	-	80.246
Tabungan Bali Direct	-	36.841
Tabungan Kreatif	-	28.051
Tabungan Media Aktif	-	20.419
Tabungan Tampan dan Cantik	-	17.014
Tabungan Patriot	-	14.838
Ekstra Karya	-	14.375
Tabungan Karyawan	-	9.288
Flexi Karya	-	7.452
Tabungan Kesejahteraan	-	1.141
Jumlah	**2.731.289**	**2.884.012**

Tabungan dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa-karyawan kunci pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001 masing-masing berjumlah Rp 5.703 dan Rp 7.332 atau sekitar 0,02%, dan 0,03% masing-masing dari jumlah kewajiban konsolidasi.

Tabungan yang diblokir pada tahun 2002 dan 2001 masing-masing sebesar Rp 8.628 dan Rp 15.693, dan umumnya diblokir karena kesalahan PIN (Personal Identification Number), kartu hilang, adanya program bundling antara kartu kredit dengan produk tabungan tertentu serta adanya pencairan deposito yang dikreditkan ke rekening tabungan atas perintah nasabah sendiri namun sertifikat deposito belum diserahkan oleh nasabah.

Suku bunga rata-rata tahunan tabungan masing-masing berkisar antara 8,60% sampai dengan 11,25% pada tahun 2002 dan antara 8,74% sampai dengan 9,50% pada tahun 2001.

19. DEPOSITO BERJANGKA

Akun ini terdiri dari:

	2002		
	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah
Pihak ketiga	13.510.322	1.462.303	14.972.625
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	4.232	12.620	16.852
Jumlah	**13.514.554**	**1.474.923**	**14.989.477**

	2001		
	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah
Pihak ketiga	12.687.624	1.848.589	14.536.213
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	419.808	309.291	729.099
Jumlah	**13.107.432**	**2.157.880**	**15.265.312**

19. DEPOSITO BERJANGKA (lanjutan)

Rincian deposito berjangka bukan bank berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	2002		
	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah
1 bulan	11.063.391	1.348.938	12.412.329
3 bulan	2.184.951	44.315	2.229.266
6 bulan	160.362	7.565	167.927
12 bulan	76.165	74.105	150.270
Lebih dari 12 bulan	29.685	-	29.685
Jumlah	**13.514.554**	**1.474.923**	**14.989.477**

	2001		
	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah
1 bulan	6.360.733	996.460	7.357.193
3 bulan	6.005.686	1.059.595	7.065.281
6 bulan	66.732	20.102	86.834
12 bulan	92.789	5.807	98.596
Lebih dari 12 bulan	33.247	-	33.247
Primex *	548.245	75.916	624.161
Jumlah	**13.107.432**	**2.157.880**	**15.265.312**

* Data tidak tersedia dari bank yang menggabungkan diri

Rincian deposito berjangka berdasarkan jangka waktu adalah sebagai berikut:

	2002	2001
Rupiah		
1 bulan	10.089.564	7.783.517
2 bulan	6	-
3 bulan	2.885.411	3.503.510
6 bulan	143.880	1.468.702
12 bulan	382.193	267.244
Lebih dari 12 bulan	13.500	84.459
	13.514.554	13.107.432
Valuta Asing		
1 bulan	1.266.202	1.347.014
3 bulan	95.573	661.454
6 bulan	15.686	113.001
12 bulan	97.462	32.348
Lebih dari 12 bulan	-	4.063
	1.474.923	2.157.880
Jumlah	**14.989.477**	**15.265.312**

19. DEPOSITO BERJANGKA (lanjutan)

Deposito berjangka yang diblokir pada tahun 2002 dan 2001 masing-masing sebesar Rp 860.275 dan Rp 832.943 dan umumnya diblokir karena digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan dan bank garansi oleh Bank (lihat Catatan 10).

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada tahun 2002 adalah perusahaan asosiasi dan karyawan kunci dari Bank sedangkan pada tahun 2001 adalah pemegang saham, perusahaan asosiasi dan karyawan kunci dari Bank (lihat Catatan 27).

Deposito berjangka yang diterima dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001 masing-masing berjumlah Rp 16.852 dan Rp 729.099 atau sekitar 0,06% dan 2,68% masing-masing dari jumlah kewajiban konsolidasi.

Suku bunga tahunan berkisar antara 13,75% sampai dengan 17,09% pada tahun 2002 dan antara 14,69% sampai dengan 17,75% pada tahun 2001 untuk deposito berjangka dalam Rupiah, serta berkisar antara 2,88% sampai dengan 4,00% pada tahun 2002 dan antara 4,42% sampai dengan 6,08% pada tahun 2001 untuk deposito berjangka dalam valuta asing.

20. EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI

Rincian efek yang dijual dengan janji dibeli kembali adalah sebagai berikut:

	2001				
	Jangka Waktu	Tanggal Jatuh Tempo	Harga Beli Kembali	Beban Bunga yang Belum Diamortisasi	Nilai Bersih
Obligasi Pemerintah Nomor Seri:					
FR0002	1 bulan	10 Januari 2002	10.166	48	10.118
VR0001	1 bulan	11 Januari 2002	7.115	34	7.081
VR0002	3 bulan	22 Februari 2002	2.237	34	2.203
VR0002	3 bulan	26 Februari 2002	3.140	47	3.093
VR0002	3 bulan	26 Februari 2002	2.733	81	2.652
VR0003	3 bulan	26 Februari 2002	3.254	96	3.158
VR0004	1 bulan	10 Januari 2002	2.887	34	2.853
VR0005	1 bulan	10 Januari 2002	3.467	41	3.426
VR0006	1 bulan	10 Januari 2002	3.411	40	3.371
VR0007	1 bulan	10 Januari 2002	4.106	48	4.058
VR0007	3 bulan	26 Februari 2002	11.162	167	10.995
VR0008	1 bulan	10 Januari 2002	3.829	45	3.784
VR0009	1 bulan	10 Januari 2002	575	7	568
VR0009	3 bulan	26 Februari 2002	11.033	166	10.867
VR0009	3 bulan	19 Maret 2002	52.688	2.300	50.388
VR0010	3 bulan	14 Maret 2002	105.375	4.300	101.075
VR0011	3 bulan	11 Maret 2002	210.250	7.858	202.392
VR0014	1 bulan	18 Januari 2002	15.241	137	15.104
VR0014	3 bulan	22 Februari 2002	4.337	65	4.272
VR0015	3 bulan	22 Februari 2002	23.530	353	23.177
VR0016	3 bulan	27 Februari 2002	13.920	209	13.711
VR0016	3 bulan	28 Februari 2002	34.160	513	33.647
Jumlah			**528.616**	**16.623**	**511.993**

Pada saat jatuh tempo, efek yang dijual dengan janji dibeli kembali sudah dibeli kembali (lihat Catatan 8).

21. KEWAJIBAN AKSEPTASI

Kewajiban akseptasi berdasarkan counterparty merupakan kewajiban kepada nasabah dan Bank yang bukan merupakan pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai berikut:

	2002	2001
Rupiah		
Nasabah	599	-
Valuta Asing		
Bank	54.637	62.770
Nasabah	1.802	-
	56.439	62.770
Jumlah	**57.038**	**62.770**

Kewajiban akseptasi berdasarkan jangka waktu jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	2002	2001
Rupiah		
1 - 3 bulan	106	-
3 - 6 bulan	490	-
6 - 12 bulan	3	-
	599	-
Valuta Asing		
Kurang dari 1 bulan	-	1.254
1 - 3 bulan	1.448	20.145
3 - 6 bulan	32.230	38.345
6 - 12 bulan	21.750	2.831
Lebih dari 12 bulan	1.011	195
	56.439	62.770
Jumlah	**57.038**	**62.770**

22. HUTANG PAJAK

Hutang pajak terdiri dari:

	2002	2001
Pajak penghasilan Pasal 25	191	134
Taksiran hutang pajak penghasilan (setelah dikurangi pembayaran pajak di muka sebesar Rp 2.889 pada tahun 2002 dan Rp 2.004 pada tahun 2001)	692	1.682
Jumlah	**883**	**1.816**

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum beban (penghasilan) pajak seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasi dengan taksiran laba (rugi) fiskal untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001 adalah sebagai berikut:

	2002	2001
Laba (rugi) sebelum beban (penghasilan) pajak menurut laporan laba rugi konsolidasi	(847.855)	231.249
Rugi sebelum beban (penghasilan) pajak Anak perusahaan yang dikonsolidasi	(8.711)	(94.274)
Laba (rugi) komersial Bank sebelum beban (penghasilan) pajak	(856.566)	136.975
Beda temporer		
Beban merger	248.134	-
Laba penjualan Anak perusahaan	74.928	(37.041)
Rugi penghapusan aktiva tetap	34.332	(1.385)
Beban tenaga kerja dan tunjangan	14.547	2.006
Laba penjualan aktiva tetap	139	240
Beban sewa	99	2.567
Penyisihan kerugian agunan diambil alih	(70.739)	1.782
Keuntungan bersih penilaian efek yang diperdagangkan	(54.240)	-
Penyisihan kerugian aktiva produktif - bersih	(44.425)	(46.377)
Penyusutan aktiva tetap	(29.294)	(15.326)
Bagian atas laba bersih Anak perusahaan dan perusahaan asosiasi - bersih	(20.354)	(27.295)
Amortisasi beban ditangguhkan	(1.197)	(3.275)
Pendapatan dividen	-	2.203
Kerugian restrukturisasi pinjaman	-	16
Beda tetap		
Beban merger	203.714	-
Sumbangan dan pemberian kenikmatan kepada karyawan	2.209	752
Sanksi administrasi	1.017	1.593

22. HUTANG PAJAK (lanjutan)

	2002	2001
Pendapatan sewa	(6.680)	(4.347)
Pendapatan reksadana	(705)	-
Pendapatan dividen	-	(1.198)
Taksiran laba (rugi) fiskal - Bank	**(505.081)**	**11.890**

Laba fiskal Bank tahun 2001 masih dapat dikompensasikan dengan akumulasi rugi fiskal di tahun-tahun sebelumnya.

Taksiran penghasilan kena pajak tahun 2001 seperti tersebut di atas adalah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan.

Perhitungan beban (penghasilan) pajak Bank dan Anak perusahaan adalah sebagai berikut:

	2002	2001
Taksiran penghasilan kena pajak (dibulatkan)		
Bank	-	-
Anak perusahaan	12.957	13.329
Beban pajak - tahun berjalan (dengan tarif pajak yang berlaku) Bank	-	-
Anak perusahaan	3.580	3.686
Taksiran penghasilan pajak tangguhan		
Pengaruh beda temporer pada tarif pajak maksimum (30%)		
Bank		
Keuntungan bersih penilaian efek yang diperdagangkan	16.272	-
Penyisihan kerugian agunan diambil alih	21.222	(535)
Amortisasi beban ditangguhkan	358	983
Rugi fiskal	(74.839)	(15.392)
Penyisihan kerugian aktiva produktif - bersih	(13.327)	13.913
Kewajiban lain-lain	(4.364)	(602)
Aktiva tetap	(1.553)	4.941
Beban sewa	(30)	(770)
Kerugian restrukturisasi pinjaman	-	(5)
Lain-lain	7.916	2.174
Beban (penghasilan) pajak - tangguhan - Bank	(48.345)	4.707

22. HUTANG PAJAK (lanjutan)

	2002	2001
Anak perusahaan - PT Asuransi BancBali Nippon Fire		
Laba penjualan aktiva tetap	20	-
Beban sewa	15	15
Kewajiban sewa guna usaha	15	-
Premi yang belum diterima	(883)	-
Aktiva tetap	(49)	(117)
Bunga	(4)	-
Beban tenaga kerja dan tunjangan	-	(71)
Beban (penghasilan) pajak - tangguhan - Anak perusahaan	(886)	(173)
Anak perusahaan - PT Bali Securities		
Aktiva tetap	1	-
Rugi fiskal	(527)	(367)
Beban (penghasilan) pajak - tangguhan - Anak perusahaan	(526)	(367)
Beban (penghasilan) pajak - tangguhan - konsolidasi	**(49.757)**	**4.167**

Perhitungan hutang pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

	2002	2001
Beban pajak tahun berjalan		
Bank	-	-
Anak perusahaan	3.580	3.686
Beban pajak dalam laporan laba rugi konsolidasi	3.580	3.686
Pajak penghasilan dibayar di muka - Pasal 25		
Bank	-	-
Anak perusahaan	(2.888)	(2.004)
Jumlah pajak penghasilan dibayar di muka	(2.888)	(2.004)
Taksiran hutang pajak penghasilan	**692**	**1.682**

Pengaruh pajak atas beda temporer yang signifikan antara pelaporan komersial dan pajak adalah sebagai berikut

	2002	2001
Bank		
Aktiva pajak tangguhan		
Rugi fiskal	186.134	111.295
Penyisihan kerugian aktiva produktif - bersih	93.506	76.401

22. HUTANG PAJAK (lanjutan)

	2002	2001
Aktiva tetap	57.079	54.747
Penyisihan kerugian agunan diambil alih	47.263	68.485
Kewajiban lain-lain	18.065	12.820
Keuntungan bersih penilaian efek yang diperdagangkan	-	450
Lain-lain	-	19
Jumlah	402.047	324.217
Kewajiban pajak tangguhan		
Keuntungan bersih penilaian efek yang diperdagangkan	16.522	-
Beban ditangguhkan	1.907	1.549
Beban sewa	684	731
Lain-lain	-	2
Jumlah	19.113	2.282
Aktiva pajak tangguhan - Bank-bersih	382.934	321.935
Anak perusahaan - PT Asuransi BancBali Nippon Fire		
Aktiva pajak tangguhan		
Premi yang belum diterima	883	-
Estimasi klaim untuk retensi sendiri	302	302
Aktiva tetap	159	130
Kewajiban lain-lain	71	71
Beban sewa	-	15
Jumlah	1.415	518
Kewajiban pajak tangguhan		
Kewajiban sewa guna usaha	11	-
Aktiva pajak tangguhan Anak perusahaan - PT Asuransi BancBali Nippon Fire - bersih	1.404	518
Anak perusahaan - PT Bali Securities		
Aktiva pajak tangguhan		
Rugi fiskal	1.306	779
Kewajiban pajak tangguhan		
Aktiva tetap	24	23
Aktiva pajak tangguhan Anak perusahaan - PT Bali Securities - bersih	1.282	756
Jumlah aktiva pajak tangguhan - konsolidasi - bersih	**385.620**	**323.209**

22. HUTANG PAJAK (lanjutan)

Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan mencakup konsekuensi pajak di masa mendatang sehubungan dengan perbedaan antara dasar laporan komersial dan fiskal dari aktiva dan kewajiban. Aktiva pajak tangguhan diakui sepanjang besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang dapat menyebabkan aktiva pajak tangguhan dipulihkan. Manajemen Bank berpendapat bahwa aktiva pajak tangguhan dapat terpulihkan seluruhnya dengan penghasilan kena pajak di masa mendatang.

Di dalam mutasi aktiva pajak tangguhan - Bank termasuk mutasi pajak tangguhan 4 BPP (kecuali Artamedia dan Patriot) dari 31 Desember 2001 sampai dengan 30 September 2002 yang tercatat di dalam akun Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali sebesar Rp 12.654.

Berdasarkan pemeriksaan aktiva pajak tangguhan pada akhir tahun, manajemen Bank berpendapat bahwa pajak tangguhan yang timbul dari beban merger sejumlah Rp 266.861 pada tanggal 31 Desember 2002, mungkin tidak dapat digunakan untuk mengurangi laba kena pajak di masa yang akan datang, oleh karena itu, aktiva pajak tangguhan tersebut tidak dibukukan.

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan No. 00153/406/00/054/02 tanggal 25 Juni 2002, rugi neto Bank pada tahun 2000 adalah sebesar Rp 388.528.

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan No. 00145/406/99/054/01 tanggal 26 Juni 2001, penghasilan neto Bank pada tahun 1999 seharusnya adalah sebesar Rp 292.145. Bank telah mengajukan keberatan atas SKPLB tersebut. Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah XIX Wajib Pajak Besar No. KEP/002/WPJ.19/BD.0503/2002 tanggal 17 September 2002, Direktur Jenderal Pajak menolak pengajuan keberatan Bank atas SKP tersebut.

23. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

Rincian surat-surat berharga yang diterbitkan adalah sebagai berikut:

	2002	2001
Rupiah		
Surat Berharga Pasar Uang		
Pihak ketiga	105.000	-
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	298.809	-
Valuta Asing		
Draft yang diterbitkan	8.969	7.888
Sertifikat deposito dengan bunga mengambang (FRCD)	-	260.000
Jumlah	**412.778**	**267.888**

Pada tanggal 15 Agustus 1997, Bank menerbitkan sertifikat deposito yang dapat diperdagangkan dengan tingkat bunga mengambang (Negotiable Floating Rate Certificates of Deposit)/FRCD sejumlah US$ 30.000.000, dengan sertifikat deposito masing-masing senilai US$ 250.000 pada sindikasi lembaga keuangan luar negeri. Suku bunga tahunan sertifikat deposito tersebut adalah sebesar 0,85% di atas LIBOR dan terhutang setiap bulan Februari dan Agustus. Sertifikat deposito ini jatuh tempo pada bulan Agustus 2002. Pada tanggal 15 Juni 2001, FRCD tersebut dilunasi sebesar US$ 5.000.000.

23. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Bank telah melunasi kembali FRCD masing-masing sebesar US$ 8 juta pada tanggal 3 Juni 2002 dan sebesar US$ 17 juta pada tanggal 28 Agustus 2002.

Suku bunga tahunan FRCD tersebut masing-masing berkisar antara 2,91% sampai dengan 4,41% pada tahun 2002 dan antara 4,41% sampai dengan 7,73% pada tahun 2001.

Suku bunga tahunan Surat Berharga Pasar Uang berkisar antara 11,75% sampai dengan 13,25%.

24. PINJAMAN YANG DITERIMA

Rincian pinjaman yang diterima adalah sebagai berikut:

	2002	2001
Rupiah		
a) Pinjaman penerusan (two-step loans)	198.858	231.285
b) Bank Indonesia	670.770	641.380
c) Penempatan oleh bank lain	845	1.050.537
	870.473	1.923.202
Valuta Asing		
a) Pinjaman penerusan (two-step loans)	54.274	74.534
c) Penempatan oleh bank lain		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	189.046	-
Pihak ketiga	-	161.200
d) Hutang jangka panjang	361.132	462.800
	604.452	698.534
Jumlah	**1.474.925**	**2.621.736**

a) Pinjaman penerusan (Two-Step Loans)

Akun ini terdiri dari:

	2002	2001
Rupiah		
1) Japan Bank for International Coorporation (dahulu Export-Import Bank of Japan)	189.379	218.614
2) Asian Development Bank	4.270	5.978
3) International Bank for Reconstruction and Development	5.209	6.693
	198.858	231.285
Valuta Asing		
2) Asian Development Bank	54.274	74.534
Jumlah	**253.132**	**305.819**

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a) Pinjaman penerusan (Two-Step Loans) (lanjutan)

1) Japan Bank for International Coorperation (JBIC)

Bank (melalui Bank Indonesia) memperoleh fasilitas-fasilitas kredit dengan jumlah maksimum sebesar JP¥ 4.080.000.000 dari JBIC. Fasilitas-fasilitas kredit tersebut terdiri dari empat tahap, yaitu JBIC tahap kedua dengan jumlah JP¥ 1.000.000.000 sejak tanggal 10 November 1989, JBIC tahap ketiga dengan jumlah JP¥ 1.000.000.000 sejak tanggal 4 Februari 1991, JBIC tahap keempat dengan jumlah JP¥ 1.100.000.000 sejak tanggal 28 Januari 1992 dan JBIC tahap kelima dengan jumlah JP¥ 980.000.000 sejak tanggal 16 Juni 1992.

Pinjaman ini wajib dibayar dalam angsuran tengah-tahunan (setelah tenggang waktu tiga tahun) dimulai pada tanggal 1 April 1993, 15 Januari 1994 dan 15 Juli 1995 masing-masing untuk tahap kedua, ketiga dan keempat. Perjanjian pendanaan ini meliputi jangka waktu 15 tahun kecuali untuk tahap kelima yang meliputi jangka waktu 11 tahun dan wajib dibayar dalam angsuran tengah-tahunan (setelah tenggang waktu dua tahun) dimulai pada tanggal 15 September 1994.

Berdasarkan Akta Penerusan Pinjaman tanggal 13 Februari 1995, Bank mendapat tambahan fasilitas pinjaman dari JBIC sebesar JP¥ 600.000.000. Pinjaman ini meliputi jangka waktu 15 tahun dan wajib dibayar dalam angsuran tengah-tahunan (setelah tenggang waktu tiga tahun) dimulai pada tanggal 15 Desember 1997.

Berdasarkan Akta Penerusan Pinjaman tanggal 21 November 1996, Bank mendapat tambahan fasilitas pinjaman dari JBIC sebesar JP¥ 2.200.000.000. Pinjaman ini meliputi jangka waktu 14 tahun dan wajib dibayar dalam angsuran tengah-tahunan (setelah tenggang waktu tiga tahun) dimulai pada tanggal 15 Februari 2000.

Berdasarkan Akta Penerusan Pinjaman tanggal 25 Juli 1996, Universal mendapat fasilitas pinjaman dari JBIC sebesar JP¥ 1.710.000.000. Pinjaman ini meliputi jangka waktu 14 tahun dan wajib dibayar dalam angsuran tengah-tahunan (setelah tenggang waktu tiga tahun) dimulai pada tanggal 15 Februari 2000. Pinjaman ini dikenakan suku bunga sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia untuk periode 3 bulan.

Berdasarkan Akta Penerusan Pinjaman tanggal 5 Februari 1994, Primex mendapat fasilitas pinjaman dari JBIC sebesar JP¥ 570.000.000. Pinjaman ini meliputi jangka waktu 11 tahun dan wajib dibayar dalam angsuran tengah-tahunan (setelah tenggang waktu dua tahun) dimulai pada tanggal 15 Juni 1996. Pinjaman ini dikenakan suku bunga sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia untuk periode 6 bulan.

Berdasarkan Akta Penerusan Pinjaman tanggal 21 November 1996, Primex mendapat tambahan fasilitas pinjaman dari JBIC sebesar JP¥ 1.160.000.000. Pinjaman ini meliputi jangka waktu 14 tahun dan wajib dibayar dalam angsuran tengah-tahunan (setelah tenggang waktu tiga tahun) dimulai pada tanggal 15 Februari 2000. Pinjaman ini dikenakan suku bunga sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia untuk periode 6 bulan.

Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan yang berkisar antara 9,29% sampai dengan 17,41% pada tahun 2002 dan antara 8,30% sampai dengan 15,41% pada tahun 2001.

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a) Pinjaman penerusan (Two-Step Loans) (lanjutan)

2) Asian Development Bank (ADB)

Rupiah

Bank (melalui Bank Indonesia) memperoleh fasilitas kredit dengan jumlah maksimum sebesar US$ 15.000.000 sejak tanggal 24 Januari 1990 dari ADB. Pinjaman ini meliputi jangka waktu 15 tahun dan wajib dibayar dalam angsuran tengah-tahunan (setelah tenggang waktu tiga tahun) dimulai pada tanggal 15 Juli 1993.

Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 10,18% sampai dengan 10,43% pada tahun 2002 dan antara 9,01% sampai dengan 9,67% pada tahun 2001.

Valuta Asing

Bank (melalui Bank Indonesia) memperoleh fasilitas kredit dengan jumlah maksimum sebesar US$ 22.222.222 sejak tanggal 29 Desember 1993 dari ADB. Pinjaman ini meliputi jangka waktu 15 tahun dan wajib dibayar dalam angsuran tengah-tahunan (setelah tenggang waktu empat tahun) dimulai pada tanggal 1 Agustus 1997.

Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan antara 6,84% sampai dengan 7,19% pada tahun 2002 dan 7,20% pada tahun 2001.

3) International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

Kredit investasi ini merupakan kredit jangka panjang kepada nasabah yang dibiayai oleh IBRD melalui Bank Indonesia dengan jumlah maksimum sebesar US$ 8.000.000 sejak tanggal 27 Juli 1989 dan digunakan untuk membiayai industri-industri kecil dan menengah di Indonesia. Pinjaman yang digunakan oleh Bank adalah sebesar US$ 5.700.000. Pinjaman yang meliputi jangka waktu 15 tahun ini wajib dibayar dalam angsuran tengah-tahunan (setelah tenggang waktu tiga tahun) dimulai pada tanggal 1 Oktober 1992.

Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan antara 10,38% sampai dengan 10,43% pada tahun 2002 dan antara 9,25% sampai dengan 9,82% pada tahun 2001.

Bank memperoleh fasilitas kredit lainnya dalam rangka "Agricultural Financing Project" melalui Bank Indonesia dengan jumlah maksimum sebesar US$ 5.300.000 sejak tanggal 20 Juni 1995. Fasilitas ini meliputi jangka waktu 12 tahun dan wajib dibayar dalam angsuran tengah-tahunan (setelah tenggang waktu 3 tahun) dimulai pada tanggal 30 September 1998.

Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 10,38% sampai dengan 13,86% pada tahun 2002 dan antara 11,62% sampai dengan 12,53% pada tahun 2001.

b) Bank Indonesia

Kredit likuiditas ini merupakan fasilitas-fasilitas kredit dari Bank Indonesia untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada nasabah lokal dalam bentuk sebagai berikut:

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

b) Bank Indonesia (lanjutan)

	2002	2001
(1) Kredit Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA)	670.215	640.456
(2) Lain-lain	555	924
Jumlah	**670.770**	**641.380**

(1) Kredit Likuiditas Jangka Panjang Universal merupakan pinjaman yang diperoleh dari Bank Indonesia untuk kemudian disalurkan kepada pengusaha kecil dengan sistem penerusan Kredit Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA). Pinjaman ini jatuh tempo pada berbagai tahun sampai dengan tahun 2010. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 9,00% pada tahun 2002 dan 2001.

(2) Termasuk dalam fasilitas lain-lain adalah fasilitas sebesar Rp 500 untuk jangka waktu maksimal 20 tahun yang diperoleh bank dari BI pada tanggal 16 Mei 1997 dalam rangka pelaksanaan pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) (Two-Step Loans). Saldo pinjaman tersebut pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001 masing-masing sebesar Rp 357 dan Rp 381.

Ketentuan tingkat bunga atas pinjaman tersebut adalah:

	Bank Indonesia kepada Bank (Artamedia)	Bank (Artamedia) kepada nasabah
KPR Sangat Sederhana Tipe 36	3,00%	8,50%
KPR Sederhana Tipe 18 dan 21	3,00%	11,00%
KPR Sederhana Tipe 27 dan 36	9,00%	14,00%

c) Penempatan oleh Bank Lain

Akun ini merupakan saldo penempatan oleh bank lain pada Bank dan Anak perusahaan. Suku bunga tahunan selama tahun berjalan adalah berkisar antara 17,00% sampai dengan 45,00% pada tahun 2002 dan antara 17,41% sampai dengan 42,00% pada tahun 2001 untuk penempatan oleh bank lain pada BPR dalam mata uang Rupiah, serta sebesar 1,25% pada tahun 2002 untuk penempatan oleh BPPN pada Bank dan sebesar 5,50% pada tahun 2001 untuk penempatan oleh bank lain pada Bank dalam valuta asing.

Pada tanggal 31 Desember 2001, penempatan oleh bank lain dalam mata uang Rupiah termasuk pinjaman jangka pendek yang diperoleh Universal dari beberapa bank dalam negeri sebesar Rp 1.050.000 yang dijamin dengan obligasi pemerintah dengan nilai nominal Rp 1.574.880 (lihat Catatan 8). Pinjaman jangka pendek ini jatuh tempo dalam beberapa tanggal mulai dari tanggal 14 Februari 2002 sampai dengan tanggal 11 Maret 2002. Pinjaman tersebut telah dilunasi. Suku bunga rata-rata pinjaman jangka pendek tersebut adalah 19% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2001, penempatan oleh bank lain dalam valuta asing sebesar Rp 10.400 merupakan pinjaman jangka pendek yang diperoleh Universal dari beberapa bank di Singapura yang jatuh tempo dalam beberapa tanggal sampai dengan tanggal 25 Agustus 2002. Pinjaman tersebut telah dilunasi. Suku bunga rata-rata pinjaman jangka pendek ini adalah 6% per tahun pada tahun 2002 dan 7% per tahun pada tahun 2001.

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

c) Penempatan oleh Bank Lain (lanjutan)

Selain pinjaman jangka pendek yang disebutkan di atas, pada tanggal 31 Desember 2001, Universal juga memiliki pinjaman jangka pendek dalam valuta asing sebesar Rp 78.000 yang diperoleh dari bank dalam negeri. Pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 27 Februari 2002 dan dijamin dengan obligasi pemerintah dengan nilai nominal sebesar Rp 158.730 (lihat Catatan 8). Pinjaman tersebut telah dilunasi. Suku bunga pinjaman ini adalah sebesar 6,25% per tahun.

d) Hutang Jangka Panjang

Hutang jangka panjang termasuk pinjaman "Revolving Credit Facility" yang diperoleh dari satu lembaga keuangan luar negeri dengan fasilitas pinjaman sejumlah US$ 30.000.000, US$ 20.000.000 dan US$ 15.000.000. Fasilitas ini dikenakan suku bunga tahunan masing-masing sebesar 1,00%, 1,00% dan 0,70% di atas LIBOR dan telah jatuh tempo pada tanggal 16 Oktober 1998, 13 Juli 2000 dan 12 September 2001. Berdasarkan perjanjian pinjaman, Bank diharuskan untuk mematuhi pembatasan-pembatasan tertentu, serta diharuskan memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu pula.

Pada tanggal 18 Agustus 1998, Bank mengadakan perjanjian "exchange offer" melalui dan dijamin oleh Bank Indonesia, di mana fasilitas pinjaman sejumlah US$ 96.787.142 yang berasal dari pinjaman "Revolving Credit Facility" sejumlah US$ 30.000.000 dan US$ 20.000.000 serta yang berasal dari bank lain sejumlah US$ 46.787.142 diubah menjadi kredit baru yang terbagi atas 4 (empat) "tranche" dengan jatuh tempo yang berbeda-beda sebagai berikut:

Tranche	Jumlah Fasilitas		Jatuh Tempo
1 tahun	US$	13.955.571	25 Agustus 1999
2 tahun		27.911.143	25 Agustus 2000
3 tahun		41.266.714	25 Agustus 2001
4 tahun		13.653.714	25 Agustus 2002

Bunga dari setiap "tranche" kredit baru dibayar setiap tengah tahunan dengan suku bunga sebesar 2,75%, 3,00%, 3,25% dan 3,50% di atas LIBOR 6 bulanan masing-masing untuk tranche 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan 4 tahun.

Fasilitas pinjaman yang sudah jatuh tempo pada tanggal 25 Agustus 1999 dan 2000 telah dilunasi dan fasilitas yang jatuh tempo pada tanggal 25 Agustus 2001 dan 2002 sudah dilunasi pada tanggal 25 Februari 2001.

Pada tanggal 25 Mei 1999, Bank mengadakan perjanjian "exchange offer" melalui dan dijamin oleh Bank Indonesia, di mana fasilitas pinjaman sejumlah US$ 15.000.000 diubah menjadi kredit baru yang terbagi atas 3 (tiga) "tranche" dengan jatuh tempo yang berbeda-beda sebagai berikut:

Tranche	Jumlah Fasilitas		Jatuh Tempo
1 tahun	US$	1.500.000	1 Juni 2002
2 tahun		6.750.000	1 Juni 2003
3 tahun		6.750.000	1 Juni 2004

Bunga dari setiap "tranche" kredit baru dibayar setiap tengah tahunan dengan suku bunga 2,25%, 2,375% dan 2,50% di atas LIBOR 6 bulanan masing-masing untuk tranche 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun.

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

d) Hutang Jangka Panjang (lanjutan)

Pada tanggal 10 September 1993, Bank menerbitkan sertifikat deposito yang dapat diperdagangkan dengan tingkat bunga mengambang (Negotiable Floating Rate Certificates of Deposit) sejumlah US$ 50.000.000, dengan sertifikat deposito masing-masing senilai US$ 250.000 pada sindikasi lembaga keuangan luar negeri. Suku bunga tahunan sertifikat deposito tersebut adalah sebesar 1,25% di atas LIBOR dan terhutang setiap akhir tengah tahunan. Sertifikat deposito yang jatuh tempo pada tanggal 28 Oktober 1996 ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 28 Oktober 1999 dengan suku bunga tahunan 0,78% di atas LIBOR. Pada tanggal 7 dan 8 Desember 1998 Floating Rate Certificates of Deposit masing-masing sebesar US$ 2.000.000 dan US$ 1.500.000 telah dibeli kembali.

Pada tanggal 25 Mei 1999 sertifikat deposito yang diperdagangkan dengan tingkat bunga mengambang (Negotiable Floating Rate Certificates of Deposit) sejumlah US$ 46.500.000 termasuk dalam Program Exchange Offer II, melalui dan dijamin oleh Bank Indonesia, di mana fasilitas tersebut diubah menjadi kredit baru yang terbagi atas 3 (tiga) "tranche" dengan jatuh tempo sebagai berikut:

Tranche	Jumlah Fasilitas		Jatuh Tempo
1 tahun	US$	4.350.000	1 Juni 2002
2 tahun		19.575.000	1 Juni 2003
3 tahun		22.575.000	1 Juni 2004

Selama tahun 2001, Exchange Offer II sebesar US$ 17.000.000 yang terdiri dari US$ 1.700.000, US$ 7.650.000 dan US$ 7.650.000 masing-masing untuk tranche 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun telah dibeli kembali.

Pada tanggal 4 Juni 2002, Bank telah melunasi sebagian Exchange Offer II yang telah jatuh tempo sebesar US$ 4.150.000.

Bunga dari setiap "tranche" kredit baru dibayar setiap tengah tahunan dengan suku bunga 2,25%, 2,375% dan 2,50% di atas LIBOR 6 bulanan masing-masing untuk tranche 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun.

25. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Estimasi kerugian atas transaksi komitmen dan kontinjensi yang lazim dalam kegiatan usaha bank dibentuk sebagai berikut:

	2002	2001
Rupiah		
Bank garansi	1.576	1.509
L/C yang masih berjalan	42	34
Valuta Asing		
Bank garansi	14.697	17.009
L/C yang masih berjalan	906	4.975
Jumlah	**17.221**	**23.527**

25. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Transaksi komitmen dan kontinjensi Universal yang mempunyai risiko kredit dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebesar Rp 51.318 pada tanggal 31 Desember 2001 (lihat Catatan 27 dan 30).

Kualitas transaksi komitmen dan kontinjensi dalam kegiatan usaha bank yang mempunyai risiko kredit adalah sebagai berikut:

Kualitas	2002			2001		
	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah
Lancar	120.846	82.668	203.514	144.216	123.722	267.938
Dalam perhatian khusus	737	285.544	286.281	-	331.805	331.805
Kurang lancar	2.000	-	2.000	668	10.041	10.709
Diragukan	84	-	84	-	-	-
Macet	31	499	530	-	2.651	2.651
Jumlah	123.698	368.711	492.409	144.884	468.219	613.103
Dikurangi penyisihan kerugian	1.618	15.603	17.221	1.543	21.984	23.527
Bersih	**122.080**	**353.108**	**475.188**	**143.341**	**446.235**	**589.576**

Perubahan penyisihan kerugian adalah sebagai berikut:

Keterangan	2002			2001		
	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah
Saldo awal tahun	1.543	21.984	23.527	4.488	54.029	58.517
Penyisihan (pembalikan) selama tahun berjalan	75	(3.276)	(3.201)	(2.945)	(42.493)	(45.438)
Selisih kurs	-	(3.105)	(3.105)	-	10.448	10.448
Saldo akhir tahun	**1.618**	**15.603**	**17.221**	**1.543**	**21.984**	**23.527**

26. KEWAJIBAN LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	2002	2001
Rupiah		
Biaya merger (lihat Catatan 3 dan 46)	1.318.518	-
Bunga masih harus dibayar	121.575	147.761
Kewajiban aktuaria atas kesejahteraan karyawan	105.114	37.524
Biaya masih harus dibayar	70.525	47.817
Uang muka diterima	16.137	9.029
Premi yang belum merupakan pendapatan	15.934	12.248
Kewajiban kepada BPPN	12.457	12.795
Setoran jaminan	8.606	8.086
Hutang pembelian efek	7.969	1.172

26. KEWAJIBAN LAIN-LAIN (lanjutan)

	2002	2001
Hutang klaim	7.796	6.701
Hutang komisi	3.096	3.302
Titipan setoran modal Artamedia	-	10.000
Pendapatan yang diterima di muka lainnya	-	2.631
Lain-lain	48.273	35.023
	1.736.000	334.089
Valuta Asing		
Bunga masih harus dibayar	5.922	14.976
Setoran jaminan	4.572	11.779
Biaya masih harus dibayar	289	249
Uang muka diterima	38	1.885
Lain-lain	2.439	3.009
	13.260	31.898
Jumlah	**1.749.260**	**365.987**

Cadangan biaya merger pada tanggal 30 September 2002 adalah cadangan atas biaya-biaya sehubungan dengan merger antara Bank dengan empat bank lainnya, di mana di dalam cadangan biaya merger tersebut termasuk juga kewajiban Universal kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) sehubungan dengan gugatan perdata BNI terhadap Universal dalam rangka pembiayaan sindikasi PT Riau Andalan Kertas. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 September 2002 telah memberikan keputusan bahwa jumlah kewajiban Universal kepada BNI adalah sebesar US$ 25.000.000 dan kewajiban tersebut harus diselesaikan selambat-lambatnya empat belas hari (14) hari kerja setelah tanggal efektif merger melalui bank hasil merger, yang dalam rangka merger tersebut akan mengambil alih kewajiban Universal. Kewajiban tersebut telah dibayar oleh Bank pada tanggal 21 Oktober 2002.

Kewajiban aktuaria atas kesejahteraan karyawan merupakan kewajiban aktuaria atas Bali sebesar Rp 18.560 dan Rp 4.013, Universal sebesar Rp 41.539 dan Rp 32.197 dan Artamedia sebesar Rp 1.314 dan Rp 1.314 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001, sedangkan Primex sebesar Rp 43.701 pada tanggal 31 Desember 2002 (lihat Catatan 37).

Kewajiban kepada BPPN merupakan penerimaan pembayaran yang diterima Universal dari debitur-debitur yang diserahkan kepada BPPN pada tanggal 28 Mei 1999 sehubungan dengan keikutsertaan Universal dalam program rekapitalisasi.

Titipan setoran modal merupakan setoran yang dilakukan oleh PT Arya Mitra pada tanggal 30 Oktober 2001 yang semula dimaksudkan untuk menambah modal disetor Artamedia. Namun demikian, rencana penambahan modal ini kemudian tidak jadi dilakukan.

27. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR-AGIO SAHAM

Dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pada tanggal 23 September 2002 yang berita acaranya telah diaktakan dengan akta notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M. No. 34 tanggal 23 September 2002 para pemegang saham telah menyetujui antara lain peningkatan modal dasar Bank dari semula sebesar Rp 800.000 menjadi Rp 2.600.000 dengan menambah jumlah saham kelas B menjadi sebanyak 452.799.416.700. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. C-18423.HT.01.04.TH.2002 tanggal 24 September 2002.

27. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR-AGIO SAHAM (lanjutan)

Pengumuman perubahan anggaran dasar tersebut telah diumumkan dalam lembaran berita negara.

Dalam rapat umum luar biasa para pemegang saham pada tanggal 27 September 2002 yang berita acaranya telah diaktakan dengan akta notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M No. 45 tanggal 27 September 2002, para pemegang saham telah menyetujui antara lain:

1. Penggabungan usaha Bank, Universal, Primex, Artamedia dan Patriot dengan ketentuan dalam penggabungan tersebut, Bank bertindak sebagai Bank yang menerima penggabungan atau Bank Hasil Penggabungan, sedangkan Bank Peserta Penggabungan lainnya di luar Bank bertindak sebagai Bank yang Menggabungkan Diri sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam Rancangan Penggabungan dan Konsep Akta Merger.
2. Rancangan Penggabungan dan Konsep Akta Merger yang telah disusun bersama oleh Direksi Bank dan Tim Pengelola Bank yang Menggabungkan Diri.
3. Peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor penuh dari Rp 668.646 menjadi Rp 1.300.534 dengan cara mengeluarkan saham baru kelas B dari portepel yang terdiri dari:

   (i) 15.266.453.664 saham baru kelas B, masing-masing dengan nilai nominal Rp 5 per saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 76.332 kepada para pemegang saham Universal sebagai hasil konversi saham mereka dalam Universal menjadi saham mereka di Bank Hasil Penggabungan sebagai konsekuensi dari Penggabungan.

   (ii) 111.111.111.111 saham baru Kelas B kepada BPPN dengan nilai nominal Rp 5 per saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 555.556 dengan cara penempatan terbatas sesuai Peraturan BAPEPAM No. IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan uang pemasukan seluruhnya Rp 4.600.000.
4. Pengubahan nama Bank menjadi PT Bank Permata Tbk.
5. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Akta No. 45 tersebut, telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. C-18778.HT.01.04.TH.2002 tanggal 30 September 2002. Pengumuman perubahan akta tersebut telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara.

Sehubungan dengan proses peleburan usaha, pada tanggal 27 September 2002, BPPN telah menyetorkan dana sebesar Rp 4.600.000 yang disajikan sebagai akun Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sebesar Rp 555.556 dan Agio Saham sebesar Rp 4.044.444. Kemudian sebagian dari dana tersebut sebesar Rp 1.863.256 digunakan untuk membeli Obligasi Pemerintah (lihat Catatan 8).

Rincian pemegang saham adalah sebagai berikut:

	2002			
	Jumlah Lembar Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham	Kelas A dengan nilai nominal Rp 500	Kelas B dengan nilai nominal Rp 5	Persentase Pemilikan	Jumlah
Badan Penyehatan Perbankan Nasional	-	176.790.314.903	91,33%	883.952
Negara Republik Indonesia	-	12.281.185.540	6,34	61.406
Masyarakat	672.005.833	3.834.641.799	2,33	355.176
Jumlah	**672.005.833**	**192.906.142.242**	**100,00%**	**1.300.534**

27. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR-AGIO SAHAM (lanjutan)

	2001			
	Jumlah Lembar Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham	Kelas A dengan nilai nominal Rp 500	Kelas B dengan nilai nominal Rp 5	Persentase Pemilikan	Jumlah
Badan Penyehatan Perbankan Nasional	-	66.011.335.917	98,23%	330.057
Masyarakat	672.005.833	517.241.550	1,77	338.589
Jumlah	**672.005.833**	**66.528.577.467**	**100,00%**	**668.646**

Kepemilikan BPPN berasal dari kepemilikan negara yang dilakukan melalui mekanisme Penempatan Modal Sementara (PMS) pada saat dilakukannya Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III Bank dan penyuntikan modal dalam rangka merger 5 Bank (lihat Catatan 3).

Kepemilikan Negara Republik Indonesia dilakukan melalui mekanisme Penempatan Modal Negara (PMN) pada tanggal 28 Mei 1999 yaitu saat berlangsungnya proses rekapitalisasi atas 4 Bank Peserta Penggabungan.

Pemegang saham masyarakat diantaranya termasuk Direksi (Ongki W. Dana dan Joseph Georgino Godong) dengan jumlah pemilikan 592.000 saham atau sebesar 0,00031% dari seluruh jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 31 Desember 2002 serta 1.779.000 saham (Thomas Tan Tjio Tong dan Joseph Georgino Godong) atau sebesar 0,003% dari seluruh jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 31 Desember 2001.

Setelah program rekapitalisasi tersebut, Bank telah memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) sesuai dengan yang disyaratkan Bank Indonesia, walaupun demikian sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No. 2/11/PBI/2000 tanggal 31 Maret 2000, pasal 5 ayat 1, status Bank masih sebagai Bank Take Over (BTO), karena program penyehatan terhadap Bank masih berlangsung.

Pada tanggal 28 September 2001, PT Astra International Tbk (AI) menjual sebagian kepemilikan sahamnya di Universal, yaitu sejumlah 600.000.000 saham yang mewakili 1,57% kepemilikan AI di Universal, kepada Skylark Limited, British Virgin Island dengan jumlah harga penjualan sebesar Rp 18.000 yang menyebabkan persentase kepemilikan AI turun dari 11,53% pada tanggal 31 Desember 2000 menjadi 9,92% pada tanggal 31 Desember 2001. Kemudian pada tanggal 19 Maret 2002, AI menjual lagi 310.000.000 saham yang mewakili 0,81% kepemilikan AI di Universal, kepada PT Semesta Indovest Securities dengan jumlah harga penjualan sebesar Rp 7.750, yang menyebabkan persentase kepemilikan AI turun menjadi 9,11% pada tanggal 30 September 2002. Sehubungan dengan penjualan kepemilikan AI di Universal, Universal menerima pemberitahuan dari AI mengenai transaksi tersebut. Selain itu, dua representatif dari AI mengundurkan diri sebagai komisaris Universal. Berdasarkan hal tersebut, AI dapat dikategorikan bukan sebagai pihak yang mempunyai hubungan istimewa apabila mengacu kepada Surat Keputusan Direksi BI No. 31/177/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 yang telah diperbaharui dengan peraturan BI No. 2/16/PBI/2000 tanggal 12 Juni 2000. Namun demikian, berdasarkan Perjanjian Investasi, Manajemen dan Kinerja Usaha (IMPA) tanggal 28 Mei 1998, AI, salah satu pihak dalam Perjanjian Investasi, Manajemen dan Kinerja Usaha, menandatangani perjanjian tersebut sebagai pemegang saham pengendali. Untuk memperoleh kepastian mengenai status hubungan antara AI dengan

27. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR-AGIO SAHAM (lanjutan)

Universal, pada tanggal 11 November 2002 Bank telah mengirimkan surat kepada BI untuk mengkonfirmasikan status hubungan AI dengan Bank. Mengingat hingga tanggal 16 Desember 2002, BI belum memberikan jawabannya, Bank masih mengklasifikasikan seluruh transaksi dengan AI selama sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2002 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001 sebagai transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (lihat Catatan 8, 9, 10, 12, 17, 19, 25, 30 dan 39).

Berdasarkan surat BI No. 5/35/DPwBI/PwB16 tanggal 18 Februari 2003, dinyatakan bahwa berhubung kepemilikan AI pada Bank tercatat dibawah 10% maka status AI dilihat dari kepemilikan tidak merupakan pihak terkait. Disamping itu, karena pada tanggal 31 Desember 2002 kredit Group Astra tidak termasuk kategori pelampauan BMPK di Bank, maka Bank tidak mengklasifikasikan AI sebagai pihak terkait.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 27 September 2002 dan diaktakan dengan Akta Notaris Benny Kristianto, S.H., No. 68, para pemegang saham Universal, selain menyetujui peleburan usaha bank tersebut ke dalam Bank, juga telah mengambil keputusan membatalkan Program Hak Opsi Universal 2000 (Employee Stock Option Plan) yang semula disetujui oleh pemegang saham Universal berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 28 Juni 1999 yang diaktakan dengan Akta Notaris Benny Kristianto, S.H., No. 41.

Dalam rangka program rekapitalisasi Universal, Primex, Artamedia dan Patriot berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia No. 53/KMK.017/1999 dan No. 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 (SKB 53/1999), BPPN menerbitkan Sertifikat Bukti Hak (SBH) yang diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham Universal, Primex, Artamedia dan Patriot yang turut menyetorkan tambahan modal kepada bank-bank tersebut pada saat rekapitalisasi.

Berdasarkan Ketentuan Pokok SBH disebutkan bahwa pemegang SBH berhak untuk menerima suatu bagian atas hasil perolehan dari kredit kategori 5 yang dialihkan kepada BPPN oleh Universal, Primex, Artamedia dan Patriot, yang diberikan dalam bentuk saham Kelas C yang dimiliki oleh BPPN dalam masing-masing Universal, Primex, Artamedia dan Patriot, atau dalam hal jumlah saham Kelas C yang dipegang oleh BPPN tidak cukup maka akan diberikan dalam bentuk uang tunai sesuai dengan proporsi jumlah SBH yang dimiliki oleh pemegang SBH tersebut. SBH tersebut dapat diperdagangkan secara terpisah oleh pemiliknya.

SBH tersebut telah jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2002 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 21 Desember 2002 berdasarkan Keputusan KKSK No. Kep. 02/K.KKSK/06/2002 tanggal 21 Juni 2002 mengenai penanganan SBH Bank-bank Rekapitalisasi (Keputusan KKSK 21 Juni 2002).

Sehubungan dengan Keputusan KKSK 21 Juni 2002 tersebut, BPPN melakukan negosiasi dengan para pemegang SBH di mana tingkat *recovery rate* untuk pengembalian SBH kepada pemegang SBH telah ditetapkan maksimal sebesar 25%. Penggunaan dana perolehan masing-masing SBH tersebut tetap mengacu kepada SKB 53 pasal 17 butir F yaitu wajib digunakan untuk membeli saham seri C milik negara RI pada Bank Peserta Penggabungan dengan harga sebesar harga pembelian oleh negara RI untuk saham yang ditawarkan, yang ditetapkan oleh Pemerintah. Apabila setelah tanggal tersebut di atas BPPN menerima hasil perolehan kredit kategori 5 yang dialihkan oleh Bank-Bank bersangkutan maka pemegang SBH tidak berhak atas hasil perolehan kredit kategori 5 tersebut dan SBH terhitung sejak tanggal tersebut menjadi tidak bernilai dan tidak dapat diperdagangkan.

27. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR-AGIO SAHAM (lanjutan)

Perlakuan konversi terhadap pemegang SBH sehubungan dengan peleburan usaha Bank adalah sebagai berikut:

- Hak atas perolehan dari kredit kategori 5 yang diserahkan masing-masing bank ke BPPN masih tetap melekat pada pemegang SBH.
- Hasil perolehan dari kredit kategori 5 tersebut akan digunakan untuk membeli saham Seri B Pemerintah/BPPN di Bank Hasil Penggabungan.
- Besarnya saham Seri B Pemerintah/BPPN yang akan diperoleh masing-masing pemegang SBH adalah sebesar faktor konversi saham bank asal ke Bank Hasil Penggabungan/Bank Permata dikali jumlah saham seri C Negara RI di bank asal yang seharusnya diperoleh.

Berdasarkan pengumuman BPPN kepada para pemegang SBH tentang laporan hasil perolehan aset kredit kategori 5 dan tata cara serta persyaratan pelaksanaan hak atas SBH PT Bank Permata Tbk (Eks PT Bank Universal Tbk), dinyatakan tanggal akhir pencatatan SBH adalah 31 Januari 2003 dan periode pelaksanaan hak adalah 17 Februari 2003 sampai dengan 16 Februari 2008.

28. SELISIH KURS KARENA PENJABARAN LAPORAN KEUANGAN

Akun ini merupakan selisih kurs yang timbul karena penjabaran laporan keuangan cabang Bank di Los Angeles, Amerika Serikat dan Cayman Islands dari Dolar Amerika Serikat ke dalam mata uang Rupiah (lihat Catatan 2b). Sehubungan dengan penutupan kedua cabang tersebut, maka saldo selisih kurs yang timbul karena penjabaran laporan keuangan sebesar Rp 17.276 dibebankan pada tahun berjalan.

29. TRANSAKSI PEMBELIAN/PENJUALAN TUNAI MATA UANG ASING

Saldo piutang dan kewajiban yang timbul dari transaksi-transaksi dalam valuta asing terdiri dari:

	2002	2001
Piutang		
Pembelian tunai (spot) valuta asing yang belum diselesaikan dalam rangka:		
Trading Dolar Amerika Serikat	262.879	146.027
Yen Jepang	1.130	1.042
Euro Eropa	-	23.206
Jumlah	**264.009**	**170.275**

29. TRANSAKSI PEMBELIAN/PENJUALAN TUNAI MATA UANG ASING (lanjutan)

	2002	2001
Kewajiban		
Penjualan tunai (spot) valuta asing yang belum diselesaikan dalam rangka:		
Trading Dolar Amerika Serikat	127.317	142.795
Dolar Singapura	5.373	1.562
Euro Eropa	939	20.222
Dolar Kanada	85	-
Yen Jepang	63	2.608
Dolar Hong Kong	39	-
Dolar Australia	5	3
Primex *	-	1.040
Jumlah	**133.821**	**168.230**

* Data tidak tersedia dari bank yang menggabungkan diri

30. TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA

Dalam kegiatan usaha normal, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai berikut:

a. Tagihan dan kewajiban derivatif (lihat Catatan 9).
b. Kredit yang diberikan (lihat Catatan 10).
c. Tagihan akseptasi (lihat Catatan 12).
d. Penutupan asuransi aktiva tetap (lihat Catatan 14).
e. Giro, tabungan dan deposito berjangka (lihat Catatan 17, 18 dan 19).
f. Bank menerbitkan Surat Berharga Pasar Uang kepada BPPN (lihat Catatan 23).
g. Penempatan oleh BPPN pada Bank (lihat Catatan 24).
h. L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan (lihat Catatan 25, 27 dan 39).
i. Bank garansi yang diterbitkan (lihat Catatan 25, 27 dan 39).
j. Sehubungan dengan rekapitalisasi dan peleburan usaha Bank, Pemerintah Indonesia telah melakukan penyertaan modal sementara dan menerbitkan Obligasi Pemerintah (lihat Catatan 8).
k. Berdasarkan perjanjian kerjasama No. 051/BB/CL/IX/02 pada tanggal 26 September 2002 antara PT Asuransi BancBali Nippon Fire (Anak perusahaan) dan Bank sepakat untuk melakukan kerja sama dalam penutupan asuransi kerugian bagi setiap agunan yang berkaitan dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada debitur. Perjanjian ini akan berakhir 26 September 2003 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Karena keterbatasan data mengenai transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada Artamedia untuk tahun 2001 maka transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang terdapat pada laporan keuangan konsolidasi untuk tahun 2001 disusun berdasarkan laporan keuangan auditor dari Artamedia tanpa mempertimbangkan apakah pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut masih merupakan pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada PT Bank Permata Tbk.

31. PELAPORAN SEGMEN

Pada tahun 2002, Bank dan Anak perusahaan mengungkapkan pelaporan informasi keuangan berdasarkan segmen geografis Bank sesuai dengan PSAK No. 5 (Revisi 2000). Pelaporan segmen untuk tahun 2001 untuk tujuan perbandingan tidak disajikan kembali sesuai dengan PSAK No. 5 (Revisi 2000) karena hal tersebut tidak praktis untuk dilakukan.

31. PELAPORAN SEGMEN (lanjutan)

Keterangan	2002								
	Kantor Pusat	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah - Bank (Induk Perusahaan)	Anak Perusahaan	Eliminasi - Bersih	Jumlah - Konsolidasi
Pendapatan Segmen									
- Kredit Yang Diberikan	37.902	472.150	72.424	99.524	82.936	764.936	21.694	-	786.630
- Efek-efek	1.248.056	2.042	170	121	176	1.250.565	1	-	1.250.566
- Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain	77.451	1	-	12	-	77.464	2.686	(614)	79.536
- Aktiva Produktif Lainnya	5.402	636	489	632	525	7.684	606	(295)	7.995
Beban Segmen									
- Deposito Berjangka	17.395	734.485	200.802	252.556	162.831	1.368.069	10.450	(614)	1.377.905
- Tabungan	2.538	77.968	21.428	30.419	32.840	165.193	437	-	165.630
- Giro	1.139	56.309	8.549	15.711	11.125	92.833	-	(295)	92.538
- Surat-surat Berharga Yang Diterbitkan	32.741	4	-	-	-	32.745	-	-	32.745
- Pinjaman Yang Diterima	41.345	18.229	32	6	-	59.612	146	-	59.758
- Lainnya	38.873	92	31	-	7	39.003	209	-	39.212
Pendapatan (Beban) Segmen - Bersih	1.234.780	(412.258)	(157.759)	(198.403)	(123.166)	343.194	13.745	-	356.939
Pendapatan Operasional Lainnya									
- Pendapatan - bersih dari penyertaan saham (metoda ekuitas)	20.354	-	-	-	-	20.354	-	(8.938)	11.416
- Lainnya	133.172	50.124	11.430	15.661	11.784	222.171	38.171	(1.823)	258.519
Beban (Pembalikan) Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif	84.044	182.754	4.492	71.151	(233)	342.208	128	-	342.336
Beban (Pembalikan) Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	12.511	190	44	99	178	13.022	-	-	13.022
Beban Operasional Lainnya	791.057	158.430	48.664	56.244	40.721	1.095.336	37.059	(1.823)	1.130.572
Laba (Rugi) Operasional	500.694	(703.508)	(199.749)	(310.236)	(152.048)	(864.847)	14.729	(8.938)	(859.056)
Pendapatan (Beban) Bukan Operasional - Bersih	(1.452.615)	582.634	247.287	305.643	225.332	8.281	2.920	-	11.201
Jumlah Beban (Penghasilan) Pajak	(48.345)	-	-	-	-	(48.345)	2.168	-	(46.177)
Hak Minoritas atas Laba Bersih Anak perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	(6.543)	(6.543)
Laba (Rugi) - Bersih	(903.576)	(20.874)	47.538	(4.593)	73.284	(808.221)	15.481	(15.481)	(808.221)

Penjelasan:

- Kantor Pusat terdiri dari Treasury, Card Center, Merchant, Trust & Custody dan unit-unit fungsional di mana di dalamnya termasuk pendapatan, beban, aktiva dan kewajiban yang tidak dapat dialokasikan.
- Wilayah I terdiri dari Bisnis Unit Jakarta dan Bogor.
- Wilayah II terdiri dari Bisnis Unit Bandung, Cirebon, Tasikmalaya, Semarang, Purwokerto, Surakarta dan Yogyakarta.
- Wilayah III terdiri dari Bisnis Unit Surabaya, Malang, Jember, Tulungagung, Denpasar, Balikpapan, Samarinda dan Makassar.
- Wilayah IV terdiri dari Bisnis Unit Medan, Palembang, Lampung, Batam, Padang, Pekanbaru dan Pontianak.

31. PELAPORAN SEGMEN (lanjutan)

Keterangan	2002								
	Kantor Pusat	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah - Bank (Induk Perusahaan)	Anak Perusahaan	Eliminasi - Bersih	Jumlah - Konsolidasi
Aktiva									
- Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain	2.531.359	-	-	477	-	2.531.836	77.492	(16.191)	2.593.137
- Efek-efek	13.375.664	14.284	3.063	1.457	1.530	13.395.998	30.872	-	13.426.870
- Kredit Yang Diberikan	221.519	4.933.864	591.817	792.471	584.184	7.123.855	71.028	-	7.194.883
- Aktiva Produktif Lainnya	98.736	44.506	1.934	15.549	2	160.727	16.291	(3.981)	173.037
- Penyertaan Saham	92.559	-	-	-	-	92.559	199	(64.707)	28.051
- Aktiva Lain-lain	1.956.121	2.315.783	102.482	120.553	73.618	4.568.557	43.033	(36)	4.611.554
Jumlah Aktiva	**18.275.958**	**7.308.437**	**699.296**	**930.507**	**659.334**	**27.873.532**	**238.915**	**(84.915)**	**28.027.532**
Kewajiban									
- Simpanan	576.176	13.050.195	2.610.141	3.444.786	2.162.556	21.845.854	67.948	(19.346)	21.894.456
- Simpanan Dari Bank Lain	105.280	7.973	11.567	4.767	37	129.624	-	(826)	128.798
- Surat-surat Berharga Yang Diterbitkan	412.778	-	-	-	-	412.778	-	-	412.778
- Pinjaman Yang Diterima	711.787	762.096	-	198	-	1.474.080	845	-	1.474.925
- Kewajiban Lain-lain	1.080.569	1.643.542	42.836	62.224	24.773	2.853.944	65.844	(33)	2.919.755
Jumlah Kewajiban	**2.888.590**	**15.463.805**	**2.664.544**	**3.511.975**	**2.187.366**	**26.716.280**	**134.637**	**(20.205)**	**26.830.712**

Penjelasan:

- Kantor Pusat terdiri dari Treasury, Card Center, Merchant, Trust & Custody dan unit-unit fungsional di mana di dalamnya termasuk pendapatan, beban, aktiva dan kewajiban yang tidak dapat dialokasikan.
- Wilayah I terdiri dari Bisnis Unit Jakarta dan Bogor.
- Wilayah II terdiri dari Bisnis Unit Bandung, Cirebon, Tasikmalaya, Semarang, Purwokerto, Surakarta dan Yogyakarta.
- Wilayah III terdiri dari Bisnis Unit Surabaya, Malang, Jember, Tulungagung, Denpasar, Balikpapan, Samarinda dan Makassar.
- Wilayah IV terdiri dari Bisnis Unit Medan, Palembang, Lampung, Batam, Padang, Pekanbaru dan Pontianak.

31. PELAPORAN SEGMEN (lanjutan)

	31 Desember 2001		
Informasi Segmen Usaha	Pendapatan Bunga dan Pendapatan Operasional Lainnya	Laba (Rugi) Operasional	Jumlah Aktiva
Bank	1.503.169	29.058	26.549.613
Lain-lain (Asuransi dan Sekuritas)	37.922	11.755	138.629
Jumlah	1.541.091	40.813	26.688.242
Eliminasi	(12.297)	(9.571)	(74.607)
Bersih	**1.528.794**	**31.242**	**26.613.635**

32. PENDAPATAN BUNGA

Pendapatan bunga berasal dari:

	2002	2001
Efek-efek	1.250.566	875.392
Kredit yang diberikan	709.915	251.884
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	79.536	83.342
Lain-lain	5.783	6.133
Jumlah	**2.045.800**	**1.216.751**

33. BEBAN BUNGA

Beban bunga meliputi bunga atas:

	2002	2001
Deposito berjangka	1.373.755	854.579
Tabungan	166.428	145.694
Giro	92.538	88.324
Pinjaman yang diterima	57.439	70.112
Premi program penjaminan pemerintah	39.003	27.797
Surat-surat berharga yang diterbitkan	32.745	3.442
Jumlah	**1.761.908**	**1.189.948**

34. IMBALAN

Akun ini terdiri dari:

	2002	2001
Penerimaan biaya administrasi	58.571	65.077
Komisi dari kartu debet	16.748	17.199
Komisi impor dan ekspor	11.587	11.547
Komisi dari bank garansi	5.181	720
Jasa "safe deposit box"	4.086	4.024
Komisi penjualan valuta asing	1.356	6.107
Jasa kustodian (lihat Catatan 42)	1.062	171
Komisi dari pialang	888	638
Jasa manajemen	272	325
Lain-lain	3.174	1.049
Jumlah	**102.925**	**106.857**

35. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	2002	2001
Keperluan kantor	165.524	123.563
Perbaikan dan pemeliharaan	61.387	52.798
Penyusutan dan amortisasi	43.675	41.429
Promosi	24.438	19.223
Jumlah	**295.024**	**237.013**

36. TENAGA KERJA DAN TUNJANGAN

Akun ini merupakan pembayaran gaji, bonus, Tunjangan Hari Raya, lembur, asuransi tenaga kerja, pendidikan dan pelatihan dan biaya tenaga kerja lainnya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001, gaji bruto Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing berjumlah Rp 6.882 dan Rp 6.858.

37. DANA PENSIUN

Bank menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk karyawan tetap yang memilih ikut serta dan memenuhi syarat yang diadministrasikan oleh Dana Pensiun Bank Bali (telah disahkan oleh Menteri Keuangan dalam surat keputusan No. KEP-320/KM.17/1994 tanggal 10 November 1994). Iuran-iuran untuk dana pensiun ini dihitung berdasarkan suatu persentase tertentu dari gaji karyawan. Dari jumlah iuran tersebut 2,5% ditanggung oleh karyawan, sedangkan 5% ditanggung oleh Bank. Biaya pensiun yang dibebankan pada operasi adalah sebesar Rp 5.683 dan Rp 4.142 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001.

37. DANA PENSIUN (lanjutan)

Bank mencatat kewajiban atas "past service liabilities" dari karyawan yang masuk sebelum terbentuknya Dana Pensiun Bank Bali masing-masing sebesar Rp 14.547 dan Rp 2.006 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001 dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-150/Men/2000 (Kep-150) tanggal 20 Juni 2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan. Kewajiban aktuaria Bank masing-masing sebesar Rp 55.403 dan Rp 52.322 pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001. Akrual atas kewajiban ini telah ditentukan berdasarkan penilaian aktuaria pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2000 yang dilakukan oleh PT Dian Artha Tama, aktuaritas independen, berdasarkan laporannya tertanggal 27 Juni 2002 dan 9 April 2001 dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit", dan dengan asumsi akrual tersebut dihitung sejak karyawan masuk kerja di Bank sebelum adanya program Dana Pensiun Bank Bali, di mana setelah tahun 1994, manfaat pensiun ditanggung oleh Dana Pensiun Bank Bali. Manfaat pensiun tersebut disajikan sebagai bagian dari beban tenaga kerja dan tunjangan dalam laporan laba rugi konsolidasi tahun 2002 dan 2001.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-295/KM.6/2002 tanggal 3 Desember 2002, Dana Pensiun Bank Bali telah dibubarkan secara hukum.

Pada tanggal 18 Desember 2002, berdasarkan Perjanjian Pengalihan Program Pensiun No. DPLK/SP/001/XII/2002, Bank mengalihkan dana program pensiun karyawan kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan Central Asia Raya.

Pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001, Bank (Universal) mencatat akrual untuk uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian masing-masing sebesar Rp 6.126 dan Rp 32.197 sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. Kep-150. Akrual atas kesejahteraan karyawan pada tanggal 31 Desember 2001 ditentukan berdasarkan penilaian aktuaria yang dilakukan oleh Bumi Dharma Aktuaria, aktuaris independen, masing-masing berdasarkan laporannya tertanggal 25 Maret 2002 dengan menggunakan metode *"projected unit credit"*.

Pada tanggal 31 Desember 2002, Bank (Primex) mencatat akrual untuk pesangon karyawan sebesar Rp 43.701 yang merupakan kewajiban Bank sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja karyawan. Peraturan ini mengharuskan Bank untuk memberikan sejumlah kompensasi yang sebanding dengan masa kerja kepada karyawan dalam hal pemutusan hubungan kerja apabila persyaratan dalam peraturan tersebut terpenuhi. Sehubungan dengan peraturan ini Primex telah menghitung cadangan pesangon karyawan sesuai dengan pasal 27 ayat 2 Kep-150 sebesar Rp 43.701, di mana jumlah tersebut diperoleh berdasarkan gaji bulan Februari 2002 belum termasuk perhitungan untuk semua anggota Direksi, serta uang pengganti cuti besar semua karyawan.

Bank (Artamedia) menghitung dan membukukan estimasi manfaat karyawan sesuai Kep-150. Tidak ada pendanaan yang dilakukan sehubungan dengan manfaat karyawan tersebut. Kewajiban transisi dibebankan langsung pada tahun berjalan. Akrual atas kewajiban ini telah ditentukan berdasarkan penilaian aktuaria PT Dayamandiri Dharmakonsolindo, aktuaris independen, berdasarkan laporannya tertanggal 18 April 2002 dengan menggunakan metode *"projected unit credit"*. Jumlah karyawan yang berhak memperoleh manfaat tersebut adalah sebanyak 306 karyawan. Estimasi kewajiban manfaat karyawan adalah sebesar Rp 1.314 pada tahun 2002 disajikan sebagai kewajiban lain-lain.

37. DANA PENSIUN (lanjutan)

Nilai tunai kewajiban manfaat karyawan dihitung dengan asumsi utama sebagai berikut:

Tingkat diskonto : 13%
Tingkat proyeksi kenaikan gaji: 9%

Pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001, jumlah keseluruhan akrual yang telah dibukukan oleh Bank masing - masing adalah sebesar Rp 105.114 dan Rp 37.524.

38. PENDAPATAN BUKAN OPERASIONAL - BERSIH

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	2002	2001
Laba penjualan penyertaan	15.335	34.550
Pembalikan kerugian - agunan diambil alih	12.165	333
Pendapatan sewa	6.680	4.347
Laba penjualan aktiva tetap - bersih	4.676	2.566
Laba penjualan agunan yang diambil alih - bersih	1.431	8.904
Rugi penghapusan aktiva tetap (lihat Catatan 14)	(36.009)	-
Sumbangan	(476)	(79)
Penerimaan kembali dari rugi yang telah diserap sebelumnya atas Anak perusahaan yang dijual	-	83.857
Ganti rugi atas pengakhiran perjanjian dengan PT Prudential BancBali Life Assurance (lihat Catatan 13)	-	61.500
Pendapatan bunga yang diperoleh Anak perusahaan	-	2.533
Lain-lain - bersih	7.399	1.496
Bersih	**11.201**	**200.007**

39. TAGIHAN DAN KEWAJIBAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Bank memiliki tagihan dan kewajiban komitmen dan kontinjensi sebagai berikut:

	2002	2001
KOMITMEN		
Kewajiban Komitmen		
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	1.961.182	1.686.962
Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	41.273	100.072
Jumlah Kewajiban Komitmen	2.002.455	1.787.034
Kewajiban Komitmen - Bersih	(2.002.455)	(1.787.034)
KONTINJENSI		
Tagihan Kontinjen		
Pendapatan bunga dalam penyelesaian (lihat Catatan 2t)	176.550	115.416

39. TAGIHAN DAN KEWAJIBAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

	2002	2001
Kewajiban Kontinjen		
Garansi yang diterbitkan dalam bentuk:		
Standby letters of credit	288.703	331.931
Performance bonds	139.048	23.754
Advance payment bonds	18.444	8.354
Custom bonds	1.359	791
Retention bonds	1.320	245
Shipping guarantee	1.152	-
Bid bonds	1.111	500
Universal *	-	121.020
Primex *	-	13.621
Artamedia *	-	12.630
Patriot *	-	185
Patriot - Lainnya *	-	4.663
Lainnya	-	44.697
Jumlah Kewajiban Kontinjen	451.137	562.391
Kewajiban Kontinjen - Bersih	(274.587)	(446.975)
KOMITMEN DAN KONTINJENSI - Bersih	**(2.277.042)**	**(2.234.009)**

* Data tidak tersedia dari bank yang menggabungkan diri

L/C tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebesar Rp 45.104 pada tanggal 31 Desember 2001 (lihat Catatan 27 dan 30).

Bank garansi yang diterbitkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebesar Rp 6.214 pada tanggal 31 Desember 2001 (lihat Catatan 27 dan 30).

40. POSISI DEVISA NETO

Berdasarkan ketentuan BI yang berlaku, posisi devisa neto Bank (mencakup seluruh kantor cabang di dalam negeri maupun luar negeri) setinggi-tingginya 20% dari modal. Posisi devisa neto merupakan penjumlahan dari nilai absolut atas selisih bersih aktiva dan kewajiban dalam valuta asing, baik dalam neraca maupun komitmen dan kontinjensi.

	2002		
	Aktiva dan Aktiva pada Rekening Administratif	Kewajiban dan Kewajiban pada Rekening Administratif	Posisi Devisa Neto
Dolar Amerika Serikat	3.922.567	4.259.947	337.380
Dolar Singapura	47.239	49.553	2.314
Franc Swiss	2.479	321	2.158
Euro Eropa	14.449	12.664	1.785
Dolar Hong Kong	3.206	1.450	1.756

40. POSISI DEVISA NETO (lanjutan)

	2002		
	Aktiva dan Aktiva pada Rekening Administratif	Kewajiban dan Kewajiban pada Rekening Administratif	Posisi Devisa Neto
Dolar Australia	10.416	9.673	743
Kroner Swedia	728	1	727
Dolar Cayman Island	654	4	650
Dolar Kanada	1.309	738	571
Poundsterling Inggris	6.676	6.135	541
Kroner Denmark	456	38	418
Ringgit Malaysia	-	33	33
Yen Jepang	52.532	52.545	13
Dolar Selandia Baru	785	791	6
Jumlah			**349.095**

Pada tanggal 31 Desember 2002 berdasarkan perhitungan Bank, posisi devisa neto Bank adalah 33,35% dari modal.

41. IKATAN

Pada tanggal 8 Oktober 1992, Bank mengadakan perjanjian bangun, kelola, serah dengan PT Yacolt Graha (Yacolt), pihak yang mempunyai hubungan istimewa karena mempunyai pemegang saham yang sama sebelum dilakukannya rekapitalisasi Bank, di mana Bank setuju untuk mengalihkan hak dan kewajibannya kepada Yacolt yang berkenaan dengan penyelesaian, penggunaan dan pengoperasian lantai tertentu gedung yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 27, Jakarta. Yacolt akan mengkoordinasi dan membiayai penyelesaian lantai-lantai tersebut dan kemudian akan menggunakan lantai tersebut selama 20 (dua puluh) tahun dimulai dari tanggal lantai-lantai tersebut siap untuk digunakan yaitu tahun 1993. Pada akhir tahun ke-20 (dua puluh), Yacolt akan mengalihkan lantai-lantai tersebut ke Bank tanpa imbalan apapun. Jangka waktu 20 tahun dapat diperpanjang berdasarkan negosiasi antara Bank dan Yacolt dan atas persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, jika diperlukan. Bank memiliki hak untuk melaksanakan "early transfer option" berdasarkan harga yang disepakati bersama. Pembangunan lantai lain dari gedung tersebut yang tidak termasuk dalam perjanjian di atas didanai dan dimiliki oleh Bank. Pada tanggal 31 Desember 2002, Bank memiliki 21 lantai baik yang didanai sendiri maupun melalui "early transfer option", sedangkan Yacolt memiliki 3 lantai dan area parkir mobil.

42. HAL-HAL LAIN

a. Bank melakukan kegiatan wali amanat yang antara lain ditunjuk sebagai agen pembayaran. Imbalan jasa atas kegiatan wali amanat tersebut dibukukan pada laporan laba rugi konsolidasi sebesar Rp 829 dan Rp 713 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001.

42. HAL-HAL LAIN (lanjutan)

b. Bank melakukan kegiatan sebagai tempat penitipan harta (kustodian) sesuai dengan keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-99/PM/1991 tanggal 23 April 1991. Imbalan jasa atas kegiatan kustodian tersebut dibukukan pada laporan laba rugi konsolidasi sebesar Rp 1.062 dan Rp 171 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001 (lihat Catatan 34).

c. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap jumlah aktiva produktif Bank adalah sebesar 10,03% pada tanggal 31 Desember 2002.

d. Pada tanggal 31 Desember 2002 kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) Bank adalah sebesar 10,42%. Perhitungan KPMM Bank tanggal 31 Desember 2002 tersebut, dilakukan sesuai dengan SE BI No. 3/21/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001.

Perhitungan KPMM Bank adalah sebagai berikut:

	2002
Modal inti	
Modal disetor	1.300.534
Cadangan tambahan modal	
Agio saham	9.067.496
Rugi tahun-tahun lalu	(5.366.945)
Rugi tahun berjalan	(856.566)
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	(3.412.212)
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	-
Penurunan nilai penyertaan pada portofolio tersedia untuk dijual	(1.561)
Jumlah modal inti	730.746
Modal pelengkap (maksimum 100% dari modal inti)	
Selisih penilaian kembali aktiva tetap	43.574
Cadangan umum penyisihan kerugian aktiva produktif (maksimum 1,25% dari ATMR)	125.577
Pinjaman subordinasi (maksimum 50% dari modal inti)	226.353
Jumlah modal pelengkap	395.504
Jumlah modal inti dan modal pelengkap	1.126.250
Penyertaan saham	79.391
Jumlah modal	**1.046.859**
Aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR)	10.046.193
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum Bank	10,42%
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan	8,00%

e. Rasio pemenuhan penyisihan penghapusan aktiva produktif Bank pada tahun 2002 adalah sebesar 107,15%.

43. KONDISI EKONOMI

Kondisi ekonomi Indonesia di tahun 2002 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2001. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan beberapa indikator ekonomi, seperti nilai tukar Rupiah yang cenderung stabil, suku bunga yang cenderung menurun, dan minat investasi yang membaik. Namun demikian tingkat inflasi masih tetap relatif tinggi (dua digit).

Restrukturisasi perbankan yang merupakan salah satu rencana kerja Pemerintah dalam bidang ekonomi masih terus berlanjut hingga saat ini. Realisasi restrukturisasi perbankan oleh Pemerintah di tahun 2002 diantaranya adalah dilakukannya penggabungan (*merger*) 5 (lima) bank di bawah pengelolaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yaitu PT Bank Bali Tbk, PT Bank Universal Tbk, PT Bank Prima Express, PT Bank Artamedia dan PT Bank Patriot. Tujuan dari penggabungan ini adalah untuk membentuk suatu bank yang memiliki struktur permodalan yang lebih kuat, kondisi finansial yang lebih sehat, dan daya saing yang lebih tinggi. PT Bank Bali Tbk ditetapkan sebagai rangka bank di dalam penggabungan ini dan berganti nama menjadi PT Bank Permata Tbk (Bank). Pemerintah juga telah melakukan penyertaan modal sementara sebesar Rp 4,6 triliun sehubungan dengan penggabungan ini yang bertujuan untuk menjaga tingkat kesehatan dan kesinambungan usaha Bank Hasil Penggabungan.

Bank saat ini telah menyelesaikan operasional merger dan kegiatan pasca merger antara lain meliputi konsolidasi sumber manusia, standarisasi cabang dan sosialisasi nama Bank Permata. Meskipun tantangan yang harus dihadapi cukup besar, namun Bank tetap optimis akan mampu mengembangkan usahanya pada tahun mendatang.

Rencana jangka pendek Bank setelah penggabungan adalah sebagai berikut:

1. Membangun sistem pelayanan prima dengan memperhatikan segmen pasar yang menjadi target pilihan Bank.
2. Memperoleh penambahan modal melalui *right issue*.
3. Menyelesaikan konsolidasi sumber daya manusia dan aktivitas *pasca merger*.
4. Membangun *brand* Bank.
5. Menurunkan rasio *Non-Performing Loan* (NPL) menjadi di bawah 5%.
6. Mencapai stabilitas dan membangun sistem operasional berbasis teknologi informasi.
7. Mengkonsolidasikan, menyelesaikan dan mempersiapkan "*champion product*" Bank.
8. Memperbaiki struktur *funding* untuk menurunkan *cost of fund*.
9. Meningkatkan kontribusi *fee based income* terhadap laba Bank.
10. Mengimplementasikan *risk management* dan *good corporate governance* secara konsisten dalam upaya mencapai tingkat kesehatan yang berkesinambungan.

Sedangkan rencana jangka panjang Bank adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan mengembangkan nasabah yang memberikan keuntungan bagi Bank.
2. Menciptakan organisasi yang berkinerja tinggi.
3. Mencapai tingkat kinerja operasional yang optimal agar memiliki daya saing yang tinggi.
4. Meningkatkan kemampuan pengendalian resiko.
5. Mengembangkan keahlian dalam pengendalian produk.
6. Membangun dan mensosialisasikan *brand*.

43. KONDISI EKONOMI (lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001 mencakup kondisi ekonomi tersebut, sepanjang hal itu dapat ditentukan dan diperkirakan. Pemulihan kondisi ekonomi tersebut tergantung pada kebijakan moneter, fiskal dan kebijakan lainnya yang telah dan akan diambil oleh Pemerintah Indonesia, suatu tindakan yang berada di luar kendali Bank dan Anak perusahaan. Oleh karena itu, tidaklah mungkin untuk menentukan dampak masa depan kondisi ekonomi terhadap pendapatan dan realisasi aktiva produktif Bank dan Anak perusahaan, termasuk dampak mengalirnya dana nasabah, kreditur, deposan dan pemegang saham ke dan dari Bank dan Anak perusahaan.

44. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 26/KMK.17/1998 tanggal 28 Januari 1998 dinyatakan bahwa pemerintah menjamin kewajiban bank umum meliputi giro, tabungan, deposito berjangka dan deposito on-call, obligasi, surat-surat berharga yang diterbitkan, pinjaman antar bank, pinjaman yang diterima, swaps/hedges/futures, derivatif dan kewajiban kontinjen lainnya seperti bank garansi, standby letters of credit, performance bonds dan kewajiban sejenis selain pinjaman subordinasi dan kewajiban kepada direktur, komisaris dan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Bank. Jaminan tersebut di atas berlaku untuk jangka waktu dua tahun sejak tanggal 26 Januari 1998 sampai dengan tanggal 31 Januari 2000. Sesuai dengan surat keputusan bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN No. 32/46/KEP/DIR dan No. 181/BPPN/0599 tanggal 14 Mei 1999, jangka waktu jaminan tersebut telah diperpanjang dengan sendirinya untuk jangka waktu enam bulan berikutnya. Lebih lanjut, Menteri Keuangan mengeluarkan surat keputusannya No.179/KMK/017/2000 tanggal 26 Mei 2000 untuk menggantikan surat keputusan diatas di mana jaminan pemerintah atas kewajiban bank umum seperti dijelaskan di atas berlaku untuk jangka waktu mulai tanggal 26 Januari 1998 sampai dengan tanggal 31 Januari 2001. Jangka waktu jaminan ini akan diperpanjang dengan sendirinya untuk jangka waktu enam bulan berikutnya secara terus-menerus, kecuali Menteri Keuangan, dalam waktu sekurang-kurangnya enam bulan sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut menerbitkan pemberitahuan bahwa Menteri Keuangan tidak bermaksud untuk memperpanjang jangka waktunya.

45. KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN DAN GUBERNUR BANK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia No. 53/KMK.017/1999 dan No. 31/12/KEP/GBI tertanggal 8 Februari 1999 tentang pelaksanaan program rekapitalisasi bank umum telah diatur, antara lain:

1. Bank umum yang dapat menjadi peserta program rekapitalisasi bank umum adalah bank umum kategori B, dengan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) lebih kecil dari 4% sampai dengan negatif 25%, di mana bank umum tersebut wajib membuat rencana kerja dan menyampaikan kepada Bank Indonesia serta pemegang saham pengendali, dewan komisaris dan direksinya wajib memenuhi "Fit and Proper Test".

2. Bank umum yang telah go public yang mengikuti program rekapitalisasi dapat menawarkan saham baru melalui mekanisme penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu (Rights Issue) atau tanpa melalui rights issue, dan pemegang saham pengendali wajib melaksanakan hak tersebut

45. KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN DAN GUBERNUR BANK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM (lanjutan)

sekurang-kurangnya 20% dari saham yang diterbitkan dengan pembayaran secara tunai untuk mencapai KPMM 4%. Dalam hal bank umum memilih mekanisme rights issue dan pemegang saham pengendali tidak dapat memenuhi kewajibannya sebesar 20%, kewajiban tersebut dapat dipenuhi secara bersama dengan atau seluruhnya dilakukan oleh investor strategis (strategic investors). Sedangkan, sisa saham baru tersebut yang tidak diambil oleh pemegang saham dan masyarakat diambil oleh pemerintah selaku pembeli siaga (stand-by-buyer).

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia No. 117/KMK.017/1999 dan No. 31/15/KEP/GBI tertanggal 26 Maret 1999 tentang pelaksanaan program rekapitalisasi bank dalam penyehatan yang berstatus Bank Take Over (BTO), pemerintah akan melakukan penyertaan modal sementara pada bank dengan jumlah minimal untuk mencapai kewajiban penyediaan modal minimum 4%. Penyertaan modal sementara yang diperlukan ditentukan berdasarkan hasil penelaahan (due diligence review) oleh pihak independen yang ditunjuk oleh BPPN.

46. SURAT KEPUTUSAN DAN PERJANJIAN PENTING

a. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/14/KEP.DpG/1999 tanggal 23 Juli 1999, Bank Indonesia menyerahkan Bank kepada BPPN untuk penyehatan, penyelesaian aktiva bank dan upaya pengembalian uang negara. Penyerahan tersebut bersifat sementara sampai dengan selesainya negosiasi antara investor dengan Pemerintah dan disetujuinya pemegang saham baru tersebut oleh Pemerintah dan Bank Indonesia serta yang bersangkutan telah melakukan setoran tambahan modal secara tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua BPPN No. SK-368/BPPN/0899 tanggal 4 Agustus 1999, Bank telah ditetapkan sebagai Bank Take Over (BTO).

c. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua BPPN No. SK-418/BPPN/1099 tanggal 7 Oktober 1999, BPPN membebastugaskan Hendri Kurniawan dan Rusli Suryadi dari tanggung jawabnya masing-masing sebagai anggota Tim Pengelola dan anggota Tim Kerja Pendukung Tim Pengelola. Dalam RUPSLB Bank pada tanggal 23 November 2000, keduanya telah diberhentikan dengan hormat dari keanggotaannya sebagai Direksi Bank. Sehubungan dengan hal tersebut, keduanya menanyakan mengenai kontrak kerja sebagai Direksi yang berakhir sampai dengan Juni 2001 dan klaim biaya pengacara dalam perkara Bank Bali di mana keduanya bertindak selaku Direksi Bank. Pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001, Bank telah mencadangkan sebesar Rp 5.200 untuk kompensasi dan estimasi klaim biaya pengacara.

d. Berdasarkan nota kesepahaman antara PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) dan Bank pada tanggal 24 Mei 2000, Bank dan Telkom telah sepakat untuk bekerjasama dalam aktivitas "e-commerce" antara lain tetapi tidak terbatas pada "Business to Business (B to B)" dan "Wireless Application Protocol (WAP)". Kesepakatan ini berakhir pada tanggal 24 Mei 2002.

e. Sehubungan dengan masalah hukum sebelumnya antara Herman Ramli, Rudy Ramli dan Bank Indonesia termasuk BPPN, mengenai penempatan Bank di bawah supervisi BPPN, pada tanggal 17 Juli 2000 telah ditandatangani Perjanjian Perdamaian antara Bank Indonesia, BPPN, Herman Ramli, Rudy Ramli dan PT Sarijaya Wirasentosa, yang di antaranya telah menyepakati untuk:

46. SURAT KEPUTUSAN DAN PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

- Mengakhiri perkara No. 138/G/TUN/1999/PTUN-JKT yang saat ini berada di tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta.

- Menyetujui dan akan mengusulkan kepada BAPEPAM untuk melakukan suspensi terhadap saham-saham Bank Bali yang dikuasai oleh Deutsche Bourse Clearing AG (DBC AG), dalam arti menunda hak-hak suara (voting rights) dan hak prioritas untuk membeli saham-saham yang diterbitkan Bank dalam rangka rights issue, dan suspensi tersebut terus berlaku sehingga diperolehnya kejelasan tentang identitas kepemilikan saham-saham Bank, yang dikuasai oleh DBC AG.

- Mengikutsertakan Herman Ramli, Rudy Ramli dan PT Sarijaya Wirasentosa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka divestasi Bank.

- Mengikuti dan mematuhi setiap ketentuan yang berlaku dan diberlakukan Pemerintah mengenai Rekapitalisasi Bank, termasuk untuk menghilangkan/menetralisasi setiap dan seluruh hambatan hukum (legal barriers), sehingga persiapan dan pelaksanaan rekapitalisasi Bank dapat dilakukan sepenuhnya dan sebagaimana mestinya.

- Herman Ramli, Rudy Ramli dan PT Sarijaya Wirasentosa membebaskan Bank Indonesia, BPPN dan Bank atas setiap tindakan yang dilakukan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan SK Gubernur BI No. 1/14/KEP.DpG/1999 dan SK Ketua BPPN No. SK-328/BPPN/0799 serta SK Ketua BPPN No. SK-329/BPPN/0799, dan karenanya mengikatkan diri untuk tidak mengajukan tuntutan atau gugatan terhadap pihak-pihak tersebut di atas.

f. BPPN bersama dengan Rudy Ramli mengadakan perjanjian penyelesaian yang integral dengan perjanjian perdamaian (lihat Catatan 46e) pada tanggal 17 Juli 2000 yang menyatakan bahwa BPPN menyetujui membayar sejumlah uang tunai setelah dipotong pajak yang berlaku sebesar Rp 9.000 kepada Rudy Ramli pada hari dilaksanakan rekapitalisasi Bank.

g. Sehubungan dengan adanya penyertaan modal sementara oleh Pemerintah RI (qq BPPN) kepada Bank, maka pada tanggal 2 Mei 2001, Bank bersama-sama dengan BPPN telah menandatangani Perjanjian Manajemen yang merupakan suatu perjanjian kinerja usaha sebagai pelaksanaan kewajiban dari SKB No. 117/KMK.017/1999 dan 31/15/KEP/GBI tanggal 26 Maret 1999 (SKB) dan Perjanjian Modal Sementara antara Bank dan BPPN tanggal 9 Oktober 2000.

h. Berdasarkan nota kesepahaman antara Bank dan PT Landas Nimpuna Teknologi (Landas) pada tanggal 9 Januari 2001, Bank dan Landas telah sepakat untuk melakukan kerja sama penyediaan layanan transaksi jual beli efek melalui media internet dengan menggunakan fasilitas e-trading yang telah dikembangkan oleh Landas dan jasa kustodian milik Bank. Perjanjian ini akan berakhir bila ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

i. Berdasarkan surat izin penutupan kantor cabang PT Bank Bali Tbk di Los Angeles, Amerika Serikat dari Deputi Direktur Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia No. 4/42/DPIP/Prz tanggal 31 Januari 2002 dan surat persetujuan dari "Commissioner of Financial Institution" tanggal 14 Februari 2002, kantor Cabang Los Angeles tersebut secara resmi telah ditutup pada tanggal 15 Februari 2002.

46. SURAT KEPUTUSAN DAN PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

j. Berdasarkan surat Deputi Gubernur BI No. 4/162/KEP.DpG/2002 tanggal 18 Oktober 2002, BI telah menyetujui:

1. Perubahan nama PT Bank Bali Tbk menjadi PT Bank Permata Tbk.
2. Izin usaha Bank sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 19371/U.M.II tanggal 19 Februari 1957 tetap berlaku bagi PT Bank Permata Tbk.

k. Berdasarkan surat BPPN No. PD/TM/249/X/2002 tanggal 25 Oktober 2002, Bank Peserta Penggabungan sebelum tanggal efektif peleburan usaha harus mencatat biaya-biaya sebesar Rp 1.630.611 yang timbul berkaitan dengan proses merger kelima bank yang antara lain terdiri dari cadangan litigasi, biaya pesangon karyawan, biaya pajak, biaya "head office", biaya teknologi, biaya "branding" dan lain-lain. Dalam biaya merger tersebut, sebesar Rp 482.248 dicatat sebagai beban merger oleh Bank dalam laporan laba rugi konsolidasi sedangkan sisanya sebesar Rp 1.148.363 dicatat oleh 4 BPP masing-masing dalam laporan laba rugi penutupan dan dicatat dalam akun Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali dalam laporan keuangan konsolidasi. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002, Bank telah menggunakan biaya merger sebesar Rp 312.093 sehingga cadangan biaya merger pada tanggal 31 Desember 2002 menjadi Rp 1.318.518 (lihat Catatan 26).

47. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

a. Berdasarkan surat dari "Caymand Islands Monetory Authority" tanggal 20 Maret 2003, kantor cabang Cayman Island telah resmi ditutup pada tanggal 31 Desember 2002.

b. Sehubungan dengan pelaksanaan SBH Universal menjadi saham seri B Bank, maka sesuai dengan surat dari biro administrasi efek PT Blue Chip Mulia pada tanggal 17 Maret 2003, jumlah saham yang dimiliki oleh BPPN qq Negara Republik Indonesia menjadi 189.045.792.865 saham (lihat Catatan 27).

c. Rincian posisi devisa neto Bank pada tanggal 28 Februari 2003 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

	2002		
	Aktiva dan Aktiva pada Rekening Administratif	Kewajiban dan Kewajiban pada Rekening Administratif	Posisi Devisa Neto
Dolar Amerika Serikat	4.008.368	4.176.288	167.920
Dolar Singapura	65.397	69.842	4.445
Franc Swiss	2.802	340	2.462
Kroner Swedia	1.830	-	1.830
Poundsterling Inggris	5.648	6.879	1.231
Euro Eropa	24.176	25.351	1.175
Dolar Hong Kong	3.232	2.059	1.173
Yen Jepang	78.997	80.095	1.098

47. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA (lanjutan)

	2002		
	Aktiva dan Aktiva pada Rekening Administratif	Kewajiban dan Kewajiban pada Rekening Administratif	Posisi Devisa Neto
Kroner Denmark	881	1	880
Dolar Cayman Island	649	4	645
Dolar Selandia Baru	1.918	1.550	368
Dolar Kanada	479	197	282
Dolar Australia	10.255	10.114	141
Ringgit Malaysia	-	32	32
Jumlah			**183.682**

Pada tanggal 28 Februari 2003 berdasarkan perhitungan Bank (tidak diaudit), posisi devisa neto Bank adalah 11,46% dari modal.

d. BMPK Bank pada tanggal 28 Februari 2003 (tidak diaudit) tidak melampaui ketentuan BMPK untuk pihak terkait dan untuk pihak tidak terkait terdapat pelampauan BMPK sebesar Rp 72.248.

e. Kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) Bank tanggal 28 Februari 2003 adalah sebesar 11,45% (tidak diaudit).

f. Efektif sejak tanggal 31 Januari 2003, I Nyoman Suwandha telah mengundurkan diri sebagai komisaris Bank.

g. Berdasarkan keputusan BPPN No. PB 1779/BPPN/0902 tanggal 6 September 2002 dan surat No. PB-171/BPPN/0203 tanggal 3 Februari 2003 tentang Pelaksanaan Program Penjualan Asset Inti II (PPAI II), Bank akan melaksanakan PPAI II kategori 5 per posisi tanggal 31 Desember 2002 melalui mekanisme lelang pada bulan Februari 2003 dan Maret 2003.

h. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, seluruh pengurus Bank telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia kecuali Ichsanuddin Noorsy (Komisaris) dan Ir. Ongki Wanadjati Dana (Direktur).

48. MASALAH HUKUM

a. Pada tanggal 5 Februari 1997, Bank mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Singapura terhadap Santosa Widjaja selaku "personal guarantor" dari PT Cakra Ekacemerlang Elektrindo (CEE). Gugatan tersebut timbul dari ketidakmampuan CEE dalam memenuhi kewajibannya atas kredit yang telah jatuh tempo sebesar US$ 8.000.000. Pada tanggal 4 November 1997, Mahkamah Agung Singapura membatalkan gugatan tersebut. Kemudian karena masalah tersebut di atas, Santosa Widjaja melakukan gugatan terhadap Bank atas tuduhan pencemaran nama baik, gugatan mana diajukan di Indonesia melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

48. MASALAH HUKUM (lanjutan)

Pada tanggal 18 Februari 1999, Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Surat Putusan No. 318/PDT/G/1998/PN.JKT.BAR. telah memutuskan agar Bank membayar ganti rugi sebesar Rp 2.142 dan US$ 6.000.000. Namun demikian, Bank telah mengajukan naik banding, dan diterima oleh Pengadilan Tinggi pada tanggal 14 September 1999 berdasarkan suratnya No. PTS.Pdt.1878.2929.1999 tanggal 11 November 1999. Pada tanggal 14 Februari 2000 melalui surat turunan putusan Pengadilan Tinggi DKI yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara No. 816/PDT/1999/PT.DKI.jo.No.318/PDT.G/1998/PN.JKT.BAR., Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memutuskan agar Bank membayar ganti rugi sebesar Rp 467 dan US$ 1.000.000. Namun demikian, Bank maupun Santosa Widjaja sama-sama mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berkas perkara telah diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 1 Desember 2000 dan telah diregister dengan No. 3650K/Pdt/2000.

b. Pada tanggal 17 September 1998, Bank mewakili sindikasi mengajukan permohonan sita jaminan (ex-parte application) terhadap aset-aset Bambang Sutrisno (world wide mareva injunction) selaku "personal guarantor" dari PT Surya Supratama Finance (SSF) dan terhadap tergugat lainnya termasuk Gina Widjaja (istri Bambang Sutrisno) di Pengadilan Tinggi Singapura. Gugatan tersebut timbul dari ketidakmampuan SSF dalam memenuhi kewajibannya atas kredit sindikasi yang telah jatuh tempo sebesar US$ 16.500.000.

Kemudian di Pengadilan Indonesia, Gina Widjaja melakukan gugatan terhadap Bank atas tuduhan pencemaran nama baik dengan tuntutan ganti rugi sebesar US$ 15.000.000. Pada tanggal 10 Maret 1999, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Surat Penetapan No. 93/Pdt.G/1999/PN.Jak-Sel. telah memerintahkan untuk melakukan sita jaminan terhadap bangunan tertentu milik Bank. Namun demikian, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam suratnya (Referensi No: W7-Dd.Ht.04.10.01.1062 dan W7-Dd.Ht.04.10.01.1063) tanggal 19 Maret 1999, telah memerintahkan bahwa tidak ada penyitaan jaminan atas bangunan tersebut, sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.

Pada tanggal 27 April 2000, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan putusan yang menyatakan gugatan Gina Widjaja tidak dapat diterima dan penetapan sita jaminan No. 20/1999 jo No. 93/Pdt.G/1999/PN.Jak-Sel tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun demikian, Gina Widjaja mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dan terdaftar dengan Register Perkara No. 401/Pdt/2000/PT.DKI.

Pada tanggal 27 Oktober 2000, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan bahwa pengadilan menguatkan putusan PN Jakarta Selatan tanggal 27 April 2000. Terhadap Putusan PT.DKI tersebut, pada tanggal 23 Januari 2001 Gina Widjaja mengajukan kasasi melalui PN Jakarta Selatan dan Bank telah menyerahkan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 19 April 2001 melalui PN Jakarta Selatan. Berkas perkara tersebut diregister oleh Mahkamah Agung pada tanggal 24 Agustus 2001 dengan No. 2737K/Pdt/2001.

Selain itu pada tanggal 11 Februari 1999, melalui Register Perkara No. 035/Pdt.G/1999/PN.JKT.BAR., Gina Widjaja mengajukan gugatan terhadap Bambang Sutrisno (suami Gina Widjaja) dan Bank/Kreditur Sindikasi mengenai keabsahan perjanjian "Indemnity and Guarantee" yang diberikan suaminya atas hutang SSF kepada Bank atas kekayaan bersama. Gina Widjaja menggugat ganti rugi sebesar Rp 1.200. Perkara ini sudah diputuskan pada tanggal 25 Agustus 1999 yang dimenangkan oleh Bank. Namun demikian, Gina Widjaja mengajukan banding dan telah terdaftar di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan

48. MASALAH HUKUM (lanjutan)

No. 210/PDT/2000/PT.DKI. Pada tanggal 3 November 2000, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengeluarkan putusan dengan inti menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 035/Pdt.G/1999/PN.JKT.BAR. tanggal 25 Agustus 1999. Gina Widjaja telah mengajukan kasasi pada tanggal 19 Januari 2001, di mana pemberitahuan kasasi diterima Bank tanggal 19 April 2001 dan pada tanggal 2 Mei 2001 Bank telah menyerahkan Kontra Memori Kasasi tertanggal Mei 2001 melalui PN Jakarta Barat. Berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung tanggal 9 Mei 2001 dan telah diregister dengan No. 1818K/Pdt/2001. Pada tanggal 2 Mei 2002, kuasa hukum Bank menerima pemberitahuan resmi Putusan MA dengan inti putusan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan menyatakan bahwa perjanjian "Indemnity and Guarantee" dari Bambang Sutrisno (suaminya) tidak sah dan batal demi hukum, namun tuntutan ganti rugi yang diminta oleh Penggugat tidak dikabulkan oleh MA. Pada tanggal 11 Juli 2002, Bank telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia atas putusan kasasi tersebut, dan Bank telah menerima Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Penggugat. Berkas perkara PK telah dikirim oleh PN Jkt. Barat pada tanggal 10 September 2002 melalui surat No. W7.Db.Ht.04.10.4166 telah diregistrasi di Mahkamah Agung tanggal 27 September 2002 dengan No. 501PK/Pdt.2002. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen perkara masih dalam pemeriksaan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

c. Pada tanggal 28 Juni 1999, melalui Register Perkara No. 224/Pdt.G/1999/PN.JKT.BAR., PT Samarinda Pratama Gemilang Enterprise (SPGE) mengajukan gugatan terhadap Bank sehubungan dengan penyampaian informasi mengenai SPGE sebagai bukti dalam kasus dengan Santoso Widjaja di Pengadilan Tinggi Singapura. SPGE mengajukan sita terhadap kantor Bank di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat dan ganti rugi sebesar US$ 15.100.000. Pada tanggal 30 September 1999, perkara ini sudah diputus dengan inti putusan mengabulkan gugatan sebagian berupa ganti rugi sebesar US$ 10.100.000, apabila putusan sudah berkekuatan hukum tetap. Terhadap putusan tersebut, Bank sudah menyatakan banding tanggal 17 Desember 1999 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

   Pada tanggal 2 November 2000, melalui putusan No. 302/PDT/2000/PT DKI, Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan untuk menerima permohonan banding Bank dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 30 September 1999 No. 224/Pdt.G/1999/PN.JKT.BAR. Terhadap putusan tersebut, SPGE mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2001 dan menyerahkan Memori Kasasi tanggal 13 Juli 2001. Pihak Bank mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 6 Agustus 2001 dengan Register Perkara MA No. 3982/Pdt/2001 tanggal 28 Desember 2001.

d. Pada tanggal 24 September 1999, melalui Surat Penetapan No. 448/Pdt.G/1999/PN.Jak.Sel., EGP mengajukan gugatan terhadap Bank sehubungan dengan perjanjian pengalihan/"cessie" atas tagihan BDNI dan BUN dari Bank kepada EGP. Gugatan ini timbul karena Bank dianggap telah melakukan wanprestasi. Oleh karena itu EGP mengajukan sita terhadap tanah dan bangunan milik Bank yang dikenal sebagai Bank Bali Tower dan Bintaro serta ganti kerugian sebesar Rp 2.536.000 dan meminta agar dinyatakan sebagai pemilik dana hasil pencairan piutang tersebut yang diletakkan dalam "Escrow Account" di bawah pengawasan Bank Indonesia. Berdasarkan pendapat dari penasehat hukum Bank, gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang kuat.

48. MASALAH HUKUM (lanjutan)

Pada tanggal 18 April 2000, melalui penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai perkara No. 448/Pdt.G/1999/PN.Jak.Sel., Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan perjanjian pengalihan/"cessie" atas tagihan BDNI dan BUN dari Bank kepada EGP adalah sah dan mengikat sehingga EGP berhak atas dana yang diletakkan dalam "Escrow Account" sebesar Rp 546.466. Pada tanggal 5 Juni 2000 terhadap putusan tersebut, Bank telah mengajukan banding dan terdaftar dengan No. 487/Pdt/2000/PT.DKI. Perkara banding tersebut telah diputus oleh PT DKI pada tanggal 23 Maret 2001, dengan inti putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 448/Pdt.G/1999/ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 April 2000. Atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut, Bank telah menyatakan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 6 Juni 2001 dan menyerahkan Memori Kasasi tanggal 18 Juni 2001. Berdasarkan pendapat konsultan hukum Bank tanggal 18 Maret 2003 bahwa sampai saat ini perkara No. 448/Pdt.G/1999/PN.Jak.Sel. masih di tingkat Mahkamah Agung sehingga belum bisa diprediksi hasilnya. Tetapi tambahan atas perkara yang sama di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang terdaftar di bawah No. 148/G.TUN/1999/PTUN-JKT (lihat Catatan 48e), BPPN yang membatalkan perjanjian cessie itu dianggap sah oleh pengadilan. Dengan demikian EGP tidak berhak atas perjanjian cessie itu. Bila merujuk pada putusan ini maka Mahkamah Agung akan memenangkan Bank kecuali ada inkonsistensi.

e. Pada tanggal 24 November 1999, melalui surat penetapan No. 148/G.TUN/1999/PTUN-JKT., Drs. Setya Novanto telah mengajukan gugatan terhadap BPPN di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan tersebut mengenai permohonan pembatalan Surat Keputusan Ketua BPPN No. SK-423/BPPN/1099 tanggal 15 Oktober 1999 yang membatalkan perjanjian pengalihan/"cessie" antara Bank dan EGP. Penggugat meminta ganti kerugian Rp 5 dan menyatakan batal atau tidak sah serta mencabut surat keputusan tersebut.

Pada tanggal 30 November 1999, melalui penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengenai perkara No. 148/G.TUN/1999/PTUN-JKT, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memerintahkan untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Ketua BPPN No. SK-423/BPPN/1099 tanggal 15 Oktober 1999, mengenai pembatalan perjanjian pengalihan/"cessie" dengan EGP.

Pada tanggal 2 Maret 2000, berdasarkan Surat Kuasa Hukum BPPN No. 044/GN/II/2000 tanggal 2 Maret 2000, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil keputusan mengabulkan gugatan EGP kepada Ketua BPPN berkaitan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Ketua BPPN No. SK-423/BPPN/1099 tentang pembatalan perjanjian pengalihan (cessie) tagihan antara Bank dengan EGP yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta No. 148/G.TUN/1999/PTUN.JKT. Terhadap putusan tersebut, BPPN telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada tanggal 8 Maret 2000 dan menurut Divisi Hukum dan Perundang-undangan BPPN putusan PTUN tanggal 2 Maret 2000 belum memiliki kekuatan hukum yang tetap, sehingga Surat Keputusan Ketua BPPN No. SK-423/BPPN/1099 tentang pembatalan perjanjian pengalihan (cessie) tagihan antara Bank dengan EGP belum dinyatakan batal demi hukum.

Pada tanggal 26 Juli 2000, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta melalui surat No. 096/B/2000/PT.TUN-JKT. memutuskan untuk menguatkan keputusan PTUN No. 148/G.TUN/1999/PTUN-JKT. tanggal 2 Maret 2000.

Namun, BPPN pada tanggal 12 September 2000 telah menyatakan kasasi melalui akta permohonan kasasi No. 072/KAS-2000/PTUN-JKT dan menyerahkan Memori Kasasi pada tanggal 22 September 2000.

48. MASALAH HUKUM (lanjutan)

Berdasarkan surat BPPN No: PB-1584/BPPN/0802 tertanggal 6 Agustus 2002, telah disampaikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah Agung RI telah mengabulkan permohonan kasasi BPPN melalui keputusan tanggal 4 Maret 2002 No. 447 K/TUN/2000 antara PT Era Giat Prima melawan BPPN di Peradilan Tata Usaha Negara dengan objek sengketa SK Ketua BPPN No. SK - 423/BPPN/1099 tanggal 15 Oktober 1999 tentang Pembatalan Perjanjian Pengalihan (Cessie)

   Tagihan antara PT Bank Bali Tbk dengan PT Era Giat Prima, yang pada intinya menolak gugatan dari PT Era Giat Prima dan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 148/G.TUN/1999/PTUN-JKT tanggal 29 Februari 2000 Jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 96/B/2000/PT.TUN tanggal 26 Juli 2000.

2. Bahwa dengan demikian, maka SK Ketua BPPN No. SK - 423/BPPN/1099 tanggal 15 Oktober 1999 tersebut adalah sah sehingga Perjanjian Cessie dan perjanjian-perjanjian penyelesaian antara PT Era Giat Prima dan PT Bank Bali Tbk menjadi batal.

Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, Bank belum memperoleh data bahwa EGP telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali atas putusan kasasi tersebut.

f. Pada tanggal 29 Februari 2000, melalui Surat Penetapan No. 019/G.TUN/2000/PTUN-JKT., Joko Soegiarto Tjandra, Direktur Utama PT Persada Harum Lestari (PHL), telah mengajukan gugatan terhadap BPPN di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gugatan tersebut mengenai pembatalan perjanjian pengalihan/"Cessie" antara Bank dan PHL berdasarkan Surat Keputusan ketua BPPN No. SK-464/BPPN/1199 tanggal 30 November 1999. Penggugat meminta ganti kerugian Rp 5 dan menyatakan batal atau tidak sah serta mencabut Surat Keputusan tersebut. Perkara ini sedang dalam proses di Pengadilan. Menurut pendapat Konsultan Hukum Bank sepanjang Penggugat tidak dapat membuktikan secara sah dan berharga menurut hukum, adanya alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 (2) Undang-undang No. 5 tahun 1986, maka tindakan Tergugat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingan tergugat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sekaligus melampaui kewenangan.

   Pada tanggal 30 Agustus 2000, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat. Namun BPPN telah menyatakan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding No. 091/BD/2000/PTUN.JKT tanggal 13 September 2000 dan terhadap upaya hukum banding PTTUN Jakarta melalui Surat Pemberitahuan Putusan Banding Nomor: 08/B/2000/PT.TUN-JKT kepada BPPN telah memutuskan Permohonan Banding BPPN atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor: 019/G.TUN/2000/PTUN.JKT tanggal 30 Agustus 2000 di mana pokok putusannya adalah menguatkan putusan PTUN Jakarta Nomor 019/G.TUN/2000/PTUN-JKT tanggal 30 Agustus 2000 yang dimohonkan banding.

   Mengingat putusan PTTUN Jakarta No. 08/B/2001/PT.TUN-JKT tanggal 15 Maret 2001 dinilai merugikan kepentingan BPPN maka melalui Kuasa Hukumnya BPPN pada tanggal 20 Juni 2001 telah menyatakan kasasi terhadap Putusan PTTUN Jakarta No. 08/B/2000/PT.TUN-JKT tanggal 30 Agustus 2000 melalui Akta Permohonan Kasasi No. 045/KAS-2001/PTUN-JKT dan menyerahkan Memori Kasasi pada tanggal 3 Juli 2001. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, perkara masih dalam proses pemeriksaan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

48. MASALAH HUKUM (lanjutan)

g. Pada tanggal 4 Mei 1999, Bank telah melakukan ambil alih agunan dari PT Atlantik Prakarsa senilai Rp 40.000 melalui PPJB. Namun terhadap agunan yang telah diambil alih tersebut tidak dapat dilakukan perpanjangan hak karena terhadap agunan tersebut ternyata telah diletakkan sita jaminan oleh pihak ketiga melalui perkara gugatan No. 189/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst yang diajukan tanggal 12 Mei 2000. Dalam perkara gugatan dan sita jaminan yang diajukan oleh pihak ketiga tersebut, debitur Bank (PT Atlantik Prakarsa) menjadi Tergugat II, namun Bank tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara tersebut. Untuk menjaga kepentingan Bank terhadap ex-agunan yang menjadi obyek sita, maka Bank telah mengajukan permohonan intervensi terhadap perkara tersebut. Perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Desember 2000 dengan inti putusan: Menolak gugatan Penggugat dan menolak gugatan Penggugat Intervensi. Pihak Penggugat maupun Bank (Penggugat Intervensi) telah mengajukan banding melalui Pengadilan Tinggi Jakarta pada bulan Desember 2000.

Tanggal 8 Juli 2002 telah diterima Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding/Tambahan Memori Banding dan tanggal 23 Agustus 2002 telah diterima Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding/Tambahan Barang Bukti. Perkara banding tersebut telah diregister di Pengadilan Tinggi dengan No. 75/PDT/2002/PT.DKI. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen belum ada putusan atas perkara tersebut dari Pengadilan Tinggi. Pada tanggal 4 Januari 2001 Penggugat yang sama (Ny. Wien Royani yang mengaku sebagai Pemilik sertifikat HGB No. 99/agunan yang diambil alih oleh Bank) mengajukan gugatan baru kepada Bank (sebagai Tergugat V) dalam perkara No. 03/Pdt.G/2001/PN. Jkt. Pst, dengan inti gugatan: Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik yang sah dari SHGB No. 99. Terhadap gugatan tersebut pada tanggal 28 Mei 2001 PN Jakarta Pusat telah memberikan putusan yang intinya: Mengabulkan gugatan sebagian dan menyatakan Penggugat (pihak ketiga) diberikan Hak Prioritas untuk perpanjangan hak atas tanah sengketa. Atas putusan PN tersebut Bank telah menyatakan Banding pada tanggal 8 Juni 2001 dan berdasarkan informasi dari konsultan hukum Bank telah diregister di Pengadilan Tinggi DKI dengan No. 179/Pdt/2002/PT DKI. Berdasarkan laporan dari konsultan hukum Bank, diperoleh informasi bahwa Pengadilan Tinggi DKI berdasarkan Putusan Perkara No. 179/Pdt/2002/PT.DKI tanggal 2 Agustus 2002 telah memutuskan untuk memenangkan Bank selaku pemohon banding yang pada intinya menyatakan menolak gugatan Penggugat (Ny. Wien Royani) dan mengangkat sita jaminan yang diletakkan atas tanah tersebut. Bank telah menerima Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi dan Salinan Putusan Pengadilan Tinggi dimaksud dengan inti putusan: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan pihak penggugat telah mengajukan kasasi ke MA dan Bank telah menyerahkan kontra memori kasasi tanggal 13 Februari 2003.

Karena adanya indikasi pemalsuan terhadap bukti-bukti yang dipergunakan oleh Penggugat pada 2 perkara di atas (No. 189/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst dan No. 03/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Pst), maka Bank bersama-sama dengan debitur telah melaporkan kasus penggunaan bukti palsu tersebut ke Polda Metro Jaya pada tanggal 22 Agustus 2001 dengan No. Pol 2302/K/VIII/2001/SATGA OPS"A". Saat ini perkara telah dilimpahkan dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Tinggi, dengan nomor Register R/7845/X/2002/DATRO tanggal 1 Oktober 2002. Namun oleh Kejaksaan Tinggi berkas tersebut dikembalikan ke Polda Metro Jaya dengan instruksi agar pemeriksaan terhadap kasus tersebut dilengkapi. Diharapkan laporan pidana ke Kepolisian tersebut dapat dipakai untuk memperkuat posisi Bank dalam Perkara Perdata yang sedang diperiksa di tingkat banding tersebut. Berhubung Polda belum mengembalikan berkas tersebut ke Kejaksaan Tinggi, walaupun sudah melebihi tenggang waktu yang ditentukan, maka Kejaksaan Tinggi Jakarta mengirimkan surat tanggal 20 Desember 2002 dengan No. B.5275/0.14/EPP.2/12/2002 kepada Polda Metro Jaya untuk dikembalikan, tetapi sampai sekarang, berkas tersebut masih ditahan di Polda Metro Jaya.

48. MASALAH HUKUM (lanjutan)

h. Pada tanggal 2 November 2001, melalui surat penetapan No. 506 dan 507/Pdt.G/2001/PN Jakarta Selatan, Rusli Suryadi dan Hendri Kurniawan (Penggugat), keduanya adalah mantan anggota Direksi Bank, telah mengajukan gugatan terhadap Bank di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan tersebut mengenai permohonan ganti kerugian atas tuduhan wanprestasi yang dilakukan oleh Bank terhadap yang bersangkutan berdasarkan surat kesepakatan (Surat Kesepakatan) yang pernah dibuat oleh dan antara mereka dengan Bank, di mana pihak yang mewakili Bank dalam Surat Kesepakatan tersebut adalah Dewan Komisaris Bank pada waktu itu dengan tuntutan sebesar Rp 16.886 dan Rp 17.510, gugatan juga disertai dengan permohonan sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan yaitu Gedung Bank Bali Tower lantai 17 sampai dengan 23. Berdasarkan pendapat dari pengacara Bank yang disampaikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana tertuang dalam surat jawabannya terhadap gugatan dari Penggugat, disampaikan bahwa Penggugat berhenti sebagai anggota direksi Bank karena undang-undang mengingat pemberhentian tersebut terjadi disebabkan turunnya SK Gubernur Bank Indonesia No. 1/14/KEP.DpG/1999 tanggal 23 Juli 1999, di mana berdasarkan SK Gubernur Bank Indonesia tersebut, Bank ditempatkan sebagai bank yang berada dalam pengawasan BPPN sebagai bank dalam penyehatan dan berdasarkan pasal 40 (a) PP No. 17 tahun 1999 segala hak wewenang yang bersangkutan beralih kepada BPPN. Dengan demikian pemberhentian Penggugat dalam kedudukannya sebagai anggota Direksi Bank adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal mana juga sesuai dengan ketentuan dalam pasal 11 ayat 9 butir e anggaran dasar Bank. Dalam surat jawaban dari pengacara Bank juga disampaikan bahwa kalaupun Penggugat ingin mengajukan gugatan, maka seharusnya gugatan tersebut ditujukan kepada BPPN yang mengambil alih hak dan wewenang mereka pada waktu itu. Pada tanggal 25 April 2002, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan No. 506/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel dan No. 507/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. telah memutuskan agar Bank membayar ganti rugi masing-masing sekitar Rp 2.515 kepada Rusli Suryadi dan Rp 3.049 kepada Hendri Kurniawan. Namun demikian, Bank telah mengajukan naik banding pada tanggal 6 Mei 2002. Sampai saat ini, perkara tersebut masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

i. Pada tanggal 10 Desember 2001 melalui Surat Penetapan No. 556/Pdt.G/2001/PN. Jakarta Selatan, Rudi Ramli (Penggugat), selaku mantan Direktur Utama Bank telah mengajukan gugatan terhadap Bank di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan tersebut mengenai permohonan ganti kerugian sebesar Rp 34.454 yang timbul atas tuduhan yang sama seperti yang diajukan oleh kedua mantan anggota direksi (lihat Catatan 48h). Terhadap gugatan tersebut, Bank juga mengajukan gugatan rekonpensi, sebagai akibat Penggugat telah ingkar janji dengan melanggar ketentuan Pasal 6 dari perjanjian perdamaian (Perjanjian Perdamaian) tertanggal 17 Juli 2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat bersama-sama dengan Bank Indonesia dan BPPN, di mana dalam Perjanjian Perdamaian tersebut telah disepakati bahwa Penggugat membebaskan Bank dengan tidak mengajukan tuntutan dan/atau gugatan yang berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan SK Ketua BPPN No. 328 dan No. 329. Perlu diketahui bahwa sebagai pelaksanaan dari Perjanjian Perdamaian tersebut Penggugat telah menerima ganti rugi sebesar Rp 9.000, hal mana dibuktikan dengan surat pernyataan dan pembebasan yang ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2000. Pada tanggal 6 September 2002, Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 039/2002 Del.Jo.No. 556/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. berdasarkan surat permohonan bantuan untuk melaksanakan sita jaminan tertanggal 3 September 2002 No. W7.Dd.Ht.04.10.030.3212 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengabulkan permohonan sita jaminan dari Penggugat atas gedung Bank Bali yang terletak di Jalan Hayam Wuruk No. 84-85 Jakarta Barat.

48. MASALAH HUKUM (lanjutan)

Pada tanggal 15 Oktober 2002, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan No. 556/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel telah memutuskan antara lain (i) Bank dinyatakan wanprestasi; (ii) Bank dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 1.955 ditambah bunga sebesar 3% setiap bulannya terhitung sejak bulan Desember 2001; (iii) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Gedung Bank Bali Hayam Wuruk. Terhadap putusan tersebut, Bank telah mengajukan banding pada tanggal 28 Oktober 2002. Sampai saat ini perkara tersebut masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

j. Pada tanggal 30 April 1998, melalui Register Perkara No. 175/Pdt.G/1998/PN.JKT.PST. CV Wira Mustika Indah (WMI) mengajukan gugatan terhadap Bank beserta Bank peserta sindikasi lainnya karena Bank sindikasi tersebut oleh penggugat dinyatakan telah wanprestasi sehubungan dengan dihentikannya penerbitan L/C sebelum mencapai plafon US$ 25 juta. WMI mengajukan ganti rugi sebesar Rp 500.000. Pada tanggal 5 Februari 1999, melalui putusan No. 175/Pdt.G/1998/PN.JKT.PST., Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat. Terhadap putusan tersebut, WMI mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Pada tanggal 29 November 1999, melalui Putusan No. 636/Pdt/1999/PT.DKI., Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan untuk membatalkan Putusan PN Jakarta Pusat tersebut namun tuntutan ganti rugi yang diminta oleh Penggugat kepada para Tergugat tetap tidak dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi. Terhadap putusan tersebut, Bank mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dengan Register Perkara MA No. 3722/Pdt/2001 tanggal 30 November 2001. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, perkara tersebut masih menunggu putusan dari Mahkamah Agung.

k. Pada tanggal 14 September 1991, melalui Register Perkara No. 250/Pdt/G/1991/.PN.JKT.Brt., PT Bina Ichtiar Pratama (BIP) mengajukan gugatan terhadap Bank karena Bank oleh penggugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memasang lagi hipotik dan melakukan lelang eksekusi terhadap jaminan yang lain karena masih ada sisa hutang BIP kepada Bank. BIP mengajukan ganti rugi sebesar Rp 1.225. Pada tanggal 24 Maret 1992, melalui putusan No. 250/Pdt.G/1991/PN.JKT.BAR., Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat. Terhadap putusan tersebut, BIP mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.

Pada tanggal 6 Januari 1997, melalui Putusan No. 693/Pen/1997/685/Pdt/1996/PT.DKI., Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menghukum Bank untuk membayar ganti rugi sebesar setengah dari jumlah bunga yang harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat yaitu sebesar setengah dari Rp 378 dan US$ 94.726,83 sesuai dengan bunyi pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi tersebut. Terhadap putusan tersebut, Bank mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, perkara tersebut masih menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung.

l. Pada tanggal 17 Juni 1999, melalui Register Perkara No. 286/Pdt.G/1999/PN.Jak.Sel., Sunardjo Sumargono (SS) mengajukan gugatan terhadap Bank dan meminta pembatalan risalah lelang atas lelang yang pernah diajukan oleh Bank terhadap agunan debitur PT Semoga Sakti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana agunan tersebut tercatat atas nama SS dengan tuntutan ganti rugi Rp 3.000. Pada tanggal 13 Januari 2000, melalui putusan No. 286/Pdt.G/1999/PN.Jak.Sel., Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat namun tuntutan ganti rugi yang diminta oleh Penggugat tidak dikabulkan. Pada tanggal 11 Desember 2000, melalui putusan No. 524/Pdt/2000/PT.DKI,

48. MASALAH HUKUM (lanjutan)

Pengadilan Tinggi memutuskan untuk membatalkan keputusan Pengadilan Negeri dan tuntutan ganti rugi yang diminta oleh Penggugat tetap tidak dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, belum diketahui apakah Penggugat mengajukan kasasi atau tidak ke Mahkamah Agung.

m. Pada tanggal 19 Agustus 1998, melalui Register Perkara No. 339/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel., PT Wira Mustika Indah (WMI) mengajukan gugatan kepada Bank (Primex) dengan alasan Bank tidak membukukan serta memperhitungkan uang pembayaran yang diberikan oleh penggugat. WMI mengajukan permohonan sita jaminan terhadap bangunan tertentu milik Bank dan ganti rugi sebesar Rp 1.000. Pada tanggal 16 Februari 1999 Pengadilan Negeri melalui putusan No. 339/Pdt.G/1998/PN.Jak.Sel., menolak gugatan penggugat. Pada tanggal 29 November 1999, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusan No. 503/Pdt/1999/PT.DKI., menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, perkara masih dalam pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

n. Pada tanggal 20 November 1999, melalui Register Perkara No. 414/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Bar., Tansri Singadju Benui (TSB) mengajukan gugatan kepada Bank (Primex) (Tergugat I), Ny. Erlilna Tandianus (Tergugat II) dan BPPN (sebagai turut Tergugat) dengan alasan Bank telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak menurunkan suku bunga pinjaman atas fasilitas kredit yang telah diberikan sehubungan dengan menurunnya tingkat bunga deposito dan Bank telah mengalihkan kredit beserta jaminan terkait kepada BPPN meskipun menurut penggugat kreditnya bukan kredit bermasalah. TSB mengajukan permohonan sita jaminan terhadap bangunan tertentu milik Bank dan ganti rugi sebesar Rp 100.100 dan setiap keterlambatan dikenakan denda 3% per bulan. Pada tanggal 23 Mei 2000, melalui Putusan No. 414/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Bar., Pengadilan Negeri memutuskan mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan menghukum Bank dan turut Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 400 secara tanggung renteng. Terhadap putusan tersebut Bank mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.

Pada tanggal 22 November 2000, melalui putusan No. 614/Pdt/2000/PT.DKI,. Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Terhadap putusan tersebut, Bank mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, perkara masih dalam proses pemeriksaan dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

o. Pada tanggal 2 Maret 1999, melalui Register Perkara No. 107/Pdt.G/1999/PN/Jkt.Pst., Tansri Mahadju Benui (TMB) mengajukan gugatan terhadap Bank (Primex) karena telah salah melakukan penyitaan terhadap aset milik penggugat dalam perkara yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 463/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst. TMB mengajukan ganti rugi sebesar Rp 850. Pada tanggal 2 Agustus 1999, melalui putusan No. 107/PDT.G/1999/PN.JKT.PST,. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan menghukum Bank untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 300. Terhadap putusan tersebut, Bank mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.

Pada tanggal 26 Juni 2000, melalui putusan No. 29/Pdt/2000/PT.DKI., Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Terhadap putusan tersebut, Bank mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, perkara masih dalam proses pemeriksaan dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

48. MASALAH HUKUM (lanjutan)

p. Pada tanggal 21 Februari 2001, melalui Register Perkara No. 80/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel., PT Wiraderekindo mengajukan gugatan kepada Bank (Primex) dan BPPN (Tergugat I) dengan alasan Bank telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat sehubungan dengan kesalahan dalam memperhitungkan jumlah hutang dan bunga dari pinjaman penggugat yang diterimanya dari Bank, sehingga pinjaman penggugat yang dialihkan kepada BPPN dalam rangka rekapitalisasi Bank, tidak dapat diikutsertakan dalam program pelunasan pinjaman dengan diskon. PT Wiraderekindo menuntut penyerahan kembali surat-surat jaminan milik penggugat bersamaan dengan pembayaran hutang penggugat kepada Bank dan Tergugat I sebesar Rp 2.554 sebagai pelunasan atas seluruh kewajiban penggugat. Pada tanggal 23 Januari 2002, melalui putusan No. 80/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel., Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menetapkan sisa hutang penggugat menjadi Rp 2.981. Terhadap putusan tersebut Bank mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dan pada tanggal 15 Oktober 2002 melalui putusan Pengadilan Tinggi No. 268/Pdt/2002/PT.DKI Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengeluarkan keputusan yang intinya menguatkan putusan PN Jakarta Selatan. Perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

q. Pada tanggal 19 Juni 2001, melalui Register Perkara No. 292/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel., PT Super Adi Teknik Indonesia (SATI) mengajukan gugatan dengan alasan Bank (Primex) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat sehubungan dengan kesalahan dalam memperhitungkan jumlah hutang dan bunga dari pinjaman penggugat sehingga pinjaman penggugat yang dialihkan kepada BPPN tidak dapat diikutsertakan dalam program pelunasan pinjaman dengan diskon. SATI menuntut pengembalian surat-surat jaminan milik penggugat dan menetapkan hutang penggugat terhadap Bank menjadi Rp 3.000. Perkara ini sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Mei 2002 dengan melalui Surat Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 292/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel. dengan inti putusan menyatakan hutang SATI kepada Bank sebesar Rp 3.000 dan tidak ada kewajiban untuk membayar bunga. Perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di tingkat Pengadilan Tinggi.

r. Pada tanggal 16 April 2002, melalui Register Perkara No. 142/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Bar. dan No. 143/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Bar., TSB dan TMB mengajukan gugatan dengan alasan Bank (Primex) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat sehubungan dengan tidak dikembalikannya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1433 dan No. 1434. TSB dan TMB mengajukan ganti rugi materiil dan immateriil masing-masing sebesar Rp 2.890 dan Rp 5.000.

Pada tanggal 13 November 2002 melalui surat putusan No. 142/PDT.G/2002/PN.JKT.BAR. dan No. 143/PDT.G/2002/PN.JKT.BAR., Pengadilan Negeri Jakarta Barat memberikan keputusan dengan menghukum Primex untuk mengembalikan SHM No. 1433 & 1434 serta membayar ganti rugi masing-masing sebesar Rp 490 untuk masing-masing perkara. Kedua perkara ini sedang dalam pemeriksaan di Pengadilan Tinggi.

s. Pada tanggal 3 Januari 2000, melalui Register Perkara No. 03/Pdt.G/2000/PN.BDG, UD Tekad Maju Textile (TMT) mengajukan gugatan terhadap Bank (Primex) dengan alasan pelaksanaan sita jaminan yang dilakukan oleh Bank tidak adil dan merugikan penggugat. TMT mengajukan tuntutan agar diberikan kesempatan untuk merestrukturisasi pinjamannya dan penangguhan sita jaminan. Pada tanggal 29 Februari 2000, melalui putusan No. 03/Pdt.G/2000/PN.Bdg/Bant, Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Terhadap putusan tersebut Bank melakukan banding ke Pengadilan Tinggi. Pada tanggal 19 Oktober 2000 melalui putusan No. 279/Pdt./2000/PT.BDG, Pengadilan Tinggi menolak gugatan tersebut. Terhadap putusan tersebut, TMT mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, perkara masih dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

48. MASALAH HUKUM (lanjutan)

t. Pada tanggal 3 Januari 2000, melalui Register Perkara No. 04/Pdt.G/2000/PN.Bdg., UD TMT mengajukan gugatan terhadap Bank (Primex) dengan alasan karena Bank telah ingkar janji/wanprestasi terhadap surat hutang No. 30 tanggal 31 Oktober 1996 dan kesepakatan restrukturisasi pinjaman penggugat sebagaimana tertuang dalam surat No. 052/KSK/Pemb/CB/08.99. TMT mengajukan ganti rugi sebesar Rp 22.450. Pada tanggal 11 April 2000, melalui putusan No. 04/Pdt/G/2000/PN.Bdg, Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menghukum Bank untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 1.000. Terhadap putusan tersebut Primex mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Pada tanggal 8 Januari 2001, melalui putusan No. 614/Pdt/2000/PT.Bdg, Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Terhadap putusan tersebut Bank mengajukan banding ke Mahkamah Agung.

u. Pada tanggal 17 September 1998, melalui Register Perkara No. 463/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst., Bank (Primex) mengajukan gugatan kepada PT Wira Mustika (Tergugat I), TSB (Tergugat II) dan Soesanto Leo (Tergugat III) karena Tergugat I ingkar janji tidak memenuhi pembayaran sisa hutangnya. Bank mengajukan tuntutan agar tergugat membayar pokok sebesar Rp 2.130 beserta bunga 65% per tahun dan US$ 2.534.294,51 beserta bunga 22% per tahun. Pada tanggal 10 Juni 1999 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan No. 463/Pdt/1998/PN.JKT.PST mengabulkan gugatan Bank untuk sebagian dan menghukum tergugat untuk membayar dan melunasi pinjaman sebesar Rp 1.732 dan US$ 2.302.644,90 serta denda 6% per tahun. Terhadap putusan tersebut tergugat naik banding ke Pengadilan Tinggi. Pada tanggal 16 Mei 2000 Pengadilan Tinggi melalui putusan No. 849/Pdt/1999/PT.DKI. menolak gugatan Bank. Terhadap putusan tersebut, pada tanggal 31 Oktober 2001, Bank mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, perkara masih dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

v. Pada tanggal 24 Januari 2001, melalui Register Perkara No. 028/PDT.G/2001/PN.JKT.BAR, PT Surya Raya Idaman (Penggugat I) dan Judith Suryadjaya (Penggugat II) mengajukan gugatan terhadap Bank (Artamedia) sehubungan dengan pelunasan hutang eks debitur PT Swakarsa Bina Sejahtera (Tergugat I) yang sebagian berasal dari penyerahan asset Penggugat I dan II. Adapun asset Penggugat I adalah tiga bidang tanah di Bali dengan bukti kepemilikan SHGB No. 1216/Benoa, SHGB No. 1686/Benoa dan SHGB No. 1328/Benoa, sedangkan milik Penggugat II adalah rumah di Jl. Suwiryo No. 49 Menteng, Jakarta Pusat dengan bukti kepemilikan SHM No. 198/Gondangdia. Penggugat I dalam tuntutannya menuntut agar Bank mengembalikan ketiga bidang tanah tersebut kepada Penggugat, menghukum Bank untuk membayar uang paksa sebesar Rp 100 setiap hari apabila Bank terlambat melaksanakan putusan, akta kuasa menjual No. 21, 22 dan 23 adalah batal/tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, memohon sita jaminan atas ketiga bidang tanah tersebut. Penggugat II dalam tuntutannya menuntut agar akta No. 16 dan 18 tanggal 23 Maret 1999 sepanjang tidak menyangkut opsi tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, menyatakan hutang tergugat I adalah Rp 21.781, serta mengabulkan permohonan sita jaminan atas rumah tersebut.

Pada tanggal 22 Mei 2001, melalui surat Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 028/PDT/G/2001/PN.JKT.BAR. mengeluarkan putusan yaitu menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Kemudian, para Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kemudian pada tanggal 13 Juni 2002 Pengadilan Tinggi Jakarta melalui surat keputusan No. 546/PDT/2001/PT.DKI mengeluarkan keputusan yang menguatkan Putusan PN Jakarta Barat. Terhadap putusan tersebut, para Penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 September 2002 dan menyerahkan Memori Kasasi pada tanggal 3 Oktober 2002. Pihak Bank mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 4 Desember 2002.

48. MASALAH HUKUM (lanjutan)

w. Pada tanggal 8 April 2002, melalui Register Perkara No. 128/PDT.G/2002/PN.JKT.PST, Ny. Judith Suryadjaya (Penggugat) menggugat Bank (Artamedia) (Tergugat I) sehubungan dengan pelunasan hutang eks debitur PT Swakarsa Bina Sejahtera (Tergugat III) yang sebagian berasal dari asset milik Penggugat yaitu rumah di Jl. Suwiryo No. 49 Jakarta Pusat dengan bukti kepemilikan SHM No. 198/Menteng, Jakarta Pusat, atas nama Ny. Judith Suryadjaya dan tanah seluas 5.000 m^2 yang terletak di Pemukiman Emeralda, Cimanggis, dimana pada saat pengambilalihan belum bersertifikat dan sampai saat ini belum diserahkan sertifikatnya.

Pada tanggal 11 Maret 2002, rumah tersebut telah dilelang berdasarkan Penetapan Ketua PN Jakarta Pusat pada tanggal 22 Januari 2002, No. 013/1999 Eks, walaupun penggugat mengajukan keberatan dan menyatakan terhadap rumah tersebut telah diletakan sita jaminan berdasarkan putusan PN Jakarta Pusat tanggal 27 Juli 2000 melalui surat No. 137/Pdt.G/2000/PN.JKT.PST.

Penggugat dalam tuntutannya menuntut Tergugat I, II dan III untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp 60.500 dan menyatakan lelang batal demi hukum.

x. Pada tanggal 16 September 2002, melalui Register Perkara No. 516/PDT.G/2002/PN.JKT.SEL, PT Jaya Andrean Perkasa (Penggugat) menggugat Bank (Artamedia) sehubungan dengan asset Bank (BJDA) di Jl. Teluk Betung No. 41 Jakarta Pusat yang tidak dapat direalisasikan penandatanganan Akta Jual Beli dari Bank ke Penggugat. Gugatan tersebut timbul karena Bank tidak dapat memenuhi isi perjanjian untuk penandatanganan jual beli, meskipun Penggugat telah menyetor dana dalam bentuk deposito sebesar Rp 10.000 pada tanggal 9 Juli 2001 dan uang muka sebesar Rp 100. Penggugat dalam tuntutannya menuntut Artamedia untuk mencairkan depositonya dan menuntut kerugian materiil sebesar Rp 10.100 dan menuntut kerugian immateriil sebesar Rp 12 milyar ditambah bunga sebesar 10% setiap bulan dari total kerugian materiil. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, perkara masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

y. Pada tanggal 18 Desember 2002, PT Wira Griya Mustika (debitur) telah mengajukan gugatan terhadap Bank (Universal) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat No. 673/Pdt/G/2002/PN.Jak.Sel. Gugatan itu timbul karena Bank telah menyimpan asli sertifikat hak atas tanah dan ijin mendirikan bangunan (IMB) atas asset-asset milik debitur yang telah dijaminkan kepada Bank sehingga mengakibatkan Pengikatan Jual Beli yang telah dilakukan oleh debitur dengan Pihak Ketiga/Pembeli menjadi batal dan menimbulkan kerugian bagi debitur. Penggugat menuntut Bank untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil masing-masing sebesar Rp 32.530 dan Rp 10.000 atas batalnya Pengikatan Jual Beli tersebut kepada debitur. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, perkara masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berdasarkan pendapat konsultan hukum Bank ("internal lawyer") kemungkinan Bank untuk memenangkan perkara gugatan tersebut cukup besar karena secara hukum sebenarnya dasar gugatan Penggugat sama sekali lemah dan tidak berdasar, dengan pertimbangan bahwa asli sertifikat hak atas tanah dan ijin mendirikan bangunan yang disimpan oleh Bank masih berstatus sebagai barang jaminan (Hak Tanggungan), sehingga tindakan Bank menyimpan asli dokumen-dokumen tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sebaliknya tindakan debitur yang telah melakukan Pengikatan Jual Beli dengan Pihak Ketiga atas barang jaminan tanpa persetujuan tertulis dari Bank merupakan perbuatan melawan hukum.

48. MASALAH HUKUM (lanjutan)

z. Pada tanggal 8 Februari 1999, PT Manggala Wibawa (debitur sindikasi) telah mengajukan gugatan perbuatan wanprestasi (cidera janji) terhadap Bank Sindikasi dengan pesertanya yaitu Bank Internasional Indonesia, Bank Exim, Bank Universal, Bank Bali, Bank Bukopin, Bank Pelita, Bank Duta, Bank Danamon Indonesia, Bank Niaga dan Bank Dagang Nasional Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan perkara No. 069/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Pst., karena Bank Sindikasi tidak melakukan pencairan Fasilitas Pinjaman Sindikasi sebesar US$ 122.000.000 berdasarkan Perjanjian Pinjaman Sindikasi No. 37 tanggal 14 Agustus 1997. Penggugat menuntut Bank Sindikasi untuk membayar ganti rugi atas hal tersebut secara tanggung renteng kepada debitur sebesar US$ 31.416.767 dan Rp 200, serta pengembalian participation fee dari masing-masing anggota sindikasi dimana masing-masing US$ 210,000 dan US$ 150.000 merupakan porsi Universal dan Bali.

Pada tanggal 21 Desember 1999, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui surat keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 069/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Pst. mengeluarkan putusan yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan pertimbangan hukum bahwa tindakan Bank Sindikasi tidak melakukan pencairan fasilitas kepada debitur bukan merupakan perbuatan wanprestasi karena sebagai akibat terjadinya krisis ekonomi dan keuangan (krisis moneter) yang melanda negara Indonesia pada waktu pelaksanaan pencairan pinjaman akan dilakukan. Hal tersebut bukan kehendak Bank Sindikasi tetapi merupakan keadaan yang memaksa bagi Bank Sindikasi untuk tidak memenuhi kewajibannya (membatalkan komitmen) melakukan pencairan pinjaman sindikasi tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Perjanjian Pinjaman Sindikasi No. 7 tanggal 14 Agustus 1997. Saat ini status perkara gugatan tersebut terhenti di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengingat Relaas Pemberitahuan Isi Putusan belum disampaikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Penggugat, sehingga untuk sementara tidak diketahui apakah debitur mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut.

Berdasarkan pendapat konsultan hukum Bank ("internal lawyer") kemungkinan Bank Sindikasi untuk memenangkan perkara gugatan tersebut di tingkat yang lebih tinggi adalah cukup besar, mengingat pertimbangan hukum atas putusan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sangat kuat dan berdasar sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

aa. Pada tanggal 23 November 2001, Simon Raharja (penerima Bank Garansi) telah mengajukan gugatan perbuatan wanprestasi (cidera janji) terhadap Bank (Universal) (Penerbit Bank Garansi) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui perkara No. 537/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. Gugatan tersebut timbul karena Bank telah melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan pencairan Bank Garansi sebesar US$ 5.000.000 sebagai jaminan pembayaran hutang debitur kepada Penggugat. Untuk itu, Bank (Universal) harus membayar ganti rugi materiil secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar US$ 6.633.686,62 dan Rp 500 serta ganti rugi immateriil secara tanggung renteng sebesar US$ 1.000.000 ditambah sebesar US$ 5.000.000 merupakan porsi Bank.

Pada tanggal 18 Maret 2002, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui surat keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 537/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. mengeluarkan putusan yang menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat, dengan pertimbangan hukum bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili secara absolut perkara aquo karena merupakan kewenangan absolut dari Badan Arbitrase sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Kesepakatan Bersama (MOU) tertanggal 21 April 1997 Jo. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 019 K/N/1999 tertanggal 9 Agustus 1999.

48. MASALAH HUKUM (lanjutan)

Untuk mengantisipasi adanya gugatan baru dari Penggugat (berdasarkan putusan gugatan Penggugat hanya tidak diterima), maka Universal telah mengajukan Banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut pada tanggal 9 April 2002 dan telah pula menyerahkan Memori Banding pada tanggal 17 September 2002 dan telah terdaftar di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam register perkara No. 637/Pdt/2002/PT.DKI.

Berdasarkan pendapat konsultan hukum Universal ("internal lawyer") kemungkinan Universal untuk memenangkan perkara gugatan tersebut ditingkat yang lebih tinggi (Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung) cukup besar, mengingat pertimbangan hukum atas putusan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sangat kuat dan berdasar sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

bb. Pada tanggal 19 April 2000, debitur PT Adiputera Dewasajaya (ADP) telah mengajukan gugatan terhadap Universal karena perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Pada tanggal 11 September 2000 melalui surat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 89/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Ut memutuskan menolak gugatan penggugat seluruhnya. Pada tanggal 25 Januari 2001 melalui surat putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 660/PDT/2000/PT.DKI. mengeluarkan keputusan yang memenangkan Bank dan menghukum ADP untuk membayar hutangnya kepada Bank (Universal) sebesar Rp 20.977 dan USD 2.507.900,96. Pada tanggal 13 Februari 2001 melalui surat putusan Mahkamah Agung RI No. 3253K/Pdt/2001, Universal dimenangkan dengan putusan menolak permohonan banding ADP dan mewajibkan ADP untuk membayar hutangnya kepada Universal sebesar Rp 20.977 dan USD 2.507.900,96, maka pada tanggal 18 Juli 2002 berdasarkan Risalah Lelang No. 42/2002 telah dilakukan eksekusi lelang atas barang-barang jaminan milik ADP yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Muara Enim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 09/Eks/2001/PN.Jkt.Ut jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim No. 04/Pdt.P/Eks/2001 dan dari lelang tersebut Universal memperoleh Rp 17.100. Saat ini, debitur telah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut. Pada tanggal 5 September 2002, Bank telah mengajukan kontra memori PK atas memori PK yang telah diajukan oleh ADP.

Manajemen Bank berpendapat, penyelesaian akhir dari masalah hukum tersebut tidak akan berdampak buruk terhadap hasil usaha dan posisi keuangan Bank.

49. KEWAJIBAN BERSYARAT

Berdasarkan hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun pajak 1999, Bank mengalami kekurangan bayar pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp 75.047 yang terdiri dari PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2 (final) masing-masing sebesar Rp 67.120 dan Rp 7.927. Dari kekurangan bayar pajak tersebut, sejumlah Rp 66.887 merupakan hutang PPh pasal 23 yang menurut pemeriksa pajak merupakan pajak yang harus dipungut oleh Bank atas jasa perantara transaksi dengan EGP (lihat Catatan 15). Sedangkan manajemen Bank berpendapat bahwa transaksi tersebut secara hukum adalah murni transaksi pengalihan piutang dan bukan merupakan transaksi penggunaan jasa perantara sehingga transaksi ini bukan merupakan objek PPh pasal 23.

49. KEWAJIBAN BERSYARAT (lanjutan)

Bank sudah mengajukan keberatan dan berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah XIX Wajib Pajak Besar No. KEP/001/WPJ.19/BD.0503/2002 tanggal 17 September 2002, Direktur Jenderal Pajak menolak seluruh keberatan Bank atas hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun pajak 1999 sehingga Bank mengalami kekurangan bayar pajak sebesar Rp 8.269 atas PPh pasal 4 ayat 2. Atas kekurangan bayar tersebut, Bank telah membayar sebesar Rp 423. Manajemen Bank akan mengajukan banding atas keputusan tersebut. Dalam rangka mengajukan banding, Bank telah membayar 50% dari jumlah yang terhutang.

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah XIX Wajib Pajak Besar No. KEP/003/WPJ.19/BD.0503/2002 tanggal 17 September 2002, Direktur Jenderal Pajak menerima sebagian keberatan Bank atas hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun pajak 1999 sehingga Bank mengalami kekurangan bayar pajak menjadi sebesar Rp 67.450 atas PPh pasal 23. Atas kekurangan bayar tersebut, Bank telah membayar sebesar Rp 344. Manajemen Bank akan mengajukan banding atas keputusan tersebut. Dalam rangka mengajukan banding, Bank telah membayar 50% dari jumlah yang terhutang.

Pada tanggal 25 Oktober 2002, Bank membayar sebesar Rp 33.712 dan Rp 3.923 atau masing-masing 50% dari kekurangan bayar pajak sehubungan dengan hutang PPh pasal 23 yang menurut pemeriksa pajak merupakan pajak yang harus dipungut oleh Bank atas jasa perantara transaksi dengan EGP dan hutang PPh pasal 4 ayat 2, yang telah diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu tanggal 28 Oktober 2002. Pembayaran tersebut dilakukan sehubungan dengan Undang-undang RI No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 36 ayat 4 yang menyatakan banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50%.

Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah X Jateng dan DIY No. KEP 73/WPJ.10/BD.0303/2002 dan No. KEP-72/WPJ.10/BD.0303/2002 tanggal 9 Oktober 2002, Direktur Jenderal Pajak menolak seluruh keberatan Bank atas hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun pajak 1999 sehingga Bank mengalami kekurangan bayar pajak masing-masing sebesar Rp 14 atas PPh pasal 23 dan Rp 81 atas PPh pasal 4 ayat 2. Kekurangan bayar tersebut telah dilunasi pada tanggal 11 Oktober 2002.

Berdasarkan pendapat konsultan pajak Bank, hasil pemeriksaan pajak tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan oleh karena itu hasil pemeriksaan tersebut tidak dicatat dalam laporan keuangan konsolidasi.

50. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI SEHUBUNGAN DENGAN PELEBURAN USAHA

Pada tanggal 30 September 2002, peleburan usaha 4 BDP dengan Bank telah efektif (lihat Catatan 3). Oleh karena Bank dan 4 BDP telah berada dalam pengendalian bersama (*under common control*) oleh BPPN sejak tanggal 13 Maret 1999 (untuk Artamedia), 16 Maret 1999 (untuk Universal dan Patriot) dan 29 Mei 1999 (untuk Primex), maka laporan keuangan konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2001 telah disajikan kembali seolah-olah peleburan usaha tersebut sudah terjadi sejak permulaan tahun yang disajikan, sesuai dengan PSAK No. 38.

50. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI SEHUBUNGAN DENGAN PELEBURAN USAHA (lanjutan)

Penyajian kembali laporan keuangan konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2001 tersebut dilakukan dengan menambahkan saldo akun aktiva dan kewajiban 4 BDP pada tanggal tersebut sesuai laporan keuangan tanggal 31 Desember 2001, ke saldo akun yang sama pada Bank. Sementara itu, saldo defisiensi modal 4 BDP sebesar (Rp 1.130.776) pada tanggal 31 Desember 2001 dilaporkan secara terpisah pada komponen Ekuitas (Defisiensi Modal) dalam akun "Pro forma Akun dari Restrukturisasi Entitas Sepengendali". Termasuk di dalam akun "Pro forma Akun dari Restrukturisasi Entitas Sepengendali" adalah penurunan nilai wajar Efek-efek yang diklasifikasikan ke dalam kelompok tersedia untuk dijual sebesar Rp 11.570 pada tahun 2001 (lihat Catatan 8) dan penilaian kembali aktiva tetap sebesar Rp 87.846 pada tahun 2001 (lihat Catatan 14). Pengaruh dari peleburan usaha tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2001 terutama sebagai berikut:

	2001	
	Dilaporkan Sebelumnya	Disajikan Kembali
Efek-efek - bersih	7.606.240	12.269.847
Kredit yang diberikan - bersih	2.036.045	8.575.100
Jumlah aktiva	13.001.600	26.613.635
Jumlah simpanan	10.525.754	22.449.386
Pinjaman yang diterima	703.744	2.621.736
Pro forma akun dari restrukturisasi entitas sepengendali		
Saldo awal	-	390.980
Saldo akhir	-	(1.130.776)
Ekuitas (defisiensi modal) - bersih	513.944	(616.832)

Laporan Keuangan
31 Desember 2002
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2001
(Mata Uang Indonesia)

PT BANK PERMATA Tbk (dahulu PT BANK BALI Tbk)
(Induk Perusahaan Saja)

PT BANK PERMATA Tbk (dahulu PT BANK BALI Tbk)
(INDUK PERUSAHAAN SAJA)
LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2002
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2001

Daftar Isi

	Halaman
Laporan Auditor Independen	166
Neraca	169
Laporan Laba Rugi	174
Laporan Perubahan Ekuitas (Defisiensi Modal)	176
Laporan Arus Kas	177
Catatan Atas Laporan Keuangan	179

ERNST & YOUNG

Prasetio, Sarwoko & Sandjaja
Kantor Akuntan Publik Terdaftar, Izin Usaha No. Kep-191/KM.6/2002

Gedung Bursa Efek Jakarta
Menara I, Lantai 13
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Indonesia
Telp: (62-21) 515 1960
Fax: (62-21) 515 1920

Wisma 46, Kota BNI
Lantai 25-28 & 30-31
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220
Indonesia
Telp: (62-21) 575 7999
Fax: (62-21) 574 4521

www.ey.com

21 Maret 2003

Surat No. RPC-0619/02

Direksi
PT Bank Permata Tbk

Dengan hormat,

Laporan keuangan PT Bank Permata Tbk (dahulu PT Bank Bali Tbk) (Induk Perusahaan Saja) terlampir tanggal 31 Desember 2002 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasi PT Bank Permata Tbk dan Anak Perusahaan tanggal 31 Desember 2002 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (tidak disajikan di sini) yang telah kami audit dan laporannya bertanggal 21 Maret 2003 memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut serta penjelasan tambahan sebagaimana dijelaskan dalam paragraf ketiga, keempat dan kelima di bawah ini. Laporan keuangan PT Bank Permata Tbk (Induk Perusahaan Saja) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001, juga disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasi PT Bank Permata Tbk dan Anak perusahaan tanggal 31 Desember 2001 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (tidak disajikan di sini) yang telah diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya bertanggal 28 Maret 2002 menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut sebelum penyajian kembali laporan keuangan tersebut serta penjelasan tambahan mengenai penyajian kembali dan reklasifikasi laporan keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000 agar sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 (revisi 2000) "Akuntansi Perbankan" dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) serta dampak kondisi ekonomi Indonesia terhadap Bank dan Anak perusahaan.

Seperti dijelaskan pada Catatan 2j atas laporan keuangan untuk penyajian laporan keuangan "Induk Perusahaan Saja", penyertaan saham Bank pada Anak perusahaan dengan persentase pemilikan paling sedikit 20%, dicatat dengan metode ekuitas.

Seperti diuraikan pada Catatan 3 atas laporan keuangan, berdasarkan Akta Merger yang diaktakan pada tanggal 27 September 2002, Bank dan bank-bank yang menggabungkan diri, yang terdiri dari Universal, Primex, Artamedia dan Patriot (4 bank) dengan persetujuan rapat umum luar biasa pemegang saham telah sepakat melakukan peleburan usaha. Peleburan usaha ini menjadi efektif sejak disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2002. Catatan 49 atas laporan keuangan mengungkapkan pengaruh dari peleburan usaha.

ERNST & YOUNG

Seperti diuraikan pada Catatan 47d atas laporan keuangan, pada tanggal 24 September 1999, PT Era Giat Prima (EGP) mengajukan gugatan terhadap Bank sehubungan dengan perjanjian pengalihan/"cessie" atas tagihan PT Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dan PT Bank Umum Nasional (BUN) dari Bank kepada EGP. Gugatan ini timbul karena Bank dianggap telah melakukan wanprestasi. Oleh karena itu EGP mengajukan sita terhadap tanah dan bangunan milik Bank yang dikenal sebagai Bank Bali Tower dan Bintaro serta ganti kerugian sebesar Rp 2,5 triliun dan meminta agar dinyatakan sebagai pemilik dana hasil pencairan piutang tersebut yang diletakkan dalam "Escrow Account" di bawah pengawasan Bank Indonesia sebesar Rp 546,4 milyar. Berdasarkan pendapat konsultan hukum Bank tanggal 18 Maret 2003, bahwa sampai saat ini perkara tertanggal 24 September 1999 masih diproses di tingkat Mahkamah Agung sehingga belum bisa diprediksi hasilnya. Tetapi tambahan atas perkara yang sama di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang terdaftar di bawah No. 148/G.TUN/1999/PTUN-JKT (lihat Catatan 47e), BPPN yang membatalkan perjanjian cessie itu dianggap sah oleh pengadilan. Dengan demikian EGP tidak berhak atas perjanjian cessie itu. Bila merujuk pada putusan ini maka Mahkamah Agung akan memenangkan Bank kecuali ada inkonsistensi. Seperti diuraikan pada Catatan 14, sesuai dengan surat ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kepada Bank, keduanya tertanggal 28 Desember 1999 serta surat tanggal 23 Februari 2000, BPPN menjamin realisasi tagihan kepada EGP sebesar Rp 546,4 milyar tersebut di atas. Seperti diuraikan pada Catatan 47e, sesuai dengan surat BPPN tertanggal 6 Agustus 2002, telah disampaikan antara lain hal-hal sebagai berikut: bahwa Mahkamah Agung RI telah mengabulkan permohonan kasasi BPPN melalui keputusan tanggal 4 Maret 2002 antara EGP melawan BPPN di Peradilan Tata Usaha Negara dengan objek sengketa SK Ketua BPPN tanggal 15 Oktober 1999 tentang Pembatalan Perjanjian Pengalihan (Cessie) Tagihan antara Bank dengan EGP, yang pada intinya menolak gugatan dari EGP dan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 29 Februari 2000 Jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tanggal 26 Juli 2000, bahwa dengan demikian, maka SK Ketua BPPN tanggal 15 Oktober 1999 tersebut adalah sah sehingga Perjanjian Cessie dan perjanjian-perjanjian penyelesaian antara EGP dan Bank menjadi batal. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasi tahun 2002, Bank belum memperoleh data bahwa EGP telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali atas putusan kasasi tersebut.

Seperti diuraikan pada Catatan 42 atas laporan keuangan, kondisi ekonomi Indonesia di tahun 2002 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2001. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan beberapa indikator ekonomi, seperti nilai tukar Rupiah yang cenderung stabil, suku bunga yang cenderung menurun dan minat investasi yang membaik. Sebagaimana dijelaskan pada Catatan 45a atas laporan keuangan, pada tanggal 23 Juli 1999, Bank telah ditempatkan dalam pengelolaan BPPN dan kemudian status Bank telah diubah menjadi Bank Take Over (BTO). Berdasarkan surat keputusan Ketua BPPN tanggal 4 Agustus 1999 Bank telah ditetapkan sebagai peserta program rekapitalisasi BTO. Untuk memenuhi persyaratan modal minimum, Bank melakukan Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Rights Issue) III sesuai dengan surat keputusan Ketua BPPN tanggal 29 November 1999. Setelah program rekapitalisasi tersebut, Bank telah memenuhi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai dengan yang disyaratkan Bank Indonesia. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001, Bank telah memperoleh laba bersih sebesar Rp 132.268 juta. Seperti diuraikan dalam paragraf ketiga dan Catatan 3 atas laporan keuangan, Bank telah melakukan peleburan usaha dengan Universal, Primex, Artamedia dan Patriot, di mana peleburan usaha ini menjadi efektif pada tanggal 30 September 2002. Sehubungan dengan itu BPPN melakukan penyertaan modal sementara dalam Bank sebesar Rp 4,6 triliun melalui penempatan terbatas. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002, Bank masih mengalami rugi bersih sebesar Rp 808.221 juta yang terutama disebabkan biaya merger sebesar Rp 482.248 juta dan penyisihan kerugian atas aktiva produktif sebesar Rp 342.208 juta. Pada tahun 2002, Bank telah memenuhi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai dengan yang disyaratkan Bank Indonesia, tetapi Bank belum memenuhi rasio "non performing loan" (NPL), Posisi Devisa Neto (PDN) dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Laporan keuangan terlampir mencakup dampak kondisi ekonomi tersebut, sepanjang hal itu dapat ditentukan dan diperkirakan. Pemulihan kondisi ekonomi tersebut tergantung pada kebijakan moneter, fiskal dan kebijakan lainnya yang telah dan akan diambil oleh Pemerintah Indonesia, suatu tindakan yang berada di luar kendali Bank. Oleh karena itu, tidaklah mungkin untuk menentukan dampak masa depan kondisi ekonomi terhadap pendapatan dan realisasi aktiva produktif Bank, termasuk dampak mengalimya dana nasabah, kreditur, deposan, dan pemegang saham ke dan dari Bank.

ERNST & YOUNG

Laporan keuangan terlampir disajikan atas permintaan dan digunakan oleh manajemen Bank serta tidak boleh digunakan untuk tujuan lainnya.

Hormat kami,
PRASETIO, SARWOKO & SANDJAJA

Drs. Ruddy Koesnadi
Partner

PT BANK PERMATA Tbk (dahulu PT BANK BALI Tbk)
(INDUK PERUSAHAAN SAJA)
NERACA
31 Desember 2002
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2001
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Data Saham)

	Catatan	2002	2001 (Disajikan Kembali - Lihat Catatan 49)
AKTIVA			
KAS	2a, 4	518.354	331.444
GIRO PADA BANK INDONESIA	2a, 5	1.354.090	1.085.482
GIRO PADA BANK LAIN	2a, 2b, 2i, 6	107.014	272.890
Penyisihan kerugian		(1.070)	(2.774)
Bersih		105.944	270.116
PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN	2c, 2i, 7	2.622.230	1.179.343
Penyisihan kerugian		(90.394)	(112.634)
Bersih		2.531.836	1.066.709
EFEK-EFEK	2d, 2h, 2i, 8, 29		
Diperdagangkan			
Pihak ketiga		1.318.768	39.369
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		2.775.771	927.080
Tersedia untuk dijual			
Pihak ketiga		12.927	1.038
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		645.116	2.330.886
Dimiliki hingga jatuh tempo			
Pihak ketiga		404.172	2.388.315
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		8.270.674	6.590.475
Jumlah efek-efek		13.427.428	12.277.163
Penyisihan kerugian		(31.430)	(32.442)
Bersih		13.395.998	12.244.721
TAGIHAN DERIVATIF	2e, 2h, 2i, 9, 29		
Pihak ketiga		2.082	2.784
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		-	845
Penyisihan kerugian		(21)	(41)
Bersih		2.061	3.588
KREDIT YANG DIBERIKAN	2f, 2h, 2i, 2q, 10, 18, 29		
Pihak ketiga		8.844.895	9.706.860
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		9.268	215.722

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT BANK PERMATA Tbk (dahulu PT BANK BALI Tbk)
(INDUK PERUSAHAAN SAJA)
NERACA (lanjutan)
31 Desember 2002
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2001
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Data Saham)

	Catatan	2002	2001 (Disajikan Kembali - Lihat Catatan 49)
Pendapatan bunga ditangguhkan		(12.038)	-
Penyisihan kerugian		(1.718.270)	(1.398.746)
Bersih		7.123.855	8.523.836
TAGIHAN AKSEPTASI	2g, 2h, 2i, 11, 29		
Pihak ketiga		57.038	55.965
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		-	6.805
Penyisihan kerugian		(4.316)	(628)
Bersih		52.722	62.142
AKTIVA PAJAK TANGGUHAN - Bersih	2v, 21	382.934	321.935
PENYERTAAN SAHAM	2f, 2i, 2j, 10, 12		
Metode Ekuitas		70.394	140.878
Metode Biaya			
Tidak dalam rangka restrukturisasi kredit		9.838	10.176
Dalam rangka restrukturisasi kredit		69.908	194.508
Penyisihan kerugian		(57.581)	(148.938)
Bersih		92.559	196.624
AKTIVA TETAP	2h, 2l, 13, 29, 40		
Nilai tercatat		1.013.646	1.152.969
Akumulasi penyusutan		(289.176)	(374.756)
Nilai buku		724.470	778.213
AKTIVA LAIN-LAIN			
Tagihan lain-lain	14	546.466	546.466
Agunan diambil alih - bersih	2m, 14	467.227	466.742
Bunga masih akan diterima	14	372.322	405.646
Biaya dibayar di muka	2k, 14	32.958	44.842
Lain-lain	2l, 2n, 14	169.736	138.228
Jumlah Aktiva Lain-lain		1.588.709	1.601.924
JUMLAH AKTIVA		**27.873.532**	**26.486.734**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT BANK PERMATA Tbk (dahulu PT BANK BALI Tbk)
(INDUK PERUSAHAAN SAJA)
NERACA (lanjutan)
31 Desember 2002
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2001
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Data Saham)

	Catatan	2002	2001 (Disajikan Kembali - Lihat Catatan 49)
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN SEGERA	14, 15	1.070.477	757.890
SIMPANAN			
Giro	2h, 2o, 16, 29		
Pihak ketiga		4.168.080	3.403.938
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		6.771	665.681
Jumlah Giro		4.174.851	4.069.619
Tabungan	2h, 2o, 17, 29		
Pihak ketiga		2.719.311	2.871.304
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		5.703	7.332
Jumlah Tabungan		2.725.014	2.878.636
Deposito Berjangka	2h, 2o, 18, 29		
Pihak ketiga		14.927.143	14.492.266
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		16.852	739.194
Jumlah Deposito Berjangka		14.943.995	15.231.460
Sertifikat Deposito - bersih	2o	1.994	232.973
Jumlah Simpanan		21.845.854	22.412.688
SIMPANAN DARI BANK LAIN		129.624	104.328
EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI	2p, 8, 19	-	511.993
KEWAJIBAN DERIVATIF	2e, 2h, 9, 29		
Pihak ketiga		-	2.132
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		-	873
Jumlah Kewajiban Derivatif		-	3.005
KEWAJIBAN AKSEPTASI	2g, 20	57.038	62.770

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT BANK PERMATA Tbk (dahulu PT BANK BALI Tbk)
(INDUK PERUSAHAAN SAJA)
NERACA (lanjutan)
31 Desember 2002
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2001
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Data Saham)

	Catatan	2002	2001 (Disajikan Kembali - Lihat Catatan 49)
SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN	2h, 22, 29		
Pihak ketiga		113.969	267.888
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		298.809	-
Jumlah Surat-surat Berharga yang diterbitkan		412.778	267.888
PINJAMAN YANG DITERIMA	8, 10, 23, 29		
Pihak ketiga		1.285.034	2.621.199
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		189.046	-
Jumlah Pinjaman yang Diterima		1.474.080	2.621.199
ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI	2i, 24	17.221	23.527
KEWAJIBAN LAIN-LAIN	2t, 2u, 25, 36, 45	1.709.208	338.278
Jumlah Kewajiban		26.716.280	27.103.566
EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)			
Modal saham - nilai nominal Rp 500 per saham untuk kelas A dan Rp 5 per saham untuk kelas B pada tahun 2002 dan 2001			
Modal dasar - 672.005.833 saham kelas A dan 452.799.416.700 saham kelas B pada tahun 2002 serta 672.005.833 saham kelas A dan 92.799.416.700 saham kelas B pada tahun 2001			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 672.005.833 saham kelas A dan 192.906.142.242 saham kelas B pada tahun 2002 serta 672.005.833 saham kelas A dan 66.528.577.467 saham kelas B pada tahun 2001	1, 26	1.300.534	668.646
Tambahan modal disetor-agio saham - bersih	1, 26	9.067.496	5.023.052
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	3, 26	(3.240.518)	-

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT BANK PERMATA Tbk (dahulu PT BANK BALI Tbk)
(INDUK PERUSAHAAN SAJA)
NERACA (lanjutan)
31 Desember 2002
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2001
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Data Saham)

	Catatan	2002	2001 (Disajikan Kembali - Lihat Catatan 49)
Pro forma akun dari restrukturisasi entitas sepengendali	3, 26, 49	-	(1.130.776)
Rugi yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek yang tersedia untuk dijual	2d, 8	(1.561)	-
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	2u, 27	-	(17.276)
Selisih penilaian kembali aktiva tetap	2l, 13	43.574	43.574
Defisit		(6.012.273)	(5.204.052)
Ekuitas (Defisiensi Modal) - Bersih		1.157.252	(616.832)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**27.873.532**	**26.486.734**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT BANK PERMATA Tbk (dahulu PT BANK BALI Tbk)
(INDUK PERUSAHAAN SAJA)
LAPORAN LABA RUGI
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2002
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2001
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Laba (Rugi) Bersih Per Saham Dasar)

	Catatan	2002	2001
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan Bunga			
Bunga	2q, 31	2.023.281	1.195.167
Provisi dan komisi	2r	77.368	53.045
Jumlah Pendapatan Bunga		2.100.649	1.248.212
Beban Bunga			
Bunga	2q, 32	1.751.784	1.184.780
Provisi dan komisi	2r	5.671	3.140
Jumlah Beban Bunga		1.757.455	1.187.920
Pendapatan Bunga - Bersih		343.194	60.292
Pendapatan Operasional Lainnya			
Imbalan	2s, 33	103.060	107.467
Keuntungan (kerugian) bersih penilaian efek yang diperdagangkan	2d	53.966	(1.668)
Laba selisih kurs - bersih	2e, 2u	26.668	71.862
Pendapatan - bersih dari penyertaan saham (metode ekuitas)	12	20.354	27.295
Keuntungan bersih penjualan efek	2d	16.588	8.791
Pendapatan dividen (metode biaya)	12	2.980	83
Lain-lain		18.909	24.039
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya		242.525	237.869
Beban (Pembalikan) Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif	2i	342.208	(122.371)
Beban (Pembalikan) Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	2i, 24	13.022	(46.240)
Beban Merger	45	482.248	-
Beban Operasional Lainnya			
Umum dan administrasi	2l, 2n, 34	287.813	231.679
Tenaga kerja dan tunjangan	2t, 35, 36	281.064	180.699
Lain-lain		44.211	30.459
Jumlah Beban Operasional Lainnya		613.088	442.837

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT BANK PERMATA Tbk (dahulu PT BANK BALI Tbk)
(INDUK PERUSAHAAN SAJA)
LAPORAN LABA RUGI (lanjutan)
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2002
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2001
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Laba (Rugi) Bersih Per Saham Dasar)

	Catatan	2002	2001
LABA (RUGI) OPERASIONAL	2w, 30	(864.847)	23.935
PENDAPATAN BUKAN OPERASIONAL - Bersih	2l, 2m, 12, 13, 37	8.281	113.040
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK		(856.566)	136.975
BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK Tangguhan	2v, 21	(48.345)	4.707
LABA (RUGI) BERSIH		**(808.221)**	**132.268**
LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM DASAR	2x	(8)	2

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT BANK PERMATA Tbk (dahulu PT BANK BALI Tbk)
(INDUK PERUSAHAAN SAJA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2002
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2001
(Dalam Jutaan Rupiah)

	Catatan	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor - Agio Saham - Bersih	Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	Pro forma Akun dari Restrukturisasi Entitas Sepengendali	Rugi yang Belum Direalisasi Atas Perubahan Nilai Wajar Efek Yang Tersedia Untuk Dijual	Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan	Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	Defisit	Ekuitas (Defisiensi Modal) - Bersih
Saldo 1 Januari 2001										
Dilaporkan sebelumnya		868.646	5.023.052	-	-	-	(14.966)	43.574	(5.336.320)	383.986
Penyesuaian beberapa ekuitas 4 BDP yang dialihkan aktiva dan kewajibannya secara retroaktif untuk tujuan perbandingan	3, 49	-	-	-	390.980	-	-	-	-	390.980
Disajikan kembali		868.646	5.023.052	-	390.980	-	(14.966)	43.574	(5.336.320)	774.966
Penyesuaian atas selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	27	-	-	-	-	-	(2.310)	-	-	(2.310)
Penurunan ekuitas selama tahun berjalan dari entitas sepengendali (4 BDP) yang dialihkan aktiva dan kewajibannya secara retroaktif untuk tujuan perbandingan	3, 49	-	-	-	(1.521.756)	-	-	-	-	(1.521.756)
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	-	132.268	132.268
Saldo 31 Desember 2001 disajikan kembali		**868.646**	**5.023.052**	**-**	**(1.130.776)**	**-**	**(17.276)**	**43.574**	**(5.204.052)**	**(616.832)**
Penyertaan modal sementara BPPN dalam rangka peleburan usaha 4 BDP pada Bank	3, 49	555.556	4.044.444	-	-	-	-	-	-	4.600.000
Selisih antara kewajiban bersih 4 BDP dengan saham yang diterbitkan kepada pemegang sahamnya dalam rangka peleburan usaha	3, 49	76.332	-	(3.240.516)	1.130.776	-	-	-	-	(2.033.410)
Penyesuaian atas rugi yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek yang tersedia untuk dijual		-	-	-	-	(1.561)	-	-	-	(1.561)
Penyesuaian atas selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	27	-	-	-	-	-	17.276	-	-	17.276
Rugi bersih tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	-	(808.221)	(808.221)
Saldo 31 Desember 2002		**1.300.534**	**9.067.496**	**(3.240.516)**	**-**	**(1.561)**	**-**	**43.574**	**(6.012.273)**	**1.157.252**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT BANK PERMATA Tbk (dahulu PT BANK BALI Tbk)
LAPORAN ARUS KAS
(INDUK PERUSAHAAN SAJA)
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2002
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2001
(Dalam Jutaan Rupiah)

	Catatan	2002	2001 (Disajikan Kembali - Lihat Catatan 49)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan bunga, provisi dan komisi		2.076.356	1.251.504
Pendapatan operasional lainnya		35.497	31.162
Laba selisih kurs - bersih		6.555	86.283
Pendapatan bukan operasional - bersih		(2.518)	76.275
Pembayaran bunga, provisi dan komisi		(1.700.421)	(1.192.713)
Beban operasional lainnya		(577.565)	(402.767)
Rugi sebelum perubahan dalam aktiva dan kewajiban operasi		(162.096)	(150.256)
Perubahan dalam aktiva dan kewajiban operasi:			
Penurunan (kenaikan) aktiva operasi:			
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		(1.855.401)	1.348.499
Efek-efek - diperdagangkan		(1.242.364)	659.987
Kredit yang diberikan		29.127	(948.439)
Aktiva lain-lain		123.231	33.683
Kenaikan (penurunan) kewajiban operasi:			
Kewajiban segera		312.418	(45.716)
Simpanan bank dan bukan bank			
Giro		232.424	524.754
Tabungan		(96.259)	190.150
Deposito berjangka		(3.349.569)	1.092.978
Sertifikat deposito		(4.002)	-
Simpanan dari bank lain		97.011	-
Kewajiban lain-lain		(307.051)	2.842
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan		12.469	(12.130)
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		**(6.210.062)**	**2.696.352**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Hasil penjualan penyertaan saham		103.295	6.000
Penurunan (kenaikan) efek-efek - tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo		65.555	(2.228.162)
Hasil penjualan aktiva tetap dan aktiva yang tidak digunakan lagi		8.279	6.214
Penerimaan dividen kas dari penyertaan saham		7.386	2.287

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT BANK PERMATA Tbk (dahulu PT BANK BALI Tbk)
(INDUK PERUSAHAAN SAJA)
LAPORAN ARUS KAS
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2002
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2001
(Dalam Jutaan Rupiah)

	Catatan	2002	2001 (Disajikan Kembali - Lihat Catatan 49)
Perolehan aktiva tetap		(44.854)	(15.285)
Kenaikan penyertaan saham		(44)	-
Hasil penjualan aktiva bersih satu Anak perusahaan - setelah dikurangi kas yang dilepaskan		-	33.775
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi		**139.617**	**(2.195.171)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Uang muka setoran modal		4.600.000	-
Kenaikan (penurunan) surat-surat berharga yang diterbitkan		144.890	(30.103)
Efek yang dibeli dengan janji dibeli kembali		(44.319)	-
Penurunan pinjaman yang diterima		(18.656)	(698.074)
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		**4.681.915**	**(728.177)**
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		**(1.388.530)**	**(226.996)**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		780.906	1.007.904
Penambahan kas dan setara kas yang diperoleh dari peleburan usaha	3, 49	2.587.082	908.908
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		**1.979.458**	**1.689.816**
Rincian kas dan setara kas adalah sebagai berikut:			
Kas	4	518.354	331.444
Giro pada Bank Indonesia	5	1.354.090	1.085.482
Giro pada bank lain	6	107.014	272.890
Jumlah		**1.979.458**	**1.689.816**
Informasi tambahan arus kas			
Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas:			
Penerbitan saham baru dalam rangka peleburan usaha PT Bank Universal Tbk dengan Bank	3, 49	76.332	-

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT BANK PERMATA Tbk (dahulu PT BANK BALI Tbk)
(INDUK PERUSAHAAN SAJA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2002
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2001
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing, Jumlah Cabang, Jumlah Karyawan, Data Saham Dan Nilai Tukar Mata Uang Asing)

---

1. UMUM

a. Pendirian Bank dan Informasi Umum

PT Bank Permata Tbk (dahulu PT Bank Bali Tbk) didirikan di Indonesia pada tanggal 17 Desember 1954 berdasarkan akta notaris Eliza Pondaag, S.H., No. 228, pengganti dari Raden Mas Soerojo, S.H. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam surat keputusan No. J.A.5/2/2 tanggal 4 Januari 1955 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 22 tanggal 18 Maret 1955, Tambahan No. 292. Anggaran dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M No. 34 tanggal 23 September 2002 mengenai peningkatan modal dasar Bank dari semula sebesar Rp 800.000 menjadi Rp 2.600.000 dengan menambah jumlah saham kelas B menjadi sebanyak 452.799.416.700 saham dan akta notaris A. Partomuan Pohan, S.H.,LL.M No. 45 tanggal 27 September 2002, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh Bank dari semula sebesar Rp 668.646 menjadi Rp 1.300.534 dan pengubahan nama Bank menjadi PT Bank Permata Tbk. Kedua perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia masing-masing dengan Surat Keputusan No. C-18423.HT.01.04.TH.2002 tanggal 24 September 2002 dan No. C-18778.HT.01.04.TH.2002 tanggal 30 September 2002 dan telah diumumkan masing-masing dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 8 Oktober 2002, Tambahan No. 12279/2002 dan 12280/2002 (lihat Catatan 26).

Kantor Pusat Bank berlokasi di Jakarta dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kavling 27. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2002, Bank memiliki 328 kantor cabang dan cabang pembantu domestik. Kantor cabang luar negeri yang berlokasi di Los Angeles, Amerika Serikat telah ditutup pada tanggal 15 Februari 2002, kantor perwakilan Bank di Singapura dan Shanghai telah ditutup masing-masing pada bulan Mei dan September 2001. Kantor cabang luar negeri yang berlokasi di Cayman Island telah ditutup pada tanggal 31 Desember 2002 (lihat Catatan 46).

Bank mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Januari 1955. Bank memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan No. 19371/U.M.II tanggal 19 Februari 1957. Bank juga memperoleh izin untuk menjalankan aktivitas sebagai bank devisa berdasarkan Pengumuman A No. 74 tanggal 25 Mei 1956 dari Lembaga Alat-Alat Pembajaran Luar Negeri Bank Indonesia.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Bank, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan kegiatan umum perbankan. Di samping aktivitas kegiatan umum perbankan, Bank juga memberikan jasa penyimpanan dan penitipan, bertindak sebagai wali amanat (lihat Catatan 41) serta pengelolaan dana pensiun. Setelah peleburan usaha, ruang lingkup kegiatan Bank tidak berubah (lihat Catatan 3).

b. Penawaran Umum Efek Bank

Pada tanggal 15 Januari 1990, berdasarkan izin Menteri Keuangan No. SI-070/SHM/MK.10/1989 tertanggal 2 Desember 1989, 3.999.000 saham Bank dengan jumlah nilai nominal Rp 3.999, telah ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat dan telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Surabaya.

Dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham pada tanggal 5 Juli 1990, Bank telah menempatkan saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas (Rights Issue) I sejumlah 15.508.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham yang ditawarkan kepada para pemegang saham lama di mana setiap pemegang saham yang memiliki 3 (tiga) saham lama berhak membeli 1 (satu) saham baru dengan harga Rp 8.000 per saham. Kemudian berdasarkan surat persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. S-1424/PM/1990 tertanggal

PT BANK PERMATA Tbk (dahulu PT BANK BALI Tbk)
(INDUK PERUSAHAAN SAJA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2002
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2001
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing, Jumlah Cabang, Jumlah Karyawan, Data Saham Dan Nilai Tukar Mata Uang Asing)

---

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum Efek Bank (lanjutan)

8 September 1990, saham-saham ini telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta. Saham-saham ini juga telah dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya berdasarkan surat No. 461/D-70/BES/IX/90 tertanggal 24 September 1990.

Berdasarkan surat persetujuan Ketua BAPEPAM No. S-1739/PM/1990 tertanggal 5 November 1990, Bank juga telah mencatatkan tambahan saham pendiri sejumlah 42.525.000 saham pada Bursa Efek Jakarta dan Surabaya.

Dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham pada tanggal 18 Juni 1992, Bank telah menerbitkan saham bonus sejumlah 124.064.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham di mana setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham memperoleh 2 (dua) saham bonus. Saham bonus ini berasal dari tambahan modal disetor-agio saham yang telah dikapitalisasi ke modal saham. Saham-saham ini telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta berdasarkan surat No. S-488/BEJ.I.1/VIII/1992 tertanggal 27 Agustus 1992. Saham-saham ini juga dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya berdasarkan surat No. 11/EMT/LIST/BES/IX/92 tertanggal 3 September 1992.

Dalam Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham pada tanggal 27 Juni 1995, para pemegang saham telah menyetujui untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Rights Issue) II sejumlah 65.133.600 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham yang ditawarkan kepada para pemegang saham lama di mana setiap pemegang saham yang memiliki 20 (dua puluh) saham lama berhak membeli 7 (tujuh) saham baru dengan harga Rp 2.000 per saham dan mendapat 4 (empat) waran atau keseluruhan berjumlah 37.219.200 waran. Setiap 1 (satu) waran dapat dikonversi menjadi 1 (satu) saham baru dengan nilai nominal Rp 1.000 dengan harga Rp 2.900 per saham. Harga pelaksanaan dan jumlah waran diubah masing-masing menjadi Rp 1.450 dan 71.629.940 waran sebagai akibat dari perubahan nilai nominal saham Bank pada tahun 1997 dan kemudian masing-masing menjadi Rp 1.090 dan 95.267.798 waran, sebagai akibat dari penerbitan saham bonus pada tahun 1998. Bank memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran penawaran umum tersebut dari Ketua BAPEPAM tanggal 26 Juni 1995. Saham-saham ini telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta berdasarkan surat No. S-193/BEJ.I.2/VII/1995 tertanggal 14 Juli 1995. Saham-saham ini juga telah dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya berdasarkan surat No. 38/EMT/LIST/BES/VII/95 tertanggal 14 Juli 1995. Pelaksanaan konversi waran menjadi saham sampai dengan 29 Agustus 2000, yang merupakan tanggal terakhir pelaksanaan konversi waran menjadi saham, adalah sejumlah 2.808.460 saham, di mana saham-saham hasil konversi ini telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Surabaya. Waran yang belum dikonversi sampai dengan tanggal 29 Agustus 2000 dan sudah kadaluarsa adalah sebesar 95.267.798 waran.

Dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham pada tanggal 18 Juni 1997, para pemegang saham telah menyetujui perubahan nilai nominal saham Bank dari Rp 1.000 per saham menjadi Rp 500 per saham.

Dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham pada tanggal 27 Juni 1998, Bank telah menerbitkan saham bonus sejumlah 166.738.173 saham dengan nilai nominal Rp 500 per saham di mana setiap pemegang saham yang memiliki 100 (seratus) saham memperoleh 33 (tiga puluh tiga) saham bonus. Saham bonus ini berasal dari tambahan modal disetor-agio saham yang telah dikapitalisasi ke modal saham. Saham bonus ini telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta berdasarkan surat No. Peng-14/BEJ-1.1/SB/0798 tertanggal 20 Juli 1998 dan No. Peng-15/BEJ-1.1/SB/0798 tertanggal 31 Juli 1998. Saham bonus ini juga dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya berdasarkan surat No. Peng-007/PDG/CB/BES/VIII/98 tertanggal 3 Agustus 1998.

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum Efek Bank (lanjutan)

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 28 Agustus 2000, para pemegang saham telah menyetujui untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Rights Issue) III sejumlah 66.528.577.467 saham baru kelas B, yang mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham kelas A, dengan nilai nominal Rp 5 per saham yang ditawarkan kepada para pemegang saham lama di mana setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham lama berhak membeli 99 (sembilan puluh sembilan) saham baru dengan harga Rp 80,51 per saham. Bank memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran penawaran umum tersebut dari Ketua BAPEPAM tanggal 25 Agustus 2000. Saham-saham ini telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta berdasarkan Surat No. S-2686/BEJ.EEM/09-2000 tanggal 18 September 2000. Saham-saham ini juga telah dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya berdasarkan surat No. JKT-01/MKT-LIST/BES/IX/2000 tanggal 12 September 2000.

c. Penempatan Terbatas Efek Bank

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 27 September 2002, para pemegang saham telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp 668.646 menjadi Rp 1.300.534 (lihat Catatan 26). Peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh ini dilakukan sehubungan dengan peleburan usaha 4 Bank Dalam Penyehatan (4 BDP) ke dalam Bank (lihat Catatan 3 dan 26). Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tanggal 30 September 2002 (lihat Catatan 1a dan 26).

d. Komposisi Saham Bank

Pada tanggal 31 Desember 2002, seluruh saham Bank setelah peleburan usaha 4 BDP ke dalam Bank berjumlah 672.005.833 saham kelas A dan 192.906.142.242 saham kelas B yang telah tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, terdiri dari:

Saham kelas A:	
3.999.000	saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana.
15.508.000	saham yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas (Rights Issue) I.
42.525.000	saham pendiri.
124.064.000	saham bonus yang berasal dari tambahan modal disetor-agio saham pada tahun 1992.
65.133.600	saham yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas (Rights Issue) II dengan waran.
1.374.230	saham yang berasal dari konversi waran sebelum perubahan nilai nominal saham.
252.603.830	saham yang berasal dari perubahan nilai nominal saham.
166.738.173	saham bonus yang berasal dari tambahan modal disetor-agio saham pada tahun 1998.
60.000	saham yang berasal dari konversi waran sejak tanggal 1 Januari 1998 sampai dengan 31 Desember 1998.
672.005.833	**Saham**

PT BANK PERMATA Tbk (dahulu PT BANK BALI Tbk)
(INDUK PERUSAHAAN SAJA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2002
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2001
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing, Jumlah Cabang, Jumlah Karyawan, Data Saham Dan Nilai Tukar Mata Uang Asing)

---

1. UMUM (lanjutan)

d. Komposisi Saham Bank (lanjutan)

Saham kelas B:

66.528.577.467	saham yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas (Rights Issue) III.
15.266.453.664	penerbitan saham bagi pemegang saham Universal (lihat Catatan 3) pada tahun 2002.
111.111.111.111	saham yang berasal dari penempatan terbatas dalam rangka peleburan usaha (lihat Catatan 3) pada tahun 2002.
192.906.142.242	**Saham**

e. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Permata Tbk No. 67 tanggal 31 Oktober 2002 yang dibuat oleh Notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M, susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	:	Dr. Aditiawan Chandra
Komisaris	:	I Nyoman Suwandha *
Komisaris	:	Dr. Ir. Lukita D. Tuwo
Komisaris	:	Dr. Tirta Hidayat
Komisaris	:	Dradjat Bagus Prasetyo *
Komisaris	:	Deswandhy Agusman
Komisaris	:	Ichsanuddin Noorsy
Direksi		
Direktur Utama	:	Agus DW. Martowardojo
Wakil Direktur Utama	:	Chandra Purnama
Direktur Kepatuhan	:	Elvyn Gahadi Masassya
Direktur	:	Joseph Georgino Godong *
Direktur	:	Andrew Hardi Hanubrata *
Direktur	:	Ir. Ongki Wanadjati Dana
Direktur	:	Mahdi Syahbuddin
Direktur	:	Irman Alvian

* telah mendapat persetujuan Bank Indonesia pada tahun 2001 sedangkan pengurus lainnya lihat Catatan 46

Pada tanggal 31 Desember 2002, Bank mempunyai 7.954 orang karyawan tetap (tidak diaudit).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya historis, kecuali untuk efek-efek tertentu yang dimiliki yang dinyatakan sebesar nilai wajar, penyertaan saham tertentu yang dicatat dengan metode ekuitas, aktiva tetap tertentu yang telah dinilai kembali, tagihan dan kewajiban derivatif yang dicatat sebesar nilai wajar, serta agunan diambil alih yang dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis akrual, kecuali untuk laporan arus kas dan tagihan bunga atas aktiva produktif yang digolongkan sebagai "non-performing" dicatat atas dasar kas. Laporan arus kas disusun berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi disusun sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000, yang memperbaharui Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Pedoman Penyajian Laporan Keuangan". Dalam laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain yang tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

Laporan keuangan Bank, pada prinsipnya telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan berdasarkan pedoman Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 (Revisi 2000) tentang "Akuntansi Perbankan" yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) yang diterbitkan atas kerjasama Ikatan Akuntan Indonesia dengan Bank Indonesia, sejauh memungkinkan, serta praktek akuntansi dan pelaporan dalam industri perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia bersama IAI apabila berlaku.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah.

b. Giro pada Bank Lain

Giro pada bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan penyisihan kerugian.

c. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar saldo penempatan dikurangi dengan penyisihan kerugian.

d. Efek-efek

Efek-efek sebagian besar terdiri dari surat berharga dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang diperdagangkan di pasar uang, exchange offer, unit penyertaan reksadana, surat pengakuan hutang dengan bunga mengambang (floating rate notes), wesel dan obligasi (termasuk Obligasi Pemerintah).

Sesuai dengan PSAK No. 50 tentang "Akuntansi Investasi Efek Tertentu", efek-efek diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Diperdagangkan, yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajar dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

2. Tersedia untuk dijual, yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajar disajikan sebagai komponen ekuitas. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tersebut dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan pada saat realisasi.

3. Dimiliki hingga jatuh tempo, dinyatakan sebesar biaya perolehan, yang disesuaikan dengan amortisasi premi dan diskonto, berdasarkan metode garis lurus.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Efek-efek (lanjutan)

SBI dan surat berharga pasar uang disajikan sebesar nilai nominal setelah dikurangi bunga yang belum diamortisasi. Obligasi (termasuk Obligasi Pemerintah), exchange offer dan surat pengakuan hutang dengan bunga mengambang (Floating Rate Notes) yang dimiliki hingga jatuh tempo dinyatakan sebesar biaya perolehan ditambah atau dikurangi dengan amortisasi diskonto atau premi. Biaya perolehan disesuaikan untuk memperhitungkan penurunan nilai efek yang permanen. Obligasi (termasuk Obligasi Pemerintah) yang tersedia untuk dijual dinyatakan sebesar nilai wajar. Laba atau rugi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajar disajikan sebagai komponen ekuitas. Obligasi (termasuk Obligasi Pemerintah), exchange offer, surat pengakuan hutang dengan bunga mengambang (Floating Rate Notes), wesel dan unit penyertaan reksadana untuk diperdagangkan dinyatakan sebesar nilai wajar. Laba atau rugi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajar dibebankan pada operasi tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001, nilai pasar atas beberapa seri obligasi pemerintah yang diperdagangkan dan tersedia untuk dijual tidak tersedia, sehingga nilai wajar atas obligasi pemerintah tersebut dihitung dengan menggunakan metode nilai sekarang *(present value)* atau arus kas yang didiskonto *(discounted cash flow)*. Apabila nilai wajar yang dihasilkan dari perhitungan tersebut lebih besar dari nilai nominal, maka akan digunakan nilai nominal. Laba atau rugi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajar efek yang diperdagangkan tersebut diakui dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan sedangkan laba atau rugi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajar efek yang tersedia untuk dijual disajikan sebagai komponen ekuitas.

Wesel merupakan wesel ekspor/impor dari nasabah yang timbul karena adanya pembayaran di muka oleh Bank kepada nasabahnya sehubungan dengan transaksi-transaksi ekspor/impor nasabah. Wesel dinyatakan sebesar saldonya.

Harga pokok efek-efek yang dijual dihitung dengan menggunakan metode nilai buku saat dijual. Penyisihan penurunan nilai pasar dan kerugian disajikan sebagai pengurang terhadap akun efek-efek.

e. Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai

Efektif tanggal 1 Januari 2001, Bank menerapkan PSAK No. 55, "Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai". Instrumen derivatif terdiri dari transaksi berjangka dan swap valuta asing yang diakui di neraca sebagai aktiva atau kewajiban berdasarkan nilai wajar dari masing-masing kontrak. Laba atau rugi atas perubahan pada nilai wajar instrumen derivatif diakui sebagai laba rugi tahun berjalan.

Pada tanggal 1 Januari 2001, tidak ada penyesuaian transisi sebagai akibat penerapan PSAK No. 55, karena pengaruhnya tidak material terhadap laporan keuangan.

Transaksi derivatif tersebut di atas disajikan sebagai bagian dari akun "Tagihan dan Kewajiban Derivatif" pada neraca. Tagihan derivatif disajikan sebesar tagihan yang timbul dikurangi penyisihan kerugian.

f. Kredit yang Diberikan

Kredit yang diberikan dinyatakan sebesar saldo kredit dikurangi dengan penyisihan kerugian. Kredit yang direstrukturisasi disajikan sebesar nilai buku baru. Kerugian atas selisih nilai buku

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

f. Kredit yang Diberikan (lanjutan)

baru dengan saldo kredit sebelum restrukturisasi disajikan sebagai pengurang penyisihan kerugian kredit. Untuk kredit yang direstrukturisasi, dalam pokok kredit termasuk bunga dan biaya lain yang dialihkan menjadi pokok kredit. Bunga yang dialihkan tersebut diakui sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan dan disajikan sebagai pengurang dari kredit yang direstrukturisasi.

Penyertaan saham yang diterima dalam restrukturisasi kredit dengan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur, diakui sebesar nilai wajar dan dicatat dengan metode biaya.

Kredit dalam rangka pembiayaan bersama (kredit sindikasi), kredit kelolaan dan penerusan kredit dinyatakan sebesar pokok kredit sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh Bank.

Kredit dalam rangka pengalihan piutang dinyatakan sebesar nilai piutang yang diperoleh dikurangi dengan penyisihan kerugian.

g. Tagihan dan Kewajiban Akseptasi

Tagihan dan kewajiban akseptasi dinyatakan sebesar nilai Letters of Credit (L/C) atau nilai realisasi L/C yang diaksep oleh bank pengaksep (accepting Bank) dikurangi penyisihan kerugian.

h. Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Bank mempunyai transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai dengan yang dimaksud dalam PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa"..

Hubungan istimewa baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga, terutama berkenaan dengan beberapa akun dalam neraca, yaitu efek, tagihan dan kewajiban derivatif, kredit yang diberikan, tagihan akseptasi, aktiva tetap, giro, tabungan, deposito berjangka dan surat-surat berharga yang diterbitkan. Sifat dan luas hubungan istimewa ini diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan untuk masing-masing akun tersebut. Transaksi Bank dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan BPPN dalam rangka restrukturisasi perbankan/perusahaan, tidak diungkapkan sebagai transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

i. Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif serta Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

Bank membentuk penyisihan kerugian aktiva produktif serta estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi manajemen terhadap kolektibilitas dan nilai yang dapat direalisasi dari masing-masing aktiva produktif, komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko kredit pada akhir tahun. Dalam kaitan tersebut, ketentuan Bank Indonesia (BI) tentang Pembentukan Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif serta Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi digunakan sebagai acuan, dengan pedoman pembentukan penyisihan kerugian aktiva produktif sebagai berikut:

1. Cadangan umum sekurang-kurangnya 1% dari aktiva produktif yang digolongkan lancar (aktiva produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, efek-efek, tagihan derivatif, kredit yang diberikan, tagihan akseptasi, penyertaan saham serta komitmen dan kontinjensi).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

i. Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif serta Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi (lanjutan)

2. Cadangan khusus untuk aktiva produktif:

Penggolongan	Persentase
Dalam perhatian khusus	5%
Kurang lancar	15
Diragukan	50
Macet	100

Cadangan khusus untuk aktiva produktif yang digolongkan sebagai kurang lancar, diragukan dan macet adalah sebesar jumlah saldo pinjaman setelah dikurangi dengan nilai agunan yang bersangkutan.

Aktiva produktif dihapuskan dari masing-masing penyisihan kerugian pada saat manajemen Bank berpendapat bahwa aktiva tersebut sudah tidak dapat tertagih lagi. Penerimaan kembali aktiva yang telah dihapuskan dicatat sebagai penambahan pada masing-masing penyisihan kerugian selama tahun berjalan.

j. Penyertaan saham

Penyertaan saham Bank dengan persentase pemilikan paling sedikit 20% dicatat dengan metode ekuitas (equity method). Dengan metode ini, penyertaan dinyatakan sebesar biaya perolehannya dan ditambah/dikurangi dengan bagian atas laba atau rugi bersih Anak Perusahaan dan perusahaan asosiasi sejak tanggal perolehan serta dikurangi penerimaan dividen kas.

Penyertaan saham Bank dengan persentase pemilikan kurang dari 20% dinyatakan sebesar biaya perolehan (cost method).

Penyertaan saham yang berasal dari restrukturisasi kredit merupakan penyertaan sementara sehingga dinyatakan sebesar biaya perolehan (cost method) tanpa memperhatikan besarnya kepemilikan.

k. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka dibebankan selama masa manfaat.

l. Aktiva Tetap

Aktiva tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan, kecuali yang dinilai kembali berdasarkan peraturan pemerintah, dikurangi akumulasi penyusutan.

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Biaya-biaya tertentu sehubungan dengan perolehan atau perpanjangan pemilikan hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang periode yang lebih pendek antara hak atas tanah atau umur ekonomis tanah. Beban ditangguhkan ini disajikan dalam akun "Aktiva Lain-lain" pada neraca (lihat Catatan 2n).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

l. Aktiva Tetap (lanjutan)

Golongan bangunan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis selama 5 sampai 40 tahun. Kecuali tanah yang tidak disusutkan, aktiva tetap lainnya disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aktiva yang berkisar antara 4 sampai dengan 8 tahun dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (double-declining balance method).

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya; pemugaran dan penambahan dalam jumlah signifikan dikapitalisasi. Aktiva tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual, nilai tercatat serta akumulasi penyusutan dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi dibukukan dalam pendapatan/beban bukan operasional tahun yang bersangkutan.

Bangunan dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke akun bangunan pada saat bangunan tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

Sejak tahun 2000, Bank telah menerapkan PSAK No. 48 tentang "Penurunan Nilai Aktiva". PSAK No. 48 mensyaratkan bahwa jumlah aktiva yang dapat diperoleh kembali diestimasi pada saat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat diperoleh kembali. Penurunan nilai aktiva tetap tersebut yang telah direvaluasi dikompensasikan ke "Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap" dan sisanya dibukukan pada laporan laba rugi tahun berjalan.

m. Agunan Diambil Alih

Efektif tahun 2001, berdasarkan PSAK No. 31 (Revisi 2000), agunan diambil alih sehubungan dengan penyelesaian kredit yang diberikan dinyatakan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi. Nilai bersih yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan diambil alih setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan. Selisih lebih antara saldo kredit yang tidak dapat ditagih dengan nilai bersih yang dapat direalisasi tersebut dibebankan pada penyisihan kerugian. Biaya-biaya sehubungan dengan pemeliharaan dan perolehan aktiva tersebut dibebankan pada operasi pada saat terjadinya. Selisih lebih antara nilai agunan diambil alih dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan agunan diambil alih.

n. Beban Ditangguhkan

Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan pembukaan cabang Bank dan pengembangan produk baru ditangguhkan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sampai dengan 4 tahun. Akun ini disajikan dalam "Aktiva Lain-lain" (lihat Catatan 2l).

o. Simpanan

Giro merupakan simpanan nasabah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek, atau dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya. Giro dinyatakan sebesar nilai kewajiban pada pemegang giro.

Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Tabungan dinyatakan sebesar nilai kewajiban kepada pemilik tabungan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

o. Simpanan (lanjutan)

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian dengan penyimpan. Deposito berjangka dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian dengan pemegang deposito berjangka.

Sertifikat deposito dinyatakan sebesar nilai nominal dikurangi bunga yang belum diamortisasi.

p. Efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali

Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali diakui sebagai kewajiban repo sebesar harga pembelian yang disepakati. Selisih antara harga jual dengan harga beli kembali efek diakui sebagai beban bunga yang dibayar di muka dan diakui sebagai beban sesuai dengan jangka waktu efek dijual hingga dibeli kembali. Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali dinyatakan sebesar kewajiban bruto dikurangi dengan beban bunga dibayar di muka yang belum diamortisasi.

q. Pendapatan dan Beban Bunga

Pendapatan dan beban bunga aktiva produktif yang "performing" diakui Bank atas dasar akrual. Pendapatan bunga atas aktiva produktif yang diklasifikasikan sebagai "non-performing" tidak diakui dalam akun ini sampai saat diterimanya pembayaran. Pada saat aktiva produktif diklasifikasikan sebagai "non-performing", tagihan bunga yang sudah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima, dibatalkan. Selanjutnya bunga yang dibatalkan tersebut diakui sebagai tagihan kontinjensi. Penerimaan dari kredit yang diragukan dan macet diakui terlebih dahulu sebagai pengurang pokok kredit. Kelebihan penerimaan dari pokok kredit diakui sebagai pendapatan bunga.

Pendapatan bunga yang ditangguhkan dari kredit yang direstrukturisasi diakui sebagai pendapatan secara proporsional pada saat diterima pembayaran angsuran pokok.

r. Provisi dan Komisi

Provisi dan komisi Bank yang berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan atau jangka waktu tertentu dan jumlahnya signifikan, ditangguhkan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sesuai dengan jangka waktunya. Saldo provisi dan komisi sehubungan dengan kredit yang diselesaikan sebelum jatuh tempo diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat penyelesaian. Provisi dan komisi yang tidak berkaitan langsung dengan jangka waktu tertentu diakui pada saat transaksi dilakukan.

s. Imbalan

Imbalan Bank yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan namun terkait dengan jangka waktu tertentu dan jumlahnya signifikan, ditangguhkan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sesuai dengan jangka waktunya, antara lain jasa "safe deposit box", jasa manajemen dan jasa kustodian. Imbalan yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan atau jangka waktu tertentu diakui pada saat transaksi dilakukan, antara lain komisi transaksi ekspor/impor (L/C).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

t. Dana Pensiun

Sampai dengan tanggal 2 Desember 2002, Bank mempunyai program pensiun iuran pasti yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Bank Bali untuk sebagian karyawan tetap yang memilih ikut serta dan memenuhi syarat. Iuran dana pensiun ditanggung bersama oleh karyawan dan Bank dengan kontribusi masing-masing sebesar 2,5% dan 5% dari gaji bersih karyawan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-295/KM.6/2002 tanggal 3 Desember 2002, Dana Pensiun Bank Bali telah dibubarkan secara hukum.

Pada tanggal 18 Desember 2002, berdasarkan Perjanjian Pengalihan Program Pensiun No. DPLK/SP/001/XII/2002, Bank mengalihkan dana program pensiun karyawan kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan Central Asia Raya.

u. Transaksi dan Saldo dalam Valuta Asing

Transaksi dalam valuta asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001, aktiva dan kewajiban moneter dalam valuta asing maupun kontrak valuta asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs spot Reuters pada pukul 16.00 WIB (Rp 8.950 dan Rp 10.400 untuk US$ 1,00, Rp 5.153,75 dan Rp 5.623,91 untuk SGD 1,00, Rp 75,43 dan Rp 79,20 untuk JP¥ 1,00, Rp 9.367,08 dan Rp 9.201,93 untuk EUR 1,00 dan Rp 5.067,95 dan Rp 5.313,89 untuk AUD 1,00 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001). Laba atau rugi kurs yang terjadi, termasuk dari transaksi perdagangan valuta asing yang berhubungan langsung dengan nasabah dan bank koresponden dikredit atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

Pembelian tunai (spot) valuta asing yang belum diselesaikan disajikan sebagai akun di luar neraca. Laba atau rugi yang timbul dari selisih antara kurs tunai pada tanggal transaksi dengan kurs pada tanggal neraca diakru dan dicatat dalam laba rugi tahun berjalan.

v. Beban atau Penghasilan Pajak

Beban pajak tahun berjalan Bank dihitung berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan.

Bank telah menerapkan PSAK No. 46 tentang "Akuntansi Pajak Penghasilan" yang mensyaratkan pengakuan aktiva dan kewajiban pajak tangguhan atas konsekuensi pajak di masa yang akan datang dari beda temporer antara pelaporan komersial dan pajak. Penerapan PSAK No. 46 atas laporan keuangan menghasilkan pengakuan atas aktiva (kewajiban) pajak tangguhan dan beban atau penghasilan pajak.

w. Pelaporan Segmen

Berdasarkan PSAK No. 5 (Revisi 2000) tentang "Pelaporan Segmen" yang berlaku efektif untuk laporan keuangan yang mencakup tahun laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2002, Bank telah mengidentifikasi dan mengungkapkan pelaporan informasi keuangan berdasarkan segmen geografis Bank (menyajikan informasi produk atau jasa pada wilayah ekonomi tertentu). Segmen adalah komponen dari Bank yang dapat dibedakan berdasarkan risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen lainnya. Jika penerapan lebih dini dilakukan atau informasi komparatif disajikan, laporan keuangan tahun sebelumnya harus disajikan kembali.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

x. Laba (Rugi) Bersih per Saham Dasar

Laba (rugi) bersih per saham dasar dihitung dengan membagi masing-masing laba (rugi) bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar setelah memperhitungkan pengaruh konversi saham sehubungan dengan peleburan usaha pada tahun 2002. Laba (rugi) bersih per saham dilusi sama dengan laba (rugi) bersih per saham dasar.

Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar dasar masing-masing sebanyak 99.400.894.325 pada tahun 2002 dan 67.200.583.300 pada tahun 2001.

Proforma laba (rugi) bersih per saham dihitung dengan membagi masing-masing laba (rugi) bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham setelah peleburan usaha, seakan-akan peleburan usaha tersebut sudah terjadi sejak awal tahun yang disajikan. Jumlah proforma rata-rata tertimbang saham beredar dasar masing-masing sebanyak 193.578.148.075 pada tahun 2002 dan 2001. Proforma laba (rugi) bersih per saham dasar adalah (Rp 4) dan Rp 0,7 masing-masing pada tahun 2002 dan 2001.

3. PELEBURAN USAHA

Pada tanggal 20 Mei 2002, BPPN, Bank dan 4 bank lainnya telah mengadakan kesepakatan pendahuluan di mana 5 bank peserta tersebut setuju, berjanji dan mengikatkan diri melaksanakan program restrukturisasi sesuai dengan syarat dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh BPPN serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan surat BPPN No. PB-1591/BPPN/0802 tanggal 6 Agustus 2002, Bank telah ditunjuk sebagai Platform Bank (Rangka Bank) atau sebagai "Bank Hasil Penggabungan" sehingga Bank Peserta Penggabungan lainnya, yaitu PT Bank Universal Tbk (Universal), PT Bank Prima Express (Primex), PT Bank Artamedia (Artamedia) dan PT Bank Patriot (Patriot) akan bertindak sebagai "Bank Yang Menggabungkan Diri".

Pada tanggal 28 Agustus 2002, Bank telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada BAPEPAM dalam rangka peleburan usaha Bank dengan 4 bank lainnya dan telah mendapat pemberitahuan efektifnya penggabungan tersebut sesuai dengan Surat Ketua BAPEPAM No. S-2120/PM/2002 tanggal 26 September 2002.

Berdasarkan Akta Merger yang diaktakan dengan akta notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M No. 46 tanggal 27 September 2002, Bank dan bank-bank yang menggabungkan diri, yang terdiri dari Universal, Primex, Artamedia dan Patriot dengan persetujuan rapat umum luar biasa pemegang saham telah sepakat melakukan peleburan usaha. Peleburan usaha dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

1. Semua kekayaan dan kewajiban serta operasi, usaha, kegiatan dan aktivitas setiap Bank yang Menggabungkan Diri beralih demi hukum kepada Bank sebagai Bank Hasil Penggabungan.
2. Semua pemegang saham Universal karena hukum menjadi pemegang saham Bank, sedangkan pemegang saham Bank yang Menggabungkan Diri lainnya (di luar Universal) mendapatkan saham Bank dari BPPN sebagai pemberian.
3. Bank sebagai Bank Hasil Penggabungan tetap mempertahankan eksistensinya sebagai perseroan terbatas dan sebagai bank umum dengan memakai nama PT Bank Permata Tbk.
4. Semua Bank yang Menggabungkan Diri karena hukum akan bubar tanpa memerlukan likuidasi.

3. PELEBURAN USAHA (lanjutan)

Peleburan usaha ini menjadi efektif sejak disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. C-18778.HT.01.04.TH.2002 tanggal 30 September 2002.

Agar Bank Hasil Penggabungan dapat memenuhi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang ditetapkan oleh BI sebagai akibat beralihnya karena hukum semua kekayaan dan kewajiban yang beralih dari Bank-bank yang Menggabungkan Diri kepada Bank Hasil Penggabungan, maka sebelum atau pada tanggal penggabungan, BPPN melakukan penyertaan modal sementara dalam Bank sebesar Rp 4.600.000. Penyertaan modal sementara tersebut dilakukan melalui penempatan terbatas tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu, sebanyak 111.111.111.111 saham baru kelas B dengan nilai nominal Rp 5 per saham atau seluruhnya berjumlah nominal Rp 555.556 dan sisanya sebesar Rp 4.044.444 sebagai agio saham.

Guna memenuhi ketentuan PP No. 28/1999 yang mensyaratkan bahwa pemegang saham bank yang melakukan penggabungan menjadi pemegang saham Bank Hasil Penggabungan dan mengingat Bank yang Menggabungkan Diri (di luar Universal) telah mencatat saldo ekuitas negatif, maka sebagian dari saham yang diperoleh BPPN atas penyertaan modal sementara tersebut, yaitu sebanyak 332.132.125 saham atau merupakan 1% dari taksiran positif ekuitas per tanggal 30 September 2002 dari Bank Hasil Penggabungan setelah dilakukan Penambahan Modal BPPN, dialokasikan oleh BPPN kepada dan dibagikan di antara para pemegang saham Bank yang Menggabungkan Diri (tidak termasuk para pemegang saham Universal).

Konversi dan alokasi saham Bank dilakukan sebagai berikut:

1. Atas kekayaan dan kewajiban yang beralih dari Universal kepada Bank pada tanggal peleburan usaha, para pemegang saham Universal memperoleh 15.266.453.664 saham kelas B Bank, dengan nilai nominal Rp 5 per saham atau seluruhnya berjumlah nominal Rp 76.332.
2. Sebanyak 332.132.125 saham kelas B dialokasikan BPPN kepada para pemegang saham Bank-bank yang Menggabungkan Diri dengan pembagian sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Kelas B Yang Diperoleh		Jumlah
Primex	125.413.090	Rp	627
Artamedia	113.489.547		567
Patriot	93.229.488		466
Jumlah	**332.132.125**	**Rp**	**1.660**

Para pemegang saham Universal, Primex, Artamedia dan Patriot telah menyetujui peleburan usaha bank-bank tersebut ke dalam Bank sesuai dengan risalah rapat umum pemegang saham luar biasa masing-masing bank yang diaktakan masing-masing dengan akta notaris Benny Kristianto, S.H., No. 68 tanggal 27 September 2002, A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M No. 32 tanggal 20 September 2002, Tahir Kamili, S.H., No. 34 tanggal 20 September 2002 dan Elliza Asmawet, S.H., No. 45 tanggal 20 September 2002.

Berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur BI No. 4/159/KEP.DpG/2002 tanggal 30 September 2002, BI telah menyetujui peleburan usaha Bank-bank yang Menggabungkan Diri dengan Bank. Peleburan usaha tersebut menjadi efektif sejak tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar Bank Hasil Penggabungan Usaha oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C-18861.HT.01.04.TH.2002 tanggal 30 September 2002.

3. PELEBURAN USAHA (lanjutan)

Dengan efektifnya peleburan usaha tersebut, seluruh aktiva dan kewajiban Universal, Primex, Artamedia dan Patriot (4 Bank Dalam Penyehatan (4 BDP)) pada tanggal 30 September 2002 dengan nilai buku aktiva (kewajiban) bersih masing-masing sebesar (Rp 2.247.915), (Rp 666.866), (Rp 216.174) dan (Rp 33.231) seperti tercantum dalam laporan keuangan Universal, Primex, Artamedia dan Patriot yang telah diaudit, telah dicatat ke dalam catatan akuntansi Bank antara lain sebagai berikut:

Aktiva	
Kredit yang diberikan - bersih	5.514.780
Efek-efek - bersih	4.579.374
Kewajiban	
Simpanan	14.574.204
Pinjaman yang diterima	789.529
Kewajiban lain-lain	1.360.851

Oleh karena Bank dan Bank Yang Menggabungkan Diri telah berada dalam pengendalian bersama *(under common control)* oleh BPPN sejak tanggal 13 Maret 1999 (untuk Artamedia), 16 Maret 1999 (untuk Universal dan Patriot) dan 29 Mei 1999 (untuk Primex), maka sesuai dengan PSAK No. 38 tentang "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali", aktiva maupun kewajiban yang pemilikannya dialihkan dari bank-bank yang menggabungkan diri ke Bank dicatat sesuai dengan nilai buku. Selisih nilai buku kewajiban bersih Universal dengan nilai nominal saham baru Bank yang diterbitkan kepada pemegang saham Universal sebesar Rp 2.324.247, serta nilai buku kewajiban bersih 3 BDP lainnya (karena tidak ada penerbitan saham Bank kepada para pemegang saham terdahulu 3 BDP lainnya tersebut) sebesar Rp 916.271 menghasilkan saldo negatif sebesar Rp 3.240.518 yang dilaporkan secara terpisah (sebagai tambahan) pada komponen Ekuitas (Defisiensi Modal) dalam akun "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" pada neraca tanggal 30 September 2002, tanggal efektifnya penggabungan usaha. Termasuk di dalam akun "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" adalah penurunan nilai wajar efek-efek yang diklasifikasikan ke dalam kelompok tersedia untuk dijual sebesar Rp 4.065.

4. KAS

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	2002	2001
Rupiah	452.800	264.415
Valuta Asing	65.554	67.029
Jumlah	**518.354**	**331.444**

5. GIRO PADA BANK INDONESIA

Akun ini terdiri dari:

	2002	2001
Rupiah	1.224.315	1.000.764
Dolar Amerika Serikat	129.775	84.718
Jumlah	**1.354.090**	**1.085.482**

Pada tanggal 31 Desember 2002, Giro Wajib Minimum (GWM) Bank masing-masing sebesar 5,62% dan 3,30% untuk mata uang Rupiah dan mata uang asing. Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum.

6. GIRO PADA BANK LAIN

Akun ini terdiri dari:

	2002	2001
Rupiah	9.431	20.393
Valuta Asing	97.583	252.497
Jumlah	107.014	272.890
Dikurangi penyisihan kerugian	1.070	2.774
Bersih	**105.944**	**270.116**

Kolektibilitas atas giro pada bank lain seluruhnya lancar. Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian yang dibentuk adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya giro pada bank lain serta telah dihitung berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (lihat Catatan 2i).

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2002 dan 2001, tidak terdapat giro pada bank lain pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN

Akun ini terdiri dari:

	2002	2001
Rupiah		
Intervensi Rupiah	2.100.000	352.766
Pinjaman yang Diberikan	3.111	3.000
Call Money	844	305.454

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

	2002	2001
Deposito Berjangka	477	477
Sertifikat Deposito	-	3.995
Lain-lain	-	1.344
	2.104.432	667.036
Valuta Asing		
Deposito Berjangka	432.610	364.563
Pinjaman yang Diberikan	85.188	106.144
Call Money	-	41.600
	517.798	512.307
Jumlah	2.622.230	1.179.343
Dikurangi penyisihan kerugian	90.394	112.634
Bersih	**2.531.836**	**1.066.709**

Rincian penempatan berdasarkan sisa umur sampai saat jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001 (sebelum dikurangi penyisihan kerugian) adalah sebagai berikut:

	2002				
Jenis Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain	Intervensi Rupiah	Call Money	Deposito Berjangka	Pinjaman yang Diberikan	Jumlah
Rupiah					
Kurang dari 1 bulan	2.100.000	844	477	-	2.101.321
6 - 12 bulan	-	-	-	3.111	3.111
	2.100.000	844	477	3.111	2.104.432
Valuta Asing					
Kurang dari 1 bulan	-	-	432.610	85.188	517.798
Jumlah	**2.100.000**	**844**	**433.087**	**88.299**	**2.622.230**

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

Jenis Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain	2001				
	Intervensi Rupiah	Call Money	Deposito Berjangka	Pinjaman yang Diberikan, Sertifikat Deposito dan Lain-lain	Jumlah
Rupiah					
Kurang dari 1 bulan	352.766	305.454	-	3.995	662.215
1 - 3 bulan	-	-	477	-	477
Lebih dari 12 bulan	-	-	-	4.344	4.344
	352.766	305.454	477	8.339	667.036
Valuta Asing					
Kurang dari 1 bulan	-	41.600	338.868	-	380.468
1 - 3 bulan	-	-	3.205	-	3.205
3 - 6 bulan	-	-	22.490	-	22.490
Lebih dari 12 bulan	-	-	-	106.144	106.144
	-	41.600	364.563	106.144	512.307
Jumlah	**352.766**	**347.054**	**365.040**	**114.483**	**1.179.343**

Kolektibilitas Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain:

	2002	2001
Lancar	2.536.199	1.072.355
Macet	86.031	106.988
Jumlah	2.622.230	1.179.343
Dikurangi penyisihan kerugian	90.394	112.634
Bersih	**2.531.836**	**1.066.709**

Perubahan penyisihan kerugian adalah sebagai berikut:

Uraian	2002			2001		
	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah
Saldo awal tahun	2.429	110.205	112.634	11.516	30.635	42.151
Penyisihan (pembalikan) selama tahun berjalan	(1.252)	(6.074)	(7.326)	(9.087)	97.249	88.162
Selisih kurs	-	(14.914)	(14.914)	-	1.511	1.511
Penghapusan selama tahun berjalan	-	-	-	-	(19.190)	(19.190)
Saldo akhir tahun	**1.177**	**89.217**	**90.394**	**2.429**	**110.205**	**112.634**

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

Manajemen Bank berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian yang dibentuk adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tak tertagihnya penempatan pada bank lain serta telah dihitung berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (lihat Catatan 2i).

Pinjaman yang diberikan dalam Rupiah adalah tagihan Bank kepada PT Bank Lippo Tbk yang merupakan pengalihan kewajiban Bank Umum Majapahit Jaya yang telah dilikuidasi.

Pinjaman yang diberikan dalam Valuta Asing masing-masing sebesar US$ 9.491.934,69 dan SGD 45.540 merupakan tagihan Bank kepada PT Bank Umum Nasional (BBO), PT Bank Central Dagang (BBKU), PT Bank Umum Servitia (BBKU), PT Bank Sahid Gajah Perkasa (BBKU), PT Bank Dharmala (BBKU), PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan PT Bank Lippo Tbk. Tagihan tersebut timbul dari dana talangan Bank kepada bank-bank tersebut untuk membayar letter of credit (L/C) yang telah jatuh tempo yang diterbitkan oleh Bank untuk kepentingan nasabah CV Wira Mustika Indah (WMI). Pembayaran kepada eksportir di luar negeri untuk impor barang dengan L/C yang diterbitkan oleh Bank tersebut disepakati dengan bank-bank yang disebutkan di atas sebagai pembiayaan dengan kredit sindikasi dan Bank bertindak sebagai agen fasilitas atas pemberian kredit tersebut. Bank telah mengajukan klaim kepada bank-bank peserta sindikasi, akan tetapi ditolak. Berdasarkan surat keputusan Ketua BPPN No. SK-198/BPPN/0599 tertanggal 28 Mei 1999, pada tanggal 12 November 1999 kredit kepada WMI termasuk dalam aktiva non produktif yang dialihkan kepada BPPN. Atas klaim Bank (Primex) kepada bank-bank peserta sindikasi yang berstatus BBO dan BBKU, BPPN melalui surat Ketua BPPN No. PB-463/BPPN/0801 tanggal 7 Agustus 2001 menolak membayar klaim tersebut. Pinjaman yang diberikan tersebut memiliki kolektibilitas macet pada tahun 2002 dan 2001.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2002 dan 2001, tidak terdapat penempatan pada bank lain pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Suku bunga rata-rata tahunan adalah berkisar antara 6,00% sampai dengan 18,81% pada tahun 2002, dan antara 6,00% sampai dengan 16,18% pada tahun 2001 untuk penempatan dalam Rupiah, serta berkisar antara 1,20% sampai dengan 4,60% pada tahun 2002 dan antara 3,00% sampai dengan 4,53% pada tahun 2001 untuk penempatan dalam valuta asing.

8. EFEK-EFEK

Efek-efek yang dimiliki berdasarkan jenisnya terdiri atas:

	2002	2001
Rupiah		
Dimiliki hingga jatuh tempo		
Obligasi Pemerintah (pihak yang mempunyai hubungan istimewa)	8.270.674	6.574.538
Obligasi - setelah ditambah/dikurangi premi/diskonto yang belum diamortisasi sebesar Rp 145 pada tahun 2002 dan Rp 326 pada tahun 2001	101.972	82.624

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

	2002	2001
Sertifikat Bank Indonesia - setelah dikurangi bunga yang belum diamortisasi sebesar Rp 3.656 pada tahun 2001	-	394.093
Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)	-	100.000
Obligasi (pihak yang mempunyai hubungan istimewa) (lihat Catatan 26)	-	15.937
Wesel	-	561
	8.372.646	7.167.753
Tersedia untuk dijual		
Obligasi Pemerintah (pihak yang mempunyai hubungan istimewa) - setelah dikurangi rugi yang belum direalisasi sebesar Rp 2.762 pada tahun 2002 dan Rp 10.529 pada tahun 2001	645.116	2.330.886
Obligasi - setelah dikurangi rugi yang belum direalisasi sebesar Rp 1.953 pada tahun 2002	12.048	-
	657.164	2.330.886
Diperdagangkan		
Obligasi Pemerintah (pihak yang mempunyai hubungan istimewa)	2.775.771	927.080
Wesel	22.898	-
Unit penyertaan reksadana	18.940	15.693
Obligasi	1.290	21.800
	2.818.899	964.573
Jumlah Rupiah	11.848.709	10.463.212
Dikurangi penyisihan kerugian	7.840	4.626
Jumlah Bersih Efek Rupiah	11.840.869	10.458.586
Valuta Asing		
Dimiliki hingga jatuh tempo		
Exchange Offer - setelah ditambah/dikurangi premi/diskonto yang belum diamortisasi sebesar Rp 5.309 pada tahun 2002 dan Rp 120.927 pada tahun 2001	263.862	1.398.484
Obligasi Pemerintah - setelah dikurangi diskonto yang belum diamortisasi sebesar Rp 10.406 pada tahun 2001	-	197.594
Wesel	-	5.144

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

	2002	2001
Surat Pengakuan Hutang dengan Bunga Mengambang (Floating Rate Notes) - setelah ditambah/dikurangi premi/diskonto yang belum diamortisasi sebesar Rp 271 pada tahun 2001	-	103.729
Lainnya - setelah dikurangi premi/diskonto yang belum diamortisasi sebesar Rp 5.279 pada tahun 2002 dan Rp 12.821 pada tahun 2001	38.338	106.086
	302.200	1.811.037
Diperdagangkan		
Exchange Offer - setelah dikurangi diskonto yang belum diamortisasi sebesar Rp 62.949 pada tahun 2002	832.677	-
Surat Pengakuan Hutang dengan Bunga Mengambang (Floating Rate Notes) - setelah ditambah/dikurangi premi/diskonto yang belum diamortisasi sebesar Rp 670 pada tahun 2002	234.781	-
Obligasi Pemerintah - setelah dikurangi diskonto yang belum diamortisasi sebesar Rp 7.843 pada tahun 2002	187.055	-
Wesel	21.127	1.876
	1.275.640	1.876
Tersedia untuk dijual		
Lain-lain - setelah dikurangi rugi yang belum direalisasi sebesar Rp 911 pada tahun 2002 dan Rp 1.041 pada tahun 2001	879	1.038
Jumlah Valuta Asing	1.578.719	1.813.951
Dikurangi penyisihan kerugian	23.590	27.816
Jumlah Bersih Efek Valuta Asing	1.555.129	1.786.135
Jumlah Bersih Efek-efek	**13.395.998**	**12.244.721**

Klasifikasi efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh temponya adalah sebagai berikut (sebelum dikurangi penyisihan kerugian):

Uraian	2002			2001		
	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah
Kurang dari 1 bulan	-	-	-	494.571	4.982	499.553
1 - 3 bulan	-	-	-	83	162	245
3 - 12 bulan	-	109.553	109.553	-	128.100	128.100
12 - 60 bulan	5.441.468	159.995	5.601.463	4.371.719	1.655.835	6.027.554
Lebih dari 60 bulan	2.931.178	32.652	2.963.830	2.301.380	21.958	2.323.338
Jumlah	**8.372.646**	**302.200**	**8.674.846**	**7.167.753**	**1.811.037**	**8.978.790**

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

Perubahan penyisihan kerugian adalah sebagai berikut:

Uraian	2002			2001		
	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah
Saldo awal tahun	4.626	27.816	32.442	1.166	1.517	2.683
Penyisihan (pembalikan) selama tahun berjalan	3.214	(1.619)	1.595	3.457	25.817	29.274
Selisih kurs	-	(2.607)	(2.607)	-	482	482
Penerimaan kembali efek-efek yang telah dihapuskan	-	-	-	3	-	3
Saldo akhir tahun	**7.840**	**23.590**	**31.430**	**4.626**	**27.816**	**32.442**

Manajemen Bank berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian yang dibentuk adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya efek-efek serta telah dihitung berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (lihat Catatan 2i).

Kolektibilitas Efek-efek:

	2002	2001
Lancar	13.411.325	12.262.308
Macet	16.103	14.855
Jumlah	13.427.428	12.277.163
Dikurangi penyisihan kerugian	31.430	32.442
Bersih	**13.395.998**	**12.244.721**

Rincian penerbit obligasi, Sertifikat Bank Indonesia, SBPU, Floating Rate Notes (FRN), Exchange Offer, Wesel dan lain-lain yang dimiliki hingga jatuh tempo tersebut adalah sebagai berikut:

	2002	2001
Obligasi		
Pemerintah Republik Indonesia	8.270.674	6.772.132
Perum Pegadaian	17.600	17.000
PT Indosat Tbk	17.000	17.000
PT Ultrajaya Tbk	15.000	15.000
PT Semen Gresik Tbk	14.989	15.000
PT HM Sampoerna Tbk	14.816	14.724
PT Astra International Tbk	12.546	15.937
PT Astra Sedaya Finance	10.000	-
PT Aplikanusa Lintas Arta	21	-
PT Lontar Papyrus	-	3.900
	8.372.646	6.870.693

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

	2002	2001
Sertifikat Bank Indonesia		
Bank Indonesia	-	394.093
SBPU		
PT Bank Niaga Tbk	-	100.000
FRN		
PT Bank Mandiri (Persero)	-	103.729
Exchange offer		
PT Bank Umum Nasional (BBKU)	109.755	-
PT Bank Dagang Nasional Indonesia (BBO)	94.901	62.404
PT Bank Uppindo	23.554	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)	19.717	299.458
PT Bank Mandiri (Persero)	15.935	475.335
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	253.074
PT Bank BIRA (BBKU)	-	193.220
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	74.314
PT Bank Inter-Pacific Tbk	-	40.679
	263.862	1.398.484
Wesel	-	5.705
Lain-lain		
Indonesian Sovereign Fund IV	29.446	72.800
Efek Elnusa	8.892	11.328
PT Garuda Indonesia	-	21.958
	38.338	106.086
Jumlah	**8.674.846**	**8.978.790**

Berdasarkan data dari Bursa Efek Surabaya yang berasal dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo), rincian peringkat obligasi adalah sebagai berikut:

	2002	2001
Perum Pegadaian VIII Tahun 2001 Seri A	idA+	idA+
Perum Pegadaian IX Tahun 2002 Seri B	idAA-	-
Indosat I Tahun 2001 Seri A	idAA+	idAA+
Astra International III Tahun 1999 Seri II	idB+	idB+
Ultrajaya II Tahun 2001 Seri B	idBBB+	idBBB+
Semen Gresik I Tahun 2001 Seri B	idA+	idA
HM Sampoerna I Tahun 2000	idAA	idAA-
Astra Sedaya Finance II Tahun 2002	idA	-

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

	2002	2001
Lontar Papyrus I Tahun 2000 Seri A	idD	-
PLN V Tahun 1996 Seri B (Agustus)	-	idB
Berlian Laju Tanker I Tahun 2000 Seri A	idA-	-
Indofood Sukses Makmur I Tahun 2000	idAA+	-
Dankos Laboratories I Tahun 2000 Seri A	idA-	-
Lautan Luas I Tahun 2000 Seri A	idA	-
Ricky Putra Globalindo I Tahun 2000 Seri A	B+	-
Selamat Sempurna I Tahun 2000	idA	idAA-
Tjiwi Kimia I Tahun 1996	idD	idD
Bank DKI III Tahun 1997	idBBB-	idBB+
Bank Nagari IV Tahun 1997 Seri A	-	idBBB-

Suku bunga rata-rata tahunan efek-efek dalam Rupiah berkisar antara 10,00% sampai dengan 20,38% pada tahun 2002 dan 2001, sedangkan suku bunga rata-rata tahunan efek-efek dalam valuta asing berkisar antara 2,88% sampai dengan 10,38% pada tahun 2002 dan antara 3,96% sampai dengan 10,09% pada tahun 2001.

Obligasi pemerintah (pihak yang mempunyai hubungan istimewa) yang dimiliki pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001 merupakan obligasi Pemerintah Republik Indonesia yang diperoleh dengan dana setoran modal Pemerintah (atas nama BPPN) dan berasal dari peleburan usaha sebagai berikut:

	2002	2001
Saldo awal tahun	9.832.504	10.025.946
Penempatan terbatas dalam rangka peleburan usaha (lihat Catatan 26)	1.863.256	-
Jumlah	11.695.760	10.025.946
Dikurangi:		
Penjualan	(11.860)	(182.800)
Jatuh tempo	(186)	-
Laba (rugi) yang belum direalisasi - Tersedia untuk dijual	7.767	(10.529)
Laba (rugi) yang belum direalisasi - Diperdagangkan	80	(113)
Saldo akhir tahun	**11.691.561**	**9.832.504**

Obligasi Pemerintah ini terdiri dari obligasi dengan suku bunga tetap dan obligasi dengan suku bunga mengambang masing-masing sejumlah Rp 4.882.105 dan Rp 6.809.456 pada tanggal 31 Desember 2002. Obligasi dengan suku bunga tetap memiliki suku bunga tahunan yang berkisar antara 10,00% sampai dengan 16,50%, sedangkan obligasi dengan suku bunga mengambang memiliki suku bunga tahunan sebesar suku bunga Sertifikat Bank Indonesia jangka waktu 3 bulan atau surat hutang lain dari Pemerintah. Pada tanggal 31 Desember 2002, suku bunga tahunan obligasi dengan suku bunga mengambang adalah berkisar antara 14,11% sampai dengan 17,63%. Pembayaran bunga atas obligasi dengan suku bunga tetap adalah setiap 6 (enam) bulan sedangkan atas obligasi dengan suku bunga mengambang adalah setiap 3 (tiga) bulan. Obligasi-obligasi ini akan jatuh tempo pada berbagai tanggal antara 25 Februari 2003 sampai dengan 25 Juli 2009, namun Pemerintah dapat membeli kembali obligasi ini sebelum tanggal jatuh temponya pada harga pasar.

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

Sehubungan dengan peleburan usaha Bank dengan 4 (empat) bank peserta penggabungan, pada tanggal 27 September 2002, Pemerintah Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Menteri Keuangan menerbitkan Obligasi Pemerintah sebesar Rp 1.863.256. Obligasi dengan suku bunga tetap tersebut diterbitkan dalam 3 (tiga) seri, yaitu:

- Seri FR0004

Jumlah pokok	:	Rp 542.593
Tanggal jatuh tempo	:	15 Februari 2006
Tingkat bunga	:	12,125% per tahun

- Seri FR0008

Jumlah pokok	:	Rp 402.049
Tanggal jatuh tempo	:	15 Mei 2005
Tingkat bunga	:	16,5% per tahun

- Seri FR0009

Jumlah pokok	:	Rp 918.614
Tanggal jatuh tempo	:	15 Mei 2005
Tingkat bunga	:	10% per tahun

Pada tanggal 31 Desember 2001, seluruh obligasi Pemerintah (Universal) yang diklasifikasikan sebagai efek yang tersedia untuk dijual sebesar Rp 1.849.110 digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima yang terdiri dari obligasi dengan nilai nominal Rp 1.733.610 dijadikan jaminan atas pinjaman jangka pendek (lihat Catatan 23) dan obligasi sebesar Rp 115.500 dijadikan jaminan atas Fasilitas Likuiditas Intraday (FLI) yang diperoleh dari Bank Indonesia. FLI tersebut jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2002 dan sampai dengan saat jatuh tempo Universal tidak menggunakan fasilitas tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2001, obligasi pemerintah (Universal) yang diperdagangkan dengan nilai nominal Rp 520.020 dijual dengan janji dibeli kembali. Pada saat jatuh tempo, efek yang dijual dengan janji dibeli kembali sudah dibeli kembali (lihat Catatan 19).

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia tahun 1999, Bank tidak diperkenankan untuk memperdagangkan obligasi pemerintah sampai dengan tanggal 31 Januari 2000. Berdasarkan peraturan yang sama, mulai tanggal 1 Februari 2000, bank dapat memperdagangkan obligasi pemerintah setinggi-tingginya 10% dari nilai keseluruhan obligasi pemerintah yang dimiliki. Peraturan ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan surat Bank Indonesia tanggal 31 Juli 2001 yang memperkenankan bank untuk memperdagangkan obligasi pemerintah tersebut yang ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 100% dari nilai keseluruhan obligasi pemerintah.

Sehubungan dengan peraturan tersebut, Bank telah mengubah tujuan klasifikasi sebagian obligasi pemerintah dari dimiliki hingga jatuh tempo menjadi diperdagangkan dan tersedia untuk dijual.

Berdasarkan Internal Memorandum No. 003/KO-INV/II/2002 tanggal 31 Mei 2002, No. 068/IM-DIR/VI/02 tanggal 27 Juni 2002 dan No. 075/IM-DIR/VIII/02 tanggal 29 Agustus 2002, manajemen Bank mengubah tujuan klasifikasi Efek-efek masing-masing sebesar US$ 19,2 juta, US$ 26,1 juta, US$ 51,27 juta untuk "exchange offer" dan US$ 45,5 juta FRN dari Dimiliki Hingga Jatuh Tempo menjadi untuk Diperdagangkan.

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

Sesuai dengan edaran yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2002, nilai pasar obligasi dengan suku bunga tetap masing-masing berkisar antara 91,64% sampai dengan 104,23% dari nilai nominal. Sementara pada tanggal 21 Maret 2003, nilai pasar berkisar antara 96,59% sampai dengan 109,69% dari nilai nominal suku bunga tetap.

Pendapatan bunga dari "exchange offer" diterima setahun dua kali yaitu setiap tanggal 25 Februari dan 25 Agustus untuk perjanjian "exchange offer" pertama dan setiap tanggal 1 Juni dan 1 Desember untuk perjanjian "exchange offer" kedua. Suku bunga "exchange offer" ini ditentukan setiap 6 bulan sekali. Perjanjian "exchange offer" ini dijamin oleh Bank Indonesia.

9. TAGIHAN DAN KEWAJIBAN DERIVATIF

Tagihan dan kewajiban derivatif seluruhnya berkualitas lancar dan terdiri atas:

Transaksi	2002 Nilai Nosional Kontrak	Nilai Wajar	Tagihan Derivatif	Kewajiban Derivatif
Pihak ketiga				
Swap: - Jual dan Beli	44.750	45.551	801	-
	44.750	45.300	550	-
	44.750	45.246	496	-
	8.950	9.077	127	-
	8.950	9.058	108	-
Jumlah			2.082	-
Dikurangi penyisihan kerugian			21	-
Bersih			**2.061**	-

Transaksi	2001 Nilai Nosional Kontrak	Nilai Wajar	Tagihan Derivatif	Kewajiban Derivatif
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa (lihat Catatan 26)				
Swap: - Jual	29.314	29.403	461	550
- Beli	29.314	29.375	384	323
			845	873
Pihak ketiga				
Swap: - Jual	77.100	76.649	757	656
- Beli	108.300	107.438	1.224	426
	1.040	1.040	-	-
Forward: - Jual	74.350	75.400	-	1.050
- Beli	61.816	62.400	584	-
Artamedia *			219	-
			2.784	2.132
Jumlah			3.629	3.005
Dikurangi penyisihan kerugian			41	-
Bersih			**3.588**	**3.005**

* Data tidak tersedia dari bank yang menggabungkan diri

9. TAGIHAN DAN KEWAJIBAN DERIVATIF (lanjutan)

Kontrak derivatif ini terdiri dari kontrak berjangka dan transaksi swap valuta asing yang meliputi berbagai jenis valuta asing di antaranya Yen Jepang, Dolar Amerika Serikat, Dolar Hong Kong, Euro Eropa, mata uang Rupiah dan lain-lain dengan jangka waktu 1 hari sampai 120 hari. Tidak terdapat transaksi derivatif dengan netting agreement.

Transaksi berjangka valuta asing yang terjadi merupakan transaksi yang dilakukan untuk kepentingan Bank dalam rangka pengelolaan likuiditas dan lindung nilai posisi. Bank memiliki kebijakan pengelolaan risiko dan limit-limit untuk mengendalikan risiko nilai tukar. Perubahan variabel risiko pasar dipantau secara aktif dalam rapat ALCO (Asset Liability Committee) yang dilakukan secara bulanan dan dijadikan acuan dalam menentukan strategi Bank. Pemantauan atas posisi devisa neto dan posisi kontrak valuta asing berjangka dilakukan secara berkala oleh satu unit tersendiri dan dilaporkan ke Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena kriteria-kriteria tertentu di dalam PSAK No. 55 dan untuk tujuan akuntansi tidak dapat dipenuhi, transaksi ini tidak dianggap sebagai transaksi lindung nilai yang efektif.

Manajemen Bank berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian yang dibentuk adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya tagihan derivatif, serta telah dihitung berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (lihat Catatan 2i).

10. KREDIT YANG DIBERIKAN

Kredit yang diberikan terdiri dari:

1) Jenis Kredit

	2002	2001
Rupiah		
Konsumsi	2.423.425	1.973.995
Modal kerja	1.910.837	2.559.019
Investasi	1.366.050	1.647.423
Program Pemerintah	634.630	721.227
Kartu kredit	306.010	131.493
Sindikasi	130.745	205.237
Karyawan	67.912	80.627
Lain-lain	-	656
	6.834.609	7.319.677
Valuta Asing		
Investasi	1.112.167	1.438.453
Sindikasi	536.964	682.292
Modal kerja	370.423	481.113
Konsumsi	-	1.047
	2.019.554	2.602.905

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

1) Jenis Kredit (lanjutan)

	2002	2001
Jumlah	8.854.163	9.922.582
Dikurangi:		
Pendapatan bunga ditangguhkan*	12.038	-
Penyisihan kerugian	1.718.270	1.398.746
Bersih	**7.123.855**	**8.523.836**

* Untuk 2001, data tidak tersedia dari bank yang menggabungkan diri karena disajikan langsung sebagai pengurang saldo kredit

2) Sektor Ekonomi

	2002					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Rupiah						
Perdagangan, restoran dan hotel	1.099.290	57.731	2.503	28.386	80.791	1.268.701
Industri pengolahan	918.334	42.111	10.469	17.168	180.082	1.168.164
Pertanian, perburuan dan sarana pertanian	55.977	250.974	252.416	12.907	245.368	817.642
Jasa-jasa dunia usaha	436.179	25.480	27.101	9.116	85.245	583.121
Perumahan	368.490	48.629	8.453	2.268	4.236	432.076
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	150.332	33.970	54.550	-	1.043	239.895
Konstruksi	74.728	3.851	130	3.064	50.114	131.887
Pertambangan	40.939	27.472	2.374	-	73	70.858
Listrik, gas dan air	1.001	-	-	-	44.325	45.326
Jasa-jasa sosial/ masyarakat	27.907	362	-	-	-	28.269
Lain-lain	1.872.460	141.748	21.916	2.560	9.986	2.048.670
Jumlah Rupiah	5.045.637	632.328	379.912	75.469	701.263	6.834.609
Valuta Asing						
Industri pengolahan	329.481	22.782	132.566	166.657	598.871	1.250.357
Jasa-jasa dunia usaha	18.109	23.447	-	-	170.541	212.097
Konstruksi	6.514	-	-	-	140.895	147.409
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	68.075	31.914	-	-	8.943	108.932
Perdagangan, restoran dan hotel	44.660	41.024	-	-	20.458	106.142
Pertanian, perburuan dan sarana pertanian	695	-	7.066	-	6.116	13.877
Pertambangan	7.186	2.688	-	-	-	9.874
Lain-lain	170.866	-	-	-	-	170.866
Jumlah Valuta Asing	645.586	121.855	139.632	166.657	945.824	2.019.554

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

2) Sektor Ekonomi (lanjutan)

	2002					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Jumlah	5.691.223	754.183	519.544	242.126	1.647.087	8.854.163
Penyisihan kerugian						1.718.270
Pendapatan bunga ditangguhkan						12.038
Bersih						**7.123.855**

2) Sektor Ekonomi (sebelum dikurangi penyisihan kerugian)

	2001					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Rupiah						
Industri pengolahan	1.112.055	74.867	26.783	40.696	252.428	1.506.829
Perdagangan, restoran dan hotel	1.200.257	33.209	30.771	22.757	80.189	1.367.183
Pertanian, perburuan dan sarana pertanian	421.793	261.797	-	146.004	39.440	869.034
Jasa-jasa dunia usaha	339.811	1.683	8.549	8.248	31.733	390.024
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	317.460	37.042	2.345	151	735	357.733
Perumahan	217.724	16.679	775	210	2.515	237.903
Konstruksi	85.051	318	436	3.308	57.306	146.419
Jasa-jasa sosial/ masyarakat	57.386	104	284	-	283	58.057
Listrik, gas dan air	541	-	-	-	44.325	44.866
Pertambangan	15.978	2.592	83	-	-	18.653
Lain-lain *	2.015.751	182.128	53.079	36.881	35.137	2.322.976
Jumlah Rupiah	5.783.807	610.419	123.105	258.255	544.091	7.319.677
Valuta Asing						
Industri pengolahan	643.872	230.694	174.454	176.949	579.669	1.805.638
Jasa-jasa dunia usaha	33.306	203.925	-	-	18.200	255.431
Perdagangan, restoran dan hotel	37.648	7.779	46.652	36.915	90.073	219.067
Konstruksi	-	-	-	-	167.624	167.624
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	70.499	-	-	12.480	-	82.979
Jasa-jasa sosial/ masyarakat	-	-	-	42.499	-	42.499
Pertambangan	-	1.745	11.886	-	-	13.631
Pertanian, perburuan dan sarana pertanian	2.569	-	-	-	-	2.569
Lain-lain *	1.047	4.204	8.216	-	-	13.467
Jumlah Valuta Asing	788.941	448.347	241.208	268.843	855.566	2.602.905
Jumlah	**6.572.748**	**1.058.766**	**364.313**	**527.098**	**1.399.657**	**9.922.582**

* Termasuk data dari Artamedia yang tidak dapat diklasifikasikan per sektor ekonomi dan per kolektibilitas

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

3) Jangka Waktu

Klasifikasi kredit berdasarkan jangka waktu perjanjian kredit dan sisa umur sampai dengan saat jatuh temponya adalah sebagai berikut (sebelum dikurangi penyisihan kerugian dan pendapatan bunga ditangguhkan untuk tahun 2002 dan sebelum dikurangi penyisihan kerugian untuk tahun 2001):

a. Berdasarkan jangka waktu perjanjian kredit

Uraian	2002			2001		
	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah
Kurang dari 1 tahun	2.961.937	540.938	3.502.875	3.055.821	438.304	3.494.125
1 - 2 tahun	466.368	6.508	472.876	647.503	79.069	726.572
2 - 5 tahun	2.031.214	609.361	2.640.575	2.082.888	695.184	2.778.072
Lebih dari 5 tahun	1.375.090	862.747	2.237.837	1.533.465	1.390.348	2.923.813
Jumlah	**6.834.609**	**2.019.554**	**8.854.163**	**7.319.677**	**2.602.905**	**9.922.582**

b. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo

Uraian	2002			2001		
	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah
1 tahun	2.652.263	690.858	3.343.121	2.893.710	768.660	3.662.370
1 - 2 tahun	1.568.817	137.855	1.706.672	670.902	232.829	903.731
2 - 5 tahun	1.571.640	972.747	2.544.387	2.121.335	770.580	2.891.915
Lebih dari 5 tahun	1.041.889	218.094	1.259.983	1.166.347	695.615	1.861.962
Primex *	-	-	-	467.383	135.221	602.604
Jumlah	**6.834.609**	**2.019.554**	**8.854.163**	**7.319.677**	**2.602.905**	**9.922.582**

* Data tidak tersedia dari bank yang menggabungkan diri

Berikut adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan:

a. Suku bunga rata-rata tahunan dalam Rupiah adalah berkisar antara 14,00% sampai dengan 23,52% pada tahun 2002 dan antara 14,73% sampai dengan 21,50% pada tahun 2001, sedangkan dalam valuta asing adalah berkisar antara 1,90% sampai dengan 10,35% pada tahun 2002 dan antara 7,00% sampai dengan 11,11% pada tahun 2001.

b. Kredit pada umumnya dijamin dengan giro, deposito berjangka atau harta tak bergerak yang diaktakan dengan akta pemberian hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, atau jaminan lain yang umumnya diterima oleh Bank yang bergerak dalam bidang usaha bank (lihat Catatan 18).

c. Kredit modal kerja dan investasi diberikan kepada debitur untuk kepentingan modal kerja dan barang-barang modalnya.

d. Kredit modal kerja mencakup pinjaman rekening koran dan cerukan.

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

e. Kredit konsumsi terdiri dari kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor dan kredit perorangan lainnya.

f. Selama tahun 2002 dan 2001 kredit yang telah direstrukturisasi dilakukan dengan mengubah persyaratan pokok dan bunga, perpanjangan jangka waktu serta penurunan suku bunga. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2002, jumlah kredit yang direstrukturisasi adalah sebesar Rp 860.227 atau 9,72% dari jumlah kredit. Dalam saldo kredit yang direstrukturisasi tersebut termasuk bunga yang dialihkan menjadi pokok kredit. Dalam restrukturisasi kredit tersebut tidak termasuk restrukturisasi dengan cara "debt-to-equity participation" masing-masing sebesar Rp 69.908 dan Rp 194.508 pada tahun 2002 dan 2001 (lihat Catatan 12).

g. Kredit sindikasi merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama (sindikasi) dengan bank-bank lain. Keikutsertaan Bank sebagai anggota dalam kredit sindikasi adalah berkisar antara 0,40% sampai dengan 19,00% dari masing-masing fasilitas kredit sindikasi pada tahun 2002 dan antara 0,27% sampai dengan 19,00% dari masing-masing fasilitas kredit sindikasi pada tahun 2001.

h. Kredit yang diberikan kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa terdiri dari:

	2002	2001
Karyawan kunci	9.268	4.204
Perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa		
PT Astra International Tbk (lihat Catatan 26)	-	192.877
PT Astra Graphia Tbk (lihat Catatan 26)	-	12.108
Lain-lain	-	6.533
Jumlah	**9.268**	**215.722**
Persentase dari Jumlah Aktiva	**0,03%**	**0,81%**

Pada tahun 2001, kredit yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa tidak termasuk kredit di mana pihak yang mempunyai hubungan istimewa bertindak sebagai perantara bagi Bank dalam memberikan kredit kepada pengusaha kecil (lihat Catatan 10o).

Kredit yang diberikan kepada karyawan kunci berupa kredit untuk membeli kendaraan, rumah dan keperluan lainnya dengan jangka waktu berkisar antara 1 sampai dengan 20 tahun, dibebani bunga dan dibayar kembali melalui pemotongan gaji setiap bulan.

Kredit yang diberikan kepada perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal seperti pada pihak ketiga.

i. Kredit yang telah dihentikan pembebanan bunganya ("non-performing loan") oleh Bank sebesar Rp 2.408.757 atau 27,20% dari jumlah kredit yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2002 dan Rp 2.291.313 atau 23,09% dari jumlah kredit yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2001. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 3/25/PBI/2001 tanggal 26 Desember 2001, rasio dari kredit "non-performing" tidak boleh melebihi maksimum 5% dari jumlah kredit yang diberikan Bank.

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

j. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) pada tanggal 31 Desember 2002 tidak melampaui ketentuan BMPK untuk pihak terkait sedangkan untuk pihak tidak terkait terdapat pelampauan BMPK sebesar Rp 32.503 (3,10%).

k. Perubahan penyisihan kerugian adalah sebagai berikut:

Keterangan	2002			2001		
	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah
Saldo awal tahun	654.558	744.188	1.398.746	378.169	359.911	738.080
Penyisihan selama tahun berjalan	740.879	200.378	941.257	483.281	484.094	967.375
Selisih kurs	-	(98.213)	(98.213)	-	654	654
Penghapusan selama tahun berjalan	(38.953)	(57.473)	(96.426)	(213.970)	(99.018)	(312.988)
Penghapusan karena penjualan kredit - PPAI	(282.314)	(266.027)	(548.341)	-	-	-
Laba (rugi) restrukturisasi	236	-	236	1.258	(1.987)	(729)
Penerimaan kembali kredit yang dihapuskan	4.288	1.599	5.887	5.820	534	6.354
Penerimaan dari penjualan kredit - PPAI	54.007	61.117	115.124	-	-	-
Saldo akhir tahun	1.132.701	585.569	1.718.270	654.558	744.188	1.398.746

Manajemen Bank berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian yang dibentuk adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya kredit yang diberikan serta telah dihitung berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (lihat Catatan 2i).

l. Bank memiliki unit tersendiri yang menangani proses pengelolaan risiko di mana tanggung jawab utama unit ini dalam hal pengelolaan risiko kredit adalah menetapkan batas risiko pasar dan risiko kredit berdasarkan pertimbangan mengenai produk, mitra usaha, industri dan letak geografis. Unit ini akan mengembangkan, mengkomunikasikan, membantu dan memantau unit-unit usaha dalam mengimplementasikan kebijakan dan metodologi pengelolaan risiko dalam rangka memperkuat kemampuan Bank dalam mengelola dan mengevaluasi risiko kredit.

Bank juga memiliki pedoman kebijakan perkreditan yang mengatur mengenai kebijakan penyaluran kredit hingga administrasi perkreditan, termasuk kebijakan penelaahan atas kualitas kredit, kecukupan penyisihan kerugian dan penilaian atas agunan kredit. Proses persetujuan kredit telah memiliki tahapan yang baku di mana proposal kredit akan dievaluasi oleh pejabat yang berwenang. Tingkat persetujuan kredit telah ditentukan dengan wewenang tertinggi berada pada Komite Kredit. Di samping itu, manajemen Bank termasuk Direksi, senantiasa memelihara hubungan yang baik dengan debitur, baik dengan pemilik maupun dengan pihak manajemen, antara lain dengan melakukan kunjungan secara berkala, sehingga dapat diperoleh informasi secara jelas mengenai usaha debitur.

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

m. Sehubungan dengan Pasal 10 surat keputusan bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia No. 117/KMK.017/1999 / No. 31/15/KEP/GBI tanggal 26 Maret 1999 mengenai realisasi dari program rekapitalisasi Bank Take Over (BTO), Bank mengalihkan dan menyerahkan semua hak dan kepemilikan dari aktiva produktif "non-performing" kepada BPPN sesuai Perjanjian Jual Beli atas Barang-Barang Bergerak yang telah dilegalisasi oleh Notaris No. 1180/leg/2000, Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang yang telah dilegalisasi oleh Notaris No. 1181/leg/2000 tanggal 29 September 2000 dan Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Hak yang diaktakan dengan akta notaris Ny. Asmara Noer, S.H., No. 21 tanggal 29 September 2000. Aktiva produktif "non-performing" yang dialihkan berjumlah Rp 2.035.744, telah dibentuk penyisihan kerugian seluruhnya dan dialihkan dengan harga nihil. Aktiva "non-performing" tersebut tetap berada dalam pengelolaan, pengurusan dan pengawasan Bank sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Aktiva Sementara yang telah dilegalisasi oleh Notaris No. 1179/leg/2000 tanggal 29 September 2000. Jangka waktu pengelolaan ini berlaku 6 bulan sejak tanggal perjanjian. Setelah jangka waktu perjanjian ini berakhir, kecuali BPPN memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 30 hari kalender sebelum akhir masa berlaku perjanjian, perjanjian ini secara otomatis diperpanjang jangka waktunya untuk 6 bulan berikutnya.

Berdasarkan surat BPPN No. S-243/ADA-OSM/BPPN/0601 tanggal 27 Juni 2001, jangka waktu pelaksanaan pengelolaan aktiva sementara telah diakhiri pada bulan Mei 2001. Oleh karena itu, sejak bulan Juni 2001, tidak ada lagi aktiva "non-performing" yang dialihkan ke BPPN yang berada dalam pengelolaan, pengurusan dan pengawasan Bank.

n. Pada tanggal 19 April 2001, Bank mengadakan perjanjian asuransi kredit ekspor dengan PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI). Kredit yang ditanggung adalah kredit baru dengan kolektibilitas lancar atau perpanjangan dengan kolektibilitas lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar dan diragukan yang jangka waktunya maksimum 12 bulan dengan maksimum fasilitas sebesar Rp 250 sampai dengan Rp 3.500 atau US$ 25.000 sampai dengan US$ 350.000. Risiko yang ditanggung oleh ASEI adalah kerugian Bank yang disebabkan kegagalan nasabah untuk melunasi kredit dan telah dinyatakan kolektibilitas macet. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama. Tarif premi yang dikenakan adalah sebesar 0,8% sampai dengan 1% per tahun dari plafon, sedangkan untuk jangka waktu kredit kurang dari 1 tahun dihitung secara proporsional.

o. Pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001, kredit yang disalurkan dengan sistim pembiayaan bersama (joint financing) masing-masing sebesar Rp 1.560.178 dan Rp 2.197.747, diantaranya Bank mengadakan perjanjian kerjasama pemberian fasilitas pembiayaan bersama dengan PT Federal International Finance (FIF) dan PT Astra Sedaya Finance (ASF), masing-masing untuk menyalurkan kredit kendaraan motor dan mobil. Berdasarkan perjanjian, FIF dan ASF akan bertindak sebagai manajer fasilitas dan manajer jaminan. Bank, FIF dan ASF menanggung risiko kerugian atas piutang yang tidak tertagih sebesar porsi masing-masing dalam pembiayaan bersama tersebut. Saldo pembiayaan bersama untuk FIF dan ASF tersebut pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001 masing-masing sebesar Rp 1.062.919 dan Rp 954.657.

p. Pada bulan Juli 2002, Bank mengadakan perjanjian pengalihan piutang dengan PT Tunas Financindo Sarana (TFS). Piutang yang diambil alih oleh Bank adalah piutang TFS kepada debiturnya dalam rangka menyalurkan kredit mobil yang jangka waktu pembiayaannya maksimal tiga (3) tahun. Nilai piutang yang dialihkan dari TFS kepada Bank adalah sesuai dengan daftar debiturnya. Piutang yang dialihkan harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, antara lain debitur tidak boleh fiktif dan dalam status lancar. Apabila TFS tidak dapat memenuhi kriteria tersebut, maka TFS wajib untuk membeli kembali piutang tersebut dari Bank.

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

Sehubungan dengan pengalihan piutang tersebut, berdasarkan perjanjian pengelolaan piutang, Bank memberikan kuasa kepada TFS untuk melakukan tindakan pengelolaan termasuk melakukan penagihan kepada para debitur sampai hutang debitur tersebut lunas. Saldo pengalihan piutang dari TFS sebesar Rp 22.678 pada tanggal 31 Desember 2002.

q. Pada tahun 2002, Bank melakukan novasi kredit yang diberikan sebesar US$ 1,12 juta melalui penggantian debitur dari Sea Flyte Ferry Services Pte., Ltd. ke PT Pelayaran Baruna Binasegara.

r. Pada tanggal 31 Desember 2001, Bank tidak dapat menyajikan kredit yang diberikan dari Primex berdasarkan sisa umur jatuh tempo dan dari Artamedia berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas, karena Primex dan Artamedia tidak dapat menyediakan data tersebut.

s. Pada bulan November 2002, Bank melaksanakan Program Penjualan Asset Inti (PPAI) untuk kredit yang sudah diklasifikasikan sebagai macet dan sudah seluruhnya dibentuk penyisihan. Saldo kredit yang dijual dalam PPAI tersebut adalah sebesar Rp 548.341 dengan harga jual sebesar Rp 115.124.

11. TAGIHAN AKSEPTASI

Tagihan akseptasi berdasarkan counterparty merupakan tagihan kepada nasabah dan bank dengan rincian sebagai berikut:

	2002	2001
Rupiah		
Bank	599	-
Valuta Asing		
Bank	1.802	-
Nasabah		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa (lihat Catatan 26)	-	6.805
Pihak ketiga	54.637	55.965
	56.439	62.770
Jumlah	57.038	62.770
Dikurangi penyisihan kerugian	4.316	628
Bersih	**52.722**	**62.142**

11. TAGIHAN AKSEPTASI (lanjutan)

Rincian tagihan akseptasi berdasarkan jangka waktu jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	2002	2001
Rupiah		
1 - 3 bulan	106	-
3 - 6 bulan	490	-
6 - 12 bulan	3	-
	599	-
Valuta Asing		
Kurang dari 1 bulan	-	1.254
1 - 3 bulan	1.448	20.145
3 - 6 bulan	32.230	38.345
6 - 12 bulan	21.750	2.831
Lebih dari 12 bulan	1.011	195
	56.439	62.770
Jumlah	57.038	62.770
Dikurangi penyisihan kerugian	4.316	628
Bersih	**52.722**	**62.142**

Kolektibilitas Tagihan Akseptasi:

	2002	2001
Lancar	51.962	62.770
Dalam perhatian khusus	1.347	-
Macet	3.729	-
Jumlah	57.038	62.770
Dikurangi penyisihan kerugian	4.316	628
Bersih	**52.722**	**62.142**

Perubahan penyisihan kerugian adalah sebagai berikut:

	2002	2001
Saldo awal tahun	628	6.715
Penyisihan (pembalikan) selama tahun berjalan	3.761	(5.904)
Selisih kurs	(73)	(183)
Saldo akhir tahun	**4.316**	**628**

Manajemen Bank berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian yang dibentuk adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tagihan akseptasi serta telah dihitung berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (lihat Catatan 2i).

12. PENYERTAAN SAHAM

Rincian penyertaan saham adalah sebagai berikut:

	2002				
	Bidang Usaha	Persentase Pemilikan	Biaya Perolehan	Akumulasi Bagian atas Laba Bersih Perusahaan Asosiasi	Nilai Tercatat
Metode Ekuitas (Equity Method)					
PT Asuransi BancBali Nippon Fire	Asuransi Kerugian	51,00%	7.650	25.971	33.621
PT Bali Securities	Sekuritas	95,00	10.925	12.080	23.005
Badan Perkreditan Rakyat (18 bank)	Bank	39,17 sampai 68,00	1.064	7.108	8.172
PT Bali Walden UOB Venture Capital	Modal Ventura	35,00	3.500	1.973	5.473
PT Bali Tunas Finance	Pembiayaan Konsumen dan Sewa Guna Usaha	60,00	15.000	(14.877)	123
			38.139	32.255	70.394
Metode Biaya (Cost Method)					
Tidak dalam rangka restrukturisasi kredit					
Orient Bancorporation, San Fransisco, Amerika Serikat	Bank	4,75	4.242	-	4.242
PT KDLC BancBali Finance	Pembiayaan Konsumen dan Sewa Guna Usaha	15,00	3.617	-	3.617
UOB Venture Investment Ltd., Singapura	Modal Ventura	5,22	1.135	-	1.135
PT Sarana Bali Ventura	Modal Ventura	4,66	305	-	305
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	1,00	300	-	300
PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia	Investasi	1,91	128	-	128
PT Aplikanusa Lintasarta	Komunikasi	1,91	111	-	111
PT Bank UFJ Indonesia	Bank	3,77	-	-	-
			9.838	-	9.838
Dalam rangka restrukturisasi kredit					
PT Indra Eramulti Logam Industri	Industri	68,75	38.000	-	38.000
PT Zebra Nusantara Tbk	Transportasi	29,36	12.500	-	12.500
PT Texmaco Perkasa Engineering Tbk	Mesin dan Alat berat	0,49	12.000	-	12.000
PT Catur Karya Mukti	Industri	99,00	5.000	-	5.000
PT KDLC BancBali Finance	Pembiayaan Konsumen dan Sewa Guna Usaha	15,00	2.408	-	2.408
			69.908	-	69.908
Jumlah			117.885	32.255	150.140
Dikurangi penyisihan kerugian			-	-	57.581
Bersih			117.885	32.255	92.559

12. PENYERTAAN SAHAM (lanjutan)

	2001				
	Bidang Usaha	Persentase Pemilikan	Biaya Perolehan	Akumulasi Bagian atas Laba Bersih Perusahaan Asosiasi	Nilai Tercatat
Metode Ekuitas (Equity Method)					
PT United Overseas Bank Indonesia	Bank	20,10%	10.064	60.663	70.727
PT Asuransi BaruBali Nippon Fire	Asuransi Kerugian	51,00	7.650	23.475	31.125
PT Bali Securities	Sekuritas	95,00	10.925	12.084	23.009
Badan Perkreditan Rakyat (18 bank)	Bank	39,17 sampai 68,00	1.064	4.983	6.047
PT Bali Walden UOB Venture Capital	Modal Ventura	35,00	3.500	1.505	5.005
PT Willis Corroon BaruBali	Asuransi	48,00	1.440	3.402	4.842
PT Bali Tunas Finance	Pembiayaan Konsumen dan Sewa Guna Usaha	60,00	15.000	(14.877)	123
			49.643	91.235	140.878
Metode Biaya (Cost Method)					
Tidak dalam rangka restrukturisasi kredit					
Orient Bancorporation, San Fransisco, Amerika Serikat	Bank	4,75	4.242	-	4.242
PT KDLC BaruBali Finance	Pembiayaan Konsumen dan Sewa Guna Usaha	15,00	3.617	-	3.617
UOB Venture Investment Ltd., Singapura	Modal Ventura	5,22	1.512	-	1.512
PT Sarana Bali Ventura	Modal Ventura	4,66	305	-	305
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	1,00	300	-	300
PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia	Investasi	1,91	128	-	128
PT Aplikanusa Lintasarta	Komunikasi	0,40	72	-	72
PT Bank UFJ Indonesia	Bank	3,77	-	-	-
			10.176	-	10.176
Dalam rangka restrukturisasi kredit					
PT Tunggal Maju Asri	Industri	80,00	124.600	-	124.600
PT Indra Eramulti Logam Industri	Industri	68,75	38.000	-	38.000
PT Zebra Nusantara Tbk	Transportasi	29,36	12.500	-	12.500
PT Texmaco Perkasa Engineering Tbk	Mesin dan Alat berat	0,49	12.000	-	12.000
PT Catur Karya Mukti	Industri	99,00	5.000	-	5.000
PT KDLC BaruBali Finance	Pembiayaan Konsumen dan Sewa Guna Usaha	15,00	2.408	-	2.408
			194.508	-	194.508
Jumlah			254.327	91.235	345.562
Dikurangi penyisihan kerugian			-	-	148.938
Bersih			254.327	91.235	196.624

12. PENYERTAAN SAHAM (lanjutan)

Kolektibilitas Penyertaan Saham:

	2002	2001
Lancar	75.352	151.888
Dalam perhatian khusus	12.500	-
Kurang lancar	7.160	1.512
Macet	55.128	62
Universal	-	192.100 *
Jumlah	150.140	345.562
Dikurangi penyisihan kerugian	57.581	148.938
Bersih	**92.559**	**196.624**

* Data tidak tersedia

Perubahan penyisihan kerugian adalah sebagai berikut:

	2002	2001
Saldo awal tahun	148.938	72.220
Penyisihan selama tahun berjalan	33.286	76.718
Selisih kurs	(43)	-
Penghapusan karena penjualan penyertaan saham - PPAI	(123.354)	-
Penerimaan dari penjualan penyertaan saham - PPAI	(1.246)	-
Saldo akhir tahun	**57.581**	**148.938**

Manajemen Bank berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian yang dibentuk adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas penyertaan saham serta telah dihitung berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (lihat Catatan 2i).

Pada bulan November 2002, Bank melaksanakan PPAI untuk penyertaan saham dalam rangka restrukturisasi kredit yang sudah diklasifikasikan sebagai macet dan sudah seluruhnya dibentuk penyisihan. Saldo penyertaan yang dijual dalam PPAI tersebut adalah sebesar Rp 124.600 dengan harga jual sebesar Rp 1.246.

Berdasarkan "Sale and Purchase of Share Agreement" tanggal 26 September 2002, telah ditandatangani kesepakatan untuk menjual kepada United Overseas Bank Ltd., Singapura seluruh saham Bank pada PT United Overseas Bank Indonesia dengan harga Rp 95.000.

12. PENYERTAAN SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan "Agreement for the Sale and Purchase Shares in PT Willis Corroon BancBali" tanggal 16 Juli 2002, telah ditandatangani kesepakatan untuk menjual seluruh saham Bank kepada Willis Europe BV, Belanda dan PT Erakonsultindo Yadhikarya Indonesia masing-masing sebanyak 8.400 saham dan 6.000 saham dengan harga Rp 5.522.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT KDLC BancBali Finance No. 11 tanggal 22 Mei 2001, pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal disetor dari Rp 15.000 menjadi Rp 39.500 yang berasal dari konversi kredit ke saham. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 11 Mei 2001, Bank telah melakukan penyertaan sementara pada PT KDLC BancBali Finance dalam rangka restrukturisasi kredit sebesar Rp 2.408 yang dicatat dengan metode biaya, sehingga persentase pemilikan atas penyertaan Bank turun dari 23,50% menjadi 15,00%.

Berdasarkan risalah rapat pemegang saham PT Bali Walden UOB Venture Capital tanggal 26 Juni 2000, pemegang saham mayoritas mengajukan proposal untuk melikuidasi perusahaan tersebut dan meminta persetujuan dari pemegang saham lainnya. Berdasarkan surat BPPN No. 528/BR/0900 tanggal 6 September 2000, BPPN telah menyetujui likuidasi atas perusahaan tersebut. Berdasarkan pernyataan keputusan pemegang saham PT Bali Walden UOB Venture Capital pada tanggal 5 Desember 2000 yang diaktakan dengan akta notaris Kun Hidayat, S.H. pada tanggal yang sama, para pemegang saham telah menyetujui likuidasi dari perusahaan tersebut sejak tanggal 29 November 2000. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, proses likuidasi masih berlangsung.

Berdasarkan surat pemberitahuan dari Direksi UOB Venture Investment Ltd., Singapura kepada pemegang saham tanggal 16 Agustus 2002, UOB Venture Investment Ltd. menarik kembali 10% dari seluruh saham preferennya pada tanggal 30 September 2002. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 30 Desember 2002, Bank telah menerima Rp 1.527 (SGD 299.700) dari hasil penarikan kembali saham tersebut.

Berdasarkan surat pemberitahuan dari Direksi UOB Venture Investment Ltd., Singapura kepada pemegang saham tanggal 24 Mei 2001, UOB Venture Investment Ltd. menarik kembali 30% dari seluruh saham preferennya. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 17 Januari 2002 Bank telah menerima Rp 5.056 (SGD 899.100) dari hasil penarikan kembali saham tersebut.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Prudential BancBali Life Assurance tanggal 25 Mei 2000 yang diaktakan dalam akta notaris Singgih Susilo, S.H., No. 149 pada tanggal yang sama, pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal dasar serta modal yang ditempatkan dan disetornya. Namun demikian Bank tidak ikut berpartisipasi dalam peningkatan modal disetor tersebut, yang mengakibatkan penurunan persentase pemilikan atas penyertaan Bank dari 20,00% menjadi 11,76%. Berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, S.H., No. 17 tanggal 10 Agustus 2001, telah ditandatangani kesepakatan untuk menjual seluruh saham Bank pada PT Prudential BancBali Life Assurance dengan harga Rp 6.000. Berdasarkan "Termination Agreement" tanggal 10 Agustus 2001, Bank menerima ganti rugi atas pengakhiran perjanjian dengan PT Prudential BancBali Life Assurance sebesar Rp 61.500 (lihat Catatan 37).

Pada tahun 1999, PT Bank Sanwa Indonesia meningkatkan modal disetornya untuk memenuhi modal yang disyaratkan oleh Bank Indonesia. Namun demikian, Bank tidak ikut berpartisipasi dalam peningkatan modal disetor tersebut, yang mengakibatkan penurunan persentase kepemilikan atas penyertaan Bank dari 20,10% menjadi 5,03%. Sejak tanggal 31 Desember 1998, nilai tercatat dari penyertaan Bank pada PT Bank Sanwa Indonesia dinyatakan nihil karena akumulasi bagian atas rugi

12. PENYERTAAN SAHAM (lanjutan)

bersih perusahaan asosiasi telah melebihi nilai tercatat dari penyertaan. Berdasarkan Akta Merger No. 9 tanggal 18 Juli 2001 yang diaktakan dalam akta notaris Hendra Karyadi S.H., PT Bank Sanwa Indonesia telah berganti nama menjadi PT Bank UFJ Indonesia. Sehubungan dengan merger tersebut, PT Bank UFJ Indonesia meningkatkan modal disetornya dimana Bank tidak ikut berpartisipasi dalam peningkatan modal disetor tersebut, sehingga mengakibatkan penurunan persentase kepemilikan atas penyertaan Bank dari 5,03% menjadi 3,77%.

Dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Bali Tunas Finance (BTF) (Anak perusahaan) yang diselenggarakan pada tanggal 21 Oktober 1998, yang diaktakan dengan akta notaris Rachmat Santoso, S.H., No. 35 tanggal 5 November 1998, para pemegang saham menyetujui untuk melikuidasi Anak perusahaan tersebut sejak tanggal 31 Oktober 1998. Pada tanggal 31 Desember 2002, BTF memiliki nilai aktiva bersih sebesar Rp 389. Proses likuidasi BTF sampai dengan tanggal laporan auditor independen masih belum selesai.

Berdasarkan surat dari Bank kepada Hong Kong Monetary Authority No. DIR/2001003/LN/UM tanggal 12 Maret 2001, Bank telah memutuskan untuk mencabut surat izin "Deposit Taking Company" (DTC) yang dimiliki oleh Bali International Finance, Ltd. (BIF). Berdasarkan surat dari Hong Kong Monetary Authority No. CB/DTC/408 tanggal 3 April 2001, pencabutan surat izin DTC menjadi efektif sejak tanggal 4 April 2001.

Pada bulan September 2001, Bank telah menjual seluruh saham Bank pada BIF kepada Sun Hung Kai Securities Limited (SHKSL) dengan harga HKD 29.772.432, sesuai dengan "Sale and Purchase Agreement" tanggal 25 September 2001 dan surat SHKSL tanggal 11 Desember 2001.

Bagian Bank atas laba bersih perusahaan asosiasi berjumlah Rp 20.354 dan Rp 27.295 masing-masing untuk tahun 2002 dan 2001.

Bank menerima dividen kas dari penyertaan saham dengan metode ekuitas dan metode biaya pada tahun 2002 dan 2001 masing-masing sebesar Rp 4.405 dan Rp 2.980 dan Rp 2.203 dan Rp 83.

13. AKTIVA TETAP

Aktiva tetap terdiri dari:

	Saldo Awal 1 Januari 2002	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2002
Nilai Tercatat				
Pemilikan Langsung				
Tanah	299.324	115	1.120	298.319
Bangunan (lihat Catatan 40)	423.379	5.814	5.901	424.292
Perabot dan peralatan kantor	417.537	46.203	176.185	287.555
Kendaraan bermotor	12.643	6.325	15.488	3.480
Jumlah	1.152.883	59.457	198.694	1.013.646
Bangunan dalam penyelesaian	86	-	86	-
Jumlah Nilai Tercatat	1.152.969	59.457	198.780	1.013.646

13. AKTIVA TETAP (lanjutan)

	Saldo Awal 1 Januari 2002	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2002
Akumulasi Penyusutan				
Pemilikan Langsung				
Bangunan	82.251	22.568	2.468	102.351
Perabot dan peralatan kantor	284.380	39.075	139.108	184.347
Kendaraan bermotor	8.125	6.074	11.721	2.478
Jumlah Akumulasi Penyusutan	374.756	67.717	153.297	289.176
Nilai Buku	**778.213**			**724.470**

	Saldo Awal 1 Januari 2001	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2001
Nilai Tercatat				
Pemilikan Langsung				
Tanah	319.481	7.560	27.717	299.324
Bangunan (lihat Catatan 40)	413.110	24.110	13.841	423.379
Perabot dan peralatan kantor	413.157	26.113	21.733	417.537
Kendaraan bermotor	11.210	4.395	2.962	12.643
Jumlah	1.156.958	62.178	66.253	1.152.883
Bangunan dalam penyelesaian	-	86	-	86
Jumlah Nilai Tercatat	1.156.958	62.264	66.253	1.152.969
Akumulasi Penyusutan				
Pemilikan Langsung				
Bangunan	70.596	22.864	2.299	91.161
Perabot dan peralatan kantor	259.475	49.238	20.888	287.825
Kendaraan bermotor	8.433	1.660	2.541	7.552
Selisih atas perubahan metode penyusutan (Universal)	(5.025)	-	6.757	(11.782)
Jumlah Akumulasi Penyusutan	333.479	73.762	32.485	374.756
Nilai Buku	**823.479**			**778.213**

Sehubungan dengan perubahan metode penyusutan aktiva tetap Universal agar sesuai dengan metode penyusutan aktiva tetap Bank, nilai buku aktiva tetap Universal pada tanggal 31 Desember 2001 berubah dari Rp 159.170 menjadi Rp 170.952. Mutasi aktiva tetap Universal untuk tahun 2001 tidak disajikan kembali dengan pertimbangan bahwa jumlah aktiva tetap Universal yang dijual dan dihapus buku tidak material sehingga efek yang ditimbulkan juga tidak signifikan.

Berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa No. Kep-02/WPJ.06/KP.0404/1997 tanggal 5 Agustus 1997, Bank telah mendapat persetujuan kantor pajak atas hasil penilaian kembali aktiva tetapnya per tanggal 31 Desember 1996 yang dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 507/KMK.04/1996 tanggal 13 Agustus 1996. Selisih penilaian kembali aktiva tetap tersebut adalah sebesar Rp 161.951.

Berdasarkan hasil penilaian tanggal 12 Mei 2000 dari Penilai Independen PT Inti Utama Penilai, dengan menggunakan metode pendekatan kapitalisasi pendapatan (income approach), terdapat penurunan nilai aktiva tetap atas tanah dan bangunan sebesar Rp 289.221, di mana sebesar Rp 102.001 dikompensasikan ke selisih penilaian kembali aktiva tetap dan sebesar Rp 187.220 dibebankan dalam beban bukan operasional tahun berjalan.

13. AKTIVA TETAP (lanjutan)

Rincian selisih penilaian kembali aktiva tetap dan pembukuannya dalam kelompok Ekuitas adalah sebagai berikut:

Tanah	161.833
Bangunan	(1.026)
Perabot dan peralatan kantor	1.144
Jumlah yang dibukukan dalam Aktiva Tetap	161.951
Pajak penghasilan final atas selisih penilaian kembali aktiva tetap	(16.376)
Selisih penilaian kembali aktiva tetap yang dibukukan di dalam kelompok Ekuitas	145.575
Pengaruh penurunan nilai atas tanah	(102.001)
Selisih penilaian kembali aktiva tetap pada akhir tahun	**43.574**

Di samping itu, 4 Bank Peserta Penggabungan (BPP) juga telah melakukan revaluasi aktiva tetap dengan rincian sebagai berikut:

Bank	Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak	Surat Keputusan Menteri Keuangan	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak	Penilai Independen	Metode Penilaian
Universal	No. Kep-07/WPJ.06/KP.0404/2000 tanggal 14 Juli 2000	No. 384/KMK.04/1998 tanggal 14 Agustus 1998	No. SE-29/PJ.42/1998 tanggal 17 September 1998	PT Vigers Hagai Sejahtera tanggal 17 Mei 2000	Metode nilai pasar
Primex	-	No. 507/KMK.04/1996 tanggal 13 Agustus 1996	-	-	-
Artamedia	No. Kep. 513/WPJ.05/KP.09/1999 tanggal 31 Maret 1999	No. 384/KMK.04/1998 tanggal 14 Agustus 1998	No. SE-29/PS.42/1998 tanggal 7 September 1998	PT Ujatek Baru tanggal 16 Maret 1999	Metode nilai pasar untuk penilaian tanah dan metode kalkulasi biaya untuk penilaian aktiva tetap lainnya
Patriot	No. Kep-78/WPJ.05/KP.10/1997 tanggal 24 Juli 1997	No. 507/KMK.04/1996 tanggal 13 Agustus 1996	-	PT Cipta Daya Guna Mandiri tanggal 25 April 1997	Metode nilai pasar

Rincian selisih hasil penilaian kembali aktiva tetap 4 BPP adalah sebagai berikut:

Tanah	35.601
Bangunan	34.471
Perabot dan peralatan kantor	1.371
Primex (perincian tidak tersedia)	16.403
Jumlah yang dibukukan dalam Aktiva Tetap	**87.846**

Penambahan aktiva tetap Bank selama tahun 2002 termasuk reklasifikasi bangunan dalam penyelesaian sebesar Rp 86 ke perabot dan peralatan kantor, selisih kurs atas aktiva tetap cabang luar negeri dan penambahan aktiva tetap 4 BPP sebesar Rp 11.703.

13. AKTIVA TETAP (lanjutan)

Penambahan tahun 2001 termasuk selisih kurs atas aktiva tetap cabang luar negeri dan penambahan aktiva tetap dari 4 BPP sebesar Rp 46.653.

Pada tahun 2002, Bank melakukan penghapusan atas aktiva tetap 4 BPP (Artamedia, Primex, Patriot dan Universal) dengan nilai buku sebesar Rp 36.008.

Penambahan akumulasi penyusutan untuk tahun 2002 terdiri dari beban penyusutan sebesar Rp 41.725, reklasifikasi akumulasi penyusutan perabot dan peralatan kantor sebesar Rp 6, selisih kurs atas aktiva tetap cabang luar negeri sebesar Rp 65 dan akumulasi penyusutan 4 BPP sebesar Rp 26.051.

Penambahan akumulasi penyusutan untuk tahun 2001 terdiri dari beban penyusutan sebesar Rp 39.743, reklasifikasi akumulasi penyusutan perabot dan peralatan kantor sebesar Rp 37, selisih kurs atas aktiva tetap cabang luar negeri sebesar Rp 129 dan akumulasi penyusutan 4 BPP sebesar Rp 33.853.

Sebanyak 8 hak atas tanah dan bangunan dalam bentuk hak guna bangunan, hak guna pakai dan "Strata Title" masih dalam proses pengurusan balik nama ke dalam nama Bank. Sisa umur dari hak atas tanah dan bangunan berkisar antara 1 tahun sampai dengan 29 tahun dan dapat diperpanjang.

Aktiva tetap pemilikan langsung kecuali tanah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu masing-masing kepada perusahaan asuransi PT Asuransi BancBali Nippon Fire, anak perusahaan, dengan nilai pertanggungan sebesar US$ 60.485.695 dan Rp 70.599, PT Asuransi Astra Buana dengan nilai pertanggungan Rp 214.004, PT Wahana Tata dengan nilai pertanggungan Rp 6.422 dan PT Asuransi Mitra Maparya dengan nilai pertanggungan Rp 3.113, yang menurut pendapat manajemen Bank cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aktiva yang dipertanggungkan.

14. AKTIVA LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	2002	2001
Tagihan lain-lain (PT Era Giat Prima)	546.466	546.466
Agunan diambil alih - setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai agunan diambil alih sebesar Rp 162.521 pada tahun 2002 dan Rp 228.282 pada tahun 2001	467.227	466.742
Bunga masih akan diterima	372.322	405.646
Biaya dibayar di muka	32.958	44.842

14. AKTIVA LAIN-LAIN (lanjutan)

	2002	2001
Lain-lain		
Rupiah		
Aktiva tetap yang tidak digunakan	26.123	21.947
Rupa-rupa tagihan	18.315	24.423
Uang jaminan	16.421	16.123
Uang muka	8.562	4.502
Piutang kartu kredit	7.692	1.319
Beban ditangguhkan - bersih	5.790	6.998
Persediaan alat tulis kantor dan barang promosi	4.170	6.334
Uang muka pembelian aktiva tetap	1.929	415
Taksiran pengembalian pajak penghasilan	-	4.568
Lain-lain	44.095	15.214
	133.097	101.843
Dikurangi penyisihan kerugian	(18.315)	(16.026)
	114.782	85.817
Valuta Asing		
Uang jaminan	48.557	43.204
Draft dibeli	2.209	3.298
Piutang atas penjualan efek	-	5.057
Lain-lain	4.188	857
	54.954	52.416
Dikurangi penyisihan kerugian	-	(5)
	54.954	52.411
	169.736	138.228
Jumlah	**1.588.709**	**1.601.924**

Perubahan penyisihan kerugian adalah sebagai berikut:

Uraian	2002			2001		
	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah
Saldo awal tahun	16.026	5	16.031	16.026	5	16.031
Penyisihan (pembalikan) selama tahun berjalan	2.289	(5)	2.284	-	-	-
Saldo akhir tahun	**18.315**	**-**	**18.315**	**16.026**	**5**	**16.031**

14. AKTIVA LAIN-LAIN (lanjutan)

Amortisasi beban ditangguhkan yang dibebankan pada laporan laba rugi masing-masing sebesar Rp 542 untuk tahun 2002 dan Rp 659 untuk tahun 2001.

Taksiran pengembalian pajak penghasilan Universal sebesar Rp 4.568 pada tanggal 31 Desember 2001 telah diterima oleh Universal pada tanggal 23 Juli 2002 setelah dikurangi dengan kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp 245.

Tagihan lain-lain sebesar Rp 546,4 milyar merupakan tagihan kepada PT Era Giat Prima (EGP) yang timbul dari transaksi sebagai berikut:

- Pada tanggal 31 Desember 1998, dalam saldo penempatan pada pasar uang terdapat penempatan pada bank beku operasi dan bank yang diambil alih oleh Pemerintah Indonesia, yaitu PT Bank Dagang Nasional Indonesia Tbk (BDNI), PT Bank Umum Nasional Tbk (BUN) dan PT Bank Tiara Asia Tbk (Tiara) sebesar Rp 1.477 milyar meliputi pokok dan bunganya.

- Pada tanggal 11 Januari 1999, saldo penempatan tersebut di atas setelah diperhitungkan dengan hutang Bank kepada BDNI dan Tiara serta rugi selisih kurs yang diakui, berjumlah Rp 1.235 milyar dengan rincian: BDNI Rp 869,8 milyar, BUN Rp 327,3 milyar dan Tiara Rp 38,0 milyar. Pada tanggal tersebut, Bank mengadakan perjanjian pengalihan/"cessie" dengan EGP atas penempatan (money market) dan kontrak-kontrak swap milik Bank dengan jumlah pokok sebesar Rp 798,1 milyar, yang terdiri dari Rp 598,1 milyar pada BDNI, dan Rp 200,0 milyar pada BUN. Jumlah pokok tersebut beserta bunganya dialihkan kepada EGP dan sebagai kompensasinya EGP akan menyerahkan kepada Bank surat berharga senilai Rp 798,1 milyar. Bank juga mengadakan perjanjian pengalihan/"cessie" dengan PT Persada Harum Lestari (PHL) atas kontrak swap dengan jumlah pokok sebesar Rp 38,0 milyar pada Tiara. Jumlah tersebut beserta bunganya dialihkan kepada PHL dan sebagai kompensasinya PHL akan menyerahkan kepada Bank surat berharga senilai Rp 38,0 milyar.

- Pada tanggal 29 Maret 1999, EGP memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan penagihan atas tagihannya kepada BDNI dan BUN. Pada tanggal 1 Juni 1999, Bank menerima pembayaran dari Bank Indonesia, sesuai dengan surat dari BPPN, sebesar Rp 904,6 milyar atas tagihan kepada BDNI. Pada tanggal 9 Juni 1999, Bank mengadakan perjanjian penyelesaian dengan EGP dan berdasarkan perjanjian tersebut, Bank mentransfer ke rekening EGP dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 546,4 milyar sebagai penyelesaian menyeluruh dari perjanjian pengalihan/"cessie" atas tagihan BDNI sehingga jumlah bersih yang diterima Bank atas penempatan pada BDNI adalah sebesar Rp 358,2 milyar. Tagihan BUN belum diselesaikan dan Bank menerima surat dari EGP tertanggal 11 Juni 1999, yang menyatakan bahwa EGP akan menyerahkan surat berharga sebesar Rp 200,0 milyar.

- Pada tanggal 9 Juni 1999, Bank mengadakan perjanjian penyelesaian dengan PHL di mana kewajiban PHL untuk menyerahkan surat berharga sebesar Rp 38,0 milyar diubah menjadi pembayaran dana sebesar Rp 22,8 milyar melalui cek/bilyet giro yang dapat dicairkan selambat-lambatnya pada tanggal 17 Juni 1999. Bank telah menerima cek/bilyet giro tersebut di atas sebesar Rp 22,8 milyar pada tanggal 17 Juni 1999. Pada tanggal 19 Agustus 1999, PHL meminta Bank dan Bank telah melaksanakan transfer dana sejumlah Rp 22,8 milyar ke rekening Bank Bali Escrow qq EGP.

- Dari tanggal 16 Agustus sampai dengan 19 Agustus 1999, Bank menerima transfer dana atas nama Bank Bali Escrow qq EGP yang keseluruhannya berjumlah Rp 523,6 milyar. Dengan demikian saldo rekening ini menjadi Rp 546,4 milyar yang dibukukan sebagai Rekening Bank Bali Escrow qq EGP pada Kewajiban Segera (lihat Catatan 15).

14. AKTIVA LAIN-LAIN (lanjutan)

- Pada tanggal 15 Oktober 1999, perjanjian pengalihan/"cessie" dengan EGP sebagaimana diuraikan di atas dibatalkan dengan Surat Keputusan Ketua BPPN No. SK-423/BPPN/1099. Berdasarkan surat keputusan tersebut, Bank diminta untuk melakukan tindakan/upaya agar dana sebesar Rp 904,6 milyar yang diterima sebagai pembayaran dalam rangka penjaminan pemerintah dapat dikuasai dan dimiliki oleh Bank. Oleh karena itu, Bank menagih kembali kepada EGP sebesar Rp 546,4 milyar dan membukukan tagihan tersebut sebagai Tagihan Lain-lain. Selain itu, kewajiban EGP untuk menyerahkan surat berharga sebesar Rp 200,0 milyar menjadi batal dan timbul kembali tagihan kepada BUN. Pada pihak lain, karena tagihan kepada BUN tidak dapat direalisasikan, maka Bank membentuk penyisihan kerugian atas tagihan tersebut.

- Pada tanggal 30 November 1999, perjanjian pengalihan/"cessie" dengan PHL sebagaimana diuraikan di atas dibatalkan dengan Surat Keputusan Ketua BPPN No. SK-464/BPPN/1199. Berdasarkan surat keputusan tersebut, Bank diminta untuk melakukan tindakan/upaya guna memastikan agar pelaksanaan perjanjian tersebut berlangsung sedemikian rupa seperti layaknya tidak pernah diadakan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, Bank membukukan kembali tagihan kepada Tiara.

- Sesuai dengan surat ketua BPPN kepada Bank No. PB-805/BPPN/1299 dan surat No. PB-804/BPPN/1299, keduanya tertanggal 28 Desember 1999 serta surat No. PB-158/BPPN/0200 tanggal 23 Februari 2000, BPPN menjamin realisasi tagihan kepada EGP sebesar Rp 546,4 milyar tersebut di atas. BPPN juga menyatakan bahwa tagihan kepada Tiara termasuk dalam skema penjaminan pemerintah.

- Penempatan pada BUN sebesar Rp 204,3 milyar telah dialihkan seluruhnya kepada BPPN, sesuai dengan Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang tanggal 29 September 2000 yang telah dilegalisasi oleh Notaris No. 1181/leg/2000 (lihat Catatan 10m).

- Penempatan pada Tiara sebesar US$ 10 juta telah dilunasi oleh Tiara pada tanggal 11 September 2000 dan Bank juga telah melunasi call money pada Tiara sebesar Rp 39 milyar pada tanggal yang sama.

Agunan diambil alih terutama terdiri dari tanah dan bangunan.

15. KEWAJIBAN SEGERA

Akun ini terdiri dari:

	2002	2001
Rupiah		
Rekening Bank Bali Escrow qq EGP (lihat Catatan 14)	546.466	546.466
Rekening kreditur	115.734	18.877
Hutang pajak penghasilan pasal 21, 23, 26, 4 ayat 2 dan pajak pertambahan nilai	43.589	47.473
Hutang kartu kredit dan debit	15.856	9.728

15. KEWAJIBAN SEGERA (lanjutan)

	2002	2001
Hutang premi	2.021	1.009
Kiriman uang	920	14.816
Hutang dividen	127	356
Lain-lain	47.009	22.870
	771.722	661.595
Valuta Asing		
Rekening kreditur	189.465	2.523
Kiriman uang	107.885	93.514
Hutang pajak penghasilan pasal 23	50	14
Lain-lain	1.355	244
	298.755	96.295
Jumlah	**1.070.477**	**757.890**

16. GIRO

Akun ini terdiri dari:

	2002		
	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah
Pihak ketiga	2.551.539	1.616.541	4.168.080
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	5.519	1.252	6.771
Jumlah	**2.557.058**	**1.617.793**	**4.174.851**

	2001		
	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah
Pihak ketiga	1.908.060	1.495.878	3.403.938
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	491.047	174.634	665.681
Jumlah	**2.399.107**	**1.670.512**	**4.069.619**

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada tahun 2002 adalah anak perusahaan, perusahaan asosiasi dan karyawan kunci dari Bank sedangkan pada tahun 2001 adalah anak perusahaan, pemegang saham, perusahaan asosiasi dan karyawan kunci dari Bank (lihat Catatan 26).

Giro yang diterima dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001 masing-masing berjumlah Rp 6.771 dan Rp 665.681 atau sekitar 0,02% dan 2,46% masing-masing dari jumlah kewajiban.

16. GIRO (lanjutan)

Giro yang diblokir, yang umumnya digunakan untuk jaminan atas transaksi dengan Bank, pada tanggal 31 Desember 2002 adalah Rp 7.344, US$ 1.402.472 dan SGD 1.680 dan pada tanggal 31 Desember 2001 adalah Rp 69.281 dan US$ 961.298.

Suku bunga rata-rata tahunan giro dalam Rupiah adalah berkisar antara 2,75% sampai dengan 11,96% pada tahun 2002 dan antara 2,50% sampai dengan 6,50% pada tahun 2001, sedangkan suku bunga rata-rata tahunan giro dalam valuta asing adalah berkisar antara 1,95% sampai dengan 2,74% pada tahun 2002 dan antara 3,00% sampai dengan 4,42% pada tahun 2001.

17. TABUNGAN

Akun ini terdiri dari:

	2002	2001
Tabungan Si Jempol	1.838.821	697.110
Tabungan Bali Turbo	577.939	306.988
Flexi Dana Preferred	137.682	115.906
Tabungan Payroll	67.259	36.004
Tabungan Baliprogres	62.105	569.009
Flexi Save	28.589	330.839
Flexi Save Junior	7.347	7.826
Rancang Guna	3.679	1.267
Tabungan Ambisi	1.593	7.183
Flexi Prima	-	270.297
Tabungan Tumbuh	-	218.724
Ekstra Save	-	87.818
Tabungan Tahapan	-	80.246
Tabungan Bali Direct	-	36.841
Tabungan Kreatif	-	28.051
Tabungan Media Aktif	-	20.419
Tabungan Tampan dan Cantik	-	17.014
Tabungan Patriot	-	14.838
Ekstra Karya	-	14.375
Tabungan Karyawan	-	9.288
Flexi Karya	-	7.452
Tabungan Kesejahteraan	-	1.141
Jumlah	**2.725.014**	**2.878.636**

Tabungan dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa-karyawan kunci pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001 masing-masing berjumlah Rp 5.703 dan Rp 7.332 atau sekitar 0,02%, dan 0,03% masing-masing dari jumlah kewajiban.

Tabungan yang diblokir pada tahun 2002 dan 2001 masing-masing sebesar Rp 8.628 dan Rp 15.693, dan umumnya diblokir karena kesalahan PIN (Personal Identification Number), kartu hilang, adanya program bundling antara kartu kredit dengan produk tabungan tertentu serta adanya pencairan deposito yang dikreditkan ke rekening tabungan atas perintah nasabah sendiri namun sertifikat deposito belum diserahkan oleh nasabah.

17. TABUNGAN (lanjutan)

Suku bunga rata-rata tahunan tabungan masing-masing berkisar antara 8,60% sampai dengan 11,25% pada tahun 2002 dan antara 8,74% sampai dengan 9,50% pada tahun 2001.

18. DEPOSITO BERJANGKA

Akun ini terdiri dari:

	2002		
	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah
Pihak ketiga	13.456.756	1.470.387	14.927.143
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	4.232	12.620	16.852
Jumlah	**13.460.988**	**1.483.007**	**14.943.995**

	2001		
	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah
Pihak ketiga	12.643.677	1.848.589	14.492.266
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	424.703	314.491	739.194
Jumlah	**13.068.380**	**2.163.080**	**15.231.460**

Rincian deposito berjangka bukan bank berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	2002		
	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah
1 bulan	11.063.391	1.348.938	12.412.329
3 bulan	2.131.385	52.399	2.183.784
6 bulan	160.362	7.565	167.927
12 bulan	76.165	74.105	150.270
Lebih dari 12 bulan	29.685	-	29.685
Jumlah	**13.460.988**	**1.483.007**	**14.943.995**

	2001		
	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah
1 bulan	6.349.240	1.001.660	7.350.900
3 bulan	5.978.374	1.059.595	7.037.969
6 bulan	66.622	20.102	86.724
12 bulan	92.652	5.807	98.459
Lebih dari 12 bulan	33.247	-	33.247
Primex *	548.245	75.916	624.161
Jumlah	**13.068.380**	**2.163.080**	**15.231.460**

* Data tidak tersedia dari bank yang menggabungkan diri

18. DEPOSITO BERJANGKA (lanjutan)

Rincian deposito berjangka berdasarkan jangka waktu adalah sebagai berikut:

	2002	2001
Rupiah		
1 bulan	10.035.998	7.772.024
2 bulan	6	-
3 bulan	2.885.411	3.476.198
6 bulan	143.880	1.468.592
12 bulan	382.193	267.107
Lebih dari 12 bulan	13.500	84.459
	13.460.988	13.068.380
Valuta Asing		
1 bulan	1.274.286	1.352.214
3 bulan	95.573	661.454
6 bulan	15.686	113.001
12 bulan	97.462	32.348
Lebih dari 12 bulan	-	4.063
	1.483.007	2.163.080
Jumlah	**14.943.995**	**15.231.460**

Deposito berjangka yang diblokir pada tahun 2002 dan 2001 masing-masing sebesar Rp 859.828 dan Rp 832.943 dan umumnya diblokir karena digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan dan bank garansi oleh Bank (lihat Catatan 10).

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada tahun 2002 adalah perusahaan asosiasi dan karyawan kunci dari Bank sedangkan pada tahun 2001 adalah anak perusahaan, pemegang saham, perusahaan asosiasi dan karyawan kunci dari Bank (lihat Catatan 26).

Deposito berjangka yang diterima dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001 masing-masing berjumlah Rp 16.852 dan Rp 739.194 atau sekitar 0,06% dan 2,73% masing-masing dari jumlah kewajiban.

Suku bunga tahunan berkisar antara 13,75% sampai dengan 17,09% pada tahun 2002 dan antara 14,69% sampai dengan 17,75% pada tahun 2001 untuk deposito berjangka dalam Rupiah, serta berkisar antara 2,88% sampai dengan 4,00% pada tahun 2002 dan antara 4,42% sampai dengan 6,08% pada tahun 2001 untuk deposito berjangka dalam valuta asing.

19. EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI

Rincian efek yang dijual dengan janji dibeli kembali adalah sebagai berikut:

	2001				
	Jangka Waktu	Tanggal Jatuh Tempo	Harga Beli Kembali	Beban Bunga yang Belum Diamortisasi	Nilai Bersih
Obligasi Pemerintah Nomor Seri:					
FR0002	1 bulan	10 Januari 2002	10.166	48	10.118
VR0001	1 bulan	11 Januari 2002	7.115	34	7.081
VR0002	3 bulan	22 Februari 2002	2.237	34	2.203
VR0002	3 bulan	26 Februari 2002	3.140	47	3.093
VR0002	3 bulan	26 Februari 2002	2.733	81	2.652
VR0003	3 bulan	26 Februari 2002	3.254	96	3.158
VR0004	1 bulan	10 Januari 2002	2.887	34	2.853
VR0005	1 bulan	10 Januari 2002	3.467	41	3.426
VR0006	1 bulan	10 Januari 2002	3.411	40	3.371
VR0007	1 bulan	10 Januari 2002	4.106	48	4.058
VR0007	3 bulan	26 Februari 2002	11.162	167	10.995
VR0008	1 bulan	10 Januari 2002	3.829	45	3.784
VR0009	1 bulan	10 Januari 2002	575	7	568
VR0009	3 bulan	26 Februari 2002	11.033	166	10.867
VR0009	3 bulan	19 Maret 2002	52.688	2.300	50.388
VR0010	3 bulan	14 Maret 2002	105.375	4.300	101.075
VR0011	3 bulan	11 Maret 2002	210.250	7.858	202.392
VR0014	1 bulan	18 Januari 2002	15.241	137	15.104
VR0014	3 bulan	22 Februari 2002	4.337	65	4.272
VR0016	3 bulan	22 Februari 2002	23.530	353	23.177
VR0016	3 bulan	27 Februari 2002	13.920	209	13.711
VR0016	3 bulan	28 Februari 2002	34.160	513	33.647
Jumlah			**528.616**	**16.623**	**511.993**

Pada saat jatuh tempo, efek yang dijual dengan janji dibeli kembali sudah dibeli kembali (lihat Catatan 8).

20. KEWAJIBAN AKSEPTASI

Kewajiban akseptasi berdasarkan counterparty merupakan kewajiban kepada nasabah dan Bank yang bukan merupakan pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai berikut:

	2002	2001
Rupiah		
Nasabah	599	-
Valuta Asing		
Bank	54.637	62.770
Nasabah	1.802	-
	56.439	62.770
Jumlah	**57.038**	**62.770**

20. KEWAJIBAN AKSEPTASI (lanjutan)

Kewajiban akseptasi berdasarkan jangka waktu jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	2002	2001
Rupiah		
1 - 3 bulan	106	-
3 - 6 bulan	490	-
6 - 12 bulan	3	-
	599	-
Valuta Asing		
Kurang dari 1 bulan	-	1.254
1 - 3 bulan	1.448	20.145
3 - 6 bulan	32.230	38.345
6 - 12 bulan	21.750	2.831
Lebih dari 12 bulan	1.011	195
	56.439	62.770
Jumlah	**57.038**	**62.770**

21. HUTANG PAJAK

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum beban (penghasilan) pajak seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dengan taksiran laba (rugi) fiskal untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001 adalah sebagai berikut:

	2002	2001
Laba (rugi) komersial Bank sebelum beban (penghasilan) pajak	(856.566)	136.975
Beda temporer		
Beban merger	248.134	-
Laba penjualan Anak perusahaan	74.928	(37.041)
Rugi penghapusan aktiva tetap	34.332	(1.385)
Beban tenaga kerja dan tunjangan	14.547	2.006
Laba penjualan aktiva tetap	139	240
Beban sewa	99	2.567
Penyisihan kerugian agunan diambil alih	(70.739)	1.782
Keuntungan bersih penilaian efek yang diperdagangkan	(54.240)	-
Penyisihan kerugian aktiva produktif - bersih	(44.425)	(46.377)
Penyusutan aktiva tetap	(29.294)	(15.326)
Bagian atas laba bersih Anak perusahaan dan perusahaan asosiasi - bersih	(20.354)	(27.295)
Amortisasi beban ditangguhkan	(1.197)	(3.275)
Pendapatan dividen	-	2.203
Kerugian restrukturisasi pinjaman	-	16

21. HUTANG PAJAK (lanjutan)

	2002	2001
Beda tetap		
Beban merger	203.714	-
Sumbangan dan pemberian kenikmatan kepada karyawan	2.209	752
Sanksi administrasi	1.017	1.593
Pendapatan sewa	(6.680)	(4.347)
Pendapatan reksadana	(705)	-
Pendapatan dividen	-	(1.198)
Taksiran laba (rugi) fiskal - Bank	**(505.081)**	**11.890**

Laba fiskal Bank tahun 2001 masih dapat dikompensasikan dengan akumulasi rugi fiskal di tahun-tahun sebelumnya.

Taksiran penghasilan kena pajak tahun 2001 seperti tersebut di atas adalah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan.

Perhitungan beban (penghasilan) pajak Bank adalah sebagai berikut:

	2002	2001
Taksiran penghasilan pajak tangguhan		
Pengaruh beda temporer pada tarif pajak maksimum (30%)		
Keuntungan bersih penilaian efek yang diperdagangkan	16.272	-
Penyisihan kerugian agunan diambil alih	21.222	(535)
Amortisasi beban ditangguhkan	358	983
Rugi fiskal	(74.839)	(15.392)
Penyisihan kerugian aktiva produktif - bersih	(13.327)	13.913
Kewajiban lain-lain	(4.364)	(602)
Aktiva tetap	(1.553)	4.941
Beban sewa	(30)	(770)
Kerugian restrukturisasi pinjaman	-	(5)
Lain-lain	7.916	2.174
Beban (penghasilan) pajak - tangguhan	(48.345)	4.707

21. HUTANG PAJAK (lanjutan)

Pengaruh pajak atas beda temporer yang signifikan antara pelaporan komersial dan pajak adalah sebagai berikut

	2002	2001
Aktiva pajak tangguhan		
Rugi fiskal	186.134	111.295
Penyisihan kerugian aktiva produktif - bersih	93.506	76.401
Aktiva tetap	57.079	54.747
Penyisihan kerugian agunan diambil alih	47.263	68.485
Kewajiban lain-lain	18.065	12.820
Keuntungan bersih penilaian efek yang diperdagangkan	-	450
Lain-lain	-	19
Jumlah	402.047	324.217
Kewajiban pajak tangguhan		
Keuntungan bersih penilaian efek yang diperdagangkan	16.522	-
Beban ditangguhkan	1.907	1.549
Beban sewa	684	731
Lain-lain	-	2
Jumlah	19.113	2.282
Aktiva pajak tangguhan - bersih	**382.934**	**321.935**

Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan mencakup konsekuensi pajak di masa mendatang sehubungan dengan perbedaan antara dasar laporan komersial dan fiskal dari aktiva dan kewajiban. Aktiva pajak tangguhan diakui sepanjang besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang dapat menyebabkan aktiva pajak tangguhan dipulihkan. Manajemen Bank berpendapat bahwa aktiva pajak tangguhan dapat terpulihkan seluruhnya dengan penghasilan kena pajak di masa mendatang.

Di dalam mutasi aktiva pajak tangguhan - Bank termasuk mutasi pajak tangguhan 4 BPP (kecuali Artamedia dan Patriot) dari 31 Desember 2001 sampai dengan 30 September 2002 yang tercatat di dalam akun Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali sebesar Rp 12.654.

Berdasarkan pemeriksaan aktiva pajak tangguhan pada akhir tahun, manajemen Bank berpendapat bahwa pajak tangguhan yang timbul dari beban merger sejumlah Rp 266.861 pada tanggal 31 Desember 2002, mungkin tidak dapat digunakan untuk mengurangi laba kena pajak di masa yang akan datang, oleh karena itu, aktiva pajak tangguhan tersebut tidak dibukukan.

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan No. 00153/406/00/054/02 tanggal 25 Juni 2002, rugi neto Bank pada tahun 2000 adalah sebesar Rp 388.528.

21. HUTANG PAJAK (lanjutan)

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan No. 00145/406/99/054/01 tanggal 26 Juni 2001, penghasilan neto Bank pada tahun 1999 seharusnya adalah sebesar Rp 292.145. Bank telah mengajukan keberatan atas SKPLB tersebut. Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah XIX Wajib Pajak Besar No. KEP/002/WPJ.19/BD.0503/2002 tanggal 17 September 2002, Direktur Jenderal Pajak menolak pengajuan keberatan Bank atas SKP tersebut.

22. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

Rincian surat-surat berharga yang diterbitkan adalah sebagai berikut:

	2002	2001
Rupiah		
Surat Berharga Pasar Uang		
Pihak ketiga	105.000	-
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	298.809	-
Valuta Asing		
Draft yang diterbitkan	8.969	7.888
Sertifikat deposito dengan bunga mengambang (FRCD)	-	260.000
Jumlah	**412.778**	**267.888**

Pada tanggal 15 Agustus 1997, Bank menerbitkan sertifikat deposito yang dapat diperdagangkan dengan tingkat bunga mengambang (Negotiable Floating Rate Certificates of Deposit)/FRCD sejumlah US$ 30.000.000, dengan sertifikat deposito masing-masing senilai US$ 250.000 pada sindikasi lembaga keuangan luar negeri. Suku bunga tahunan sertifikat deposito tersebut adalah sebesar 0,85% di atas LIBOR dan terhutang setiap bulan Februari dan Agustus. Sertifikat deposito ini jatuh tempo pada bulan Agustus 2002. Pada tanggal 15 Juni 2001, FRCD tersebut dilunasi sebesar US$ 5.000.000.

Bank telah melunasi kembali FRCD masing-masing sebesar US$ 8 juta pada tanggal 3 Juni 2002 dan sebesar US$ 17 juta pada tanggal 28 Agustus 2002.

Suku bunga tahunan FRCD tersebut masing-masing berkisar antara 2,91% sampai dengan 4,41% pada tahun 2002 dan antara 4,41% sampai dengan 7,73% pada tahun 2001.

Suku bunga tahunan Surat Berharga Pasar Uang berkisar antara 11,75% sampai dengan 13,25% pada tahun 2002.

23. PINJAMAN YANG DITERIMA

Rincian pinjaman yang diterima adalah sebagai berikut:

23. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

	2002	2001
Rupiah		
a) Pinjaman penerusan (two-step loans)	198.858	231.285
b) Bank Indonesia	670.770	641.380
c) Penempatan oleh bank lain	-	1.050.000
	869.628	1.922.665
Valuta Asing		
a) Pinjaman penerusan (two-step loans)	54.274	74.534
c) Penempatan oleh bank lain		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	189.046	-
Pihak ketiga	-	161.200
d) Hutang jangka panjang	361.132	462.800
	604.452	698.534
Jumlah	**1.474.080**	**2.621.199**

a) Pinjaman penerusan (Two-Step Loans)

Akun ini terdiri dari:

	2002	2001
Rupiah		
1) Japan Bank for International Coorporation (dahulu Export-Import Bank of Japan)	189.379	218.614
2) Asian Development Bank	4.270	5.978
3) International Bank for Reconstruction and Development	5.209	6.693
	198.858	231.285
Valuta Asing		
2) Asian Development Bank	54.274	74.534
Jumlah	**253.132**	**305.819**

23. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a) Pinjaman penerusan (Two-Step Loans) (lanjutan)

1) Japan Bank for International Coorperation (JBIC)

Bank (melalui Bank Indonesia) memperoleh fasilitas-fasilitas kredit dengan jumlah maksimum sebesar JP¥ 4.080.000.000 dari JBIC. Fasilitas-fasilitas kredit tersebut terdiri dari empat tahap, yaitu JBIC tahap kedua dengan jumlah JP¥ 1.000.000.000 sejak tanggal 10 November 1989, JBIC tahap ketiga dengan jumlah JP¥ 1.000.000.000 sejak tanggal 4 Februari 1991, JBIC tahap keempat dengan jumlah JP¥ 1.100.000.000 sejak tanggal 28 Januari 1992 dan JBIC tahap kelima dengan jumlah JP¥ 980.000.000 sejak tanggal 16 Juni 1992.

Pinjaman ini wajib dibayar dalam angsuran tengah-tahunan (setelah tenggang waktu tiga tahun) dimulai pada tanggal 1 April 1993, 15 Januari 1994 dan 15 Juli 1995 masing-masing untuk tahap kedua, ketiga dan keempat. Perjanjian pendanaan ini meliputi jangka waktu 15 tahun kecuali untuk tahap kelima yang meliputi jangka waktu 11 tahun dan wajib dibayar dalam angsuran tengah-tahunan (setelah tenggang waktu dua tahun) dimulai pada tanggal 15 September 1994.

Berdasarkan Akta Penerusan Pinjaman tanggal 13 Februari 1995, Bank mendapat tambahan fasilitas pinjaman dari JBIC sebesar JP¥ 600.000.000. Pinjaman ini meliputi jangka waktu 15 tahun dan wajib dibayar dalam angsuran tengah-tahunan (setelah tenggang waktu tiga tahun) dimulai pada tanggal 15 Desember 1997.

Berdasarkan Akta Penerusan Pinjaman tanggal 21 November 1996, Bank mendapat tambahan fasilitas pinjaman dari JBIC sebesar JP¥ 2.200.000.000. Pinjaman ini meliputi jangka waktu 14 tahun dan wajib dibayar dalam angsuran tengah-tahunan (setelah tenggang waktu tiga tahun) dimulai pada tanggal 15 Februari 2000.

Berdasarkan Akta Penerusan Pinjaman tanggal 25 Juli 1996, Universal mendapat fasilitas pinjaman dari JBIC sebesar JP¥ 1.710.000.000. Pinjaman ini meliputi jangka waktu 14 tahun dan wajib dibayar dalam angsuran tengah-tahunan (setelah tenggang waktu tiga tahun) dimulai pada tanggal 15 Februari 2000. Pinjaman ini dikenakan suku bunga sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia untuk periode 3 bulan.

Berdasarkan Akta Penerusan Pinjaman tanggal 5 Februari 1994, Primex mendapat fasilitas pinjaman dari JBIC sebesar JP¥ 570.000.000. Pinjaman ini meliputi jangka waktu 11 tahun dan wajib dibayar dalam angsuran tengah-tahunan (setelah tenggang waktu dua tahun) dimulai pada tanggal 15 Juni 1996. Pinjaman ini dikenakan suku bunga sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia untuk periode 6 bulan.

Berdasarkan Akta Penerusan Pinjaman tanggal 21 November 1996, Primex mendapat tambahan fasilitas pinjaman dari JBIC sebesar JP¥ 1.160.000.000. Pinjaman ini meliputi jangka waktu 14 tahun dan wajib dibayar dalam angsuran tengah-tahunan (setelah tenggang waktu tiga tahun) dimulai pada tanggal 15 Februari 2000. Pinjaman ini dikenakan suku bunga sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia untuk periode 6 bulan.

Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan yang berkisar antara 9,29% sampai dengan 17,41% pada tahun 2002 dan antara 8,30% sampai dengan 15,41% pada tahun 2001.

23. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a) Pinjaman penerusan (Two-Step Loans) (lanjutan)

2) Asian Development Bank (ADB)

Rupiah

Bank (melalui Bank Indonesia) memperoleh fasilitas kredit dengan jumlah maksimum sebesar US$ 15.000.000 sejak tanggal 24 Januari 1990 dari ADB. Pinjaman ini meliputi jangka waktu 15 tahun dan wajib dibayar dalam angsuran tengah-tahunan (setelah tenggang waktu tiga tahun) dimulai pada tanggal 15 Juli 1993.

Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 10,18% sampai dengan 10,43% pada tahun 2002 dan antara 9,01% sampai dengan 9,67% pada tahun 2001.

Valuta Asing

Bank (melalui Bank Indonesia) memperoleh fasilitas kredit dengan jumlah maksimum sebesar US$ 22.222.222 sejak tanggal 29 Desember 1993 dari ADB. Pinjaman ini meliputi jangka waktu 15 tahun dan wajib dibayar dalam angsuran tengah-tahunan (setelah tenggang waktu empat tahun) dimulai pada tanggal 1 Agustus 1997.

Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan antara 6,84% sampai dengan 7,19% pada tahun 2002 dan 7,20% pada tahun 2001.

3) International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

Kredit investasi ini merupakan kredit jangka panjang kepada nasabah yang dibiayai oleh IBRD melalui Bank Indonesia dengan jumlah maksimum sebesar US$ 8.000.000 sejak tanggal 27 Juli 1989 dan digunakan untuk membiayai industri-industri kecil dan menengah di Indonesia. Pinjaman yang digunakan oleh Bank adalah sebesar US$ 5.700.000. Pinjaman yang meliputi jangka waktu 15 tahun ini wajib dibayar dalam angsuran tengah-tahunan (setelah tenggang waktu tiga tahun) dimulai pada tanggal 1 Oktober 1992.

Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan antara 10,38% sampai dengan 10,43% pada tahun 2002 dan antara 9,25% sampai dengan 9,82% pada tahun 2001.

Bank memperoleh fasilitas kredit lainnya dalam rangka "Agricultural Financing Project" melalui Bank Indonesia dengan jumlah maksimum sebesar US$ 5.300.000 sejak tanggal 20 Juni 1995. Fasilitas ini meliputi jangka waktu 12 tahun dan wajib dibayar dalam angsuran tengah-tahunan (setelah tenggang waktu 3 tahun) dimulai pada tanggal 30 September 1998.

Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 10,38% sampai dengan 13,86% pada tahun 2002 dan antara 11,62% sampai dengan 12,53% pada tahun 2001.

b) Bank Indonesia

Kredit likuiditas ini merupakan fasilitas-fasilitas kredit dari Bank Indonesia untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada nasabah lokal dalam bentuk sebagai berikut:

23. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

b) Bank Indonesia (lanjutan)

	2002	2001
(1) Kredit Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA)	670.215	640.456
(2) Lain-lain	555	924
Jumlah	**670.770**	**641.380**

(1) Kredit Likuiditas Jangka Panjang Universal merupakan pinjaman yang diperoleh dari Bank Indonesia untuk kemudian disalurkan kepada pengusaha kecil dengan sistem penerusan Kredit Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA). Pinjaman ini jatuh tempo pada berbagai tahun sampai dengan tahun 2010. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 9,00% pada tahun 2002 dan 2001.

(2) Termasuk dalam fasilitas lain-lain adalah fasilitas sebesar Rp 500 untuk jangka waktu maksimal 20 tahun yang diperoleh bank dari BI pada tanggal 16 Mei 1997 dalam rangka pelaksanaan pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) (Two-Step Loans). Saldo pinjaman tersebut pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001 masing-masing sebesar Rp 357 dan Rp 381.

Ketentuan tingkat bunga atas pinjaman tersebut adalah:

	Bank Indonesia kepada Bank (Artamedia)	Bank (Artamedia) kepada nasabah
KPR Sangat Sederhana Tipe 36	3,00%	8,50%
KPR Sederhana Tipe 18 dan 21	3,00%	11,00%
KPR Sederhana Tipe 27 dan 36	9,00%	14,00%

c) Penempatan oleh Bank Lain

Akun ini merupakan saldo penempatan oleh bank lain pada Bank. Suku bunga tahunan selama tahun berjalan adalah sebesar 1,25% pada tahun 2002 untuk penempatan oleh BPPN pada Bank dan sebesar 5,50% pada tahun 2001 untuk penempatan oleh bank lain pada Bank dalam valuta asing.

Pada tanggal 31 Desember 2001, penempatan oleh bank lain dalam mata uang Rupiah termasuk pinjaman jangka pendek yang diperoleh Universal dari beberapa bank dalam negeri sebesar Rp 1.050.000 yang dijamin dengan obligasi pemerintah dengan nilai nominal Rp 1.574.880 (lihat Catatan 8). Pinjaman jangka pendek ini jatuh tempo dalam beberapa tanggal mulai dari tanggal 14 Februari 2002 sampai dengan tanggal 11 Maret 2002. Pinjaman tersebut telah dilunasi. Suku bunga rata-rata pinjaman jangka pendek tersebut adalah 19% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2001, penempatan oleh bank lain dalam valuta asing sebesar Rp 10.400 merupakan pinjaman jangka pendek yang diperoleh Universal dari beberapa bank di Singapura yang jatuh tempo dalam beberapa tanggal sampai dengan tanggal 25 Agustus 2002. Pinjaman tersebut telah dilunasi. Suku bunga rata-rata pinjaman jangka pendek ini adalah 6% per tahun pada tahun 2002 dan 7% per tahun pada tahun 2001.

23. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

c) Penempatan oleh Bank Lain (lanjutan)

Selain pinjaman jangka pendek yang disebutkan di atas, pada tanggal 31 Desember 2001, Universal juga memiliki pinjaman jangka pendek dalam valuta asing sebesar Rp 78.000 yang diperoleh dari bank dalam negeri. Pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 27 Februari 2002 dan dijamin dengan obligasi pemerintah dengan nilai nominal sebesar Rp 158.730 (lihat Catatan 8). Pinjaman tersebut telah dilunasi. Suku bunga pinjaman ini adalah sebesar 6,25% per tahun.

d) Hutang Jangka Panjang

Hutang jangka panjang termasuk pinjaman "Revolving Credit Facility" yang diperoleh dari satu lembaga keuangan luar negeri dengan fasilitas pinjaman sejumlah US$ 30.000.000, US$ 20.000.000 dan US$ 15.000.000. Fasilitas ini dikenakan suku bunga tahunan masing-masing sebesar 1,00%, 1,00% dan 0,70% di atas LIBOR dan telah jatuh tempo pada tanggal 16 Oktober 1998, 13 Juli 2000 dan 12 September 2001. Berdasarkan perjanjian pinjaman, Bank diharuskan untuk mematuhi pembatasan-pembatasan tertentu, serta diharuskan memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu pula.

Pada tanggal 18 Agustus 1998, Bank mengadakan perjanjian "exchange offer" melalui dan dijamin oleh Bank Indonesia, di mana fasilitas pinjaman sejumlah US$ 96.787.142 yang berasal dari pinjaman "Revolving Credit Facility" sejumlah US$ 30.000.000 dan US$ 20.000.000 serta yang berasal dari bank lain sejumlah US$ 46.787.142 diubah menjadi kredit baru yang terbagi atas 4 (empat) "tranche" dengan jatuh tempo yang berbeda-beda sebagai berikut:

Tranche	Jumlah Fasilitas		Jatuh Tempo
1 tahun	US$	13.955.571	25 Agustus 1999
2 tahun		27.911.143	25 Agustus 2000
3 tahun		41.266.714	25 Agustus 2001
4 tahun		13.653.714	25 Agustus 2002

Bunga dari setiap "tranche" kredit baru dibayar setiap tengah tahunan dengan suku bunga sebesar 2,75%, 3,00%, 3,25% dan 3,50% di atas LIBOR 6 bulanan masing-masing untuk tranche 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan 4 tahun.

Fasilitas pinjaman yang sudah jatuh tempo pada tanggal 25 Agustus 1999 dan 2000 telah dilunasi dan fasilitas yang jatuh tempo pada tanggal 25 Agustus 2001 dan 2002 sudah dilunasi pada tanggal 25 Februari 2001.

Pada tanggal 25 Mei 1999, Bank mengadakan perjanjian "exchange offer" melalui dan dijamin oleh Bank Indonesia, di mana fasilitas pinjaman sejumlah US$ 15.000.000 diubah menjadi kredit baru yang terbagi atas 3 (tiga) "tranche" dengan jatuh tempo yang berbeda-beda sebagai berikut:

Tranche	Jumlah Fasilitas		Jatuh Tempo
1 tahun	US$	1.500.000	1 Juni 2002
2 tahun		6.750.000	1 Juni 2003
3 tahun		6.750.000	1 Juni 2004

Bunga dari setiap "tranche" kredit baru dibayar setiap tengah tahunan dengan suku bunga 2,25%, 2,375% dan 2,50% di atas LIBOR 6 bulanan masing-masing untuk tranche 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun.

23. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

d) Hutang Jangka Panjang (lanjutan)

Pada tanggal 10 September 1993, Bank menerbitkan sertifikat deposito yang dapat diperdagangkan dengan tingkat bunga mengambang (Negotiable Floating Rate Certificates of Deposit) sejumlah US$ 50.000.000, dengan sertifikat deposito masing-masing senilai US$ 250.000 pada sindikasi lembaga keuangan luar negeri. Suku bunga tahunan sertifikat deposito tersebut adalah sebesar 1,25% di atas LIBOR dan terhutang setiap akhir tengah tahunan. Sertifikat deposito yang jatuh tempo pada tanggal 28 Oktober 1996 ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 28 Oktober 1999 dengan suku bunga tahunan 0,78% di atas LIBOR. Pada tanggal 7 dan 8 Desember 1998 Floating Rate Certificates of Deposit masing-masing sebesar US$ 2.000.000 dan US$ 1.500.000 telah dibeli kembali.

Pada tanggal 25 Mei 1999 sertifikat deposito yang diperdagangkan dengan tingkat bunga mengambang (Negotiable Floating Rate Certificates of Deposit) sejumlah US$ 46.500.000 termasuk dalam Program Exchange Offer II, melalui dan dijamin oleh Bank Indonesia, di mana fasilitas tersebut diubah menjadi kredit baru yang terbagi atas 3 (tiga) "tranche" dengan jatuh tempo sebagai berikut:

Tranche	Jumlah Fasilitas		Jatuh Tempo
1 tahun	US$	4.350.000	1 Juni 2002
2 tahun		19.575.000	1 Juni 2003
3 tahun		22.575.000	1 Juni 2004

Selama tahun 2001, Exchange Offer II sebesar US$ 17.000.000 yang terdiri dari US$ 1.700.000, US$ 7.650.000 dan US$ 7.650.000 masing-masing untuk tranche 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun telah dibeli kembali.

Pada tanggal 4 Juni 2002, Bank telah melunasi sebagian Exchange Offer II yang telah jatuh tempo sebesar US$ 4.150.000.

Bunga dari setiap "tranche" kredit baru dibayar setiap tengah tahunan dengan suku bunga 2,25%, 2,375% dan 2,50% di atas LIBOR 6 bulanan masing-masing untuk tranche 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun.

24. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Estimasi kerugian atas transaksi komitmen dan kontinjensi yang lazim dalam kegiatan usaha bank dibentuk sebagai berikut:

	2002	2001
Rupiah		
Bank garansi	1.576	1.509
L/C yang masih berjalan	42	34
Valuta Asing		
Bank garansi	14.697	17.009
L/C yang masih berjalan	906	4.975
Jumlah	**17.221**	**23.527**

24. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Transaksi komitmen dan kontinjensi Universal yang mempunyai risiko kredit dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebesar Rp 51.318 pada tanggal 31 Desember 2001 (lihat Catatan 26 dan 29).

Kualitas transaksi komitmen dan kontinjensi dalam kegiatan usaha bank yang mempunyai risiko kredit adalah sebagai berikut:

Kualitas	2002			2001		
	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah
Lancar	120.846	82.668	203.514	144.216	123.722	267.938
Dalam perhatian khusus	737	285.544	286.281	-	331.805	331.805
Kurang lancar	2.000	-	2.000	668	10.041	10.709
Diragukan	84	-	84	-	-	-
Macet	31	499	530	-	2.651	2.651
Jumlah	123.698	368.711	492.409	144.884	468.219	613.103
Dikurangi penyisihan kerugian	1.618	15.603	17.221	1.543	21.984	23.527
Bersih	**122.080**	**353.108**	**475.188**	**143.341**	**446.235**	**589.576**

Perubahan penyisihan kerugian adalah sebagai berikut:

Keterangan	2002			2001		
	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah
Saldo awal tahun	1.543	21.984	23.527	4.488	54.029	58.517
Penyisihan (pembalikan) selama tahun berjalan	75	(3.276)	(3.201)	(2.945)	(42.493)	(45.438)
Selisih kurs	-	(3.105)	(3.105)	-	10.448	10.448
Saldo akhir tahun	**1.618**	**15.603**	**17.221**	**1.543**	**21.984**	**23.527**

25. KEWAJIBAN LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	2002	2001
Rupiah		
Biaya merger (lihat Catatan 3 dan 45)	1.318.518	-
Bunga masih harus dibayar	121.003	147.323
Kewajiban aktuaria atas kesejahteraan karyawan	105.114	37.524
Biaya masih harus dibayar	70.224	47.220
Kewajiban kepada BPPN	12.457	12.795
Uang muka diterima	11.982	7.664
Setoran jaminan	8.606	8.086

25. KEWAJIBAN LAIN-LAIN (lanjutan)

	2002	2001
Titipan setoran modal Artamedia	-	10.000
Pendapatan yang diterima di muka lainnya	-	2.631
Lain-lain	48.044	34.994
	1.695.948	308.237
Valuta Asing		
Bunga masih harus dibayar	5.925	14.982
Setoran jaminan	4.572	11.779
Biaya masih harus dibayar	289	249
Uang muka diterima	38	22
Lain-lain	2.436	3.009
	13.260	30.041
Jumlah	**1.709.208**	**338.278**

Cadangan biaya merger pada tanggal 30 September 2002 adalah cadangan atas biaya-biaya sehubungan dengan merger antara Bank dengan empat bank lainnya, di mana di dalam cadangan biaya merger tersebut termasuk juga kewajiban Universal kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) sehubungan dengan gugatan perdata BNI terhadap Universal dalam rangka pembiayaan sindikasi PT Riau Andalan Kertas. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 September 2002 telah memberikan keputusan bahwa jumlah kewajiban Universal kepada BNI adalah sebesar US$ 25.000.000 dan kewajiban tersebut harus diselesaikan selambat-lambatnya empat belas hari (14) hari kerja setelah tanggal efektif merger melalui bank hasil merger, yang dalam rangka merger tersebut akan mengambil alih kewajiban Universal. Kewajiban tersebut telah dibayar oleh Bank pada tanggal 21 Oktober 2002.

Kewajiban aktuaria atas kesejahteraan karyawan merupakan kewajiban aktuaria atas Bali sebesar Rp 18.560 dan Rp 4.013, Universal sebesar Rp 41.539 dan Rp 32.197 dan Artamedia sebesar Rp 1.314 dan Rp 1.314 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001, sedangkan Primex sebesar Rp 43.701 pada tanggal 31 Desember 2002 (lihat Catatan 36).

Kewajiban kepada BPPN merupakan penerimaan pembayaran yang diterima Universal dari debitur-debitur yang diserahkan kepada BPPN pada tanggal 28 Mei 1999 sehubungan dengan keikutsertaan Universal dalam program rekapitalisasi.

Titipan setoran modal merupakan setoran yang dilakukan oleh PT Arya Mitra pada tanggal 30 Oktober 2001 yang semula dimaksudkan untuk menambah modal disetor Artamedia. Namun demikian, rencana penambahan modal ini kemudian tidak jadi dilakukan.

26. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR-AGIO SAHAM

Dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pada tanggal 23 September 2002 yang berita acaranya telah diaktakan dengan akta notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M. No. 34 tanggal 23 September 2002 para pemegang saham telah menyetujui antara lain peningkatan modal dasar Bank dari semula sebesar Rp 800.000 menjadi Rp 2.600.000 dengan menambah jumlah saham kelas B menjadi sebanyak 452.799.416.700. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. C-18423.HT.01.04.TH.2002 tanggal 24 September 2002. Pengumuman perubahan anggaran dasar tersebut telah diumumkan dalam lembaran berita negara.

26. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR-AGIO SAHAM (lanjutan)

Dalam rapat umum luar biasa para pemegang saham pada tanggal 27 September 2002 yang berita acaranya telah diaktakan dengan akta notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M No. 45 tanggal 27 September 2002, para pemegang saham telah menyetujui antara lain:

1. Penggabungan usaha Bank, Universal, Primex, Artamedia dan Patriot dengan ketentuan dalam penggabungan tersebut, Bank bertindak sebagai Bank yang menerima penggabungan atau Bank Hasil Penggabungan, sedangkan Bank Peserta Penggabungan lainnya di luar Bank bertindak sebagai Bank yang Menggabungkan Diri sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam Rancangan Penggabungan dan Konsep Akta Merger.
2. Rancangan Penggabungan dan Konsep Akta Merger yang telah disusun bersama oleh Direksi Bank dan Tim Pengelola Bank yang Menggabungkan Diri.
3. Peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor penuh dari Rp 668.646 menjadi Rp 1.300.534 dengan cara mengeluarkan saham baru kelas B dari portepel yang terdiri dari:

   (i) 15.266.453.664 saham baru kelas B, masing-masing dengan nilai nominal Rp 5 per saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 76.332 kepada para pemegang saham Universal sebagai hasil konversi saham mereka dalam Universal menjadi saham mereka di Bank Hasil Penggabungan sebagai konsekuensi dari Penggabungan.

   (ii) 111.111.111.111 saham baru Kelas B kepada BPPN dengan nilai nominal Rp 5 per saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 555.556 dengan cara penempatan terbatas sesuai Peraturan BAPEPAM No. IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan uang pemasukan seluruhnya Rp 4.600.000.
4. Pengubahan nama Bank menjadi PT Bank Permata Tbk.
5. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Akta No. 45 tersebut, telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. C-18778.HT.01.04.TH.2002 tanggal 30 September 2002. Pengumuman perubahan akta tersebut telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara.

Sehubungan dengan proses peleburan usaha, pada tanggal 27 September 2002, BPPN telah menyetorkan dana sebesar Rp 4.600.000 yang disajikan sebagai akun Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sebesar Rp 555.556 dan Agio Saham sebesar Rp 4.044.444. Kemudian sebagian dari dana tersebut sebesar Rp 1.863.256 digunakan untuk membeli Obligasi Pemerintah (lihat Catatan 8).

Rincian pemegang saham adalah sebagai berikut:

	2002			
	Jumlah Lembar Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham	Kelas A dengan nilai nominal Rp 500	Kelas B dengan nilai nominal Rp 5	Persentase Pemilikan	Jumlah
Badan Penyehatan Perbankan Nasional	-	176.790.314.903	91,33%	883.952
Negara Republik Indonesia	-	12.281.185.540	6,34	61.406
Masyarakat	672.005.833	3.834.641.799	2,33	355.176
Jumlah	**672.005.833**	**192.906.142.242**	**100,00%**	**1.300.534**

26. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR-AGIO SAHAM (lanjutan)

	2001			
	Jumlah Lembar Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham	Kelas A dengan nilai nominal Rp 500	Kelas B dengan nilai nominal Rp 5	Persentase Pemilikan	Jumlah
Badan Penyehatan Perbankan Nasional	-	66.011.335.917	98,23%	330.057
Masyarakat	672.005.833	517.241.550	1,77	338.589
Jumlah	**672.005.833**	**66.528.577.467**	**100,00%**	**668.646**

Kepemilikan BPPN berasal dari kepemilikan negara yang dilakukan melalui mekanisme Penempatan Modal Sementara (PMS) pada saat dilakukannya Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III Bank dan penyuntikan modal dalam rangka merger 5 Bank (lihat Catatan 3).

Kepemilikan Negara Republik Indonesia dilakukan melalui mekanisme Penempatan Modal Negara (PMN) pada tanggal 28 Mei 1999 yaitu saat berlangsungnya proses rekapitalisasi atas 4 Bank Peserta Penggabungan.

Pemegang saham masyarakat diantaranya termasuk Direksi (Ongki W. Dana dan Joseph Georgino Godong) dengan jumlah pemilikan 592.000 saham atau sebesar 0,00031% dari seluruh jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 31 Desember 2002 serta 1.779.000 saham (Thomas Tan Tjio Tong dan Joseph Georgino Godong) atau sebesar 0,003% dari seluruh jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 31 Desember 2001.

Setelah program rekapitalisasi tersebut, Bank telah memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) sesuai dengan yang disyaratkan Bank Indonesia, walaupun demikian sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No. 2/11/PBI/2000 tanggal 31 Maret 2000, pasal 5 ayat 1, status Bank masih sebagai Bank Take Over (BTO), karena program penyehatan terhadap Bank masih berlangsung.

Pada tanggal 28 September 2001, PT Astra International Tbk (AI) menjual sebagian kepemilikan sahamnya di Universal, yaitu sejumlah 600.000.000 saham yang mewakili 1,57% kepemilikan AI di Universal, kepada Skylark Limited, British Virgin Island dengan jumlah harga penjualan sebesar Rp 18.000 yang menyebabkan persentase kepemilikan AI turun dari 11,53% pada tanggal 31 Desember 2000 menjadi 9,92% pada tanggal 31 Desember 2001. Kemudian pada tanggal 19 Maret 2002, AI menjual lagi 310.000.000 saham yang mewakili 0,81% kepemilikan AI di Universal, kepada PT Semesta Indovest Securities dengan jumlah harga penjualan sebesar Rp 7.750, yang menyebabkan persentase kepemilikan AI turun menjadi 9,11% pada tanggal 30 September 2002. Sehubungan dengan penjualan kepemilikan AI di Universal, Universal menerima pemberitahuan dari AI mengenai transaksi tersebut. Selain itu, dua representatif dari AI mengundurkan diri sebagai komisaris Universal. Berdasarkan hal tersebut, AI dapat dikategorikan bukan sebagai pihak yang mempunyai hubungan istimewa apabila mengacu kepada Surat Keputusan Direksi BI No. 31/177/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 yang telah diperbaharui dengan peraturan BI No. 2/16/PBI/2000 tanggal 12 Juni 2000. Namun demikian, berdasarkan Perjanjian Investasi, Manajemen dan Kinerja Usaha (IMPA) tanggal 28 Mei 1998, AI, salah satu pihak dalam Perjanjian Investasi, Manajemen dan Kinerja Usaha, menandatangani perjanjian tersebut sebagai pemegang saham pengendali. Untuk memperoleh kepastian mengenai status hubungan antara AI dengan

26. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR-AGIO SAHAM (lanjutan)

Universal, pada tanggal 11 November 2002 Bank telah mengirimkan surat kepada BI untuk mengkonfirmasikan status hubungan AI dengan Bank. Mengingat hingga tanggal 16 Desember 2002, BI belum memberikan jawabannya, Bank masih mengklasifikasikan seluruh transaksi dengan AI selama sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2002 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001 sebagai transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (lihat Catatan 8, 9, 10, 11, 16, 18, 24, 29 dan 38).

Berdasarkan surat BI No. 5/35/DPwBI/PwB16 tanggal 18 Februari 2003, dinyatakan bahwa berhubung kepemilikan AI pada Bank tercatat dibawah 10% maka status AI dilihat dari kepemilikan tidak merupakan pihak terkait. Disamping itu, karena pada tanggal 31 Desember 2002 kredit Group Astra tidak termasuk kategori pelampauan BMPK di Bank, maka Bank tidak mengklasifikasikan AI sebagai pihak terkait.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 27 September 2002 dan diaktakan dengan Akta Notaris Benny Kristianto, S.H., No. 68, para pemegang saham Universal, selain menyetujui peleburan usaha bank tersebut ke dalam Bank, juga telah mengambil keputusan membatalkan Program Hak Opsi Universal 2000 (Employee Stock Option Plan) yang semula disetujui oleh pemegang saham Universal berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 28 Juni 1999 yang diaktakan dengan Akta Notaris Benny Kristianto, S.H., No. 41.

Dalam rangka program rekapitalisasi Universal, Primex, Artamedia dan Patriot berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia No. 53/KMK.017/1999 dan No. 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 (SKB 53/1999), BPPN menerbitkan Sertifikat Bukti Hak (SBH) yang diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham Universal, Primex, Artamedia dan Patriot yang turut menyetorkan tambahan modal kepada bank-bank tersebut pada saat rekapitalisasi.

Berdasarkan Ketentuan Pokok SBH disebutkan bahwa pemegang SBH berhak untuk menerima suatu bagian atas hasil perolehan dari kredit kategori 5 yang dialihkan kepada BPPN oleh Universal, Primex, Artamedia dan Patriot, yang diberikan dalam bentuk saham Kelas C yang dimiliki oleh BPPN dalam masing-masing Universal, Primex, Artamedia dan Patriot, atau dalam hal jumlah saham Kelas C yang dipegang oleh BPPN tidak cukup maka akan diberikan dalam bentuk uang tunai sesuai dengan proporsi jumlah SBH yang dimiliki oleh pemegang SBH tersebut. SBH tersebut dapat diperdagangkan secara terpisah oleh pemiliknya.

SBH tersebut telah jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2002 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 21 Desember 2002 berdasarkan Keputusan KKSK No. Kep. 02/K.KKSK/06/2002 tanggal 21 Juni 2002 mengenai penanganan SBH Bank-bank Rekapitalisasi (Keputusan KKSK 21 Juni 2002).

Sehubungan dengan Keputusan KKSK 21 Juni 2002 tersebut, BPPN melakukan negosiasi dengan para pemegang SBH di mana tingkat *recovery rate* untuk pengembalian SBH kepada pemegang SBH telah ditetapkan maksimal sebesar 25%. Penggunaan dana perolehan masing-masing SBH tersebut tetap mengacu kepada SKB 53 pasal 17 butir F yaitu wajib digunakan untuk membeli saham seri C milik negara RI pada Bank Peserta Penggabungan dengan harga sebesar harga pembelian oleh negara RI untuk saham yang ditawarkan, yang ditetapkan oleh Pemerintah. Apabila setelah tanggal tersebut di atas BPPN menerima hasil perolehan kredit kategori 5 yang dialihkan oleh Bank-Bank bersangkutan maka pemegang SBH tidak berhak atas hasil perolehan kredit kategori 5 tersebut dan SBH terhitung sejak tanggal tersebut menjadi tidak bernilai dan tidak dapat diperdagangkan.

26. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR-AGIO SAHAM (lanjutan)

Perlakuan konversi terhadap pemegang SBH sehubungan dengan peleburan usaha Bank adalah sebagai berikut:

- Hak atas perolehan dari kredit kategori 5 yang diserahkan masing-masing bank ke BPPN masih tetap melekat pada pemegang SBH.
- Hasil perolehan dari kredit kategori 5 tersebut akan digunakan untuk membeli saham Seri B Pemerintah/BPPN di Bank Hasil Penggabungan.
- Besarnya saham Seri B Pemerintah/BPPN yang akan diperoleh masing-masing pemegang SBH adalah sebesar faktor konversi saham bank asal ke Bank Hasil Penggabungan/Bank Permata dikali jumlah saham seri C Negara RI di bank asal yang seharusnya diperoleh.

Berdasarkan pengumuman BPPN kepada para pemegang SBH tentang laporan hasil perolehan aset kredit kategori 5 dan tata cara serta persyaratan pelaksanaan hak atas SBH PT Bank Permata Tbk (Eks PT Bank Universal Tbk), dinyatakan tanggal akhir pencatatan SBH adalah 31 Januari 2003 dan periode pelaksanaan hak adalah 17 Februari 2003 sampai dengan 16 Februari 2008.

27. SELISIH KURS KARENA PENJABARAN LAPORAN KEUANGAN

Akun ini merupakan selisih kurs yang timbul karena penjabaran laporan keuangan cabang Bank di Los Angeles, Amerika Serikat dan Cayman Islands dari Dolar Amerika Serikat ke dalam mata uang Rupiah (lihat Catatan 2b). Sehubungan dengan penutupan kedua cabang tersebut, maka saldo selisih kurs yang timbul karena penjabaran laporan keuangan sebesar Rp 17.276 dibebankan pada tahun berjalan.

28. TRANSAKSI PEMBELIAN/PENJUALAN TUNAI MATA UANG ASING

Saldo piutang dan kewajiban yang timbul dari transaksi-transaksi dalam valuta asing terdiri dari:

	2002	2001
Piutang		
Pembelian tunai (spot) valuta asing yang belum diselesaikan dalam rangka:		
Trading Dolar Amerika Serikat	262.879	146.027
Yen Jepang	1.130	1.042
Euro Eropa	-	23.206
Jumlah	**264.009**	**170.275**

28. TRANSAKSI PEMBELIAN/PENJUALAN TUNAI MATA UANG ASING (lanjutan)

	2002	2001
Kewajiban		
Penjualan tunai (spot) valuta asing yang belum diselesaikan dalam rangka:		
Trading Dolar Amerika Serikat	127.317	142.795
Dolar Singapura	5.373	1.562
Euro Eropa	939	20.222
Dolar Kanada	85	-
Yen Jepang	63	2.608
Dolar Hong Kong	39	-
Dolar Australia	5	3
Primex *	-	1.040
Jumlah	**133.821**	**168.230**

* Data tidak tersedia dari bank yang menggabungkan diri

29. TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA

Dalam kegiatan usaha normal, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai berikut:

a. Tagihan dan kewajiban derivatif (lihat Catatan 9).
b. Kredit yang diberikan.(lihat Catatan 10).
c. Tagihan akseptasi (lihat Catatan 11).
d. Penutupan asuransi aktiva tetap (lihat Catatan 13).
e. Giro, tabungan dan deposito berjangka (lihat Catatan 16, 17 dan 18).
f. Bank menerbitkan Surat Berharga Pasar Uang kepada BPPN (lihat Catatan 22).
g. Penempatan oleh BPPN pada Bank (lihat Catatan 23).
h. L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan (lihat Catatan 24, 26 dan 38).
i. Bank garansi yang diterbitkan (lihat Catatan 24, 26 dan 38).
j. Sehubungan dengan rekapitalisasi dan peleburan usaha Bank, Pemerintah Indonesia telah melakukan penyertaan modal sementara dan menerbitkan Obligasi Pemerintah (lihat Catatan 8).
k. Berdasarkan perjanjian kerjasama No. 051/BB/CL/IX/02 pada tanggal 26 September 2002 antara PT Asuransi BancBali Nippon Fire (Anak perusahaan) dan Bank sepakat untuk melakukan kerja sama dalam penutupan asuransi kerugian bagi setiap agunan yang berkaitan dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada debitur. Perjanjian ini akan berakhir 26 September 2003 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Karena keterbatasan data mengenai transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada Artamedia untuk tahun 2001 maka transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang terdapat pada laporan keuangan untuk tahun 2001 disusun berdasarkan laporan keuangan auditor dari Artamedia tanpa mempertimbangkan apakah pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut masih merupakan pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada PT Bank Permata Tbk.

30. PELAPORAN SEGMEN

Pada tahun 2002, Bank mengungkapkan pelaporan informasi keuangan berdasarkan segmen geografis Bank sesuai dengan PSAK No. 5 (Revisi 2000). Pelaporan segmen untuk tahun 2001 untuk tujuan perbandingan tidak disajikan kembali sesuai dengan PSAK No. 5 (Revisi 2000) karena hal tersebut tidak praktis untuk dilakukan.

30. PELAPORAN SEGMEN (continued)

Keterangan	2002					
	Kantor Pusat	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah - Bank (Induk Perusahaan)
Pendapatan Segmen						
- Kredit Yang Diberikan	37.902	472.150	72.424	99.524	82.936	764.936
- Efek-efek	1.248.056	2.042	170	121	176	1.250.565
- Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain	77.451	1	-	12	-	77.464
- Aktiva Produktif Lainnya	5.402	636	489	632	525	7.684
Beban Segmen						
- Deposito Berjangka	17.395	734.485	200.802	252.556	162.831	1.368.069
- Tabungan	2.538	77.968	21.428	30.419	32.840	165.193
- Giro	1.139	56.309	8.549	15.711	11.125	92.833
- Surat-surat Berharga Yang Diterbitkan	32.741	4	-	-	-	32.745
- Pinjaman Yang Diterima	41.345	18.229	32	6	-	59.612
- Lainnya	38.873	92	31	-	7	39.003
Pendapatan (Beban) Segmen - Bersih	1.234.780	(412.258)	(157.759)	(198.403)	(123.166)	343.194
Pendapatan Operasional Lainnya						
- Pendapatan - bersih dari penyertaan saham (metode ekuitas)	20.354	-	-	-	-	20.354
- Lainnya	133.172	50.124	11.430	15.661	11.784	222.171
Beban (Pembalikan) Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif	84.044	182.754	4.492	71.151	(233)	342.208
Beban (Pembalikan) Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	12.511	190	44	99	178	13.022
Beban Operasional Lainnya	791.057	158.430	48.884	56.244	40.721	1.095.336
Laba (Rugi) Operasional	500.694	(703.508)	(199.749)	(310.236)	(152.048)	(864.847)
Pendapatan (Beban) Bukan Operasional - Bersih	(1.452.615)	682.634	247.287	305.643	225.332	8.281
Jumlah Beban (Penghasilan) Pajak	(48.345)	-	-	-	-	(48.345)
Hak Minoritas atas Laba Bersih Anak perusahaan	-	-	-	-	-	-
Laba (Rugi) - Bersih	(903.676)	(20.874)	47.538	(4.593)	73.284	(808.221)

Penjelasan:

- Kantor Pusat terdiri dari Treasury, Card Center, Merchant, Trust & Custody dan unit-unit fungsional di mana di dalamnya termasuk pendapatan, beban, aktiva dan kewajiban yang tidak dapat dialokasikan.
- Wilayah I terdiri dari Bisnis Unit Jakarta dan Bogor.
- Wilayah II terdiri dari Bisnis Unit Bandung, Cirebon, Tasikmalaya, Semarang, Purwokerto, Surakarta dan Yogyakarta.
- Wilayah III terdiri dari Bisnis Unit Surabaya, Malang, Jember, Tulungagung, Denpasar, Balikpapan, Samarinda dan Makassar.
- Wilayah IV terdiri dari Bisnis Unit Medan, Palembang, Lampung, Batam, Padang, Pekanbaru dan Pontianak.

PT BANK PERMATA Tbk (dahulu PT BANK BALI Tbk)
(INDUK PERUSAHAAN SAJA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2002
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2001
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Mata Uang Asing, Jumlah Cabang, Jumlah Karyawan, Data Saham Dan Nilai Tukar Mata Uang Asing)

30. PELAPORAN SEGMEN (continued)

Keterangan	2002					
	Kantor Pusat	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah - Bank (Induk Perusahaan)
Aktiva						
- Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain	2.531.359	-	-	477	-	2.531.836
- Efek-efek	13.375.664	14.284	3.063	1.457	1.530	13.395.998
- Kredit Yang Diberikan	221.519	4.933.864	591.817	792.471	584.184	7.123.855
- Aktiva Produktif Lainnya	98.736	44.508	1.934	15.549	2	160.727
- Penyertaan Saham	92.559	-	-	-	-	92.559
- Aktiva Lain-lain	1.956.121	2.315.783	102.482	120.553	73.618	4.568.557
Jumlah Aktiva	**18.275.958**	**7.308.437**	**699.298**	**930.507**	**659.334**	**27.873.532**
Kewajiban						
- Simpanan	578.176	13.050.195	2.610.141	3.444.786	2.162.556	21.845.854
- Simpanan Dari Bank Lain	105.280	7.973	11.567	4.767	37	129.624
- Surat-surat Berharga Yang Diterbitkan	412.778	-	-	-	-	412.778
- Pinjaman Yang Diterima	711.787	762.095	-	198	-	1.474.080
- Kewajiban Lain-lain	1.080.569	1.643.542	42.836	62.224	24.773	2.853.944
Jumlah Kewajiban	**2.888.590**	**15.463.805**	**2.664.544**	**3.511.975**	**2.187.366**	**26.716.280**

Penjelasan:

- Kantor Pusat terdiri dari Treasury, Card Center, Merchant, Trust & Custody dan unit-unit fungsional di mana di dalamnya termasuk pendapatan, beban, aktiva dan kewajiban yang tidak dapat dialokasikan.
- Wilayah I terdiri dari Bisnis Unit Jakarta dan Bogor.
- Wilayah II terdiri dari Bisnis Unit Bandung, Cirebon, Tasikmalaya, Semarang, Purwokerto, Surakarta dan Yogyakarta.
- Wilayah III terdiri dari Bisnis Unit Surabaya, Malang, Jember, Tulungagung, Denpasar, Balikpapan, Samarinda dan Makassar.
- Wilayah IV terdiri dari Bisnis Unit Medan, Palembang, Lampung, Batam, Padang, Pekanbaru dan Pontianak.

31. PENDAPATAN BUNGA

Pendapatan bunga berasal dari:

	2002	2001
Efek-efek	1.248.143	874.728
Kredit yang diberikan	689.780	238.899
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	77.464	75.144
Lain-lain	7.894	6.396
Jumlah	**2.023.281**	**1.195.167**

32. BEBAN BUNGA

Beban bunga meliputi bunga atas:

	2002	2001
Deposito berjangka	1.363.919	849.610
Tabungan	165.991	145.432
Giro	92.833	88.532
Pinjaman yang diterima	57.293	69.968
Premi program penjaminan pemerintah	39.003	27.797
Surat-surat berharga yang diterbitkan	32.745	3.441
Jumlah	**1.751.784**	**1.184.780**

33. IMBALAN

Akun ini terdiri dari:

	2002	2001
Penerimaan biaya administrasi	57.825	64.399
Komisi dari kartu debet	16.748	17.199
Komisi impor dan ekspor	11.587	11.547
Komisi dari bank garansi	5.181	720
Jasa "safe deposit box"	4.086	4.024
Jasa manajemen	2.031	2.362
Komisi penjualan valuta asing	1.356	6.107
Jasa kustodian (lihat Catatan 41)	1.062	171

33. IMBALAN (lanjutan)

	2002	2001
Komisi dari pialang	18	17
Lain-lain	3.166	921
Jumlah	**103.060**	**107.467**

34. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	2002	2001
Keperluan kantor	160.942	120.187
Perbaikan dan pemeliharaan	60.819	52.415
Penyusutan dan amortisasi	42.267	40.402
Promosi	23.785	18.675
Jumlah	**287.813**	**231.679**

35. TENAGA KERJA DAN TUNJANGAN

Akun ini merupakan pembayaran gaji, bonus, Tunjangan Hari Raya, lembur, asuransi tenaga kerja, pendidikan dan pelatihan dan biaya tenaga kerja lainnya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001, gaji bruto Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing berjumlah Rp 6.882 dan Rp 6.858.

36. DANA PENSIUN

Bank menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk karyawan tetap yang memilih ikut serta dan memenuhi syarat yang diadministrasikan oleh Dana Pensiun Bank Bali (telah disahkan oleh Menteri Keuangan dalam surat keputusan No. KEP-320/KM.17/1994 tanggal 10 November 1994). Iuran-iuran untuk dana pensiun ini dihitung berdasarkan suatu persentase tertentu dari gaji karyawan. Dari jumlah iuran tersebut 2,5% ditanggung oleh karyawan, sedangkan 5% ditanggung oleh Bank. Biaya pensiun yang dibebankan pada operasi adalah sebesar Rp 5.683 dan Rp 4.142 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001.

Bank mencatat kewajiban atas "past service liabilities" dari karyawan yang masuk sebelum terbentuknya Dana Pensiun Bank Bali masing-masing sebesar Rp 14.547 dan Rp 2.006 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001 dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-150/Men/2000 (Kep-150) tanggal 20 Juni 2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan. Kewajiban aktuaria Bank masing-masing sebesar Rp 55.403 dan Rp 52.322 pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001. Akrual atas kewajiban ini telah ditentukan

36. DANA PENSIUN (lanjutan)

berdasarkan penilaian aktuaria pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2000 yang dilakukan oleh PT Dian Artha Tama, aktuaritas independen, berdasarkan laporannya tertanggal 27 Juni 2002 dan 9 April 2001 dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit", dan dengan asumsi akrual tersebut dihitung sejak karyawan masuk kerja di Bank sebelum adanya program Dana Pensiun Bank Bali, di mana setelah tahun 1994, manfaat pensiun ditanggung oleh Dana Pensiun Bank Bali. Manfaat pensiun tersebut disajikan sebagai bagian dari beban tenaga kerja dan tunjangan dalam laporan laba rugi tahun 2002 dan 2001.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-295/KM.6/2002 tanggal 3 Desember 2002, Dana Pensiun Bank Bali telah dibubarkan secara hukum.

Pada tanggal 18 Desember 2002, berdasarkan Perjanjian Pengalihan Program Pensiun No. DPLK/SP/001/XII/2002, Bank mengalihkan dana program pensiun karyawan kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan Central Asia Raya.

Pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001, Bank (Universal) mencatat akrual untuk uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian masing-masing sebesar Rp 6.126 dan Rp 32.197 sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. Kep-150. Akrual atas kesejahteraan karyawan pada tanggal 31 Desember 2001 ditentukan berdasarkan penilaian aktuaria yang dilakukan oleh Bumi Dharma Aktuaria, aktuaris independen, masing-masing berdasarkan laporannya tertanggal 25 Maret 2002 dengan menggunakan metode *"projected unit credit"*.

Pada tanggal 31 Desember 2002, Bank (Primex) mencatat akrual untuk pesangon karyawan sebesar Rp 43.701 yang merupakan kewajiban Bank sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja karyawan. Peraturan ini mengharuskan Bank untuk memberikan sejumlah kompensasi yang sebanding dengan masa kerja kepada karyawan dalam hal pemutusan hubungan kerja apabila persyaratan dalam peraturan tersebut terpenuhi. Sehubungan dengan peraturan ini Primex telah menghitung cadangan pesangon karyawan sesuai dengan pasal 27 ayat 2 Kep-150 sebesar Rp 43.701, di mana jumlah tersebut diperoleh berdasarkan gaji bulan Februari 2002 belum termasuk perhitungan untuk semua anggota Direksi, serta uang pengganti cuti besar semua karyawan.

Bank (Artamedia) menghitung dan membukukan estimasi manfaat karyawan sesuai Kep-150. Tidak ada pendanaan yang dilakukan sehubungan dengan manfaat karyawan tersebut. Kewajiban transisi dibebankan langsung pada tahun berjalan. Akrual atas kewajiban ini telah ditentukan berdasarkan penilaian aktuaria PT Dayamandiri Dharmakonsolindo, aktuaris independen, berdasarkan laporannya tertanggal 18 April 2002 dengan menggunakan metode *"projected unit credit"*. Jumlah karyawan yang berhak memperoleh manfaat tersebut adalah sebanyak 306 karyawan. Estimasi kewajiban manfaat karyawan adalah sebesar Rp 1.314 pada tahun 2002 disajikan sebagai kewajiban lain-lain.

Nilai tunai kewajiban manfaat karyawan dihitung dengan asumsi utama sebagai berikut:

Tingkat diskonto : 13%
Tingkat proyeksi kenaikan gaji: 9%

Pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001, jumlah keseluruhan akrual yang telah dibukukan oleh Bank masing - masing adalah sebesar Rp 105.114 dan Rp 37.524.

37. PENDAPATAN BUKAN OPERASIONAL - BERSIH

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	2002	2001
Laba penjualan penyertaan	15.335	34.550
Pembalikan kerugian - agunan diambil alih	12.165	-
Pendapatan sewa	6.680	4.347
Laba penjualan aktiva tetap - bersih	4.461	2.335
Laba penjualan agunan yang diambil alih - bersih	1.440	8.904
Rugi penghapusan aktiva tetap (lihat Catatan 13)	(36.008)	-
Sumbangan	(468)	(69)
Ganti rugi atas pengakhiran perjanjian dengan PT Prudential BancBali Life Assurance (lihat Catatan 12)	-	61.500
Lain-lain - bersih	4.676	1.473
Bersih	**8.281**	**113.040**

38. TAGIHAN DAN KEWAJIBAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Bank memiliki tagihan dan kewajiban komitmen dan kontinjensi sebagai berikut:

	2002	2001
KOMITMEN		
Kewajiban Komitmen		
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	1.961.182	1.686.962
Letters of credit yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	41.273	100.072
Jumlah Kewajiban Komitmen	2.002.455	1.787.034
Kewajiban Komitmen - Bersih	(2.002.455)	(1.787.034)
KONTINJENSI		
Tagihan Kontinjen		
Pendapatan bunga dalam penyelesaian (lihat Catatan 2q)	176.550	115.416
Kewajiban Kontinjen		
Garansi yang diterbitkan dalam bentuk:		
Standby letters of credit	288.703	331.931
Performance bonds	139.048	23.754
Advance payment bonds	18.444	8.354
Custom bonds	1.359	791
Retention bonds	1.320	245
Shipping guarantee	1.152	-
Bid bonds	1.111	500
Universal *	-	121.020
Primex *	-	13.621
Artamedia *	-	12.630
Patriot *	-	185
Patriot - Lainnya *	-	4.663
Lainnya	-	44.697

38. TAGIHAN DAN KEWAJIBAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

	2002	2001
Jumlah Kewajiban Kontinjen	451.137	562.391
Kewajiban Kontinjen - Bersih	(274.587)	(446.975)
KOMITMEN DAN KONTINJENSI - Bersih	**(2.277.042)**	**(2.234.009)**

* Data tidak tersedia dari bank yang menggabungkan diri

L/C tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebesar Rp 45.104 pada tanggal 31 Desember 2001 (lihat Catatan 26 dan 29).

Bank garansi yang diterbitkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebesar Rp 6.214 pada tanggal 31 Desember 2001 (lihat Catatan 26 dan 29).

39. POSISI DEVISA NETO

Berdasarkan ketentuan BI yang berlaku, posisi devisa neto Bank (mencakup seluruh kantor cabang di dalam negeri maupun luar negeri) setinggi-tingginya 20% dari modal. Posisi devisa neto merupakan penjumlahan dari nilai absolut atas selisih bersih aktiva dan kewajiban dalam valuta asing, baik dalam neraca maupun komitmen dan kontinjensi.

	2002		
	Aktiva dan Aktiva pada Rekening Administratif	Kewajiban dan Kewajiban pada Rekening Administratif	Posisi Devisa Neto
Dolar Amerika Serikat	3.922.567	4.259.947	337.380
Dolar Singapura	47.239	49.553	2.314
Franc Swiss	2.479	321	2.158
Euro Eropa	14.449	12.664	1.785
Dolar Hong Kong	3.206	1.450	1.756
Dolar Australia	10.416	9.673	743
Kroner Swedia	728	1	727
Dolar Cayman Island	654	4	650
Dolar Kanada	1.309	738	571
Poundsterling Inggris	6.676	6.135	541
Kroner Denmark	456	38	418
Ringgit Malaysia	-	33	33
Yen Jepang	52.532	52.545	13
Dolar Selandia Baru	785	791	6
Jumlah			**349.095**

Pada tanggal 31 Desember 2002 berdasarkan perhitungan Bank, posisi devisa neto Bank adalah 33,35% dari modal.

40. IKATAN

Pada tanggal 8 Oktober 1992, Bank mengadakan perjanjian bangun, kelola, serah dengan PT Yacolt Graha (Yacolt), pihak yang mempunyai hubungan istimewa karena mempunyai pemegang saham yang sama sebelum dilakukannya rekapitalisasi Bank, di mana Bank setuju untuk mengalihkan hak dan kewajibannya kepada Yacolt yang berkenaan dengan penyelesaian, penggunaan dan pengoperasian lantai tertentu gedung yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 27, Jakarta. Yacolt akan mengkoordinasi dan membiayai penyelesaian lantai-lantai tersebut dan kemudian akan menggunakan lantai tersebut selama 20 (dua puluh) tahun dimulai dari tanggal lantai-lantai tersebut siap untuk digunakan yaitu tahun 1993. Pada akhir tahun ke-20 (dua puluh), Yacolt akan mengalihkan lantai-lantai tersebut ke Bank tanpa imbalan apapun. Jangka waktu 20 tahun dapat diperpanjang berdasarkan negosiasi antara Bank dan Yacolt dan atas persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, jika diperlukan. Bank memiliki hak untuk melaksanakan "early transfer option" berdasarkan harga yang disepakati bersama. Pembangunan lantai lain dari gedung tersebut yang tidak termasuk dalam perjanjian di atas didanai dan dimiliki oleh Bank. Pada tanggal 31 Desember 2002, Bank memiliki 21 lantai baik yang didanai sendiri maupun melalui "early transfer option", sedangkan Yacolt memiliki 3 lantai dan area parkir mobil.

41. HAL-HAL LAIN

a. Bank melakukan kegiatan wali amanat yang antara lain ditunjuk sebagai agen pembayaran. Imbalan jasa atas kegiatan wali amanat tersebut dibukukan pada laporan laba rugi sebesar Rp 829 dan Rp 713 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001.

b. Bank melakukan kegiatan sebagai tempat penitipan harta (kustodian) sesuai dengan keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-99/PM/1991 tanggal 23 April 1991. Imbalan jasa atas kegiatan kustodian tersebut dibukukan pada laporan laba rugi sebesar Rp 1.062 dan Rp 171 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001 (lihat Catatan 33).

c. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap jumlah aktiva produktif Bank adalah sebesar 10,03% pada tanggal 31 Desember 2002.

d. Pada tanggal 31 Desember 2002 kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) Bank adalah sebesar 10,42%. Perhitungan KPMM Bank tanggal 31 Desember 2002 tersebut, dilakukan sesuai dengan SE BI No. 3/21/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001.

Perhitungan KPMM Bank adalah sebagai berikut:

	2002
Modal inti	
Modal disetor	1.300.534
Cadangan tambahan modal	
Agio saham	9.067.496
Rugi tahun-tahun lalu	(5.366.945)
Rugi tahun berjalan	(856.566)
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	(3.412.212)

41. HAL-HAL LAIN (lanjutan)

	2002
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	-
Penurunan nilai penyertaan pada portofolio tersedia untuk dijual	(1.561)
Jumlah modal inti	730.746
Modal pelengkap (maksimum 100% dari modal inti)	
Selisih penilaian kembali aktiva tetap	43.574
Cadangan umum penyisihan kerugian aktiva produktif (maksimum 1,25% dari ATMR)	125.577
Pinjaman subordinasi (maksimum 50% dari modal inti)	226.353
Jumlah modal pelengkap	395.504
Jumlah modal inti dan modal pelengkap	1.126.250
Penyertaan saham	79.391
Jumlah modal	**1.046.859**
Aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR)	10.046.193
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum Bank	10,42%
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan	8,00%

e. Rasio pemenuhan penyisihan penghapusan aktiva produktif Bank pada tahun 2002 adalah sebesar 107,15%.

42. KONDISI EKONOMI

Kondisi ekonomi Indonesia di tahun 2002 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2001. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan beberapa indikator ekonomi, seperti nilai tukar Rupiah yang cenderung stabil, suku bunga yang cenderung menurun, dan minat investasi yang membaik. Namun demikian tingkat inflasi masih tetap relatif tinggi (dua digit).

Restrukturisasi perbankan yang merupakan salah satu rencana kerja Pemerintah dalam bidang ekonomi masih terus berlanjut hingga saat ini. Realisasi restrukturisasi perbankan oleh Pemerintah di tahun 2002 diantaranya adalah dilakukannya penggabungan (*merger*) 5 (lima) bank di bawah pengelolaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yaitu PT Bank Bali Tbk, PT Bank Universal Tbk, PT Bank Prima Express, PT Bank Artamedia dan PT Bank Patriot. Tujuan dari penggabungan ini adalah untuk membentuk suatu bank yang memiliki struktur permodalan yang lebih kuat, kondisi finansial yang lebih sehat, dan daya saing yang lebih tinggi. PT Bank Bali Tbk ditetapkan sebagai rangka bank di dalam penggabungan ini dan berganti nama menjadi PT Bank Permata Tbk (Bank). Pemerintah juga telah melakukan penyertaan modal sementara sebesar Rp 4,6 triliun sehubungan dengan penggabungan ini yang bertujuan untuk menjaga tingkat kesehatan dan kesinambungan usaha Bank Hasil Penggabungan.

Bank saat ini telah menyelesaikan operasional merger dan kegiatan pasca merger antara lain meliputi konsolidasi sumber manusia, standarisasi cabang dan sosialisasi nama Bank Permata. Meskipun tantangan yang harus dihadapi cukup besar, namun Bank tetap optimis akan mampu mengembangkan usahanya pada tahun mendatang.

42. KONDISI EKONOMI (lanjutan)

Rencana jangka pendek Bank setelah penggabungan adalah sebagai berikut:

1. Membangun sistem pelayanan prima dengan memperhatikan segmen pasar yang menjadi target pilihan Bank.
2. Memperoleh penambahan modal melalui *right issue*.
3. Menyelesaikan konsolidasi sumber daya manusia dan aktivitas *pasca merger*.
4. Membangun *brand* Bank.
5. Menurunkan rasio *Non-Performing Loan* (NPL) menjadi di bawah 5%.
6. Mencapai stabilitas dan membangun sistem operasional berbasis teknologi informasi.
7. Mengkonsolidasikan, menyelesaikan dan mempersiapkan *"champion product"* Bank.
8. Memperbaiki struktur *funding* untuk menurunkan *cost of fund*.
9. Meningkatkan kontribusi *fee based income* terhadap laba Bank.
10. Mengimplementasikan *risk management* dan *good corporate governance* secara konsisten dalam upaya mencapai tingkat kesehatan yang berkesinambungan.

Sedangkan rencana jangka panjang Bank adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan mengembangkan nasabah yang memberikan keuntungan bagi Bank.
2. Menciptakan organisasi yang berkinerja tinggi.
3. Mencapai tingkat kinerja operasional yang optimal agar memiliki daya saing yang tinggi.
4. Meningkatkan kemampuan pengendalian resiko.
5. Mengembangkan keahlian dalam pengendalian produk.
6. Membangun dan mensosialisasikan *brand*.

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001 mencakup kondisi ekonomi tersebut, sepanjang hal itu dapat ditentukan dan diperkirakan. Pemulihan kondisi ekonomi tersebut tergantung pada kebijakan moneter, fiskal dan kebijakan lainnya yang telah dan akan diambil oleh Pemerintah Indonesia, suatu tindakan yang berada di luar kendali Bank. Oleh karena itu, tidaklah mungkin untuk menentukan dampak masa depan kondisi ekonomi terhadap pendapatan dan realisasi aktiva produktif Bank, termasuk dampak mengalirnya dana nasabah, kreditur, deposan dan pemegang saham ke dan dari Bank.

43. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 26/KMK.17/1998 tanggal 28 Januari 1998 dinyatakan bahwa pemerintah menjamin kewajiban bank umum meliputi giro, tabungan, deposito berjangka dan deposito on-call, obligasi, surat-surat berharga yang diterbitkan, pinjaman antar bank, pinjaman yang diterima, swaps/hedges/futures, derivatif dan kewajiban kontinjen lainnya seperti bank garansi, standby letters of credit, performance bonds dan kewajiban sejenis selain pinjaman subordinasi dan kewajiban kepada direktur, komisaris dan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Bank. Jaminan tersebut di atas berlaku untuk jangka waktu dua tahun sejak tanggal 26 Januari 1998 sampai dengan tanggal 31 Januari 2000. Sesuai dengan surat keputusan bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN No. 32/46/KEP/DIR dan No. 181/BPPN/0599 tanggal 14 Mei 1999, jangka waktu jaminan tersebut telah diperpanjang dengan sendirinya untuk jangka waktu enam bulan berikutnya. Lebih lanjut, Menteri Keuangan mengeluarkan surat keputusannya No.179/KMK/017/2000 tanggal 26 Mei 2000 untuk menggantikan surat keputusan diatas di mana jaminan pemerintah atas kewajiban bank umum seperti dijelaskan di atas berlaku untuk jangka waktu mulai tanggal 26 Januari 1998 sampai dengan tanggal 31 Januari 2001. Jangka waktu jaminan ini akan diperpanjang dengan sendirinya untuk jangka waktu enam bulan berikutnya

43. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM (lanjutan)

secara terus-menerus, kecuali Menteri Keuangan, dalam waktu sekurang-kurangnya enam bulan sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut menerbitkan pemberitahuan bahwa Menteri Keuangan tidak bermaksud untuk memperpanjang jangka waktunya.

44. KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN DAN GUBERNUR BANK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia No. 53/KMK.017/1999 dan No. 31/12/KEP/GBI tertanggal 8 Februari 1999 tentang pelaksanaan program rekapitalisasi bank umum telah diatur, antara lain:

1. Bank umum yang dapat menjadi peserta program rekapitalisasi bank umum adalah bank umum kategori B, dengan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) lebih kecil dari 4% sampai dengan negatif 25%, di mana bank umum tersebut wajib membuat rencana kerja dan menyampaikan kepada Bank Indonesia serta pemegang saham pengendali, dewan komisaris dan direksinya wajib memenuhi "Fit and Proper Test".

2. Bank umum yang telah go public yang mengikuti program rekapitalisasi dapat menawarkan saham baru melalui mekanisme penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu (Rights Issue) atau tanpa melalui rights issue, dan pemegang saham pengendali wajib melaksanakan hak tersebut sekurang-kurangnya 20% dari saham yang diterbitkan dengan pembayaran secara tunai untuk mencapai KPMM 4%. Dalam hal bank umum memilih mekanisme rights issue dan pemegang saham pengendali tidak dapat memenuhi kewajibannya sebesar 20%, kewajiban tersebut dapat dipenuhi secara bersama dengan atau seluruhnya dilakukan oleh investor strategis (strategic investors). Sedangkan, sisa saham baru tersebut yang tidak diambil oleh pemegang saham dan masyarakat diambil oleh pemerintah selaku pembeli siaga (stand-by-buyer).

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia No. 117/KMK.017/1999 dan No. 31/15/KEP/GBI tertanggal 26 Maret 1999 tentang pelaksanaan program rekapitalisasi bank dalam penyehatan yang berstatus Bank Take Over (BTO), pemerintah akan melakukan penyertaan modal sementara pada bank dengan jumlah minimal untuk mencapai kewajiban penyediaan modal minimum 4%. Penyertaan modal sementara yang diperlukan ditentukan berdasarkan hasil penelaahan (due diligence review) oleh pihak independen yang ditunjuk oleh BPPN.

45. SURAT KEPUTUSAN DAN PERJANJIAN PENTING

a. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/14/KEP.DpG/1999 tanggal 23 Juli 1999, Bank Indonesia menyerahkan Bank kepada BPPN untuk penyehatan, penyelesaian aktiva bank dan upaya pengembalian uang negara. Penyerahan tersebut bersifat sementara sampai dengan selesainya negosiasi antara investor dengan Pemerintah dan disetujuinya pemegang saham baru tersebut oleh Pemerintah dan Bank Indonesia serta yang bersangkutan telah melakukan setoran tambahan modal secara tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua BPPN No. SK-368/BPPN/0899 tanggal 4 Agustus 1999, Bank telah ditetapkan sebagai Bank Take Over (BTO).

45. SURAT KEPUTUSAN DAN PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

c. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua BPPN No. SK-418/BPPN/1099 tanggal 7 Oktober 1999, BPPN membebastugaskan Hendri Kurniawan dan Rusli Suryadi dari tanggung jawabnya masing-masing sebagai anggota Tim Pengelola dan anggota Tim Kerja Pendukung Tim Pengelola. Dalam RUPSLB Bank pada tanggal 23 November 2000, keduanya telah diberhentikan dengan hormat dari keanggotaannya sebagai Direksi Bank. Sehubungan dengan hal tersebut, keduanya menanyakan mengenai kontrak kerja sebagai Direksi yang berakhir sampai dengan Juni 2001 dan klaim biaya pengacara dalam perkara Bank Bali di mana keduanya bertindak selaku Direksi Bank. Pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2001, Bank telah mencadangkan sebesar Rp 5.200 untuk kompensasi dan estimasi klaim biaya pengacara.

d. Berdasarkan nota kesepahaman antara PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) dan Bank pada tanggal 24 Mei 2000, Bank dan Telkom telah sepakat untuk bekerjasama dalam aktivitas "e-commerce" antara lain tetapi tidak terbatas pada "Business to Business (B to B)" dan "Wireless Application Protocol (WAP)". Kesepakatan ini berakhir pada tanggal 24 Mei 2002.

e. Sehubungan dengan masalah hukum sebelumnya antara Herman Ramli, Rudy Ramli dan Bank Indonesia termasuk BPPN, mengenai penempatan Bank di bawah supervisi BPPN, pada tanggal 17 Juli 2000 telah ditandatangani Perjanjian Perdamaian antara Bank Indonesia, BPPN, Herman Ramli, Rudy Ramli dan PT Sarijaya Wirasentosa, yang di antaranya telah menyepakati untuk:

- Mengakhiri perkara No. 138/G/TUN/1999/PTUN-JKT yang saat ini berada di tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta.

- Menyetujui dan akan mengusulkan kepada BAPEPAM untuk melakukan suspensi terhadap saham-saham Bank Bali yang dikuasai oleh Deutsche Bourse Clearing AG (DBC AG), dalam arti menunda hak-hak suara (voting rights) dan hak prioritas untuk membeli saham-saham yang diterbitkan Bank dalam rangka rights issue, dan suspensi tersebut terus berlaku sehingga diperolehnya kejelasan tentang identitas kepemilikan saham-saham Bank, yang dikuasai oleh DBC AG.

- Mengikutsertakan Herman Ramli, Rudy Ramli dan PT Sarijaya Wirasentosa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka divestasi Bank.

- Mengikuti dan mematuhi setiap ketentuan yang berlaku dan diberlakukan Pemerintah mengenai Rekapitalisasi Bank, termasuk untuk menghilangkan/menetralisasi setiap dan seluruh hambatan hukum (legal barriers), sehingga persiapan dan pelaksanaan rekapitalisasi Bank dapat dilakukan sepenuhnya dan sebagaimana mestinya.

- Herman Ramli, Rudy Ramli dan PT Sarijaya Wirasentosa membebaskan Bank Indonesia, BPPN dan Bank atas setiap tindakan yang dilakukan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan SK Gubernur BI No. 1/14/KEP.DpG/1999 dan SK Ketua BPPN No. SK-328/BPPN/0799 serta SK Ketua BPPN No. SK-329/BPPN/0799, dan karenanya mengikatkan diri untuk tidak mengajukan tuntutan atau gugatan terhadap pihak-pihak tersebut di atas.

f. BPPN bersama dengan Rudy Ramli mengadakan perjanjian penyelesaian yang integral dengan perjanjian perdamaian (lihat Catatan 45e) pada tanggal 17 Juli 2000 yang menyatakan bahwa BPPN menyetujui membayar sejumlah uang tunai setelah dipotong pajak yang berlaku sebesar Rp 9.000 kepada Rudy Ramli pada hari dilaksanakan rekapitalisasi Bank.

45. SURAT KEPUTUSAN DAN PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

g. Sehubungan dengan adanya penyertaan modal sementara oleh Pemerintah RI (qq BPPN) kepada Bank, maka pada tanggal 2 Mei 2001, Bank bersama-sama dengan BPPN telah menandatangani Perjanjian Manajemen yang merupakan suatu perjanjian kinerja usaha sebagai pelaksanaan kewajiban dari SKB No. 117/KMK.017/1999 dan 31/15/KEP/GBI tanggal 26 Maret 1999 (SKB) dan Perjanjian Modal Sementara antara Bank dan BPPN tanggal 9 Oktober 2000.

h. Berdasarkan nota kesepahaman antara Bank dan PT Landas Nimpuna Teknologi (Landas) pada tanggal 9 Januari 2001, Bank dan Landas telah sepakat untuk melakukan kerja sama penyediaan layanan transaksi jual beli efek melalui media internet dengan menggunakan fasilitas e-trading yang telah dikembangkan oleh Landas dan jasa kustodian milik Bank. Perjanjian ini akan berakhir bila ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

i. Berdasarkan surat izin penutupan kantor cabang PT Bank Bali Tbk di Los Angeles, Amerika Serikat dari Deputi Direktur Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia No. 4/42/DPIP/Prz tanggal 31 Januari 2002 dan surat persetujuan dari "Commissioner of Financial Institution" tanggal 14 Februari 2002, kantor Cabang Los Angeles tersebut secara resmi telah ditutup pada tanggal 15 Februari 2002.

j. Berdasarkan surat Deputi Gubernur BI No. 4/162/KEP.DpG/2002 tanggal 18 Oktober 2002, BI telah menyetujui:

   1. Perubahan nama PT Bank Bali Tbk menjadi PT Bank Permata Tbk.
   2. Izin usaha Bank sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 19371/U.M.II tanggal 19 Februari 1957 tetap berlaku bagi PT Bank Permata Tbk.

k. Berdasarkan surat BPPN No. PD/TM/249/X/2002 tanggal 25 Oktober 2002, Bank Peserta Penggabungan sebelum tanggal efektif peleburan usaha harus mencatat biaya-biaya sebesar Rp 1.630.611 yang timbul berkaitan dengan proses merger kelima bank yang antara lain terdiri dari cadangan litigasi, biaya pesangon karyawan, biaya pajak, biaya "head office", biaya teknologi, biaya "branding" dan lain-lain. Dalam biaya merger tersebut, sebesar Rp 482.248 dicatat sebagai beban merger oleh Bank dalam laporan laba rugi sedangkan sisanya sebesar Rp 1.148.363 dicatat oleh 4 BPP masing-masing dalam laporan laba rugi penutupan dan dicatat dalam akun Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali dalam laporan keuangan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002, Bank telah menggunakan biaya merger sebesar Rp 312.093 sehingga cadangan biaya merger pada tanggal 31 Desember 2002 menjadi Rp 1.318.518 (lihat Catatan 25).

46. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

a. Berdasarkan surat dari "Cayman Islands Monetary Authority" tanggal 20 Maret 2003, kantor cabang Cayman Island telah resmi ditutup pada tanggal 31 Desember 2002.

b. Sehubungan dengan pelaksanaan SBH Universal menjadi saham seri B Bank, maka sesuai dengan surat dari biro administrasi efek PT Blue Chip Mulia pada tanggal 17 Maret 2003, jumlah saham yang dimiliki oleh BPPN qq Negara Republik Indonesia menjadi 189.045.792.865 saham (lihat Catatan 26).

46. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA (lanjutan)

c. Rincian posisi devisa neto Bank pada tanggal 28 Februari 2003 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

	2003		
	Aktiva dan Aktiva pada Rekening Administratif	Kewajiban dan Kewajiban pada Rekening Administratif	Posisi Devisa Neto
Dolar Amerika Serikat	4.008.368	4.176.288	167.920
Dolar Singapura	65.397	69.842	4.445
Franc Swiss	2.802	340	2.462
Kroner Swedia	1.830	-	1.830
Poundsterling Inggris	5.648	6.879	1.231
Euro Eropa	24.176	25.351	1.175
Dolar Hong Kong	3.232	2.059	1.173
Yen Jepang	78.997	80.095	1.098
Kroner Denmark	881	1	880
Dolar Cayman Island	649	4	645
Dolar Selandia Baru	1.918	1.550	368
Dolar Kanada	479	197	282
Dolar Australia	10.255	10.114	141
Ringgit Malaysia	-	32	32
Jumlah			**183.682**

Pada tanggal 28 Februari 2003 berdasarkan perhitungan Bank (tidak diaudit), posisi devisa neto Bank adalah 11,46% dari modal.

d. BMPK Bank pada tanggal 28 Februari 2003 (tidak diaudit) tidak melampaui ketentuan BMPK untuk pihak terkait dan untuk pihak tidak terkait terdapat pelampauan BMPK sebesar Rp 72.248.

e. Kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) Bank tanggal 28 Februari 2003 adalah sebesar 11,45% (tidak diaudit).

f. Efektif sejak tanggal 31 Januari 2003, I Nyoman Suwandha telah mengundurkan diri sebagai komisaris Bank.

g. Berdasarkan keputusan BPPN No. PB 1779/BPPN/0902 tanggal 6 September 2002 dan surat No. PB-171/BPPN/0203 tanggal 3 Februari 2003 tentang Pelaksanaan Program Penjualan Asset Inti II (PPAI II), Bank akan melaksanakan PPAI II kategori 5 per posisi tanggal 31 Desember 2002 melalui mekanisme lelang pada bulan Februari 2003 dan Maret 2003.

h. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, seluruh pengurus Bank telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia kecuali Ichsanuddin Noorsy (Komisaris) dan Ir. Ongki Wanadjati Dana (Direktur).

47. MASALAH HUKUM

a. Pada tanggal 5 Februari 1997, Bank mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Singapura terhadap Santosa Widjaja selaku "personal guarantor" dari PT Cakra Ekacemerlang Elektrindo (CEE). Gugatan tersebut timbul dari ketidakmampuan CEE dalam memenuhi kewajibannya atas kredit yang telah jatuh tempo sebesar US$ 8.000.000. Pada tanggal 4 November 1997, Mahkamah Agung Singapura membatalkan gugatan tersebut. Kemudian karena masalah tersebut di atas, Santosa Widjaja melakukan gugatan terhadap Bank atas tuduhan pencemaran nama baik, gugatan mana diajukan di Indonesia melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

   Pada tanggal 18 Februari 1999, Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Surat Putusan No. 318/PDT/G/1998/PN.JKT.BAR. telah memutuskan agar Bank membayar ganti rugi sebesar Rp 2.142 dan US$ 6.000.000. Namun demikian, Bank telah mengajukan naik banding, dan diterima oleh Pengadilan Tinggi pada tanggal 14 September 1999 berdasarkan suratnya No. PTS.Pdt.1878.2929.1999 tanggal 11 November 1999. Pada tanggal 14 Februari 2000 melalui surat turunan putusan Pengadilan Tinggi DKI yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara No. 816/PDT/1999/PT.DKI.jo.No.318/PDT.G/1998/PN.JKT.BAR., Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memutuskan agar Bank membayar ganti rugi sebesar Rp 467 dan US$ 1.000.000. Namun demikian, Bank maupun Santosa Widjaja sama-sama mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berkas perkara telah diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 1 Desember 2000 dan telah diregister dengan No. 3650K/Pdt/2000.

b. Pada tanggal 17 September 1998, Bank mewakili sindikasi mengajukan permohonan sita jaminan (ex-parte application) terhadap aset-aset Bambang Sutrisno (world wide mareva injunction) selaku "personal guarantor" dari PT Surya Supratama Finance (SSF) dan terhadap tergugat lainnya termasuk Gina Widjaja (istri Bambang Sutrisno) di Pengadilan Tinggi Singapura. Gugatan tersebut timbul dari ketidakmampuan SSF dalam memenuhi kewajibannya atas kredit sindikasi yang telah jatuh tempo sebesar US$ 16.500.000.

   Kemudian di Pengadilan Indonesia, Gina Widjaja melakukan gugatan terhadap Bank atas tuduhan pencemaran nama baik dengan tuntutan ganti rugi sebesar US$ 15.000.000. Pada tanggal 10 Maret 1999, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Surat Penetapan No. 93/Pdt.G/1999/PN.Jak-Sel. telah memerintahkan untuk melakukan sita jaminan terhadap bangunan tertentu milik Bank. Namun demikian, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam suratnya (Referensi No: W7-Dd.Ht.04.10.01.1062 dan W7-Dd.Ht.04.10.01.1063) tanggal 19 Maret 1999, telah memerintahkan bahwa tidak ada penyitaan jaminan atas bangunan tersebut, sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.

   Pada tanggal 27 April 2000, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan putusan yang menyatakan gugatan Gina Widjaja tidak dapat diterima dan penetapan sita jaminan No. 20/1999 jo No. 93/Pdt.G/1999/PN.Jak-Sel tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun demikian, Gina Widjaja mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dan terdaftar dengan Register Perkara No. 401/Pdt/2000/PT.DKI.

   Pada tanggal 27 Oktober 2000, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan bahwa pengadilan menguatkan putusan PN Jakarta Selatan tanggal 27 April 2000. Terhadap Putusan PT.DKI tersebut, pada tanggal 23 Januari 2001 Gina Widjaja mengajukan kasasi melalui PN Jakarta Selatan dan Bank telah menyerahkan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 19 April 2001 melalui PN Jakarta Selatan. Berkas perkara tersebut diregister oleh Mahkamah Agung pada tanggal 24 Agustus 2001 dengan No. 2737K/Pdt/2001.

47. MASALAH HUKUM (lanjutan)

Selain itu pada tanggal 11 Februari 1999, melalui Register Perkara No. 035/Pdt.G/1999/PN.JKT.BAR., Gina Widjaja mengajukan gugatan terhadap Bambang Sutrisno (suami Gina Widjaja) dan Bank/Kreditur Sindikasi mengenai keabsahan perjanjian "Indemnity and Guarantee" yang diberikan suaminya atas hutang SSF kepada Bank atas kekayaan bersama. Gina Widjaja menggugat ganti rugi sebesar Rp 1.200. Perkara ini sudah diputuskan pada tanggal 25 Agustus 1999 yang dimenangkan oleh Bank. Namun demikian, Gina Widjaja mengajukan banding dan telah terdaftar di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan No. 210/PDT/2000/PT.DKI. Pada tanggal 3 November 2000, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengeluarkan putusan dengan inti menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 035/Pdt.G/1999/PN.JKT.BAR. tanggal 25 Agustus 1999. Gina Widjaja telah mengajukan kasasi pada tanggal 19 Januari 2001, di mana pemberitahuan kasasi diterima Bank tanggal 19 April 2001 dan pada tanggal 2 Mei 2001 Bank telah menyerahkan Kontra Memori Kasasi tertanggal Mei 2001 melalui PN Jakarta Barat. Berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung tanggal 9 Mei 2001 dan telah diregister dengan No. 1818K/Pdt/2001. Pada tanggal 2 Mei 2002, kuasa hukum Bank menerima pemberitahuan resmi Putusan MA dengan inti putusan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan menyatakan bahwa perjanjian "Indemnity and Guarantee" dari Bambang Sutrisno (suaminya) tidak sah dan batal demi hukum, namun tuntutan ganti rugi yang diminta oleh Penggugat tidak dikabulkan oleh MA. Pada tanggal 11 Juli 2002, Bank telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia atas putusan kasasi tersebut, dan Bank telah menerima Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Penggugat. Berkas perkara PK telah dikirim oleh PN Jkt. Barat pada tanggal 10 September 2002 melalui surat No. W7.Db.Ht.04.10.4166 telah diregistrasi di Mahkamah Agung tanggal 27 September 2002 dengan No. 501PK/Pdt.2002. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen perkara masih dalam pemeriksaan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

c. Pada tanggal 28 Juni 1999, melalui Register Perkara No. 224/Pdt.G/1999/PN.JKT.BAR., PT Samarinda Pratama Gemilang Enterprise (SPGE) mengajukan gugatan terhadap Bank sehubungan dengan penyampaian informasi mengenai SPGE sebagai bukti dalam kasus dengan Santoso Widjaja di Pengadilan Tinggi Singapura. SPGE mengajukan sita terhadap kantor Bank di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat dan ganti rugi sebesar US$ 15.100.000. Pada tanggal 30 September 1999, perkara ini sudah diputus dengan inti putusan mengabulkan gugatan sebagian berupa ganti rugi sebesar US$ 10.100.000, apabila putusan sudah berkekuatan hukum tetap. Terhadap putusan tersebut, Bank sudah menyatakan banding tanggal 17 Desember 1999 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Pada tanggal 2 November 2000, melalui putusan No. 302/PDT/2000/PT DKI, Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan untuk menerima permohonan banding Bank dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 30 September 1999 No. 224/Pdt.G/1999/PN.JKT.BAR. Terhadap putusan tersebut, SPGE mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2001 dan menyerahkan Memori Kasasi tanggal 13 Juli 2001. Pihak Bank mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 6 Agustus 2001 dengan Register Perkara MA No. 3982/Pdt/2001 tanggal 28 Desember 2001.

d. Pada tanggal 24 September 1999, melalui Surat Penetapan No. 448/Pdt.G/1999/PN.Jak.Sel., EGP mengajukan gugatan terhadap Bank sehubungan dengan perjanjian pengalihan/"cessie" atas tagihan BDNI dan BUN dari Bank kepada EGP. Gugatan ini timbul karena Bank dianggap telah melakukan wanprestasi. Oleh karena itu EGP mengajukan sita terhadap tanah dan bangunan milik

47. MASALAH HUKUM (lanjutan)

Bank yang dikenal sebagai Bank Bali Tower dan Bintaro serta ganti kerugian sebesar Rp 2.536.000 dan meminta agar dinyatakan sebagai pemilik dana hasil pencairan piutang tersebut yang diletakkan dalam "Escrow Account" di bawah pengawasan Bank Indonesia. Berdasarkan pendapat dari penasehat hukum Bank, gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang kuat.

Pada tanggal 18 April 2000, melalui penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai perkara No. 448/Pdt.G/1999/PN.Jak.Sel., Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan perjanjian pengalihan/"cessie" atas tagihan BDNI dan BUN dari Bank kepada EGP adalah sah dan mengikat sehingga EGP berhak atas dana yang diletakkan dalam "Escrow Account" sebesar Rp 546.466. Pada tanggal 5 Juni ,2000 terhadap putusan tersebut, Bank telah mengajukan banding dan terdaftar dengan No. 487/Pdt/2000/PT.DKI. Perkara banding tersebut telah diputus oleh PT DKI pada tanggal 23 Maret 2001, dengan inti putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 448/Pdt.G/1999/ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 April 2000. Atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut, Bank telah menyatakan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 6 Juni 2001 dan menyerahkan Memori Kasasi tanggal 18 Juni 2001. Berdasarkan pendapat konsultan hukum Bank tanggal 18 Maret 2003 bahwa sampai saat ini perkara No. 448/Pdt.G/1999/PN.Jak.Sel. masih di tingkat Mahkamah Agung sehingga belum bisa diprediksi hasilnya. Tetapi tambahan atas perkara yang sama di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang terdaftar di bawah No. 148/G.TUN/1999/PTUN-JKT (lihat Catatan 47e), BPPN yang membatalkan perjanjian cessie itu dianggap sah oleh pengadilan. Dengan demikian EGP tidak berhak atas perjanjian cessie itu. Bila merujuk pada putusan ini maka Mahkamah Agung akan memenangkan Bank kecuali ada inkonsistensi.

e. Pada tanggal 24 November 1999, melalui surat penetapan No. 148/G.TUN/1999/PTUN-JKT., Drs. Setya Novanto telah mengajukan gugatan terhadap BPPN di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan tersebut mengenai permohonan pembatalan Surat Keputusan Ketua BPPN No. SK-423/BPPN/1099 tanggal 15 Oktober 1999 yang membatalkan perjanjian pengalihan/"cessie" antara Bank dan EGP. Penggugat meminta ganti kerugian Rp 5 dan menyatakan batal atau tidak sah serta mencabut surat keputusan tersebut.

   Pada tanggal 30 November 1999, melalui penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengenai perkara No. 148/G.TUN/1999/PTUN-JKT, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memerintahkan untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Ketua BPPN No. SK-423/BPPN/1099 tanggal 15 Oktober 1999, mengenai pembatalan perjanjian pengalihan/"cessie" dengan EGP.

   Pada tanggal 2 Maret 2000, berdasarkan Surat Kuasa Hukum BPPN No. 044/GN/II/2000 tanggal 2 Maret 2000, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil keputusan mengabulkan gugatan EGP kepada Ketua BPPN berkaitan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Ketua BPPN No. SK-423/BPPN/1099 tentang pembatalan perjanjian pengalihan (cessie) tagihan antara Bank dengan EGP yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta No. 148/G.TUN/1999/PTUN.JKT. Terhadap putusan tersebut, BPPN telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada tanggal 8 Maret 2000 dan menurut Divisi Hukum dan Perundang-undangan BPPN putusan PTUN tanggal 2 Maret 2000 belum memiliki kekuatan hukum yang tetap, sehingga Surat Keputusan Ketua BPPN No. SK-423/BPPN/1099 tentang pembatalan perjanjian pengalihan (cessie) tagihan antara Bank dengan EGP belum dinyatakan batal demi hukum.

47. MASALAH HUKUM (lanjutan)

Pada tanggal 26 Juli 2000, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta melalui surat No. 096/B/2000/PT.TUN-JKT. memutuskan untuk menguatkan keputusan PTUN No. 148/G.TUN/1999/PTUN-JKT. tanggal 2 Maret 2000.

Namun, BPPN pada tanggal 12 September 2000 telah menyatakan kasasi melalui akta permohonan kasasi No. 072/KAS-2000/PTUN-JKT dan menyerahkan Memori Kasasi pada tanggal 22 September 2000.

Berdasarkan surat BPPN No: PB-1584/BPPN/0802 tertanggal 6 Agustus 2002, telah disampaikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah Agung RI telah mengabulkan permohonan kasasi BPPN melalui keputusan tanggal 4 Maret 2002 No. 447 K/TUN/2000 antara PT Era Giat Prima melawan BPPN di Peradilan Tata Usaha Negara dengan objek sengketa SK Ketua BPPN No. SK - 423/BPPN/1099 tanggal 15 Oktober 1999 tentang Pembatalan Perjanjian Pengalihan (Cessie) Tagihan antara PT Bank Bali Tbk dengan PT Era Giat Prima, yang pada intinya menolak gugatan dari PT Era Giat Prima dan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 148/G.TUN/1999/PTUN-JKT tanggal 29 Februari 2000 Jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 96/B/2000/PT.TUN tanggal 26 Juli 2000.

2. Bahwa dengan demikian, maka SK Ketua BPPN No. SK - 423/BPPN/1099 tanggal 15 Oktober 1999 tersebut adalah sah sehingga Perjanjian Cessie dan perjanjian-perjanjian penyelesaian antara PT Era Giat Prima dan PT Bank Bali Tbk menjadi batal.

Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, Bank belum memperoleh data bahwa EGP telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali atas putusan kasasi tersebut.

f. Pada tanggal 29 Februari 2000, melalui Surat Penetapan No. 019/G.TUN/2000/PTUN-JKT., Joko Soegiarto Tjandra, Direktur Utama PT Persada Harum Lestari (PHL), telah mengajukan gugatan terhadap BPPN di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gugatan tersebut mengenai pembatalan perjanjian pengalihan/"Cessie" antara Bank dan PHL berdasarkan Surat Keputusan ketua BPPN No. SK-464/BPPN/1199 tanggal 30 November 1999. Penggugat meminta ganti kerugian Rp 5 dan menyatakan batal atau tidak sah serta mencabut Surat Keputusan tersebut. Perkara ini sedang dalam proses di Pengadilan. Menurut pendapat Konsultan Hukum Bank sepanjang Penggugat tidak dapat membuktikan secara sah dan berharga menurut hukum, adanya alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 (2) Undang-undang No. 5 tahun 1986, maka tindakan Tergugat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingan tergugat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sekaligus melampaui kewenangan.

Pada tanggal 30 Agustus 2000, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat. Namun BPPN telah menyatakan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding No. 091/BD/2000/PTUN.JKT tanggal 13 September 2000 dan terhadap upaya hukum banding PTTUN Jakarta melalui Surat Pemberitahuan Putusan Banding Nomor: 08/B/2000/PT.TUN-JKT kepada BPPN telah memutuskan Permohonan Banding BPPN atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor: 019/G.TUN/2000/PTUN.JKT tanggal 30 Agustus 2000 di mana pokok putusannya adalah menguatkan putusan PTUN Jakarta Nomor 019/G.TUN/2000/PTUN-JKT tanggal 30 Agustus 2000 yang dimohonkan banding.

47. MASALAH HUKUM (lanjutan)

tersebut dikembalikan ke Polda Metro Jaya dengan instruksi agar pemeriksaan terhadap kasus tersebut dilengkapi. Diharapkan laporan pidana ke Kepolisian tersebut dapat dipakai untuk memperkuat posisi Bank dalam Perkara Perdata yang sedang diperiksa di tingkat banding tersebut. Berhubung Polda belum mengembalikan berkas tersebut ke Kejaksaan Tinggi, walaupun sudah melebihi tenggang waktu yang ditentukan, maka Kejaksaan Tinggi Jakarta mengirimkan surat tanggal 20 Desember 2002 dengan No. B.5275/0.14/EPP.2/12/2002 kepada Polda Metro Jaya untuk dikembalikan, tetapi sampai sekarang, berkas tersebut masih ditahan di Polda Metro Jaya.

h. Pada tanggal 2 November 2001, melalui surat penetapan No. 506 dan 507/Pdt.G/2001/PN Jakarta Selatan, Rusli Suryadi dan Hendri Kurniawan (Penggugat), keduanya adalah mantan anggota Direksi Bank, telah mengajukan gugatan terhadap Bank di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan tersebut mengenai permohonan ganti kerugian atas tuduhan wanprestasi yang dilakukan oleh Bank terhadap yang bersangkutan berdasarkan surat kesepakatan (Surat Kesepakatan) yang pernah dibuat oleh dan antara mereka dengan Bank, di mana pihak yang mewakili Bank dalam Surat Kesepakatan tersebut adalah Dewan Komisaris Bank pada waktu itu dengan tuntutan sebesar Rp 16.886 dan Rp 17.510, gugatan juga disertai dengan permohonan sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan yaitu Gedung Bank Bali Tower lantai 17 sampai dengan 23. Berdasarkan pendapat dari pengacara Bank yang disampaikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana tertuang dalam surat jawabannya terhadap gugatan dari Penggugat, disampaikan bahwa Penggugat berhenti sebagai anggota direksi Bank karena undang-undang mengingat pemberhentian tersebut terjadi disebabkan turunnya SK Gubernur Bank Indonesia No. 1/14/KEP.DpG/1999 tanggal 23 Juli 1999, di mana berdasarkan SK Gubernur Bank Indonesia tersebut, Bank ditempatkan sebagai bank yang berada dalam pengawasan BPPN sebagai bank dalam penyehatan dan berdasarkan pasal 40 (a) PP No. 17 tahun 1999 segala hak wewenang yang bersangkutan beralih kepada BPPN. Dengan demikian pemberhentian Penggugat dalam kedudukannya sebagai anggota Direksi Bank adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal mana juga sesuai dengan ketentuan dalam pasal 11 ayat 9 butir e anggaran dasar Bank. Dalam surat jawaban dari pengacara Bank juga disampaikan bahwa kalaupun Penggugat ingin mengajukan gugatan, maka seharusnya gugatan tersebut ditujukan kepada BPPN yang mengambil alih hak dan wewenang mereka pada waktu itu. Pada tanggal 25 April 2002, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan No. 506/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel dan No. 507/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. telah memutuskan agar Bank membayar ganti rugi masing-masing sekitar Rp 2.515 kepada Rusli Suryadi dan Rp 3.049 kepada Hendri Kurniawan. Namun demikian, Bank telah mengajukan naik banding pada tanggal 6 Mei 2002. Sampai saat ini, perkara tersebut masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

i. Pada tanggal 10 Desember 2001 melalui Surat Penetapan No. 556/Pdt.G/2001/PN. Jakarta Selatan, Rudi Ramli (Penggugat), selaku mantan Direktur Utama Bank telah mengajukan gugatan terhadap Bank di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan tersebut mengenai permohonan ganti kerugian sebesar Rp 34.454 yang timbul atas tuduhan yang sama seperti yang diajukan oleh kedua mantan anggota direksi (lihat Catatan 47h). Terhadap gugatan tersebut, Bank juga mengajukan gugatan rekonpensi, sebagai akibat Penggugat telah ingkar janji dengan melanggar ketentuan Pasal 6 dari perjanjian perdamaian (Perjanjian Perdamaian) tertanggal 17 Juli 2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat bersama-sama dengan Bank Indonesia dan BPPN, di mana dalam Perjanjian Perdamaian tersebut telah disepakati bahwa Penggugat membebaskan Bank dengan tidak mengajukan tuntutan dan/atau gugatan yang berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan SK Ketua BPPN No. 328 dan No. 329. Perlu diketahui bahwa sebagai pelaksanaan dari Perjanjian Perdamaian tersebut Penggugat telah menerima ganti rugi sebesar

47. MASALAH HUKUM (lanjutan)

Rp 9.000, hal mana dibuktikan dengan surat pernyataan dan pembebasan yang ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2000. Pada tanggal 6 September 2002, Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 039/2002 Del.Jo.No. 556/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. berdasarkan surat permohonan bantuan untuk melaksanakan sita jaminan tertanggal 3 September 2002 No. W7.Dd.Ht.04.10.030.3212 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengabulkan permohonan sita jaminan dari Penggugat atas gedung Bank Bali yang terletak di Jalan Hayam Wuruk No. 84-85 Jakarta Barat.

Pada tanggal 15 Oktober 2002, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan No. 556/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel telah memutuskan antara lain (i) Bank dinyatakan wanprestasi; (ii) Bank dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 1.955 ditambah bunga sebesar 3% setiap bulannya terhitung sejak bulan Desember 2001; (iii) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Gedung Bank Bali Hayam Wuruk. Terhadap putusan tersebut, Bank telah mengajukan banding pada tanggal 28 Oktober 2002. Sampai saat ini perkara tersebut masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

j. Pada tanggal 30 April 1998, melalui Register Perkara No. 175/Pdt.G/1998/PN.JKT.PST. CV Wira Mustika Indah (WMI) mengajukan gugatan terhadap Bank beserta Bank peserta sindikasi lainnya karena Bank sindikasi tersebut oleh penggugat dinyatakan telah wanprestasi sehubungan dengan dihentikannya penerbitan L/C sebelum mencapai plafon US$ 25 juta. WMI mengajukan ganti rugi sebesar Rp 500.000. Pada tanggal 5 Februari 1999, melalui putusan No. 175/Pdt.G/1998/PN.JKT.PST., Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat. Terhadap putusan tersebut, WMI mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Pada tanggal 29 November 1999, melalui Putusan No. 636/Pdt/1999/PT.DKI., Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan untuk membatalkan Putusan PN Jakarta Pusat tersebut namun tuntutan ganti rugi yang diminta oleh Penggugat kepada para Tergugat tetap tidak dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi. Terhadap putusan tersebut, Bank mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dengan Register Perkara MA No. 3722/Pdt/2001 tanggal 30 November 2001. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, perkara tersebut masih menunggu putusan dari Mahkamah Agung.

k. Pada tanggal 14 September 1991, melalui Register Perkara No. 250/Pdt/G/1991/.PN.JKT.Brt., PT Bina Ichtiar Pratama (BIP) mengajukan gugatan terhadap Bank karena Bank oleh penggugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memasang lagi hipotik dan melakukan lelang eksekusi terhadap jaminan yang lain karena masih ada sisa hutang BIP kepada Bank. BIP mengajukan ganti rugi sebesar Rp 1.225. Pada tanggal 24 Maret 1992, melalui putusan No. 250/Pdt.G/1991/PN.JKT.BAR., Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat. Terhadap putusan tersebut, BIP mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.

Pada tanggal 6 Januari 1997, melalui Putusan No. 693/Pen/1997/685/Pdt/1996/PT.DKI., Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menghukum Bank untuk membayar ganti rugi sebesar setengah dari jumlah bunga yang harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat yaitu sebesar setengah dari Rp 378 dan US$ 94.726,83 sesuai dengan bunyi pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi tersebut. Terhadap putusan tersebut, Bank mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, perkara tersebut masih menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung.

47. MASALAH HUKUM (lanjutan)

l. Pada tanggal 17 Juni 1999, melalui Register Perkara No. 286/Pdt.G/1999/PN.Jak.Sel., Sunardjo Sumargono (SS) mengajukan gugatan terhadap Bank dan meminta pembatalan risalah lelang atas lelang yang pernah diajukan oleh Bank terhadap agunan debitur PT Semoga Sakti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana agunan tersebut tercatat atas nama SS dengan tuntutan ganti rugi Rp 3.000. Pada tanggal 13 Januari 2000, melalui putusan No. 286/Pdt.G/1999/PN.Jak.Sel., Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat namun tuntutan ganti rugi yang diminta oleh Penggugat tidak dikabulkan. Pada tanggal 11 Desember 2000, melalui putusan No. 524/Pdt/2000/PT.DKI, Pengadilan Tinggi memutuskan untuk membatalkan keputusan Pengadilan Negeri dan tuntutan ganti rugi yang diminta oleh Penggugat tetap tidak dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, belum diketahui apakah Penggugat mengajukan kasasi atau tidak ke Mahkamah Agung.

m. Pada tanggal 19 Agustus 1998, melalui Register Perkara No. 339/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel., PT Wira Mustika Indah (WMI) mengajukan gugatan kepada Bank (Primex) dengan alasan Bank tidak membukukan serta memperhitungkan uang pembayaran yang diberikan oleh penggugat. WMI mengajukan permohonan sita jaminan terhadap bangunan tertentu milik Bank dan ganti rugi sebesar Rp 1.000. Pada tanggal 16 Februari 1999 Pengadilan Negeri melalui putusan No. 339/Pdt.G/1998/PN.Jak.Sel., menolak gugatan penggugat. Pada tanggal 29 November 1999, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusan No. 503/Pdt/1999/PT.DKI., menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, perkara masih dalam pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

n. Pada tanggal 20 November 1999, melalui Register Perkara No. 414/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Bar., Tansri Singadju Benui (TSB) mengajukan gugatan kepada Bank (Primex) (Tergugat I), Ny. Erlina Tandianus (Tergugat II) dan BPPN (sebagai turut Tergugat) dengan alasan Bank telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak menurunkan suku bunga pinjaman atas fasilitas kredit yang telah diberikan sehubungan dengan menurunnya tingkat bunga deposito dan Bank telah mengalihkan kredit beserta jaminan terkait kepada BPPN meskipun menurut penggugat kreditnya bukan kredit bermasalah. TSB mengajukan permohonan sita jaminan terhadap bangunan tertentu milik Bank dan ganti rugi sebesar Rp 100.100 dan setiap keterlambatan dikenakan denda 3% per bulan. Pada tanggal 23 Mei 2000, melalui Putusan No. 414/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Bar., Pengadilan Negeri memutuskan mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan menghukum Bank dan turut Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 400 secara tanggung renteng. Terhadap putusan tersebut Bank mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.

Pada tanggal 22 November 2000, melalui putusan No. 614/Pdt/2000/PT.DKI,. Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Terhadap putusan tersebut, Bank mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, perkara masih dalam proses pemeriksaan dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

o. Pada tanggal 2 Maret 1999, melalui Register Perkara No. 107/Pdt.G/1999/PN/Jkt.Pst., Tansri Mahadju Benui (TMB) mengajukan gugatan terhadap Bank (Primex) karena telah salah melakukan penyitaan terhadap aset milik penggugat dalam perkara yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 463/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst. TMB mengajukan ganti rugi sebesar Rp 850. Pada tanggal 2 Agustus 1999, melalui putusan No. 107/PDT.G/1999/PN.JKT.PST,. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan menghukum Bank untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 300. Terhadap putusan tersebut, Bank mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.

47. MASALAH HUKUM (lanjutan)

Pada tanggal 26 Juni 2000, melalui putusan No. 29/Pdt/2000/PT.DKI., Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Terhadap putusan tersebut, Bank mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, perkara masih dalam proses pemeriksaan dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

p. Pada tanggal 21 Februari 2001, melalui Register Perkara No. 80/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel., PT Wiraderekindo mengajukan gugatan kepada Bank (Primex) dan BPPN (Tergugat I) dengan alasan Bank telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat sehubungan dengan kesalahan dalam memperhitungkan jumlah hutang dan bunga dari pinjaman penggugat yang diterimanya dari Bank, sehingga pinjaman penggugat yang dialihkan kepada BPPN dalam rangka rekapitalisasi Bank, tidak dapat diikutsertakan dalam program pelunasan pinjaman dengan diskon. PT Wiraderekindo menuntut penyerahan kembali surat-surat jaminan milik penggugat bersamaan dengan pembayaran hutang penggugat kepada Bank dan Tergugat I sebesar Rp 2.554 sebagai pelunasan atas seluruh kewajiban penggugat. Pada tanggal 23 Januari 2002, melalui putusan No. 80/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel., Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menetapkan sisa hutang penggugat menjadi Rp 2.981. Terhadap putusan tersebut Bank mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dan pada tanggal 15 Oktober 2002 melalui putusan Pengadilan Tinggi No. 268/Pdt/2002/PT.DKI Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengeluarkan keputusan yang intinya menguatkan putusan PN Jakarta Selatan. Perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

q. Pada tanggal 19 Juni 2001, melalui Register Perkara No. 292/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel., PT Super Adi Teknik Indonesia (SATI) mengajukan gugatan dengan alasan Bank (Primex) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat sehubungan dengan kesalahan dalam memperhitungkan jumlah hutang dan bunga dari pinjaman penggugat sehingga pinjaman penggugat yang dialihkan kepada BPPN tidak dapat diikutsertakan dalam program pelunasan pinjaman dengan diskon. SATI menuntut pengembalian surat-surat jaminan milik penggugat dan menetapkan hutang penggugat terhadap Bank menjadi Rp 3.000. Perkara ini sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Mei 2002 dengan melalui Surat Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 292/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel. dengan inti putusan menyatakan hutang SATI kepada Bank sebesar Rp 3.000 dan tidak ada kewajiban untuk membayar bunga. Perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di tingkat Pengadilan Tinggi.

r. Pada tanggal 16 April 2002, melalui Register Perkara No. 142/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Bar. dan No. 143/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Bar., TSB dan TMB mengajukan gugatan dengan alasan Bank (Primex) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat sehubungan dengan tidak dikembalikannya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1433 dan No. 1434. TSB dan TMB mengajukan ganti rugi materiil dan immateriil masing-masing sebesar Rp 2.890 dan Rp 5.000.

Pada tanggal 13 November 2002 melalui surat putusan No. 142/PDT.G/2002/PN.JKT.BAR. dan No. 143/PDT.G/2002/PN.JKT.BAR., Pengadilan Negeri Jakarta Barat memberikan keputusan dengan menghukum Primex untuk mengembalikan SHM No. 1433 & 1434 serta membayar ganti rugi masing-masing sebesar Rp 490 untuk masing-masing perkara. Kedua perkara ini sedang dalam pemeriksaan di Pengadilan Tinggi.

s. Pada tanggal 3 Januari 2000, melalui Register Perkara No. 03/Pdt.G/2000/PN.BDG, UD Tekad Maju Textile (TMT) mengajukan gugatan terhadap Bank (Primex) dengan alasan pelaksanaan sita jaminan yang dilakukan oleh Bank tidak adil dan merugikan penggugat. TMT mengajukan tuntutan agar diberikan kesempatan untuk merestrukturisasi pinjamannya dan penangguhan sita jaminan.

47. MASALAH HUKUM (lanjutan)

Pada tanggal 29 Februari 2000, melalui putusan No. 03/Pdt.G/2000/PN.Bdg/Bant, Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Terhadap putusan tersebut Bank melakukan banding ke Pengadilan Tinggi. Pada tanggal 19 Oktober 2000 melalui putusan No. 279/Pdt./2000/PT.BDG, Pengadilan Tinggi menolak gugatan tersebut. Terhadap putusan tersebut, TMT mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, perkara masih dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

t. Pada tanggal 3 Januari 2000, melalui Register Perkara No. 04/Pdt.G/2000/PN.Bdg., UD TMT mengajukan gugatan terhadap Bank (Primex) dengan alasan karena Bank telah ingkar janji/wanprestasi terhadap surat hutang No. 30 tanggal 31 Oktober 1996 dan kesepakatan restrukturisasi pinjaman penggugat sebagaimana tertuang dalam surat No. 052/KSK/Pemb/CB/08.99. TMT mengajukan ganti rugi sebesar Rp 22.450. Pada tanggal 11 April 2000, melalui putusan No. 04/Pdt/G/2000/PN.Bdg, Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menghukum Bank untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 1.000. Terhadap putusan tersebut Primex mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Pada tanggal 8 Januari 2001, melalui putusan No. 614/Pdt/2000/PT.Bdg, Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Terhadap putusan tersebut Bank mengajukan banding ke Mahkamah Agung.

u. Pada tanggal 17 September 1998, melalui Register Perkara No. 463/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst., Bank (Primex) mengajukan gugatan kepada PT Wira Mustika (Tergugat I), TSB (Tergugat II) dan Soesanto Leo (Tergugat III) karena Tergugat I ingkar janji tidak memenuhi pembayaran sisa hutangnya. Bank mengajukan tuntutan agar tergugat membayar pokok sebesar Rp 2.130 beserta bunga 65% per tahun dan US$ 2.534.294,51 beserta bunga 22% per tahun. Pada tanggal 10 Juni 1999 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan No. 463/Pdt/1998/PN.JKT.PST mengabulkan gugatan Bank untuk sebagian dan menghukum tergugat untuk membayar dan melunasi pinjaman sebesar Rp 1.732 dan US$ 2.302.644,90 serta denda 6% per tahun. Terhadap putusan tersebut tergugat naik banding ke Pengadilan Tinggi. Pada tanggal 16 Mei 2000 Pengadilan Tinggi melalui putusan No. 849/Pdt/1999/PT.DKI. menolak gugatan Bank. Terhadap putusan tersebut, pada tanggal 31 Oktober 2001, Bank mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, perkara masih dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

v. Pada tanggal 24 Januari 2001, melalui Register Perkara No. 028/PDT.G/2001/PN.JKT.BAR, PT Surya Raya Idaman (Penggugat I) dan Judith Suryadjaya (Penggugat II) mengajukan gugatan terhadap Bank (Artamedia) sehubungan dengan pelunasan hutang eks debitur PT Swakarsa Bina Sejahtera (Tergugat I) yang sebagian berasal dari penyerahan asset Penggugat I dan II. Adapun asset Penggugat I adalah tiga bidang tanah di Bali dengan bukti kepemilikan SHGB No. 1216/Benoa, SHGB No. 1686/Benoa dan SHGB No. 1328/Benoa, sedangkan milik Penggugat II adalah rumah di Jl. Suwiryo No. 49 Menteng, Jakarta Pusat dengan bukti kepemilikan SHM No. 198/Gondangdia. Penggugat I dalam tuntutannya menuntut agar Bank mengembalikan ketiga bidang tanah tersebut kepada Penggugat, menghukum Bank untuk membayar uang paksa sebesar Rp 100 setiap hari apabila Bank terlambat melaksanakan putusan, akta kuasa menjual No. 21, 22 dan 23 adalah batal/tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, memohon sita jaminan atas ketiga bidang tanah tersebut. Penggugat II dalam tuntutannya menuntut agar akta No. 16 dan 18 tanggal 23 Maret 1999 sepanjang tidak menyangkut opsi tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, menyatakan hutang tergugat I adalah Rp 21.781, serta mengabulkan permohonan sita jaminan atas rumah tersebut.

47. MASALAH HUKUM (lanjutan)

Pada tanggal 22 Mei 2001, melalui surat Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 028/PDT/G/2001/PN.JKT.BAR. mengeluarkan putusan yaitu menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Kemudian, para Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kemudian pada tanggal 13 Juni 2002 Pengadilan Tinggi Jakarta melalui surat keputusan No. 546/PDT/2001/PT.DKI mengeluarkan keputusan yang menguatkan Putusan PN Jakarta Barat. Terhadap putusan tersebut, para Penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 September 2002 dan menyerahkan Memori Kasasi pada tanggal 3 Oktober 2002. Pihak Bank mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 4 Desember 2002.

w. Pada tanggal 8 April 2002, melalui Register Perkara No. 128/PDT.G/2002/PN.JKT.PST, Ny. Judith Suryadjaya (Penggugat) menggugat Bank (Artamedia) (Tergugat I) sehubungan dengan pelunasan hutang eks debitur PT Swakarsa Bina Sejahtera (Tergugat III) yang sebagian berasal dari asset milik Penggugat yaitu rumah di Jl. Suwiryo No. 49 Jakarta Pusat dengan bukti kepemilikan SHM No. 198/Menteng, Jakarta Pusat, atas nama Ny. Judith Suryadjaya dan tanah seluas 5.000 m^2 yang terletak di Pemukiman Emeralda, Cimanggis, dimana pada saat pengambilalihan belum bersertifikat dan sampai saat ini belum diserahkan sertifikatnya.

Pada tanggal 11 Maret 2002, rumah tersebut telah dilelang berdasarkan Penetapan Ketua PN Jakarta Pusat pada tanggal 22 Januari 2002, No. 013/1999 Eks, walaupun penggugat mengajukan keberatan dan menyatakan terhadap rumah tersebut telah diletakan sita jaminan berdasarkan putusan PN Jakarta Pusat tanggal 27 Juli 2000 melalui surat No. 137/Pdt.G/2000/PN.JKT.PST.

Penggugat dalam tuntutannya menuntut Tergugat I, II dan III untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp 60.500 dan menyatakan lelang batal demi hukum.

x. Pada tanggal 16 September 2002, melalui Register Perkara No. 516/PDT.G/2002/PN.JKT.SEL, PT Jaya Andrean Perkasa (Penggugat) menggugat Bank (Artamedia) sehubungan dengan asset Bank (BJDA) di Jl. Teluk Betung No. 41 Jakarta Pusat yang tidak dapat direalisasikan penandatanganan Akta Jual Beli dari Bank ke Penggugat. Gugatan tersebut timbul karena Bank tidak dapat memenuhi isi perjanjian untuk penandatanganan jual beli, meskipun Penggugat telah menyetor dana dalam bentuk deposito sebesar Rp 10.000 pada tanggal 9 Juli 2001 dan uang muka sebesar Rp 100. Penggugat dalam tuntutannya menuntut Artamedia untuk mencairkan depositonya dan menuntut kerugian materiil sebesar Rp 10.100 dan menuntut kerugian immateriil sebesar Rp 12 milyar ditambah bunga sebesar 10% setiap bulan dari total kerugian materiil. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, perkara masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

y. Pada tanggal 18 Desember 2002, PT Wira Griya Mustika (debitur) telah mengajukan gugatan terhadap Bank (Universal) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat No. 673/Pdt/G/2002/PN.Jak.Sel. Gugatan itu timbul karena Bank telah menyimpan asli sertifikat hak atas tanah dan ijin mendirikan bangunan (IMB) atas asset-asset milik debitur yang telah dijaminkan kepada Bank sehingga mengakibatkan Pengikatan Jual Beli yang telah ditakukan oleh debitur dengan Pihak Ketiga/Pembeli menjadi batal dan menimbulkan kerugian bagi debitur. Penggugat menuntut Bank untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil masing-masing sebesar Rp 32.530 dan Rp 10.000 atas batalnya Pengikatan Jual Beli tersebut kepada debitur. Sampai dengan tanggal laporan auditor independen, perkara masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

47. MASALAH HUKUM (lanjutan)

Berdasarkan pendapat konsultan hukum Bank ("internal lawyer") kemungkinan Bank untuk memenangkan perkara gugatan tersebut cukup besar karena secara hukum sebenarnya dasar gugatan Penggugat sama sekali lemah dan tidak berdasar, dengan pertimbangan bahwa asli sertifikat hak atas tanah dan ijin mendirikan bangunan yang disimpan oleh Bank masih berstatus sebagai barang jaminan (Hak Tanggungan), sehingga tindakan Bank menyimpan asli dokumen-dokumen tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sebaliknya tindakan debitur yang telah melakukan Pengikatan Jual Beli dengan Pihak Ketiga atas barang jaminan tanpa persetujuan tertulis dari Bank merupakan perbuatan melawan hukum.

z. Pada tanggal 8 Februari 1999, PT Manggala Wibawa (debitur sindikasi) telah mengajukan gugatan perbuatan wanprestasi (cidera janji) terhadap Bank Sindikasi dengan pesertanya yaitu Bank Internasional Indonesia, Bank Exim, Bank Universal, Bank Bali, Bank Bukopin, Bank Pelita, Bank Duta, Bank Danamon Indonesia, Bank Niaga dan Bank Dagang Nasional Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan perkara No. 069/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Pst., karena Bank Sindikasi tidak melakukan pencairan Fasilitas Pinjaman Sindikasi sebesar US$ 122.000.000 berdasarkan Perjanjian Pinjaman Sindikasi No. 37 tanggal 14 Agustus 1997. Penggugat menuntut Bank Sindikasi untuk membayar ganti rugi atas hal tersebut secara tanggung renteng kepada debitur sebesar US$ 31.416.767 dan Rp 200, serta pengembalian participation fee dari masing-masing anggota sindikasi dimana masing-masing US$ 210.000 dan US$ 150.000 merupakan porsi Universal dan Bali.

Pada tanggal 21 Desember 1999, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui surat keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 069/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Pst. mengeluarkan putusan yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan pertimbangan hukum bahwa tindakan Bank Sindikasi tidak melakukan pencairan fasilitas kepada debitur bukan merupakan perbuatan wanprestasi karena sebagai akibat terjadinya krisis ekonomi dan keuangan (krisis moneter) yang melanda negara Indonesia pada waktu pelaksanaan pencairan pinjaman akan dilakukan. Hal tersebut bukan kehendak Bank Sindikasi tetapi merupakan keadaan yang memaksa bagi Bank Sindikasi untuk tidak memenuhi kewajibannya (membatalkan komitmen) melakukan pencairan pinjaman sindikasi tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Perjanjian Pinjaman Sindikasi No. 7 tanggal 14 Agustus 1997. Saat ini status perkara gugatan tersebut terhenti di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengingat Relaas Pemberitahuan Isi Putusan belum disampaikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Penggugat, sehingga untuk sementara tidak diketahui apakah debitur mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut.

Berdasarkan pendapat konsultan hukum Bank ("internal lawyer") kemungkinan Bank Sindikasi untuk memenangkan perkara gugatan tersebut di tingkat yang lebih tinggi adalah cukup besar, mengingat pertimbangan hukum atas putusan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sangat kuat dan berdasar sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

aa. Pada tanggal 23 November 2001, Simon Raharja (penerima Bank Garansi) telah mengajukan gugatan perbuatan wanprestasi (cidera janji) terhadap Bank (Universal) (Penerbit Bank Garansi) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui perkara No. 537/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. Gugatan tersebut timbul karena Bank telah melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan pencairan Bank Garansi sebesar US$ 5.000.000 sebagai jaminan pembayaran hutang debitur kepada Penggugat. Untuk itu, Bank (Universal) harus membayar ganti rugi materiil secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar US$ 6.633.686,62 dan Rp 500 serta ganti rugi immateriil secara tanggung renteng sebesar US$ 1.000.000 ditambah sebesar US$ 5.000.000 merupakan porsi Bank.

47. MASALAH HUKUM (lanjutan)

Pada tanggal 18 Maret 2002, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui surat keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 537/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. mengeluarkan putusan yang menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat, dengan pertimbangan hukum bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili secara absolut perkara aquo karena merupakan kewenangan absolut dari Badan Arbitrase sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Kesepakatan Bersama (MOU) tertanggal 21 April 1997 Jo. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 019 K/N/1999 tertanggal 9 Agustus 1999.

Untuk mengantisipasi adanya gugatan baru dari Penggugat (berdasarkan putusan gugatan Penggugat hanya tidak diterima), maka Universal telah mengajukan Banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut pada tanggal 9 April 2002 dan telah pula menyerahkan Memori Banding pada tanggal 17 September 2002 dan telah terdaftar di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam register perkara No. 637/Pdt/2002/PT.DKI.

Berdasarkan pendapat konsultan hukum Universal ("internal lawyer") kemungkinan Universal untuk memenangkan perkara gugatan tersebut ditingkat yang lebih tinggi (Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung) cukup besar, mengingat pertimbangan hukum atas putusan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sangat kuat dan berdasar sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

bb. Pada tanggal 19 April 2000, debitur PT Adiputera Dewasajaya (ADP) telah mengajukan gugatan terhadap Universal karena perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Pada tanggal 11 September 2000 melalui surat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 89/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Ut memutuskan menolak gugatan penggugat seluruhnya. Pada tanggal 25 Januari 2001 melalui surat putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 660/PDT/2000/PT.DKI. mengeluarkan keputusan yang memenangkan Bank dan menghukum ADP untuk membayar hutangnya kepada Bank (Universal) sebesar Rp 20.977 dan USD 2.507.900,96. Pada tanggal 13 Februari 2001 melalui surat putusan Mahkamah Agung RI No. 3253K/Pdt/2001, Universal dimenangkan dengan putusan menolak permohonan banding ADP dan mewajibkan ADP untuk membayar hutangnya kepada Universal sebesar Rp 20.977 dan USD 2.507.900,96, maka pada tanggal 18 Juli 2002 berdasarkan Risalah Lelang No. 42/2002 telah dilakukan eksekusi lelang atas barang-barang jaminan milik ADP yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Muara Enim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 09/Eks/2001/PN.Jkt.Ut jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim No. 04/Pdt.P/Eks/2001 dan dari lelang tersebut Universal memperoleh Rp 17.100. Saat ini, debitur telah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut. Pada tanggal 5 September 2002, Bank telah mengajukan kontra memori PK atas memori PK yang telah diajukan oleh ADP.

Manajemen Bank berpendapat, penyelesaian akhir dari masalah hukum tersebut tidak akan berdampak buruk terhadap hasil usaha dan posisi keuangan Bank.

48. KEWAJIBAN BERSYARAT

Berdasarkan hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun pajak 1999, Bank mengalami kekurangan bayar pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp 75.047 yang terdiri

48. KEWAJIBAN BERSYARAT (lanjutan)

dari PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2 (final) masing-masing sebesar Rp 67.120 dan Rp 7.927. Dari kekurangan bayar pajak tersebut, sejumlah Rp 66.887 merupakan hutang PPh pasal 23 yang menurut pemeriksa pajak merupakan pajak yang harus dipungut oleh Bank atas jasa perantara transaksi dengan EGP (lihat Catatan 14). Sedangkan manajemen Bank berpendapat bahwa transaksi tersebut secara hukum adalah murni transaksi pengalihan piutang dan bukan merupakan transaksi penggunaan jasa perantara sehingga transaksi ini bukan merupakan objek PPh pasal 23.

Bank sudah mengajukan keberatan dan berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah XIX Wajib Pajak Besar No. KEP/001/WPJ.19/BD.0503/2002 tanggal 17 September 2002, Direktur Jenderal Pajak menolak seluruh keberatan Bank atas hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun pajak 1999 sehingga Bank mengalami kekurangan bayar pajak sebesar Rp 8.269 atas PPh pasal 4 ayat 2. Atas kekurangan bayar tersebut, Bank telah membayar sebesar Rp 423. Manajemen Bank akan mengajukan banding atas keputusan tersebut. Dalam rangka mengajukan banding, Bank telah membayar 50% dari jumlah yang terhutang.

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah XIX Wajib Pajak Besar No. KEP/003/WPJ.19/BD.0503/2002 tanggal 17 September 2002, Direktur Jenderal Pajak menerima sebagian keberatan Bank atas hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun pajak 1999 sehingga Bank mengalami kekurangan bayar pajak menjadi sebesar Rp 67.450 atas PPh pasal 23. Atas kekurangan bayar tersebut, Bank telah membayar sebesar Rp 344. Manajemen Bank akan mengajukan banding atas keputusan tersebut. Dalam rangka mengajukan banding, Bank telah membayar 50% dari jumlah yang terhutang.

Pada tanggal 25 Oktober 2002, Bank membayar sebesar Rp 33.712 dan Rp 3.923 atau masing-masing 50% dari kekurangan bayar pajak sehubungan dengan hutang PPh pasal 23 yang menurut pemeriksa pajak merupakan pajak yang harus dipungut oleh Bank atas jasa perantara transaksi dengan EGP dan hutang PPh pasal 4 ayat 2, yang telah diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu tanggal 28 Oktober 2002. Pembayaran tersebut dilakukan sehubungan dengan Undang-undang RI No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 36 ayat 4 yang menyatakan banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50%.

Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah X Jateng dan DIY No. KEP 73/WPJ.10/BD.0303/2002 dan No. KEP-72/WPJ.10/BD.0303/2002 tanggal 9 Oktober 2002, Direktur Jenderal Pajak menolak seluruh keberatan Bank atas hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun pajak 1999 sehingga Bank mengalami kekurangan bayar pajak masing-masing sebesar Rp 14 atas PPh pasal 23 dan Rp 81 atas PPh pasal 4 ayat 2. Kekurangan bayar tersebut telah dilunasi pada tanggal 11 Oktober 2002.

Berdasarkan pendapat konsultan pajak Bank, hasil pemeriksaan pajak tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan oleh karena itu hasil pemeriksaan tersebut tidak dicatat dalam laporan keuangan.

49. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN SEHUBUNGAN DENGAN PELEBURAN USAHA

Pada tanggal 30 September 2002, peleburan usaha 4 BDP dengan Bank telah efektif (lihat Catatan 3). Oleh karena Bank dan 4 BDP telah berada dalam pengendalian bersama (*under common control*) oleh BPPN sejak tanggal 13 Maret 1999 (untuk Artamedia), 16 Maret 1999 (untuk Universal dan Patriot) dan 29 Mei 1999 (untuk Primex), maka laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2001 telah disajikan kembali seolah-olah peleburan usaha tersebut sudah terjadi sejak permulaan tahun yang disajikan, sesuai dengan PSAK No. 38.

Penyajian kembali laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2001 tersebut dilakukan dengan menambahkan saldo akun aktiva dan kewajiban 4 BDP pada tanggal tersebut sesuai laporan keuangan tanggal 31 Desember 2001, ke saldo akun yang sama pada Bank. Sementara itu, saldo defisiensi modal 4 BDP sebesar (Rp 1.130.776) pada tanggal 31 Desember 2001 dilaporkan secara terpisah pada komponen Ekuitas (Defisiensi Modal) dalam akun "Pro forma Akun dari Restrukturisasi Entitas Sepengendali". Termasuk di dalam akun "Pro forma Akun dari Restrukturisasi Entitas Sepengendali" adalah penurunan nilai wajar Efek-efek yang diklasifikasikan ke dalam kelompok tersedia untuk dijual sebesar Rp 11.570 pada tahun 2001 (lihat Catatan 8) dan penilaian kembali aktiva tetap sebesar Rp 87.846 pada tahun 2001 (lihat Catatan 13). Pengaruh dari peleburan usaha tersebut terhadap laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2001 terutama sebagai berikut:

	2001	
	Dilaporkan Sebelumnya	Disajikan Kembali
Efek-efek - bersih	7.581.114	12.244.721
Kredit yang diberikan - bersih	1.984.780	8.523.836
Jumlah aktiva	12.874.699	26.486.734
Jumlah simpanan	10.488.605	22.412.688
Pinjaman yang diterima	703.208	2.621.199
Pro forma akun dari restrukturisasi entitas sepengendali		
Saldo awal	-	390.980
Saldo akhir	-	(1.130.776)
Ekuitas (defisiensi modal) - bersih	513.944	(616.832)

STRUKTUR ORGANISASI
(per 31 Maret 2003)

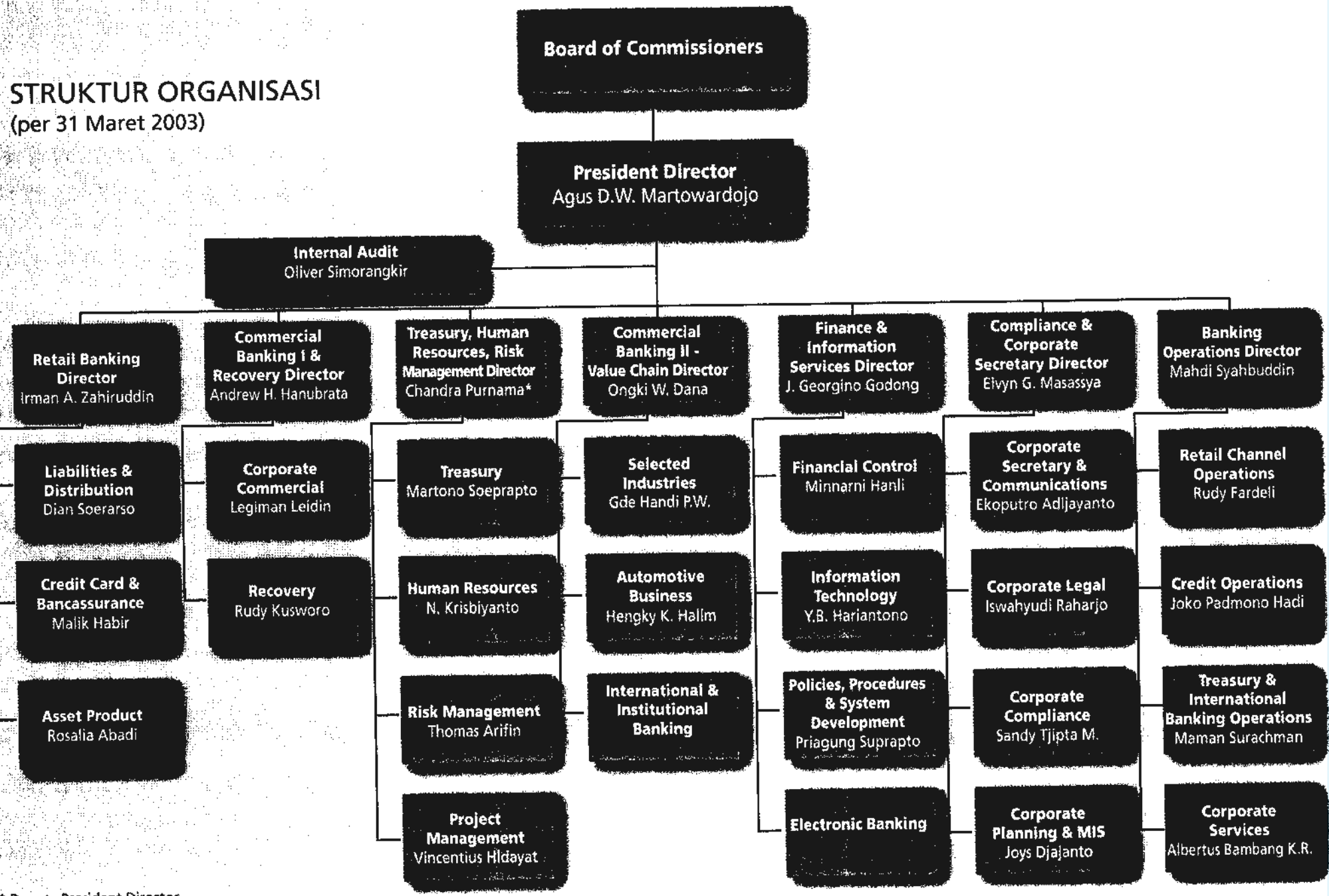

* Deputy President Director

PEJABAT EKSEKUTIF *eksekutif*

(per 31 Maret 2003)

TREASURY, HUMAN RESOURCES, RISK MANAGEMENT DAN PROJECT MANAGEMENT

General Manager Treasury	Martono Soeprapto
General Manager Human Resources	N. Krisbiyanto
General Manager Risk Management	Thomas Arifin
General Manager Project Management	Vincentius Hidayat

COMPLIANCE & CORPORATE SECRETARY

General Manager Corporate Secretary & Communications	Ekoputro Adijayanto
General Manager Corporate Legal	Iswahyudi Raharjo
General Manager Corporate Compliance	Sandy Tjipta Muliana
General Manager Corporate Planning	Joys Djajanto

FINANCE & INFORMATION SERVICES

General Manager Financial Control	Minnarni Hanli
General Manager Information Technology	Y.B. Hariantono
General Manager Policies, Procedures & System Development	Priagung Suprapto

COMMERCIAL BANKING I & RECOVERY

General Manager Corporate Commercial	Legiman Leidin
General Manager Recovery	Rudy Kusworo

COMMERCIAL BANKING II, VALUE CHAIN

General Manager Selected Industries	Gde Handi P.W.
General Manager Automotive Business	Hengky K. Halim

BANKING OPERATIONS

General Manager Retail Channel Operations	Rudy Fardeli
General Manager Credit Operations	Joko Padmono Hadi
General Manager Treasury & International Banking Operations	Maman Surachman
General Manager Corporate Services	Albertus Bambang K. Rudiyanto

RETAIL BANKING

General Manager Liabilities & Distribution	Dian Soerarso
General Manager Credit Card & Bancassurance	Malik Habir
General Manager Asset Product	Rosalia Abadi

INTERNAL AUDIT

General Manager Internal Audit	Oliver Simorangkir

REGION

General Manager Commercial Jabotabeka 1	Rufina T. Marianto
General Manager Commercial Jabotabeka 2	Sukarman Omar
General Manager Retail Sales	P. Hermanto Tjiawidjaja
General Manager Area-Medan	Husni Sim
General Manager Area-Surabaya	Chandra Tjong
General Manager Area-Semarang	Hanna Oei Lie Siang
General Manager Area-Bandung	Kevin Cahyadi Tatang

INFORMASI PERUSAHAAN

Daftar Pemegang Saham (per 31 Desember 2002)

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase
1	Badan Penyehatan Perbankan Nasional	176.790.314.903	91,33%
2	Negara Republik Indonesia	12.281.185.540	6,34%
3	Masyarakat	4.506.647.632	2,33%
	Total	193.578.148.075	100,00%

Pencatatan Saham

Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya dengan kode saham "BNLI"

Kronologi Pencatatan Saham PT Bank Permata Tbk

Tanggal Pencatatan	Jumlah Saham Yang Dikeluarkan	Total Jumlah Saham	Keterangan
15 Januari 1990	3.999.000	3.999.000	Penawaran Umum Perdana PT Bank Bali Tbk
10 September 1990	15.508.000	19.507.000	Penawaran Umum Terbatas I PT Bank Bali Tbk
14 Nopember 1990	42.525.000	62.032.000	Pencatatan Saham Pendiri PT Bank Bali Tbk
8 September 1992	124.064.000	186.096.000	Penerbitan Saham Bonus PT Bank Bali Tbk
17 Juli 1995	65.133.600	251.229.600	Penawaran Umum Terbatas II PT Bank Bali Tbk
18 Maret 1996-20 Maret 1998	1.434.230	252.663.830	Konversi Waran PT Bank Bali Tbk
27 Oktober 1997	252.603.830	505.267.660	Perubahan Nilai Nominal Saham *(stock split)* PT Bank Bali Tbk
25 Agustus 1998	166.738.173	672.005.833	Penerbitan Saham Bonus PT Bank Bali Tbk
20 September 2000	66.528.577.467	67.200.583.300	Penawaran Umum Terbatas III dalam rangka rekapitalisasi PT Bank Bali Tbk
27 September 2002	126.377.564.775	193.578.148.075	Penggabungan Lima Bank menjadi PT Bank Permata Tbk

Harga dan Volume Saham PT Bank Permata Tbk per Kuartal (2001-2002)

(dalam Rupiah dan ribu lembar)

KETERANGAN	2001				2002			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Harga Tertinggi	75	55	70	50	125	105	55	35
Harga Terendah	40	40	45	35	35	50	30	15
Volume	84.466	41.530	164.970	23.792	141.968	63.692	9.338	60.828

*Harga saham PT Bank Permata Tbk (sebelumnya merupakan harga saham PT Bank Bali Tbk)

Kinerja Pergerakan Volume dan Harga Saham
PT Bank Permata Tbk
Januari-Desember 2002

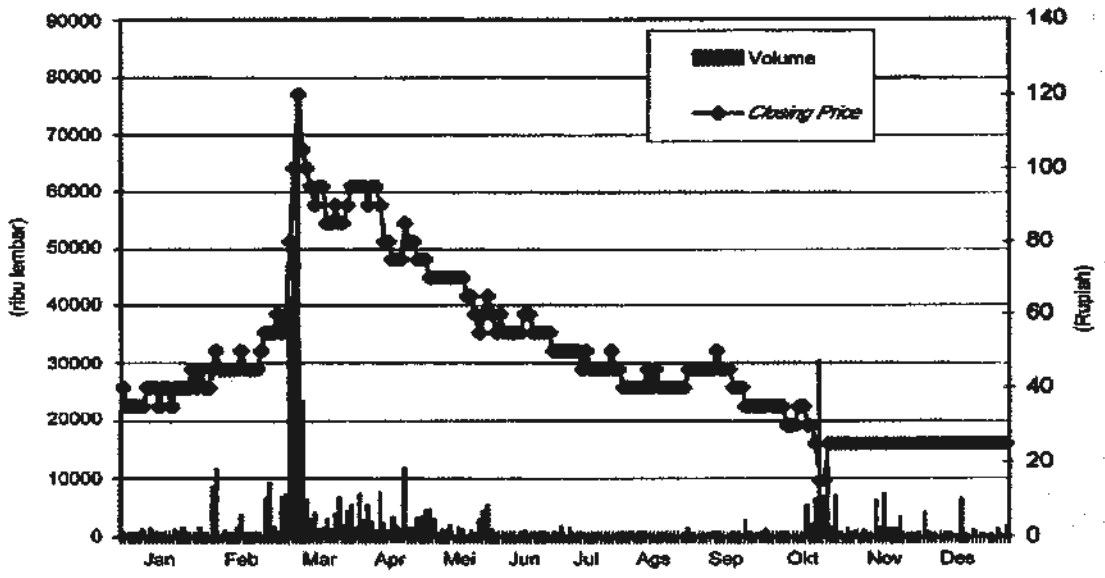

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan)
RUPS Tahunan 2003 akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2003, mulai pukul 10.00 WIB di PermataBank Tower I, Jl. Jend. Sudirman Kav. 27, Jakarta 12920.

Auditor Independen
Prasetio, Sarwoko & Sandjaja
Gedung Bursa Efek Jakarta
Menara I Lt. 13
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp. : (62-21) 515 1960
Fax : (62-21) 515 1920

Biro Administrasi Efek
PT Blue Chip Mulia
Gedung Bina Mulia I Lt. 4
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 10
Jakarta 12950
Telp. : (62-21) 520 1928, 520 1983
Fax : (62-21) 520 1924

Corporate Secretary & Communications
Ekoputro Adijayanto
PermataBank Tower I, Lt. 21
Jl. Jend. Sudirman Kav. 27
Jakarta 12920
Telp. : (62-21) 523 7980, 523 7899, 523 7788
Fax : (62-21) 523 7253, 523 7244
e-mail : eadijayanto@permatabank.co.id
investor_relations@permatabank.co.id

Situs Internet
Laporan Tahunan ini dan informasi lain mengenai PT Bank Permata Tbk dapat dilihat di situs www.permatabank.com

ANAK PERUSAHAAN DAN AFILIASI

No.	ANAK PERUSAHAAN & AFILIASI	ALAMAT	JABATAN & NAMA
1	PT Bank UFJ Indonesia (Perbankan)	PermataBank Tower I, Lantai 3-4 Jl. Jend. Sudirman Kav. 27 Jakarta 12920 Telp. : (021) 250 0401 Fax : (021) 250 0410	Direktur Utama : Makoto Kaneko Wakil Direktur Utama : Hajime Kato Mamoru Shibazaki Direktur : Toshikuni Fujita Daniel Kandinata
2	PT BALI SECURITIES (Sekuritas)	PermataBank Tower I, Lantai 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 27 Jakarta 12920 Telp. : (021) 523 7815 Fax : (021) 250 0638	Direktur Utama : Rita Ningsih Djapri Direktur : Jejei Kurnia
3	PT ASURANSI BANCBALI NIPPON FIRE (Asuransi Kerugian)	PermataBank Tower I, Lantai 8 Jl. Jend. Sudirman Kav. 27 Jakarta 12920 Telp. : (021) 523 7500/2/3/4 Fax : (021) 523 7505/6	Direktur Utama : Sadashi Kodera Wakil Direktur Utama : Bernadet Mariani Siswanto Direktur : Suzuki Masaru
4	PT KDLC BancBali Finance (Perusahaan Pembiayaan)	PermataBank Tower I, Lantai 7 Jl. Jend. Sudirman Kav. 27 Jakarta 12920 Telp. : (021) 523 7260 Fax : (021) 250 0855	Direktur Utama : Byong Mahn Lee Direktur : Soong Hee Baik Jung Sik Yoon
5	PT SARANA BALI VENTURA (Modal Ventura)	Jl. By Pass Ngurah Rai No. 17 Sanur Kauh Denpasar Selatan, Bali Telp. : (0361) 282868 Fax : (0361) 282890	Direktur Utama : Made Gde Sudharma Santosa Direktur : I Made Gunawirawan Asher Imaret Siregar
6	UOB Venture Investment Ltd. (Modal Ventura)	80 Raffles, 30th Storey UOB Plaza 2 Singapore 048624 Telp. : (65) 5393533 Fax : (65) 5382569	Direktur Utama : Ernest Wong Yuen Weng Direktur : Wee Ee Cheong Gn Hiang Meng Hong Tai Tan Lip Bu Patrick Ngiam Mia Je

7	Orient Bancorporation Ltd. (Perbankan)	233 Sansome Street San Fransisco California 94104, USA Telp. : (415) 3380668 Fax : (415) 3988949	Direktur Utama : Ernest L. Go Direktur : William Fuller Benjamin F. Greenough John Ng Matook Nissim George Sycip Robert Thomas Crowe
8	PT BPR SRISEDANA MANDIRI	Jl. Raya Peliatan No. 2 Kec. Ubud, Gianyar, Bali Telp. : (0361) 975 672	Direktur Utama : I Made Item Suarjana Direktur : I Nyoman Partha
9	PT BPR BALI ARTHA MANDIRI	Ds. Bebandem Kec. Bebandem Kab. Karangasem, Bali Telp. : (0361) 21309	Direktur Utama : I Made Wardana Direktur : Ni Nyoman Rustini
10	PT BPR BALI KOPMENGWI MANDIRI	Jl. Raya Denpasar Singaraja, Ds. Mengwiten Kec. Mengwi Kab. Badung, Bali Telp. : (0361) 829881	Direktur Utama : A. A. Putu Oka Putra Direktur : Ni Nyoman Suciati
11	PT BPR KOPKUTA MANDIRI	Jl. Gn. Sanghyang No. 198 B Kerobokan, Kuta, Badung Telp. : (0361) 423688	Direktur Utama : I Putu Surawan Direktur : Ni Nyoman Tresnawati
12	PT BPR BALI MUKTIJAYA MANDIRI	Pasar Kayuamba, Ds. Tiga Kec. Susut, Kab. Bangli, Bali Telp. : (0361) 51403	Direktur Utama : I Putu Darmawan Direktur : I Wayan Suarnata
13	PT BPR BALI CATUR MANDIRI	Jl. Raya Pakis No. 111 Kec. Pakis, Kab. Malang 65154 Telp. : (0341) 792108	Direktur Utama : Yuas Widyandono
14	PT BPR BALI PANCAJAYA MANDIRI	Jl. Pahlawan No. 9 Ds. Mayang, Kec. Mayang Kab. Jember Telp. : (0331) 591386	Direktur Utama : Rosadi Saman Direktur : Syamsul Anam
15	PT BPR BALI AGUNG MANDIRI	Jl. Raya Blitar No. 44 Kec. Ngunut, Tulungagung Telp. : (0355) 398848	Direktur Utama : Mahmudi

16	PT BPR BALI MAJUJAYA MANDIRI	Jl. Raya Kepadangan 53 Kec. Tulangan Kab. Sidoardjo Telp. : (031) 8850249	Direktur Utama : Albertus Gunawan Direktur : Akhmad Zaini
17	PT BPR BALI CEMAWIS MANDIRI	Jl. Raya Cerme Lor 98 A Gresik Telp. : (031) 7990128	Direktur Utama : Zumaroh Direktur : Rumli
18	PT BPR BALI PANDANARAN MANDIRI	Jl. Raya Boyolali Km. 3,5 Kec. Mojosongso Kab. Boyolali Telp. : (0276) 321484	Direktur Utama : Antonius Susiyanto Direktur : Teguh Herwanto
19	PT BPR BALI BANARAN MANDIRI	Jl. Raya Timur Km.16 No. 18 Ds. Banaran Kec. Sambungmacan Kab. Sragen Telp. : (0271) 662470	Direktur Utama : Fatah Hidayat Direktur : Puji Winarto
20	PT BPR BALI BUDIKUSUMA MANDIRI	Jl. Kudus, Colo Km.3 Ds. Purworejo, Kec. Bae Kab. Kudus, Semarang Telp. : (0291) 434637	Direktur Utama : Rinto Mulyono Direktur : Akhmad Mohtar
21	PT BPR BALI PATI MANDIRI	Jl. Hang Tuah No. 79 Ds. Bojomulyo, Kec. Juwana Kab. Pati 59186 Telp. : (0295) 471522	Direktur Utama : Yoga Saptono W, Direktur : Chodijah
22	PT BPR BALI GEMA MANDIRI	Jl. Raya Ajibarang No. 914 Ajibarang, Purwokerto Telp. : (0281) 572432	Direktur Utama : Gunawan Waluyo Direktur : Andri Diana
23	PT BPR BALI DAYAUPAYA MANDIRI	Jl. Raya Wangun No. 297 Kec. Ciawi, Bogor Telp. : (0251) 240155-247418	Direktur Utama : Sugiarto
24	PT BPR BALI KOPJAYA MANDIRI	Jl. RTA Prawira Adiningrat No. 140 Manonjaya, Kab. Tasikmalaya Telp. : (0265) 380529	Direktur Utama : Budiman
25	PT BPR BALI RUKUN MANDIRI	Jl. Raya Ciwidey No. 49 Rt. 04/Rw. 03, Kp. Warung Tenjolaya, Kec. Pasirjambu Telp. : (022) 5928731	Direktur Utama : Effi Budiherniwan Emor Direktur : Edi Supriyadi

ALAMAT KANTOR CABANG UTAMA

KANTOR PUSAT
PermataBank Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 27
Jakarta 12920
Tlp : (021) 5237899, 5237999
Fax : (021) 2500680

Website
www.permatabank.com

E-mail
info@permatabank.co.id

PermataTel

Jakarta	: 021	- 745 6888
Jakarta	: 021	- 252 6888 (Kartu Kredit)
Surabaya	: 031	- 531 1000
Bandung	: 022	- 423 8866
Bogor	: 0251	- 31 8888
Medan	: 061	- 452 6000
Semarang	: 024	- 841 4052
Kota lain	: 0807	- 123 4567

TANGERANG
Jl. Daan Mogot No. 35
Tangerang 15111
Tlp : (021) 5517705/7707
Fax : (021) 5517706

KARAWANG
Jl. Tuparev No. 242
Karawang 41312
Tlp : (0267) 406917-19
Fax : (0267) 406917

BOGOR
Jl. Kapten Muslihat No.17 A
Bogor 16121
Tlp : (0251) 312990
Fax : (0251) 311690

CILEGON
Komp. Ruko Istana Cilegon
Jl. Raya Merak No. 146
Cilegon 42414
Tlp : (0254) 396166-7, 386919-20-21
Fax : (0254) 386922

BANDUNG
Jl. Merdeka No. 66
Bandung 40117
Tlp : (022) 4234366
Fax : (022) 4235290

TASIKMALAYA
Jl. Yudanegara No. 59
Tasikmalaya 46121
Tlp : (0265) 338888 (hunting)
Fax : (0265) 338340

CIREBON
Jl. Yos Sudarso No. 1
Cirebon 45111
Tlp : (0231) 201062, 208134, 208136
Fax : (0231) 201031

YOGYAKARTA
Jl. Pangeran Mangkubumi No. 26-28
Yogyakarta 55232
Tlp : (0274) 516666, 522397-98, 520355
Fax : (0274) 522397

SEMARANG
Jl. Pandanaran No. 14
Semarang 50241
Tlp : (024) 8310200, 8310201
Fax : (024) 8310225

SOLO
Jl. Gatot Subroto No. 31
Solo 57151
Tlp : (0271) 646565
Fax : (0271) 654196

PURWOKERTO
Komp. Ruko Satria Plaza Blok A-B No. 1-2
Jl. Jend. Sudirman,
Purwokerto 53114
Tlp : (0281) 638288
Fax : (0281) 638286

SURABAYA
Jl. Tunjungan No. 52
Surabaya 60273
Tlp : (031) 5315500, 5311342, 5318757
Fax : (031) 5319536

JEMBER
Jl. Trunojoyo No. 35
Jember 68131
Tlp : (0331) 484612 (hunting), 427888
Fax : (0331) 484614

TULUNGAGUNG
Jl. WR. Supratman No. 107
Tulungagung 66212
Tlp : (0355) 322729, 322730, 322731
Fax : (0355) 321011

Kantor Pusat:
PermataBank Tower II
Jl. Jend. Sudirman Kav.27
Jakarta 12920 - Indonesia
Telp. (021) 5237899, 5237788
Fax. (021) 5237253

www.permatabank.com